

PERATURAN BUPATI PINRANG  
15 TAHUN 2009  
05 NOVEMBER 2009

c 6637



# RPJMD KAB. PINRANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KAB. PINRANG 2009-2014



KABUPATEN PINRANG

2009



# **BUPATI PINRANG**

---

## **PERATURAN BUPATI PINRANG**

**NOMOR: 15 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

#### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009-2014**

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2014;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan suatu Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2014;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2016;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 – 2029.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009-2014.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2029.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kabupaten adalah Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pembangunan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten Pinrang yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun RPJM Nasional I Tahun 2004-2009, RPJM Nasional II Tahun 2009-2014, RPJM Nasional III Tahun 2014-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2019-2024.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pinrang, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program kepala daerah/Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Propinsi.
13. Visi Daerah adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2029.
14. Misi Daerah adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perencanaan Pembangunan di daerah adalah

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda dan PM.

17. Bappeda dan Penanaman Modal adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.

## **BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

### **Pasal 3**

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **BAB III ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan dengan berasaskan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta kemandirian.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
  - a. mendukung kondisi antarpelaku pembangunan;
  - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas, baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi pemerintah;

- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Pasal 5**

- (1) Bappeda dan PM menyusun Rancangan awal RPJMD.
- (2) RPJMD Provinsi memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJM Nasional.
- (3) RPJMD Kabupaten/Kota memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, RTRW Kabupaten dan RPJP Daerah.
- (4) Dalam menyusun Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappeda dan PM meminta masukan dari SKPD dan pemangku Kepentingan.
- (5) Sistematika RPJMD Tahun 2009-2014 sebagai berikut :
  - BAB I Pendahuluan
  - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - BAB III Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pinrang
  - BAB IV Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
  - BAB V Arah Kebijakan Keuangan Daerah
  - BAB VI Program Pembangunan Daerah
  - BAB VII Penutup
- (6) Rincian dari Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 6**

- (1) RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, RENJA SKPD, KUA PPAS dan RAPBD Kabupaten dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi, RTRW Kabupaten, RPJP Daerah, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (2) RPJMD memuat visi, misi dan program kerja Bupati.
- (3) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang.



**BAB V**  
**PENYUSUNAN DAN PENETAPAN**  
**RPJM DAERAH KABUPATEN**

**Pasal 7**

- (1) Bappeda dan PM menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
- (2) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD.
- (3) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (4) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJMD yang sedang berjalan.

**Pasal 8**

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan RPJMD paling lama 1 (satu) bulan kepada Gubernur.
- (2) Bupati menyebarluaskan Peraturan tentang RPJPM kepada masyarakat melalui sosialisasi.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pengendalian**

**Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah dan antar Kecamatan dalam Kabupaten.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

**Pasal 10**

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda dan PM untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda dan PM meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda dan PM.
- (5) Kepala Bappeda dan PM melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

## **Bagian Kedua Evaluasi**

### **Pasal 11**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
  - a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. Hasil rencana pembangunan daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda dan PM untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD masing-masing untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda dan PM meliputi:
  - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah; dan
  - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

### **Pasal 13**

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

### **Bagian Ketiga Perubahan**

#### **Pasal 14**

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
  - c. merugikan kepentingan nasional dan Daerah.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah atau Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Masyarakat**

#### **Pasal 16**

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan PM dan Kepala SKPD terkait.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Perundang-undangan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 5 NOVEMBER 2009

BUPATI PINRANG,

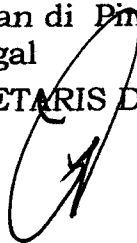


**ASLAM PATONANGI**

Diumumkan di Pinrang

Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



**Drs. H. RUSLAN HANAFLI, MP**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP: 19500420 197903 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2009 NOMOR .....

# DAFTAR ISI

## HALAMAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

### BAB I PENDAHULUAN

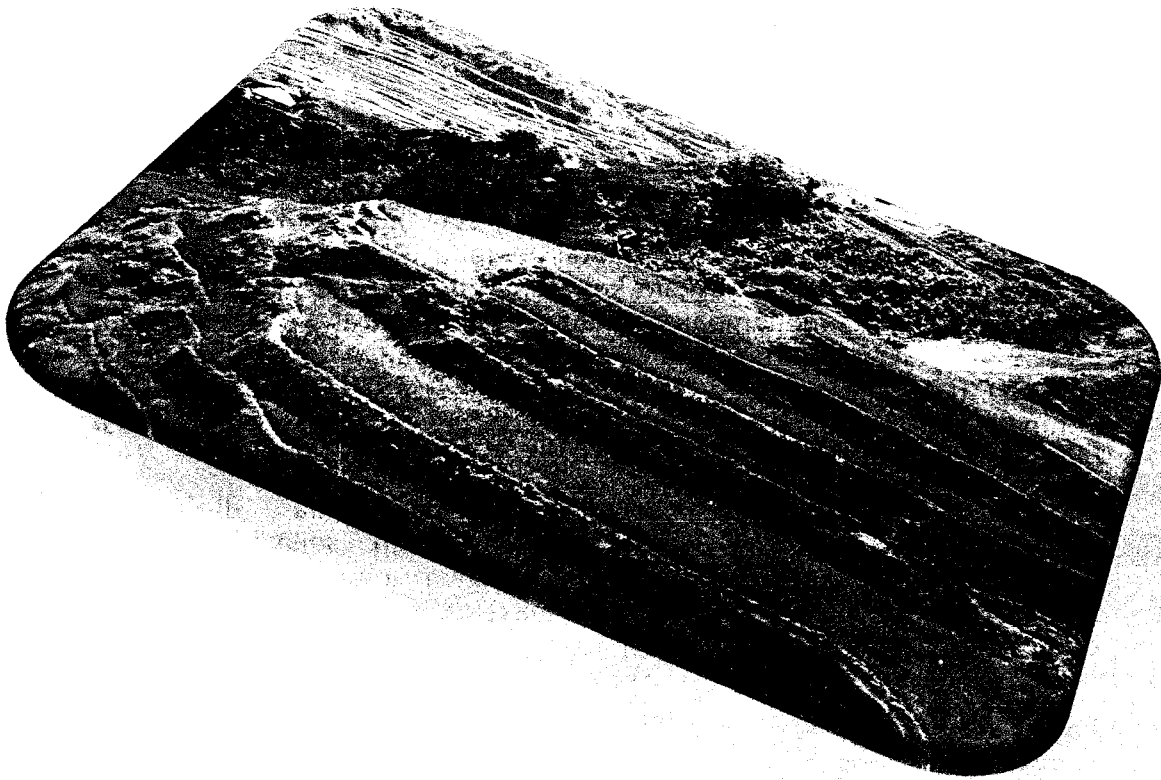
1.1. Latar Belakang	I - 2
1.2. Maksud Dan Tujuan	I - 3
1.3. Ruang Lingkup RPJMD	I - 4
1.4. Landasan Hukum Penyusunan RPJMD	I - 4
1.5. Hubungan RPJMD Dengan Perencanaan Lain	I - 6
1.6. Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Dokumen	I - 8
1.7. Sistematisa Penyusunan RPJMD	I - 9

### BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Geografis Wilayah	II - 2
2.2. Demografi	II - 5
2.3. Perekonomian Daerah	II - 7
2.4. Sosial Budaya Dan Perkembangannya	II - 22
2.5. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah	II - 27
2.6. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan	II - 31
2.7. Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait	II - 42

BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PINRANG	
3.1. V I S I	III - 2
3.2. M I S I	III - 4
BAB IV. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1. Strategi Pembangunan Daerah	IV - 2
4.1. Kebijakan Pembangunan Daerah	IV - 2
BAB V. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
5.1. Proyeksi Keuangan Daerah Optimis dan Pesimis	V - 2
Proyeksi dan alternatif pendanaan Optimis	V - 2
Proyeksi dan alternatif pendanaan Pesimis	V - 7
5.2. Investasi Dan Pembiayaan Pembangunan Optimis	V - 11
5.3. Investasi Dan Pembiayaan Pembangunan Pesimis	V - 21
5.4. Arah Kebijakan Pengelolaan Anggaran	V - 28
5.5. Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan APBD	V - 30
5.6. Rekomendasi	V - 36
BAB VI. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
6.1. Program Prioritas 2009 - 2014	VI - 3
6.2. Program Urusan Wajib Dan Pilihan Daerah	VI - 6
BAB VII. PENUTUP	
7.1. Pedoman Transisi	VII - 2
7.2. Kaidah Pelaksanaan	VI - 2

<b>BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PINRANG</b>	
3.1. V I S I	III - 2
3.2. M I S I	III - 4
<b>BAB IV. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
4.1. Strategi Pembangunan Daerah	IV - 2
4.1. Kebijakan Pembangunan Daerah	IV - 2
<b>BAB V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b>	
5.1. Proyeksi Keuangan Daerah Optimis dan Pesimis	V - 2
Proyeksi dan alternatif pendanaan Optimis	V - 2
Proyeksi dan alternatif pendanaan Pesimis	V - 7
5.2. Investasi Dan Pembiayaan Pembangunan Optimis	V - 11
5.3. Investasi Dan Pembiayaan Pembangunan Pesimis	V - 21
5.4. Arah Kebijakan Pengelolaan Anggaran	V - 28
5.5. Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan APBD	V - 30
5.6. Rekomendasi	V - 36
<b>BAB VI. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
6.1. Program Prioritas 2009 - 2014	VI - 3
6.2. Program Urusan Wajib Dan Pilihan Daerah	VI - 6
<b>BAB VII. PENUTUP</b>	
7.1. Pedoman Transisi	VII - 2
7.2. Kaidah Pelaksanaan	VI - 2



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Tahun 2009 - 2014  
KABUPATEN PINRANG



## **1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RPJMD**

Hasil - hasil pembangunan daerah yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang, umumnya telah memberikan hasil yang relatif memadai dalam berbagai ragam kehidupan masyarakat. Hasil positif tersebut masih menampilkan adanya disparitas perkembangan antar wilayah, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai adanya pemerataan dan kesempatan kerja serta lambannya peningkatan pendapatan yang berarti di tingkat bawah, dan lain - lain,

Keadaan yang demikian perlu segera dikaji dan dielaborasi dengan sasaran bahwa segala permasalahan secara bertahap dapat diatasi, diantisipasi dalam bingkai cita - cita strategis kedepan. Upayakan penanganan masalah tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang semata, tapi juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pelaku pembangunan.

Pada sisi yang lain, secara normatif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan ketentuan Yuridis formal merujuk pada Regulasi UU No 25/2004 tentang "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)" dan UU 32/2004 tentang "Pemerintahan Daerah" yang mengintegrasikan antara kepentingan Otonomi Daerah Kabupaten dengan kepentingan Nasional serta kepentingan Provinsi secara bersamaan dan proporsional, adalah merupakan suatu dokumen rencana resmi Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, terkait dengan pencapaian Visi - Misi dan Program Prioritas masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam memandu, mengarahkan pembangunan daerahnya, melalui mekanisme yang ada.

Peraturan dan perundangan berkaitan dengan perencanaan diatas memberi ruang yang memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selain tuntutan Yuridis, perencanaan strategis merupakan agenda kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan sebagai perwujudan komitmen pemerintah, swasta, dan masyarakat Kabupaten Pinrang dalam upaya pembangunan yang akan dilaksanakan secara bersama dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan sinergitas segenap potensi pelaku pembangunan di Kabupaten Pinrang, dibutuhkan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Pinrang, yang dalam kurun waktu 5 tahun ke depan rencana pembangunan tersebut akan diwujudkan dalam sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang

memiliki kedudukan strategis. Dan untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya serta cita - cita kedepan , pembangunan Kabupaten periode 2009 - 2014 yang memuat arah kebijakan serta program strategis daerah, direncanakan melalui pendekatan kesejahteraan, pendekatan kewilayahan dan pendekatan manajemen pemerintahan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD**

RPJMD Kab. Pinrang Tahun 2009 - 2014 sebagaimana amanat regulasi serta keberlangsungan akan pembangunan yang mengakomodir aspirasi segenap lapisan masyarakat , disusun dengan maksud dan tujuan dengan sasaran / target pencapaian sebagai berikut :

### **Maksud dan tujuan**

#### **Maksud**

- Elaborasi kerangka RPJPD Kab. Pinrang periode 1 (pertama) , kedalam agenda kerangka pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis pertanian unggulan dan kemandirian daerah.
- Dokumen Perencanaan Strategis yang dapat dijadikan dasar / pijakan dan rujukan oleh daerah dan Unit Kerja Daerah Kab. Pinrang untuk menyusun perencanaan strategis (Renstra SKPD) serta perencanaan dan penganggaran tahunan daerah (RKPD) / Unit Satuan Kerja (Renja SKPD), KUA - APBD, PPA
- Dokumen perencanaan yang memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif serta memberi ruang kepada pemangku kepentingan turut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan kedepan
- Dokumen perencanaan Strategis daerah yang berisinerji serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Nasional, dan Provinsi.
- Sebagai suatu dokumen perencanaan Untuk referensi penilaian Lima Tahunan / Tahunan terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Daerah

#### **Tujuan**

- Menjabarkan Visi - Misi pembangunan ke dalam program pembangunan daerah jangka menengah yang disepakati bersama, sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD .

- Tersusunnya rencana kerja kedalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif
- Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
- Terpenuhinya (minimal) indikator - indikator untuk pencapaian visi - misi - program prioritas serta indikator kemandirian daerah dalam kerangka pembangunan daerah

### **1.3. Ruang Lingkup Penyusunan RPJMD**

Ruang Lingkup penyusunan RPJMD Kab. Pinrang dalam kerangka pencapaian Visi - Misi daerah, dalam tataran kebijakan, strategi dan program pembangunan, pada prinsipnya menyangkut 2 (dua) aspek, yaitu ;

- Aspek Kewilayahan

Mencakup wilayah Kabupaten yang terdiri dari 12 wilayah kecamatan, 65 wilayah pedesaan dan 39 wilayah kelurahan

- Aspek Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Mencakup 9 (Sembilan) klasifikasi fungsi pemerintah daerah (Fungsi Pelayanan Umum, Ketertiban Dan Ketentraman, Ekonomi, Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Fasilitas Umum, Kesehatan, Pariwisata, Pendidikan, Serta Perlindungan Sosial)

Klasifikasi fungsi tersebut, terdiri dari 26 (dua puluh Enam) Urusan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pilihan.

Urusan Wajib, (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, KB Dan Keluarga Sejahtera, Social, Tenaga Kerja, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Serta Konektivitas dan Informatika, Perpustakaan

Urusan Pilihan (Pertanian, Kehutanan, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kelautan Dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Serta Transmigrasi)

### **1.4. Landasan Hukum Penyusunan RPJMD**

#### **1.4. Landasan Hukum Penyusunan RPJMD**

Landasan idiil penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang ini adalah

Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 , tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2013,
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 - 2029
  26. Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pos Pelayanan Publik Paripurna (P4).

## **1.5. Hubungan RPJMD Dengan Perencanaan Lain**

### **1.5. Hubungan RPJMD Dengan Perencanaan Lain**

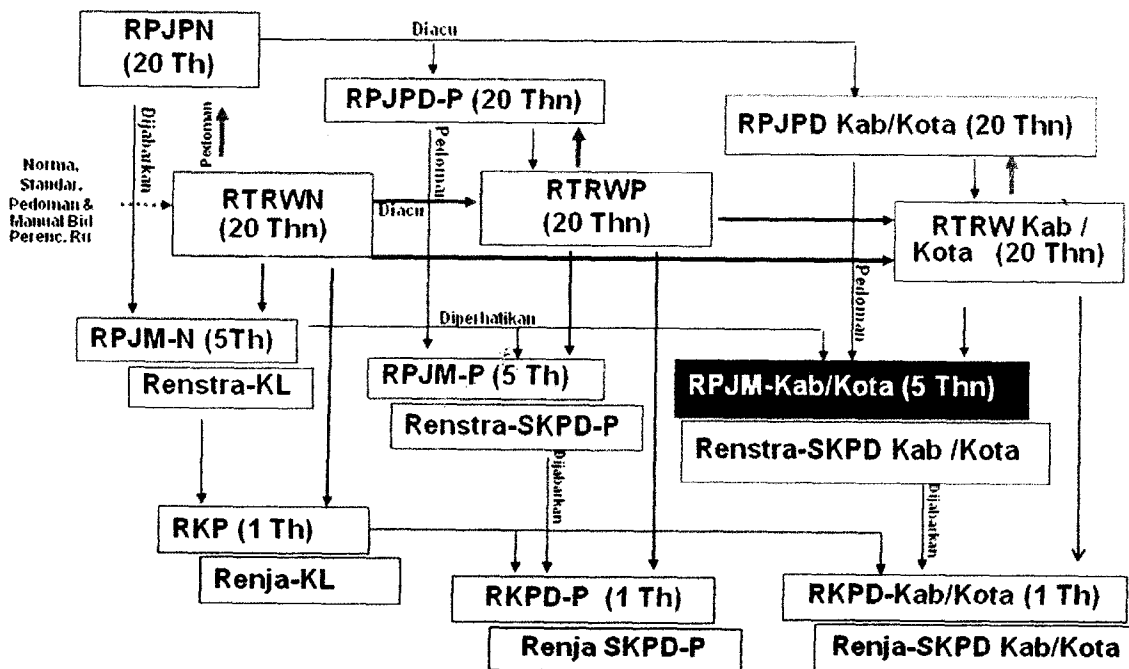
Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang dengan dokumen perencanaan terkait lainnya, disusun dengan ;

- Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
- Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Manengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, serta SPM yang telah ditetapkan pemerintah (Daerah)
- Mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) Nasional - Provinsi kabupaten.
- Menjabarkan Visi - Misi Bupati masa bakti 2009 - 2014, dengan memperhatikan Kondisi - Potensi - Prospek - Masalah - Peluang dan Aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat.
- Menjadi Pedoman bagi Satuan Kerja untuk menyusun Renstra SKPD
- Sebagai suatu dokumen untuk dijabarkan tatkala Daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renja SKPD yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) setiap tahunnya.

Untuk lebih jelasnya hubungan RPJMD Kab. Pinrang dengan Perencanaan lainnya, dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gbr. 1.1. Alur Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Gbr. 1.1. Alur Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



## 1.6. Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Dokumen

Penyusunan dokumen RPJMD Kab. Pinrang, sebagaimana yang diamanatkan Regulasi dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan :

- Teknokratis

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir dan kajian ilmiah, yang merumuskan visi - misi - kebijakan strategis dielaborasi lebih jauh tingkat korelasinya dengan kepentingan daerah Kabupaten.

- Partisipatif

pendekatan penyusunan Rencana, dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders), yang memungkinkan terwadahnya aspirasi yang berkembang di masyarakat serta untuk membangun kebersamaan dan rasa memiliki.

- Atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up),

Pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat nasional, provinsi, Kabupaten , Kecamatan, dan Desa/Kelurahan

- Politis

Pendekatan lain yang dilakukan untuk memperkuat dukungan masyarakat luas terhadap Dokumen RPJMD melalui pembahasan dengan pihak Legislatif, dengan dukungan resmi melalui “peraturan Daerah”

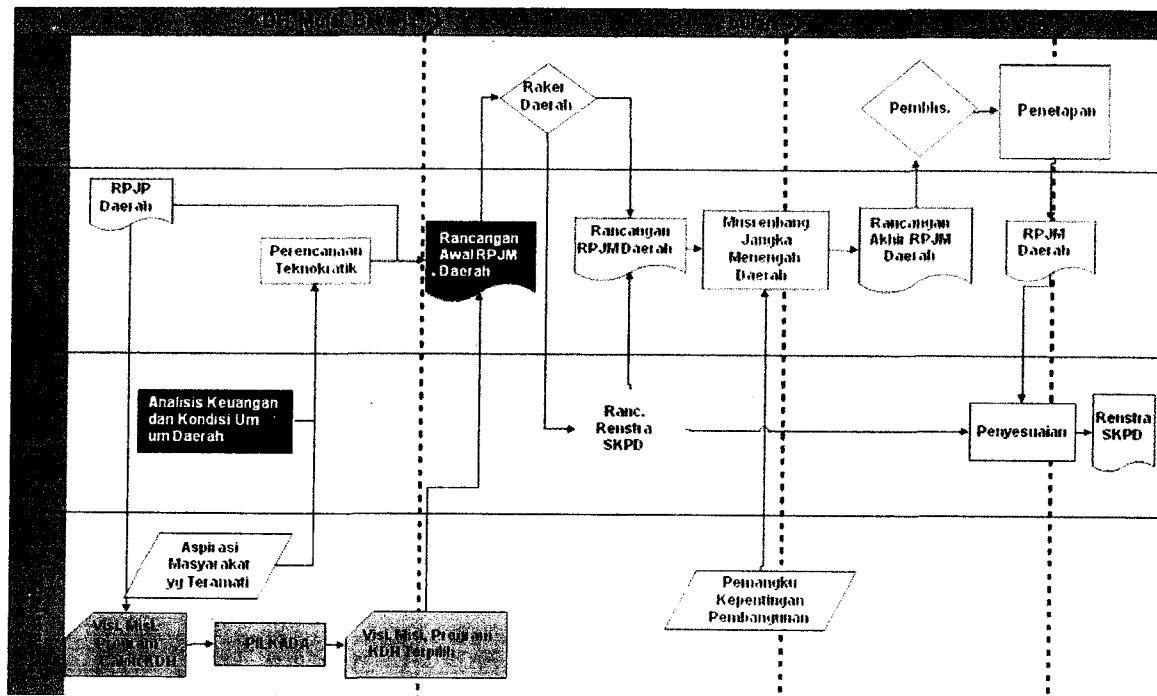
lebih lanjut Sistematisa penyusunan tersebut, terutama melalui pendekatan teknokratis - Partisipatif dan atas bawah serta bawah atas, dilakukan dengan merujuk PP No 8/2008 tentang “Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah” dilakukan melalui tahapan :

1. Penyusunan rancangan awal RPJMD lengkap, berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, yang meliputi : Rumusan Visi - Misi dan program prioritas daerah, tujuan dan sasaran, isu strategis, arah kebijakan dan identifikasi program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan hasil kajian.
2. Penyempurnaan Rancangan Awal (setelah mendapat masukan dari Satuan - Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang pada waktu hampir bersamaan juga mempersiapkan rancangan Renstra SKPD)
3. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD : berupa forum konsultasi bersama stakeholders untuk membahas rancangan awal RPJMD, termasuk didalamnya adalah

- penyepakatan rancangan RPJMD
4. Penyusunan rancangan akhir RPJMD : penyempurnaan rancangan awal RPJMD setelah mendapat masukan dari hasil Musrenbang
  5. Penetapan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD : proses pembahasan Ranperda menjadi Perda melalui pembahasan dengan pihak DPRD Kabupaten

Lebih lanjut, mekanisme dan tatacara penyusunan RPJMD Kab. Pinrang tsb. , diperlihatkan pada gambar berikut :

Gbr 1.2. Bagan Alur Penyusunan RPJMD Kab Pinrang 2009 - 2014



### 1.7. Sistematika Penyusunan RPJMD

Pengutaraan substansi RPJMD Kabupaten Pinrang, kedalam dokumen ini, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Mengetengahkan latar belakang berkaitan dengan perlunya penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang baik secara faktual maupun alasan yuridis. Selain itu dikemukakan pula tentang maksud, tujuan, ruang lingkup dan landasan hukum, uraian singkat kedudukan RPJMD dengan dokumen perencanaan lain serta mekanisme dan tata cara penyusunan dokumen RPJM

#### BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH



Mengetengahkan kondisi eksisting, kinerja, analisis perkembangan dan evaluasi sektor pembangunan daerah hingga awal penyusunan RPJMD. Terungkap didalamnya menyangkut potensi, peluang, masalah serta rumusan isu strategis dan skenario dan asumsi yang akan dihadapi selama 5 tahun ke depan,

### **BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PINRANG**

Menguraikan hal - hal yang berkaitan dengan pernyataan Visi - Misi berikut artikulasinya beserta target dan sasaran Indikatif setiap Misi pembangunan yang hendak dicapai untuk kurun waktu lima tahun ke depan

### **BAB IV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengutarakan dan menjelaskan Strategi alternatif serta Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang hendak dilakukan untuk pencapaian Misi beserta indikatornya

### **BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Mengutarakan Dan menjelaskan Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang menyangkut Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Belanja, Serta Pengelolaan Pembiayaan Daerah atas dasar kapasitas serta proyeksi kemampuan keuangan daerah, serta upaya yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan selama 5 tahun ke depan.

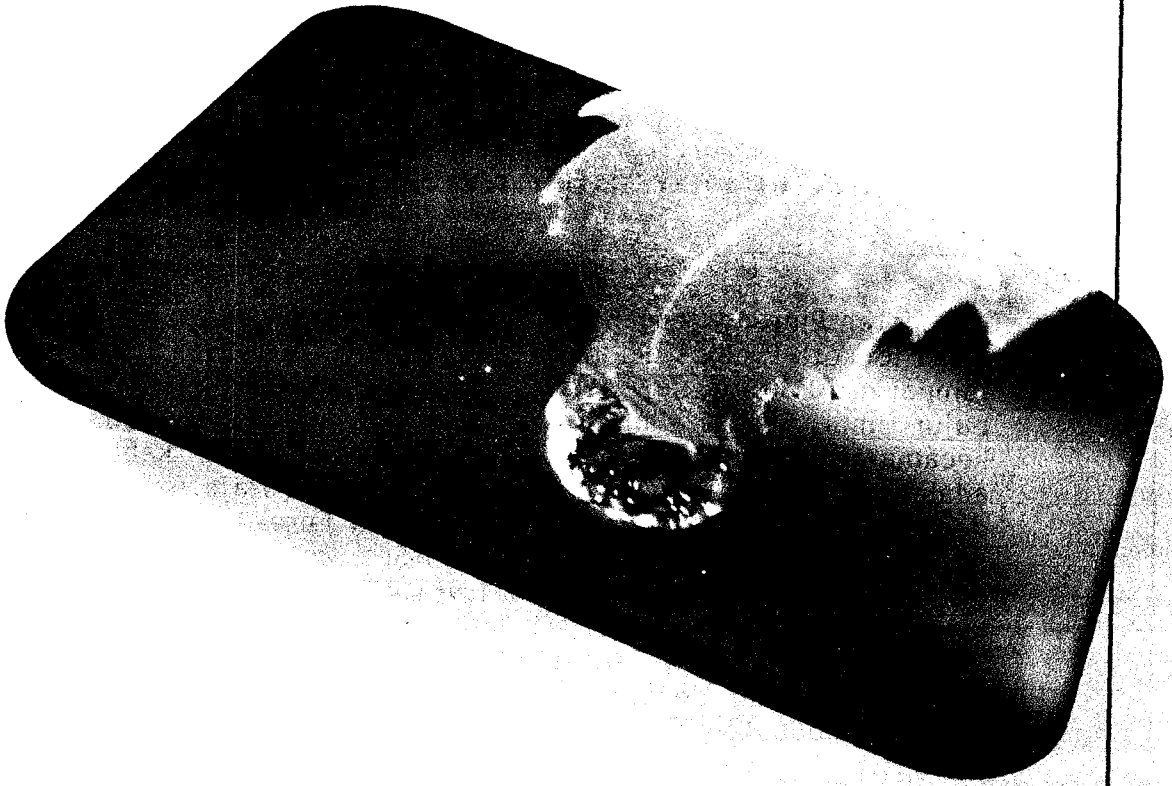
### **BAB VI : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Berisikan program prioritas daerah yang diagendakan dan dipublikasikan kepada publik oleh pimpinan daerah pada saat pemilihan kepala daerah. Program prioritas ini merupakan hasil kajian pimpinan daerah yang perlu ditindak lanjuti. disamping itu dikemukakan pula program terkait dengan otonomi daerah menurut Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, menurut kerangka pendanaan dan kerangka regulasi

### **BAB VII : PENUTUP**

Berisikan pedoman pelaksanaan pada saat transisi setelah berakhirnya masa jabatan pimpinan yang beralih ke pimpinan masa bakti baru dimana pada sela waktu tertentu belum dipersiapkan RPJMD, sehingga memerlukan arahan dan masukan perencanaan pada sela waktu tersebut untuk dipedomani oleh para pemangku kepentingan serta masyarakat kabupaten.

Selain itu dokumen ini berisikan kaidah - kaidah pelaksanaan sebagai arahan dan komitmen bagi Satuan Unit Kerja bertindak serta merespon dan mengevaluasi hasil - hasil nyata yang dicapai sebagaimana yang direncanakan



# **BAB II**

## **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

## 2.1. Geografis Wilayah

### 2.1.1. Geografi Dan Struktur Fisik Wilayah

Kabupaten Pinrang dengan ibukota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3° 19' 13" sampai 4° 10' 30" lintang selatan dan 119° 26' 44" sampai 119° 47' 20" bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat dengan Propinsi Sulawesi Barat, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,1 persen luas wilayah daratan Sulawesi Selatan dan sangat strategis karena merupakan jalur lalu lintas darat yang menghubungkan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah melalui Kabupaten Mamuju. Berdasarkan struktur perekonomiannya Kabupaten Pinrang merupakan daerah agraris dengan berbagai potensi pertanian yang dimiliki, dengan rincian sebagai berikut :

Wilayah Daratan	:	1.961,77 Ha, terdiri atas
▫ Areal Hutan	:	93.360Ha (47,59%)
▫ Areal Sawah	:	48.090Ha (24,51%)
▫ Areal Perkebunan	:	13.340Ha (6,8%)
▫ Areal Tambak	:	11.613Ha (5,92%)
▫ Areal Rawa	:	1.205 Ha (0,61%)
▫ Areal Kolam	:	160 Ha (0,08%)
▫ Areal Padang Rumput	:	6.905 Ha (3,52%)
▫ Areal Pemukiman	:	11.167Ha (5,69%)
▫ Lain-lain	:	10.337Ha (5,27%)

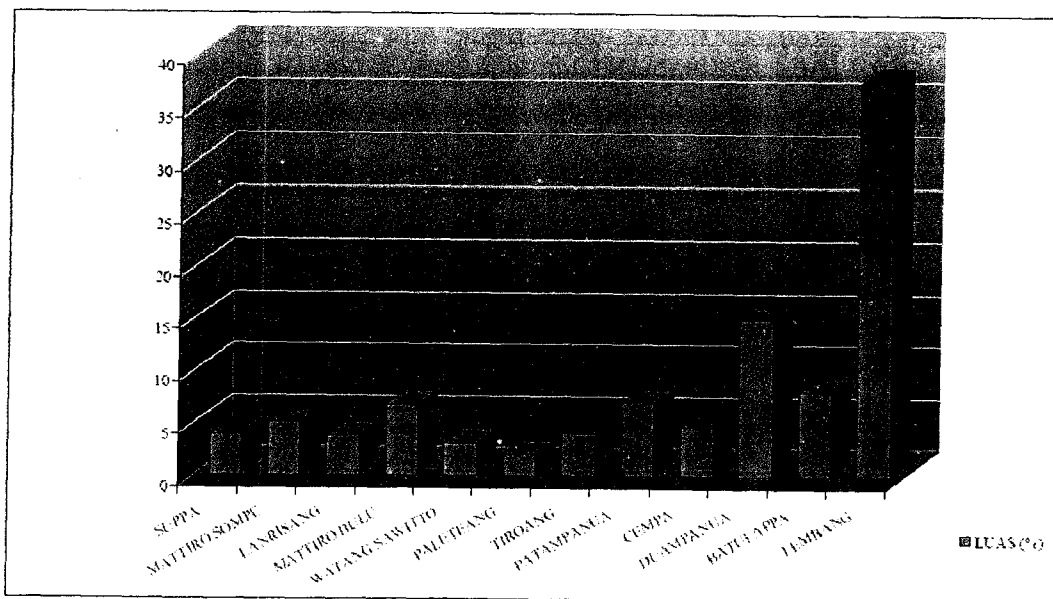
Kondisi Topografi wilayah pada umumnya berbukit-bukit dengan ketinggian 100 - 2000 metèr di atas permukaan laut. Iklim di Kabupaten ini adalah tropis dengan suhu udara rata-rata mencapai 28°C dengan curah hujan rata-rata mencapai 174,93 mm/bln.

Tabel 2.1. Jumlah Desa / Kelurahan pada tiap Kecamatan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2007

Kecamatan	Luas (ha)	Status		Ketinggian dari Permukaan Laut
		Desa	Kelurahan	
Suppa	7.420	8	2	2 - 265
Mattiro Sompe	9.699	7	2	2 - 12
Lanrisang	7.301	7	0	2 - 14
Mattiro Bulu	13.249	7	2	12 - 228
Watang Sawitto	5.897	0	8	6 - 14
Paiteang	3.729	0	6	14 - 157
Tiroang	7.773	0	5	14 - 157
Patampanua	13.685	6	4	13 - 86
Cempa	9.030	7	0	2 - 18
Duampanua	29.186	9	5	2 - 965
Batulappa	15.899	5	0	20 - 1007
Lembang	73.309	12	2	2 - 1908
<b>TOTAL</b>	<b>196.177</b>	<b>68</b>	<b>36</b>	

Sumber data : BPS

Gambar 2.1. Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten Di Kabupaten Pinrang Tahun 2007



Tabel 2.2. Jenis Tanah Yang Terdapat Dalam Kabupaten Pinrang Tahun 2007

Kecamatan	Jenis Tanah	
Suppa	1. Aluvial Kelabu 2. Grumosol Kelabu	3. Aluvial Hidromorf 4. Regosol Kelabu
Mattiro Sompe	1. Aluvial Hidromorf 2. Aluvial Kelabu Kekuningan	3. Aluvial Kelabu Olif
Lanrisang	1. Grumosol Kelabu	
Mattiro Bulu	1. Regosol Kelabu 2. Grumosol Kelabu	3. Brown Forest Soil
Watang Sawitto	1. Aluvial Kelabu 2. Aluvial hidromorf	3. Aluvial Kelabu Olif 4. Regosol Kelabu
Paleteang	1. Regosol Coklat Kelabuan 2. Aluvial Kelabu Olif	3. Aluvial Kelabu Kekuningan 4. Regosol Kelabu Kekuningan
Tiroang	1. Regosol Kelabu	2. Brown Forest Soil
Patampanua	1. Aluvial Kelabu Kekuningan 2. Aluvial Hidromorf 3. Regosol Kelabu Kekuningan	4. Fodsolik Coklat 5. Aluvial Kelabu Olif 6. Brown Forest Soil 7. Fodsolik Coklat Kekuningan
Cempa	1. Aluvial Kelabu Kekuningan 2. Aluvial Hidromorf	3. Aluvial Kelabu Olif
Duampanua	1. Fodsolik Coklat Kekuningan 2. Aluvial Kelabu Kekuningan 3. Fodsolik Coklat	4. Aluvial Kelabu Olif 5. Aluvial Hidromorf
Batulappa	1. Fodsolik Coklat	
Lembang	1. Brown Forest Soil	2. Fodsolik Coklat Kekuningan

Sumber : Master Plan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang

### 2.1.1. Pemanfaatan Lahan dan Aksesibilitas

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah lumbung padi di Sulawesi Selatan karena memiliki produksi pertanian yang relatif tinggi. Dengan kondisi yang seperti ini lahan pertanian merupakan lahan yang mayoritas. Luas lahan keseluruhan yang ada sebesar 196.177 Ha, 83.615 Ha digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian :

Luas sawah : 46.615 Ha

Sawah berpengairan teknis, sawah berpengairan setengah teknis, sawah berpengairan sederhana dan PU dan Non PU dan sawah masih merupakan tadah hujan.

Tegalan/kebun dan ladang : 27.038 Ha

Tanah perkebunan : 9.718 Ha

Tanah bangunan/halaman : 6.747 Ha

Kolam/lebat dan empang : 535 Ha

Tambak : 13.219 Ha

Padang Rumput : 6.727 Ha

Tanaman kayu : 8.609 Ha

Hutan negara : 66.787 Ha

Lahan yang belum diusahakan : 2.699 Ha

Belum teridentifikasi : 7.438 Ha

Tabel 2.3 Peruntukan Lahan Di Kab. Pinrang Untuk Tanah Sawah

KECAMATAN	Luas lahan sawah (ha)				Jumlah
	Pengairan Teknis	Pengairan ½ teknis	Pengairan Sederhana	Tadah Hujan	
1 Suppa	1.017	0	0	530	1.547
2 Mattiro Sompe	4.325	0	0	0	4.325
3 Lanrisang	3.461	0	0	0	3.461
4 Mattiro Bulu	4.022	0	0	1.133	5.155
5 Watang Sawito	4.608	0	0	0	4.608
6 Paleteang	2.164	0	0	0	2.164
7 Tiroang	4.767	0	0	0	4.767
8 Patampanua	3.569	0	0	880	4.449
9 Cempa	4.740	0	0	0	4.740
10 Duampanua	4.882	0	1.443	236	6.561
11 Batulappa	20	0	920	571	1.511
12 Lembang	0	852	2.160	315	3.327
Total	37.575	852	4.523	3.665	46.615

Sumber data : BPS

## 2.2. Demografi

### 2.2.1 Jumlah Dan Penyebaran Penduduk

Penduduk Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil perhitungan registrasi penduduk akhir Tahun 2007 berjumlah 335,270 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Duampanua yakni sebanyak 45,199 jiwa, sedangkan Kecamatan Batulappa dengan penduduknya sebanyak 9,457 jiwa merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil.

Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100 yakni hanya 92,00 persen saja.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Seks Rasio Dan Banyaknya Kepala Keluarga Dirinci Tiap Kecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2007

Kecamatan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Seks Rasio (%)	Banyaknya Kepala Keluarga
1 Suppa	13.884	14.738	28.622	94,21	6.572
2 Mattiro Sompe	13.291	15.015	28.306	88,52	6.535
3 Lanrisang	8.269	9.241	17.510	89,48	3.967
4 Mattiro Bulu	12.189	13.835	26.024	88,10	6.309
5 Watang Sawito	20.517	23.107	43.624	88,79	11.116
6 Paleteang	14.666	16.013	30.679	91,59	6.699
7 Tiroang	9.266	9.967	19.233	92,97	4.768
8 Patampanua	15.068	16.182	31.250	93,12	6.685
9 Cempa	8.145	8.588	16.733	94,84	4.106
10 Duampanua	21.754	23.445	45.199	92,79	9.701
11 Batulappa	4.596	4.861	9.457	94,55	1.952
12 Lembang	19.002	19.631	38.633	96,80	8.249
<b>Total</b>	<b>160.647</b>	<b>174.623</b>	<b>335.270</b>	<b>92.00</b>	<b>76.659</b>

Sumber data : BPS

### 2.2.2. Laju Pertumbuhan Dan Proyeksi Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2007 sebesar 0,71 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang untuk Tahun 2007 dapat sedikit ditekan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dimana pertumbuhannya sebesar 0.75 persen.

Tabel 2.5 Banyaknya Penduduk Dirinci Tiap Kecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2002 S/D 2007 (dalam jiwa)

Kecamatan	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1 Suppa	27,679	27,870	28,101	28,354	28,531	28.622
2 Mattiro Sompe	26,846	27,021	27,309	27,561	27,823	28.306
3 Lanrisang	16,351	16,981	17,151	17,215	17,374	17.510
4 Mattiro Bulu	24,347	25,437	25,659	25,777	25,901	26.024
5 Watang Sawito	41,471	41,562	43,250	43,441	43,497	43.624
6 Paleteang	27,884	30,060	30,210	30,456	30,587	30.679
7 Tiroang	17,654	17,628	18,732	18,803	19,172	19.233
8 Patampanua	28,733	30,307	30,604	30,718	30,917	31.250
9 Cempa	15,874	16,151	16,299	16,610	16,663	16.733
10 Duampanua	42,523	42,759	42,907	44,072	44,669	45.199
11 Batulappa	9,426	9,431	9,442	9,429	9,464	9.457
12 Lembang	37,086	37,222	37,852	38,002	38,323	38.633
<b>Total</b>	<b>315,874</b>	<b>322,429</b>	<b>327,516</b>	<b>330,438</b>	<b>332,921</b>	<b>335,270</b>

Sumber data : BPS

### 2.2.3. Usia Produktif Dan Angkatan Kerja

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang Tahun 2007 masih belum merata. Konsentrasikonsentrasi penduduk ada pada pusat-pusat perekonomian daerah atau pun di ibu kota kecamatan/kabupaten.

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2007 adalah 171 jiwa/km<sup>2</sup>. Paletang merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi yakni 823 jiwa/km<sup>2</sup> disusul kemudian oleh Kecamatan Watang Sawitto dengan 740 jiwa/km<sup>2</sup>

Tabel 2.6 Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Pinrang Akhir Tahun 2007 (dalam jiwa)

Kelompok Umur	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	% Terhadap Jumlah
1 00-04	19.764	19.575	39.339	11,73
2 05-09	21.953	21.686	43.639	13,02
3 10-14	21.412	21.247	42.659	12,72
4 15-19	16.481	17.357	33.838	10,09
5 20-24	11.656	14.014	25.670	7,66
6 25-29	11.287	14.131	25.418	7,58
7 30-34	9.832	11.798	21.630	6,45
8 35-39	10.703	12.091	22.794	6,8
9 40-44	8.042	9.428	17.470	5,21
10 45-49	8.074	9.125	17.199	5,13
11 50-54	6.392	7.305	13.697	4,09
12 55-59	5.148	5.692	10.840	3,23
13 60-64	5.469	6.121	11.590	3,46
14 65+	4.434	5.053	9.487	2,83
Total	160.647	174.623	335.270	100,00

Sumber data : BPS

### 2.3. Perekonomian Daerah

#### 2.3.1. Struktur Dan Perkembangan Pembangunan (Perekonomian) Daerah (Kinerja & Pencapaian)

Struktur Dan Perkembangan Pembangunan (Perekonomian) Daerah (Kinerja & Pencapaian) (GRDP & Laju pertumbuhan, Tingkat Investasi, penyerapan tenaga kerja, profil kemiskinan dan pengangguran, IPM)



Struktur ekonomi digunakan untuk mengetahui sumbangan atau peranan masing-masing kegiatan ekonomi atau sektor dalam perekonomian Kabupaten Pinrang yang dinyatakan dalam PDRB Kabupaten Pinrang. Persentase PDRB persektor dalam PDRB total Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7. Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga berlaku tahun 2003 - 2007

Lapangan Usaha	2003	2004	2005	2006	2007
1 Pertanian	1.204.878,37	1.293384,38	1.410.416,30	1.528.658,06	1.612.321,45
2 Penggalian/ Pertambangan	13.857,42	15.600,25	17.374,82	19.519,80	22.346,31
3 Industri Pengolahan	77.818,90	85.541,36	95.867,68	109.139,06	121.205,32
4 Listrik, gas & air	11.309,18	12.714,63	15.592,49	18.307,20	21.585,65
5 Bangunan	60.910,12	69.243,44	79.040,61	90.938,08	105.248,94
6 Perdagangan Restoran, hotel	195.573,19	212.285,11	238.301,55	284.321,55	323.050,54
7 Angkutan & komunikasi	195.573,19	212.285,11	238.301,55	112.009,27	116.113,85
8 Bank & lembaga Keuangan	71.905,88	79.149,44	92.423,23	84.348,81	98.495,21
9 Jasa-jasa	147.619,27	156.394,79	173.528,37	208.875,07	262.740,86
<b>Total</b>	<b>1.833.682,76</b>	<b>1.987.193,13</b>	<b>2.198.905,05</b>	<b>2.456.116,91</b>	<b>2.685.110,14</b>

Sumber data : BPS

Uraian tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pinrang adalah berasal dari sektor pertanian yang tiap tahun mengalami peningkatan untuk tahun 2003 sebesar Rp. 1.833.682,76 dan pada tahun 2007 naik menjadi Rp. 2.685.110,14 Sedangkan data mengenai perkembangan PDRB Kabupaten Pinrang selama lima tahun terakhir dalam harga konstan dan harga berlaku dapat dilihat pada tabel 10 berikut :

Tabel 2.8. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pinrang dalam harga berlaku dan konstan Tahun 2003 - 2007

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Milyar(Rp)	Pertumbuhan(%)	Milyar(Rp)	Pertumbuhan(%)
<b>2003</b>	1.833,68	9,68	1.611,66	4,23
<b>2004</b>	1.987,19	8,37	1.688,28	4,75
<b>2005</b>	2.198,81	10,65	1.787,71	5,89
<b>2006</b>	2.456,12	11,70	1.895,72	6,04
<b>2007</b>	2.685,11	9,32	1.973,87	4,12
<b>Rata-rata</b>	-	<b>9,94</b>	-	5,01

Sumber data : BPS

Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang dari tahun ke tahun digunakan indikator perkembangan PDRB untuk periode

yang sama. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang disajikan pada Tabel dibawah ini :

Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pinrang atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2007 (%)

Tabel 2.9. Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pinrang atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2007 (%)

Lapangan Usaha	2003	2004	2005	2006	2007
1 Pertanian	3,06	3,84	4,82	4,99	1,92
2 Penggalian/ Pertambangan	6,44	6,67	7,64	7,87	8,56
3 Industri Pengolahan	2,88	6,30	8,07	7,73	4,90
4 Listrik, gas & air	6,95	12,08	12,70	2,93	10,98
5 Bangunan	9,37	9,08	9,93	10,11	11,32
6 Perdagangan Restoran, hotel	9,37	9,08	9,93	8,09	8,16
7 Angkutan & komunikasi	3,58	5,26	10,97	9,41	1,71
8 Bank & lembaga Keuangan	12,05	22,23	17,05	5,87	9.,22
9 Jasa-jasa	6,02	1,39	3,38	8,41	12,33
<b>Total</b>	<b>4,23</b>	<b>4,75</b>	<b>5,89</b>	<b>6,04</b>	<b>4,12</b>

Sumber data : BPS

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang pada tahun 2003 mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2004 dari 4,23 menjadi 4,75 sedangkan pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 4,12 %. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2005 dan 2006 terjadi kenaikan produksi khususnya di sektor pertanian dan jasa yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB

II - 9

## Pendapatan dan Pertumbuhan Perkapita

Data mengenai Pendapatan dan Pertumbuhan Perkapita Kabupaten Pinrang dari tahun 2003 s/d 2007 setiap tahunnya mengalami kenaikan atas dasar harga berlaku, sedangkan untuk atas dasar harga konstan dari tahun 2003 s/d 2007 juga mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan gambaran pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.10 PDRB Perkapita atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Pinrang Tahun 2003 - 2007

TAHUN	Harga Berlaku (Rp.Milyar)	Harga Konstan (Rp. Milyar)
1 2003	5.805,108	5.102,211
2 2004	5.986,585	5.086,090
3 2005	6.586,147	5.354,790
4 2006	7.323.997	5.652.940
5 2007	7.887.199	5.798.013
<b>Rata-rata</b>	<b>8,97%</b>	<b>3,41%</b>

Sumber data : BPS

Perkembangan PDRB Kabupaten Pinrang atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu untuk tahun 2003 PDRB sebesar Rp 5.805,108 Milyar naik menjadi Rp 7.887.199 Milyar pada tahun 2007 dengan rata-rata pertumbuhan 8,97 % pertahun, sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan yang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2003 PDRB sebesar Rp. 5.102,211 Milyar menjadi Rp. 5.798.013 Milyar pada tahun 2007 ini berarti mengalami pertumbuhan sebesar rata-rata 3,41 % per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan daerah cukup baik sebagai indikator ekonomi.

## **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh upaya pemberdayaan yang telah dicapai masyarakat secara cepat adalah indikator komposisi. Beberapa indikator komposit yang telah dikembangkan dan direkomendasikan UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh upaya pemberdayaan yang telah dicapai masyarakat secara cepat adalah indikator komposisi. Beberapa indikator komposit yang telah dikembangkan dan direkomendasikan UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM).

IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan indeks standar hidup layak. Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Indeks dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran.

Berdasarkan rekomendasi UNDP, nilai IPM bernilai 0 (nol) hingga 100. Dimana nilai bergerak mendekati 100 diinterpretasikan sebagai adanya pemberdayaan semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati 0 (nol). Nilai IPM dibawah 50 dikategorikan sedang, nilai 51-79 dikategorikan menengah dan diatas 79 dikategorikan tinggi.

Tabel 2.11. Indikator Kependudukan dan EKonomi Kabupaten Pinrang 2004 - 2007

Jenis Indikator	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-rata
1 Penduduk						
a. Jumlah (jiwa)	331.592	334.090	335.545	332.921	342.800	335.390
b. Pertumbuhan	5,67	0,75	0,44	-0,78	2,97	1,81
c. Kepadatan /Km2	169	170	171	170	175	171
2 Perekonomian						
a. Struktur (%)						
- Pertanian	65,09	64,14	62,24	60,05	59,30	62,16
- Perdagangan	9,78	9,91	10,61	11,02	11,19	10,50
- Lainnya	25,13	25,95	27,15	28,93	29,51	27,33
b. PDRB (Rp. milyar)						
- Harga Berlaku	1.987,2	2.198,8	2.456,1	2.685,1	3.046,9	2474,8
- Harga Dasar	1.688,3	1.787,7	1.895,7	1.973,9	2.075,2	1.884,2
c. Pertumbuhan Ekonomi	4,75	5,89	6,04	4,12	5,14	5,19
d. PDRB perkapita (Rp.000)	5.986,6	6.586,1	7.324,0	7.887,2	8.888,9	7.334,6

Sumber data : IPM Tahun 2007

Tabel 2.12. Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang Menurut Komponennya Tahun 2004 - 2007 (%)

Jenis Indikator	2004	2005	2006	2007	Perubahan 2004-2007
1 Kesehatan					
a. Angka Harapan Hidup	70,10	70,60	70,70	71,20	0,52
b. Indeks Kesehatan	75,2	76,0	76,2	77,0	1,95
2 Pendidikan					
a. Angka Melek Huruf	88,40	89,10	89,10	89,10	0,26
b. Rata-rata lama sekolah	6,80	6,90	6,90	6,90	0,49
c. Indeks Pendidikan	74,0	74,7	74,7	74,7	1,38
3 Hidup Layak					
a. Paritas Daya Beli	609,3	621,1	622,8	630,6	1,15
b. Indeks Daya Beli	57,6	60,3	60,7	62,5	2,26
IPM	68,9	70,4	70,5	71,4	2,00

Sumber data : IPM Kab. Pinrang 2007

II - 11

Tabel 2.13. Indikator Pendukung Menurut Jenis Indikator Kabupaten Pinrang 2004 - 2007

Jenis Indikator	2004	2005	2006	2007
1 Kesehatan				
a.Rasio fasilitas terhadap 10 ribu penduduk	2,2	2,1	2,4	2,1
b.Rasio tenaga medis terhadap 10.000 penduduk	13,9	18,3	18,3	18,3
c.Rasio dokter terhadap fasilitas	0,5	0,5	0,5	0,5
2 Pendidikan				
a.rasio murid terhadap sekolah				
-sekolah dasar sederajat	156	156	152	148
-sekolah menengah pertama /sederajat	266	266	257	243
-sekolah menengah umum /sederajat	374	374	374	349
3 b.rasio murid terhadap guru				
-sekolah dasar sederajat	21	21	19	14
-sekolah menengah pertama/sederajat	14	14	14	12
-sekolah menengah umum/sederajat	14	14	12	10
3 Fasilitas perumahan penduduk				
a.rumah tangga menggunakan listrik(%)	88,34	..	89,74	94,58
b.rumah tangga menggunakan air bersih(%)	10,29	11,00	10,65	9,80
c.pengeluaran rumah tangga/bulan (rp.000)	658,9	776,8	992,4	1.014,5
-konsumsi makanan (rp.000)	412,7	501,6	581,7	645,2
-konsumsi bukan makanan (rp.000)	246,1	275,2	410,7	369,4

Sumber data : IPM Kab. Pinrang 2007

Ket : .... Data tidak tersedia

### Tenaga Kerja dan Kemiskinan

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang cukup mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup aspek ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan tidak hanya pada perluasan lapangan kerja akan tetapi kemudahan dalam berusaha di semua sector ekonomi sehingga penduduk tidak hanya terlibat tetapi juga dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan sendiri.

Perkembangan sector ketenagakerjaan secara tidak langsung dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi, atau dengan kata lain keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dari besarnya penduduk yang memasuki pasar kerja.

Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas baik yang terdiri dari mereka yang melakukan kegiatan bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Tahun 2007, dari 238.289 penduduk usia kerja terdapat 141.325 angkatan kerja, dan yang bukan angkatan kerja 96.964 orang. Perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk disebut TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK). Selama periode 2004 sampai 2007 TPAK memperlihatkan kecendrungan yang terus membaik, hal ini

tercermin dari nilainya pada 2004 yang sebesar 48,73 dan menjadi 59,31 %.

Tabel 2.14. Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK Kabupaten Pinrang 2004 - 2007

Uraian	2004	2005	2006	2007
1 Angkatan kerja (jiwa)	128.811	135.912	127.461	141,325
2 Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	135.510	127.931	101.732	96.964
3 Jumlah (jiwa)	264.321	263.843	229.193	238.289
4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	48,73	51,51	55,61	59,31

Sumber data : IPM Kab. Pinrang 2007

Catatan: tahun 2004-2005 penduduk usia 10 thn keatas, hasil survei sosial ekonomi nasional  
Tahun 2006-2007, penduduk usia 15 tahun keatas. Survei angkatan kerja nasional

Tabel 2.15. Persentase Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin Tahun 2004 dan 2007 (000. Jiwa)

Kelompok Umur	2004			2007		
	L	P	L+P	L	P	L+P
1 0 - 14	33,29	30,28	31,70	33,22	31,82	32,49
2 15 - 64	61,71	64,11	62,96	61,02	60,96	61,00
3 65+	5,03	5,60	5,33	5,77	7,21	6,52
Angka Beban Tanggungan-ABT	62,10	55,97	58,82	63,90	64,02	63,95

Sumber data : IKM Kab. Pinrang 2007

Angka Beban Tanggungan (ABT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk produktif (15-64) dengan umur yang tidak produktif (dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas)

Penduduk yang berusia 0-14 tahun pada tahun 2004 sekitar 31,7% menjadi 32,49% tahun 2007. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kelahuran sekitar 0,79%. Sedangkan penduduk usia **PRODUKTIF** mengalami penurunan dari sekitar 62,96% tahun 2004 menjadi 61% tahun 2007. Menurunnya usia produktif dan naiknya proporsi penduduk usia muda berpengaruh pada naiknya ABT, dari sekitar 48,82 tahun 2004 menjadi 63,95 pada tahun 2007.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2007, tiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 64 penduduk usia produktif.

Tingkat pengangguran. Merupakan angka yang menunjukkan besarnya angkatan kerja usia 15 tahun ke atas yang sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka penduduk Kabupaten Pinrang sekitar 9,94% pada tahun 2007. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan angka pengangguran pada tahun 2005 sebesar 16,07%

Penduduk Miskin. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997, telah menyebabkan bertambahnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Pinrang. Tahun 2000 perbaikan ekonomi dan

situasi politik yang sedikit membaik telah mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Keadaan ekonomi di Kabupaten Pinrang juga semakin membaik hingga tahun 2005. Hal ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya persentase penduduk miskin dari sekitar 14,8 persen tahun 2000 menjadi 9,99% tahun 2005. Seperti tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.16. Jumlah dan % Penduduk Miskin di Kabupaten Pinrang

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000. orang)	% Penduduk Miskin
1 2000	45,8	14,80
2 2002	33,0	10,56
3 2005	23,53	9,99

Sumber data : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Pinrang 2007

### 2.3.2. Profil Perekonomian Daerah dan Komoditi Unggulan

#### a. Pertanian

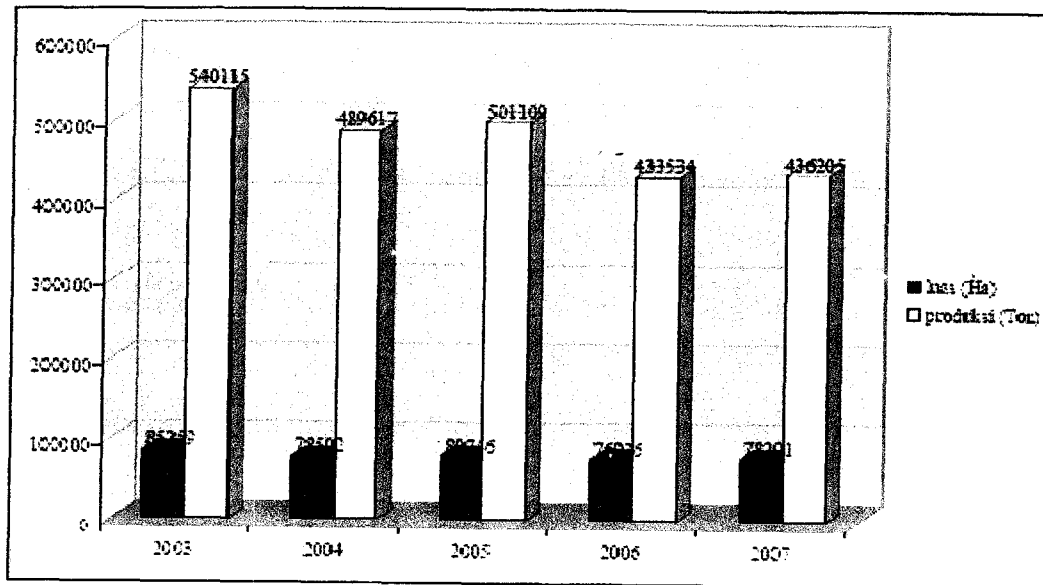
Kabupaten Pinrang merupakan salah satu lumbung padi di Sulawesi Selatan. Dengan lahan panen untuk produksi padi seluas 85.259 Ha (43% luas Kab. Pinrang), tahun 2007 mampu memproduksi padi sawah sebanyak 540.115 ton. Produksi jagung Kabupaten Pinrang Tahun 2007 sebesar 13718 ton dengan luas panen 3904 Ha.

Tabel 2.17 Luas Panen Dan Produksi Padi Sawah Dirinci Tiap Kecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2007

Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1 Suppa	2.266	14.355
2 Mattiro Sompe	8.650	54.798
3 Lanrisang	6.204	39.302
4 Mattiro Bulu	9.579	60.683
5 Watang Sawito	8.558	54.215
6 Palateang	4.328	27.418
7 Tiroang	9.510	60.246
8 Patampanua	8.807	55.792
9 Cempa	9.214	58.371
10 Duampanua	11.675	73.961
11 Batulappa	2.126	13.468
12 Lembang	4.342	27.506
<b>Total</b>	<b>85.259</b>	<b>540.115</b>

Sumber data : BPS

Gambar 2.2. Luas Panen Dan Produksi Padi Sawah Dirinci Tiap Kecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2003-2007



## b. Perkebunan

Kabupaten Pinrang sangat kaya dengan hasil produksi tanaman perkebunan. Jenis tanaman perkebunan yang dominan ditanam oleh petani yang memiliki nilai ekonomis penting berupa : kelapa dalam, kelapa hibrida, kopi, lada, kakao (coklat), cengkeh, kapok, jambu mente, kemiri dan aren.

Kelapa merupakan salah satu komoditas tanaman perkebunan yang merupakan komoditi andalan di Kabupaten Pinrang, yakni dari jenis kelapa dalam dan jenis kelapa hibrida.

Total produksi kelapa dalam tahun 2004 sebanyak 7.013 ton dengan luas areal yang dipanen sebesar 1-.362. Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap hasil produksi yaitu sebesar 1.370 ton dengan luas areal yang dipanen sebesar 1.652 ha atau 19,5% dari total hasil produksi buah kelapa.

Total produksi Kelapa hibrida tahun 2004 3.631 dari luas keseluruhan lahan yang dipanen sebesar 2.492 ha. Tingkat produksi, kelapa hibrida memiliki tingkat produksi yang lebih tinggi dibandingkan kelapa dalam. Produksi kelapa hibrida sebesar 1,46 ton/ha.

## c. Peternakan

Jenis ternak yang dipelihara di Kabupaten Pinrang dikategorikan kedalam 2 (dua) kategori yaitu :

Jenis ternak besar : Sapi, Kerbau, dan Kuda



Jenis ternak kecil : babi, kambing  
Unggas : ayam dan itik

Tahun 2004 jumlah populasi ternak terbanyak di Kabupaten Pinrang berasal dari jenis unggas yaitu ayam kampung dengan jumlah populasi sebanyak 1.315.973 ekor dan jumlah populasi ternak yang paling sedikit berasal dari ternak kecil yaitu babi.

Berdasarkan kecamatan, jumlah populasi ternak terbanyak dari jenis unggas yaitu ayam kampung yang dihasilkan oleh Kecamatan Lembang dengan populasi sebanyak 270.637 ekor, sementara untuk jenis ayam ras dan itik terbanyak di Kecamatan Mattiro Bulu dengan populasi sebanyak 82.638 ekor dan 81.610 ekor. Untuk jenis ayam petelur populasi terbanyak di Kecamatan Suppa sebanyak 14.404 ekor.

Secara umum, jumlah populasi ternak mengalami peningkatan yang signifikan. Namun peningkatan yang paling berarti diperlihatkan oleh jenis unggas.

Tabel 2.18 Luas Populasi Ternak Tiap Kecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2004

No	Kecamatan	Jenis Populasi Ternak (ekor)								
		Ternak besar			Ternak Kecil		Unggas			
		Sapi	Kerbau	Kuda	Babi	Kambing	Ayam Ras	Ayam Kampung	Itik	Ayam Petelur
1	Suppa	5.614	130	90	0	2.954	42.308	209.957	34.692	14.041
2	Mattiro Sompe	1.216	0	322	0	2.564	23.484	106.607	63.631	0
3	Lanrisang	599	0	17	0	535	70.830	104.645	36.599	591
4	Mattiro Bulu	5.429	634	162	0	1.984	82.638	220.926	81.610	11635
5	Watang Sawito	144	0	148	0	540	6.960	89.340	7.916	7520
6	Paletang	863	46	101	136	436	6.874	62.063	30.010	0
7	Tiroang	142	0	66	0	442	6.874	55.723	29.288	0
8	Patampanua	1.222	98	130	0	853	42.483	45.386	40.257	0
9	Cempa	414	0	78	0	957	2.056	42.439	10.969	0
10	Duampanua	3.598	286	217	0	957	2.056	42.716	44.905	0
11	Batulappa	2.998	596	539	0	535	0	65.534	12.188	0
12	Lembang	1.4557	3.028	1.928	2.761	3.160	0	27.0637	60.611	0
	total	36.796	4.818	3.798	2.761	15.449	224.601	1.315.973	452.678	34150

Sumber data : BPS

#### d. Kehutanan

Peranan hutan erat hubungannya dengan munculnya industri sebagai dimensi baru dalam kehidupan ekonomi manusia. Saat ini hutan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sumber diperolehnya tanah pertanian baru melainkan sebagai sumber bahan mentah untuk industri, misalnya kayu, rotan dan damar.. Areal hutan yang ada di Kabupaten Pinrang seluas 72.828 Ha dengan rincian fungsi yaitu : Hutan lindung seluas 46.782 Ha, Hutan produksi terbatas seluas 26.049 Ha dan lahan kritis seluas 19.000 Ha serta untuk pesisir pantai yang memungkinkan untuk rehabilitasi hutan mangrov sepanjang ± 92 km .

## e. Sumber daya kelautan & Perikanan

Komoditi perikanan merupakan komoditi primadona karena merupakan salah satu komoditas ekspor non migas. Selain memiliki harga jual yang sangat tinggi dipasaran, juga karena tingginya permintaan pasar. Hasil produksi perikanan di Kabupaten Pinrang dikelompokkan dalam 2 kelompok besar : Perikanan laut dan Perikanan darat

Jenis komoditas perikanan dikelompokkan ke dalam 2 jenis yaitu ikan dan udang. Hasil produksi perikanan laut lebih difokuskan pada usaha penangkapan ikan dan udang dilaut sementara perikanan darat lebih terfokus pada usaha pemeliharaan (budidaya) ikan dan udang ditambak atau kolam.

Total produksi di tahun 2004 sebesar 10.855,48 ton yang terdiri atas

Ikan : 10.578,42 ton dan Udang : 277,06 ton

Sementara hasil produksi perikanan dari sektor perikanan darat pada tahun yang sama :

1. Tambak 17.154,95 ton, terdiri atas : Ikan 14.921 ton dan Udang 2.233,92 ton
2. Kolam 486,81 ton
3. Sawah 38,10 ton
4. Sungai 28,51 ton
5. Rawa 300,75ton

II - 17

Tabel 2.19 Hasil produksi perikanan Kabupaten Pinrang Tahun 2006

No	Kecamatan	Wadah penangkapan / pemeliharaan ikan (ton)					Jumlah
		Laut	Danau	Rawa	Sungai	Waduk	
1	Suppa	4.050,73	0	12,21	0,91	0	4.063,85
2	Mattiro Sompe	1.650,68	0	0	1,66	0	1.652,34
3	Lanrisang	1.106,65	0	87,45	1,39	0	1.195,49
4	Mattiro Bulu	0	0	40	2,31	0	42,31
5	Watang Sawito	0	0	8,82	1,01	0	9,83
6	Paleteang	0	0	7,23	0,37	0	7,60
7	Tiroang	0	0	33,25	1,51	0	34,76
8	Patampanua	0	0	47,39	9,10	5,87	62,36
9	Cempa	444,72	0	10,73	0,90	0	456,35
10	Duampanua	2.076,25	0	45,44	4,74	0	2.128,43
11	Batulappa	0	0	0	2,16	0	2,16
12	Lembang	1.525,97	0	8,10	2,45	2,13	1.538,65
	total	10.855,00	0	300,62	28,51	8	11.192,13

Sumber data : BPS

Tabel 2.20. Jumlah Penduduk yang berprofesi Pada Sektor Perikanan Kabupaten Pinrang Tahun 2006

No	Kecamatan	Wadah penangkapan / pemeliharaan ikan (ton)			Jumlah
		Nelayan Laut	Nelayan Darat	P. Tani Tambak/ Kolam	
1	Suppa	4.313	21	1.663	5.997
2	Mattiro Sompe	1.750	109	3.899	5.758
3	Lanrisang	827	18	917	1.762
4	Mattiro Bulu	0	35	43	78
5	Watang Sawito	0	40	34	74
6	Paleteang	0	19	21	40
7	Tiroang	0	39	36	75
8	Patampañua	0	145	279	424
9	Cempa	320	20	1.097	1.437
10	Duampanua	1.290	89	3.914	5.293
11	Batulappa	0	15	19	34
12	Lembang	504	53	285	842
	total	9.004	603	12.207	21.814

Sumber data : BPS

Tabel 2.21 Luas Areal Pemeliharaan/ Penangkapan Ikan Berdasarkan Jenis Wadah di Kabupaten Pinrang Tahun 2006

No	Kecamatan	Jenis Wadah Pemeliharaan / Penangkapan (ha)						Jumlah
		Kolam	Sawah	Tambak	Rawa	Sungai	Waduk	
1	Suppa	1,4	0	2.203	4,75	7,0	0	2.216,15
2	Mattiro Sompe	22,2	0	4.131	0	11,0	0	4.164,20
3	Lanrisang	35,0	0	1.620	90,0	3,0	0	1.748,00
4	Mattiro Bulu	70,0	21,2	0	2,5	12,0	0	105,70
5	Watang Sawito	44,5	0	0	23,7	5,0	0	73,20
6	Paleteang	13,3	0	0	21,34	5,,0	0	49,64
7	Tiroang	92,4	0	0	72,2	8,0	0	172,60
8	Patampanua	365,0	30,45	0	12,17	25,0	36	468,62
9	Cempa	51,5	0	2.341	37	5,0	0	2.434,50
10	Duampanua	97,5	0	5.101	32,0	20,0	0	5.250,50
11	Batulappa	20,2	0	0	0	15,0	0	35,20
12	Lembang	9,1	0	339	10	9,0	112	470,10
	Total	832,1	51,65	15.375	296,66	125,0	148,0	17.188,41

Sumber data : BPS

Tabel 2.22. Jumlah produksi ikan olahan (asin) di Kabupaten Pinrang

No	Kecamatan	Wadah penangkapan / pemeliharaan ikan (ton)		
		Perikanan Laut	Perikanan Darat	Jumlah
1	Suppa	1.528,34	1,75	1.530,00
2	Mattiro Sompe	616,27	3,76	620,03
3	Lanrisang	184,8660	3,75	186,61
4	Mattiro Bulu	0	3,04	3,04
5	Watang Sawito	0	0	0
6	Paletang	0	0,50	0,50
7	Tiroang	0	4,81	4,81
8	Patampanua	0	18,84	18,84
9	Cempa	21,00	2,81	23,81
10	Duampanua	646,57	22,00	668,57
11	Batulappa	0	2,16	2,16
12	Lembang	425,62	2,10	427,72
	total	3.422,66	65,52	3.488.18

Sumber data : BPS

#### f. Perindustrian dan UMKM

Lembaga Perbankan yang telah beroperasi di Kabupaten Pinrang adalah merupakan lembaga perbankan yang sudah mapan dan profesional di bidangnya dengan omset yang cukup besar antara lain ; Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Sul Sel (BPD), Bank BNI 46, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Al Birri, dan Koperasi Unit Desa serta koperasi Primer pada tiap kecamatan di Kabupaten Pinrang. Bank Danamon adalah merupakan bank swasta dengan joint venture antara Indonesia dengan Singapore.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di daerah ini telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan jasa koperasi dan perbankan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang yang mencapai rata-rata 6,04. pertahun (2001 - 2005), membuka peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Pinrang

Jumlah Badan Usaha yang telah terdaftar di Kabupaten Pinrang adalah sebanyak 2.089. Perincian Badan Usaha disajikan pada Tabel dibawah ini

Tabel 2.23. Jumlah Badan Usaha di Kabupaten Pinrang Tahun 2007

	Badan Usaha	Jumlah (unit)	Persentase
1	PT	6	3,3
2	CV	185	9,85
3	Koperasi	17	10,7
4	Usaha Perorangan	1.620	76,15
5	Usaha lainnya	-	-
	Total	1.828	100

Sumber data : Pinrang dalam angka 2007

Tabel 2.24. Jenis dan Jumlah Industri Kabupaten Pinrang Tahun 2007

Kelompok Industri	Jumlah Usaha	Nilai Investasi (Rp)	Nilai Tambah/Produksi (Rp)	Tenaga Kerja (Jiwa)
1 Industri Hasil Pertanian dan hutan	836	3.160.479	4.964.168	2.281
2 Industri Bambu, Rotan, Rumput dan sejenisnya	638	3.094.667	7.509.158	2.972
3 Percetakan dan Penerbitan	27	1.093.881	141.750	110
4 Industri Aneka Tekstil	644	586.076	235.853	941
5 Industri Logam dan Kimia	612	2.387.128	25.082.546	3.041
<b>Total</b>	<b>2.757</b>	<b>10.322.231</b>	<b>37.933.475</b>	<b>9.345</b>

Sumber data : Pinrang dalam angka 2007

### g. Perdagangan

Jumlah keseluruhan sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Pinrang sebanyak 6.759 unit. Jumlah ini diantaranya berupa : pasar desa 51 unit, kios kecil 5.862 unit, kios sabrodi 39 unit, usaha penggilingan padi 392 unit, warung makan 237 unit dan ekonomi penunjang lainnya sebanyak 178 unit.

Tabel 2.25. Jumlah Sarana Perdagangan Kabupaten Pinrang Tahun 2004

No	Kecamatan	Jenis Wadah Pemeliharaan / Penangkapan (ha)						Jumlah
		Pasar Desa	Kios Kecil	Kios Sabrodi	Penggilingan Padi	Wrng Makan	Sarana Penunjang	
1	Suppa	7	88	1	7	13	31	144
2	Mattiro Sompe	4	219	7	25	9	13	277
3	Lanrisang	2	135	0	50	2	30	219
4	Mattiro Bulu	4	429	0	39	37	4	513
5	Watang Sawito	4	3.110	11	52	72	28	3.277
6	Paleteang	2	256	5	23	34	5	325
7	Tiroang	2	100	10	46	5	0	163
8	Patampanua	7	348	0	24	25	2	406
9	Cempa	4	29	0	35	4	3	75
10	Duampanua	6	1.095	0	30	35	17	1.183
11	Batulappa	4	3	0	29	0	0	36
12	Lembang	8	50	5	32	1	45	141
	<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>5.862</b>	<b>39</b>	<b>392</b>	<b>237</b>	<b>178</b>	<b>6.759</b>

Sumber data : Evaluasi APBD 2007 Kab.Pinrang

## **h. Perhubungan**

Jalan merupakan sarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan perekonomian. Panjang keseluruhan jalan pada tahun 2004 790,21 km terdiri atas jalan negara 68,85 km, propinsi 66,75 dan 654,61 km jalan kabupaten.

## **i. Kepariwisata**

Dengan adanya ketahanan budaya yang mampu menjadi penyelaras nilai global dan nilai lokal, sehingga dapat menghindarkan benturan antar budaya. Pariwisata, menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepariwisataan dan peningkatan kelestarian budaya, melalui pengembangan pemasaran pariwisata dan budaya, pengembangan tujuan wisata, pengembangan sarana, prasarana budaya dan wisata, pemeliharaan prasarana wisata dan budaya, pembinaan kualitas

## **j. Energi dan Pertambangan**

Sektor industri dibedakan atas industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Data mengenai industri besar dan sedang tersedia setiap tahun yang dilakukan dengan cara SENSUS lengkap, Sedangkan data industri kecil dan rumah tangga bersumber dari data sekunder dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata. Pada Tahun 2007 jumlah perusahaan di Kabupaten Pinrang sebanyak 1465 usaha dengan tenaga kerja sebanyak 5670 jiwa.

### **LISTRIK, GAS DAN AIR**

Sebagian besar kebutuhan listrik di kabupaten Pinrang dipasok dari perusahaan listrik negara (PLN). Hal ini terlihat dari tingginya pelanggan pada sebagian ranting PLN (Tabel VI.1.6.) Daya listrik yang mampu dibangkitkan oleh PLN pada Tahun 2007 sebanyak 48.895.930 kw dengan energi yang terjual sebesar 6104150468 kwh.

Pemakaian air minum yang disalurkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pinrang Tahun 2007 sebesar 924.413 m<sup>3</sup> dengan nilai sebesar Rp 2.226 juta. Jumlah pelanggan rumah tangga sebanyak 5.120 RT, perusahaan sebanyak 2 dan lainnya sebanyak 57 pelanggan. Yang termasuk lainnya misalnya Mesjid, Umum dan badan sosial/ rumah sakit.

## 2.4. Sosial Budaya dan Perkembangannya

### 2.4.1. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya, karena meningkatnya pendidikan penduduk berarti kualitas manusia sebagai sumber daya semakin baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan pula produktivitas dalam semua sector pembangunan.

Pemerintah terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta menyediakan berbagai paket seperti program wajib belajar, pendidikan luar sekolah, sekolah terbuka dan lain sebagainya. Program pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah, menurunkan angka buta huruf, serta meningkatkan jenjang pendidikan penduduk.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah partisipasi penduduk usia tertentu yang masih sekolah terhadap seluruh penduduk pada umur tersebut.

APS untuk usia SD (7-12 tahun) pada tahun 2004 sekitar 93,4% naik menjadi 95,37% tahun 2007. Ini berarti terdapat 95,37% penduduk usia SD yang masih sekolah. Pada usia SLTP (13-15 tahun) juga mengalami kenaikan dari sekitar 69,73% tahun 2004 menjadi 72,78% tahun 2007. Dan SLTA (16-18 tahun) 46,1% tahun 2004 turun menjadi 43,74% tahun 2007. Penurunan APS seiring dengan semakin tingginya kelompok umur memberi gambaran adanya pertimbangan sebagian masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi. Hal ini karena selain pertimbangan tingginya biaya, juga kebutuhan rumah tangga semakin meningkat sehingga anaknya cenderung diikutkan dalam kegiatan bekerja atau mencari kerja.

Tabel 2.26. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Sekolah (7-24 tahun) Tahun 2004 - 2007 di Kabupaten Pinrang

Kelompok Umur/ Jenis Kelamin		2004	2007
1	7-12	93,41	95,37
	Laki-Laki	92,29	95,62
	Perempuan	94,52	95,11
2	13-15	69,73	72,78
	Laki-Laki	72,51	68,38
	Perempuan	65,44	77,47
3	16-18	46,10	43,74
	Laki-Laki	49,90	47,12
	Perempuan	41,81	40,37
4	19-24	4,12	6,30
	Laki-Laki	3,22	4,11
	Perempuan	4,89	8,36

Sumber data :Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab Pinrang Tahun 2007

Angka Melek Huruf (AMH) . seseorang dikatakan melek huruf jika mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan lainnya. Huruf disini adalah misalnya huruf arab,bugis, makassar dan lain-lain. Kalau seseorang hanya dapat membaca atau menulis saja belum dianggap melek huruf. AMH penduduk usia 10 tahun keatas sekitar 89,55. Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan bila dibandingkan tahun 2004 yaitu sekitar 89,96.

Berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2004 selisih AMH laki-laki dan perempuan sekitar 6,67 poin sedangkan pada tahun 2007 sekitar 6,05 poin. Adanya penurunan selisih AMH laki-laki dan perempuan menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tanpa melihat status jenis kelamin.

Tabel 2.27. Angka Melek Huruf menurut Jenis Kelamin Tahun 2004 - 2007 di Kabupaten Pinrang

Jenis Kelamin		2004	2007
1	Laki-Laki	93,44	92,74
2	Perempuan	86,77	86,69
Total		89,86	89,55

Sumber data :Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab Pinrang Tahun 2007

Tabel 2.28. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2004 Dan 2007

Tingkat Pendidikan	2004			2007		
	L	P	L+P	L	P	L+P
1 Tdk / belum pernah sekolah/ tidak tamat SD	21,36	23,74	22,60	32,30	37,79	35,20
2 SD	36,18	38,29	37,28	31,89	30,72	31,28
3 SMTP	21,68	20,95	21,30	16,83	13,69	15,18
4 SMTA	17,50	14,13	15,74	14,70	13,86	14,25
5 D1,D2	0,10	0,58	0,35	0,19	0,60	0,40
6 D3/ Sarjana Muda	0,53	0,69	0,61	0,28	0,60	0,45
7 D4, S1, S2, S3	2,66	1,62	2,11	3,81	2,74	3,24

Sumber data :Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab Pinrang Tahun 2007

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan. Peningkatan tingkat pendidikan terjadi pada penduduk yang tamat D1, D2 dan D4,S1,S2, S3, yaitu dari sekitar 0,35% tahun 2004 menjadi 0,40% tahun 2007

#### 2.4.2. Kesehatan



Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat terwujud derajat kesehatan penduduk yang optimal. Untuk mencapai tujuan ini perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang dapat menunjang upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat secara mudah, murah dan merata.

Fasilitas Kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata di tambah lagi dengan misi nasional Menuju Indonesia sehat tahun 2010 . Dengan adanya upaya tersebut diharapkan agar tercapai derajat kesehatan yang baik. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain dengan memberikan penyuluhan agar masyarakat membiasakan diri untuk hidup sehat dan menyediakan beberapa fasilitas kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil.

Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pinrang yang terdiri dari berbagai pusat pelayanan kesehatan diantaranya adalah Rumah Sakit Umum Type C 1 buah dan beberapa puskesmas, puskesmas pembantu (PUSTU) dan BKIA yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pinrang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.29. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2007

No	Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan						
		Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Pustu	Klinik KB Program	Klinik KB non Program	Balai Pengobatan
1	Suppa	-	-	1	8	2	-	0
2	Mattiro Sompe	-	-	1	4	2	1	0
3	Lanrisang	-	-	1	4	2	-	0
4	Mattiro Bulu	-	-	1	4	2	1	0
5	Watang Sawitto	1	3	2	1	6	3	0
6	Tiroang	-	-	1	4	1	-	0
7	Paleteang	-	-	-	1	1	3	0
8	Patampanua	-	-	1	3	1	1	0
9	Cempa	-	-	1	5	2	-	0
10	Duampanua	-	-	2	7	5	2	0
11	Lembang	-	-	1	9	3	-	1
12	Batu Lappa	-	-	1	3	1	-	*
<i>Jumlah</i>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>53</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

Sumber data : <http://pinrangkab.go.id>

Tabel 2.30. Indikator Bidang Kesehatan Kab. Pinrang Tahun 2004 - 2007

Jenis Indikator	2004	2005	2006	2007
1 Kesehatan				
a. Angka Harapan Hidup	70,10	70,60	70,70	71,20
b. Indeks Kesehatan	75,2	76,0	76,2	77,0
2 Indikator Pendukung Bidang Kesehatan				
a. Rasio fasilitas terhadap 10 ribu penduduk	2,2	2,1	2,4	2,1
b. Rasio tenaga medis terhadap 10.000 penduduk	13,9	18,3	18,3	18,3
c. Rasio dokter terhadap fasilitas	0,5	0,5	0,5	0,5

Sumber data : IPM Kab. Pinrang 2007

### 2.4.3. Sosial

Tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dilingkungannya merupakan titik berat dalam memecahkan masalah-masalah sosial serta peningkatan penanggulangan kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang menurun dari tahun 2000 sebesar 45.800 orang atau sekitar 14,80% menjadi 23530 orang pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sangat besar, dan diharapkan kedepan jumlah ini dapat tereduksi lagi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. (lihat tabel 2.16)

Berbagai program dalam pengentasan kemiskinan, antara lain :

1. Program gerakan pengembangan kemiskinan
2. Program penyusunan STRAPAKIN
3. Program peningkatan keterampilan rumah tangga miskin
4. Program pendampingan teknologi dan modal usaha
5. Program revolusi agrobisnis dan agroindustri serta biocultur

### 2.4.4. Perkembangan Keolahragaan

Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan olahraga, termasuk diantaranya upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoka dengan memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda.

Berikut beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan keolahragaan :

1. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga :

Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat seperti :

- Kejuaraan sepak bola takraw, tenis meja, bola basket, futsal dan atletik
- Pelatihan wasit, senam sul-sel bangkit

Pembinaan generasi mudan dan club-club olahraga

Pembinaan pemuda dan olah raga serta pengadaan sarana olah raga

## 2. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga

### 2.4.5. Pemberdayaan Perempuan

Peran dan partisipasi perempuan dibarbagai bidang pembangunan secara aktif dalam seluruh tahapan mulai proses perencanaan sampai pada evaluasi sangat diperlukan dalam mengisi pembangunan yang dicanangkan. Berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Program pengarusutamaan gender dan anak dimaksudkan untuk memperkuat kelambagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak diberbagai bidang pembangunan.

Selain itu dalam rangka peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan diberbagai bidang kehidupan, dilakukan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pembinaan organisasi perempuan dan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender.

Dalam bidang politik partisipasi perempuan dapat dikatakan sangat minim, hal ini tergambar dalam keterwakilan perempuan di DPRD.

Tabel 2.31. Jumlah anggota DPRD Kab. Pinrang Tahun 2007

Nama Fraksi	Laki	Perempuan	Jumlah
1 Fraksi Partai Golkar	14		14
2 Fraksi Demokrasi Kebangsaan	6		6
3 Fraksi Persatuan Reformasi	5		5
5 Fraksi Keadilan Merdeka	5		5
4 Fraksi Amanat Persatuan	5		5
<b>Total</b>	<b>35</b>		<b>35</b>

Sumber data : BPS

### 2.4.6. Infrastruktur & Aksesibilitas Wilayah

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Usaha pembangunan yang makin meningkat tidak lepas dari adanya transportasi yang lancar.

Selain itu, dengan adanya transportasi dapat menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dari dan ke suatu daerah.

Panjang jalan di Kabupaten Pinrang 1.896,06 kmyang terdiri dari jalan negara 84,91 km, jalan propinsi 72,67 km, jalan kabupaten 764,72 km, sisanya adlah jalan inspeksi, desa, form road serta HPP yang masing-masing panjangnya 115,67 km, 450,02 km, 290,84 km, 117,23 km.

Tabel 2.32. Panjang Jalan Dalam Kabupaten Pinrang Dirinci Menurut Jenis Dan Tingkat Pemerintah Yang Berwenang, Keadaan Akhir Tahun 2007 ( Dalam Km )

Keadaan	Tingkat Pemerintah Yg berwenang			Inspeksi	Desa	Form Road	HPP	Jumlah
	Negara	Propinsi	Kab					
<b>1</b> Jenis Permukaan								
Diaspal	84,91	72,67	435,58					593,16
Kerikil/pengerasan			142,41					142,41
Tanah		27,75	163,59	115,67	450,02	290,84	117,23	1.137,25
Tidak diperinci		0,75	23,14					23,14
<b>Total</b>	<b>84,91</b>	<b>72,67</b>	<b>764,72</b>	<b>115,67</b>	<b>450,02</b>	<b>290,84</b>	<b>117,23</b>	<b>1.896,06</b>
<b>2</b> Kondisi Jalan								
Baik	69,35	11,23	89,72					170,30
Sedang	15,56	61,44	429,02	115,67	300,02	190,84	117,23	1.229,78
Rusak			196,48		150,0	100,0		446,48
Rusak Berat			26,36					26,36
Belum Tembus			23,14					23,14
<b>Total</b>	<b>84,91</b>	<b>72,67</b>	<b>764,72</b>	<b>115,67</b>	<b>450,02</b>	<b>290,84</b>	<b>117,23</b>	<b>1.896,06</b>
<b>3</b> Kelas Jalan								
Kelas I								
Kelas II	84,91							84,91
Kelas III		72,67						72,67
Kelas IV			17,54					17,54
Kelas V			747,18					747,18
Kelas VI				115,76	450,02	290,84		856,53
Kelas tdk diperinci							117,23	117,23
<b>Total</b>	<b>84,91</b>	<b>72,67</b>	<b>764,72</b>	<b>115,67</b>	<b>450,02</b>	<b>290,84</b>	<b>117,23</b>	<b>1.896,06</b>

Sumber data : BPS 2008

## 2.5. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah

Penyelenggaraan pemerintah berdasarkan azas desentralisasi akan efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

apabila didukung dengan tugas-tugas pembantuan dan dekonsentrasi dari pemerintah pusat dan daerah.

## **TAHUN 2008**

### **TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

#### **Dasar Hukum**

Sektoral dan Tugas Pembantuan adalah setiap penugasan dari Kementrian dan Lembaga Negara yang dilaksanakan oleh Lembaga yang dilaksanakan oleh Lembaga Vertikal dan penugasan kepada Kepala Daerah beserta dengan dananya yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dan Kepala Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas Sektoral dan Tugas Pembantuan sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

#### **Instansi Sektoral**

Pelaksanaan tugas sektoral Pemerintah yang telah melaporkan dan melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- Pengadilan Negeri
- Pengadilan Agama
- Kejaksaan Negeri
- Rumah Tahanan Negara
- Departemen Agama
- Badan Pusat Statistik
- Kantor Pertahanan
- Polres
- KPU

#### **Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2008 mendapatkan tugas pembantuan dari Instansi Pembantuan dari Instansi Pemberi Bantuan yaitu :

- Departemen Pertanian
- Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Kelautan Dan Perikanan
- Departemen Pekerjaan Umum
- Departemen Dalam Negeri
- Departemen Kesehatan
- Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- Departemen Kelautan Dan Perikanan
- Kementrian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Departemen Transmigrasi

#### **Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan**

Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantuan adalah :

- Balai Informasi Penyuluhan Kab. Pinrang
- Dinas Pendidikan Kab. Pinrang
- Dinas Eksplorasi Laut Dan Perikanan Kab. Pinrang

- Dinas Tata Ruang Pemukiman Dan Kebersihan Kab. Pinrang
- Dinas PSDA Kab. Pinrang
- Badan Perencanaan Daerah Kab. Pinrang
- Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Pinrang
- Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kab. Pinrang
- Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Pinrang
- Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Pinrang
- Rumah Sakit Umum Lasinrang Kab. Pinrang
- Dinas Kesehatan Kab, Pinrang
- Dinas Tenaga Kerja Kab. Pinrang
- Dinas Kependudukan Kab. Pinrang

Berkeenan dengan tugas pembantuan yang dapat diberikan meliputi seluruh kewenangan pemberi tugas pembantuan yang dapat dijabarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan Pemerintah yang terdapat dalam \keputusan \presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata kerja departemen untuk pemberian tugas pembantuan dari pemerintah Propinsi merupakan kewenangan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja dinas/badan dan lembaga teknis daerah.

#### **Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Perbantukan Kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Propinsi Atau Kepada \Desa Untuk Kabupaten**

Berkeenan dengan identifikasi terhadap penugasan , merupakan aktifitas merinci secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pembantuan yang menjadi acuan untuk mengelola urusan-urusan pemerintahan yang dapat ditugas perbantukan kepada desa masih sebatas pada tugas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun tidak disertai dengan

Sumber Daya Manusia sesuai Peraturan yang mengaturnya. Sumber Daya pengelola dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa beserta perangkatnya sehingga tercapai efektifitas kinerja yang maksimal.

Melihat fakta yang terjadi dalam kegiatan ini, tugas pembantuan semacam ini, sudah patut diperhitungkan untuk menjadi utusan Otonomi Daerah karena kemampuan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan kebutuhan pengelolaan masih sangat terbatas.

#### **Sumber Daya Dan Jumlah Anggaran**

Dana yang dipergunakan Kepala Desa / Kelurahan dalam melakukan pengelolaan PBB diperoleh dari sistem insentif sebesar 1,1% dari total penerimaan PBB setiap tahun serta bagi hasil pajak 10% yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.

#### **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada prinsipnya menggunakan sarana dan prasarana pemerintah Kabupaten yang tersedia baik pada tingkat Kabupaten maupun pada tingkat desa/kelurahan dalam rangka kelancaran tugas-tugas urusan pemerintahan , dan khusus sarana dan prasarana yang digunakan di Desa/Kelurahan masih belum memadai sehingga pada fase berikutnya akan diupayakan untuk lebih ditingkatkan melalui pengalokasian dana ADD dan bantuan lainnya yang dianggap perlu.

Berikut nama-nama SKPD setelah mengalami perubahan, sebagai berikut :

No.	Urusan Pemerintah Daerah		
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>		
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>		
	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	berubah menjadi	<i>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga</i>
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>		
	1 Dinas Kesehatan		Dinas Kesehatan
	2 RSUD Lasinrang		RSUD Lasinrang
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>		
	1 Dinas PU		Dinas PU
	3 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
<b>5</b>	<b>Penataan Ruang</b>		
	1 Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan	berubah menjadi	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran
<b>6</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>		
	1 Bappeda	berubah menjadi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Penanaman Modal
<b>7</b>	<b>Perhubungan</b>		
	1 Dinas Perhubungan	berubah menjadi	Dinas Perhubungan Informatika & Komunikasi
<b>8</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>		
	1 Dinas Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
	2 Bappedalda	berubah menjadi	Badan Lingkungan Hidup
<b>10</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>		
	1 Dinas Kependudukan	berubah menjadi	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
<b>12</b>	<b>Keluarga berencana dan keluarga sejahtera</b>		
	1 Badan keluarga berencana daerah	berubah menjadi	Badan keluarga berencana daerah dan Pemberdayaan Perempuan
<b>13</b>	<b>sosial</b>		
	1 Dinas Sosial	berubah menjadi	Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata
<b>14</b>	<b>Tenaga Kerja</b>		
	1 Dinas Tenaga Kerja	berubah menjadi	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
<b>15</b>	<b>Koperasi dan usaha kecil menengah</b>		
	1 dinas koperasi dan usaha kecil	berubah menjadi	dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah
<b>19</b>	<b>kesbang dan politik dalam negeri</b>		
	1 dinas kesbang linmas	baru	<i>Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</i>
	2 kantor ketentraman dan ketertiban	berubah menjadi	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>20</b>	<b>Pemerintahan umum</b>		
	1 DPRD		DPRD
	2 Kepala daerah dan wakil kepala daerah		Kepala daerah dan wakil kepala daerah
	3 sekretariat daerah		sekretariat daerah
	4 sekretariat DPRD		sekretariat DPRD
	5 dinas pendapatan daerah		dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah
	6 badan penelitian dan pengembangan		badan penelitian dan pengembangan
	7 Bawasda		Inspektorat Kab Pinrang
	8 kantor penghubung		kantor penghubung
	9 Kec. Watang sawito		Kec. Watang sawito
	10 Kec. Paletang		Kec. Paletang
	11 Kec. Tiroang		Kec. Tiroang
	12 Kec. Mattiro bulu		Kec. Mattiro bulu
	13 Kec. Suppa		Kec. Suppa
	14 Kec. Mattiro sompe		Kec. Mattiro sompe
	15 Kec. Lanrisang		Kec. Lanrisang
	16 Kec. Patampunua		Kec. Patampunua
	17 Kec. Duampunua		Kec. Duampunua
	18 Kec. Batulappa		Kec. Batulappa
	19 Kec. Cempa		Kec. Cempa
	20 Kec. Lembang		Kec. Lembang
<b>21</b>	<b>kepegawaian</b>		
	2 badan kepegawaian daerah		badan kepegawaian daerah
<b>22</b>	<b>pemberdayaan masyarakat dan desa</b>		
	1 kantor pemberdayaan masyarakat desa	berubah menjadi	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes
<b>24</b>	<b>kearsipan</b>		
	1 kantor arsip daerah	baru	<i>Kantor Perpustakaan dan arsip daerah</i>
<b>2</b>	<b>Urusan pilihan</b>		
<b>1</b>	<b>pertanian</b>		
	1 dinas pertanian dan peternakan	berubah menjadi	dinas pertanian dan peternakan
	2 kantor urusan ketahanan pangan		kantor ketahanan pangan
	3 balai informasi penyuluhan pertanian	berubah menjadi	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
<b>2</b>	<b>kehutanan</b>		
	1 dinas kehutanan dan perkebunan		dinas kehutanan dan perkebunan
<b>5</b>	<b>kelautan dan perikanan</b>		
	1 dinas perikanan dan eksplorasi laut	berubah menjadi	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>7</b>	<b>perindustrian</b>		
	1 dinas perindustrian perdagangan dan pariwisata	berubah menjadi	dinas perindustrian perdagangan energi dan Mineral

## **2.6. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan**

### **2.6.1. Profil Keuangan Daerah**

Penyusunan APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah no 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem pengelolaan keuangan mengalami perubahan yang cukup drastis. Praktek dan pelaksanaan dalam sistem keuangan daerah yang ada berubah dari soft budget control menjadi hard budget control. Soft budget control dimaksudkan bahwa apabila ada defisit dalam APBD maka pemerintah pusat akan berusaha menutupi. Sebaliknya hard budget control adalah apabila ada defisit dalam APBD, maka daerah akan menanggung dan berusaha untuk menutupi defisitnya sendiri. Perubahan bentuk anggaran berdampak untuk menutupi defisitnya sendiri. Perubahan bentuk anggaran berdampak pada perubahan prinsip anggaran yang dianut, yaitu balance budget menjadi anggaran defisit/anggaran.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Asas yang dianut dalam pengelolaan keuangan daerah : asas tahunan, universalitas, kesatuan dan spesialisitas, maupun asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah yang baik) meliputi :

Kuntabilitas berorientasi pada hasil

Profesionalitas

Proporsionalitas

Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara

Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemerikasaan yang bebas dan mandiri

APBD terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Sedangkan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.



## Ringkasan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Pinrang, Tahun Anggaran 2007 - 2009 (Rp.Juta)

URAIAN	Realisasi 2007	Realisasi 2008	APBD 2009	Pertum- buhan
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>22,711.6</b>	<b>22,980.7</b>	<b>22,863.7</b>	<b>0.3%</b>
- Hasil Pajak Daerah	2,749.2	3,716.5	3,320.9	9.9%
- Hasil Retribusi Daerah	11,371.9	9,418.5	10,466.6	-4.1%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,210.3	4,811.1	4,041.3	12.2%
- Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	5,380.2	5,034.7	5,034.9	-3.3%
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>401,847.4</b>	<b>436,305.4</b>	<b>432,447.6</b>	<b>3.7%</b>
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44,261.2	41,519.6	34,318.7	-11.9%
- Dana Alokasi Umum	315,934.1	343,004.8	348,915.9	5.1%
- Dana Alokasi Khusus	41,652.0	51,781.0	49,213.0	8.7%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5,044.1</b>	<b>16,217.1</b>	<b>20,500.0</b>	<b>101.6%</b>
- Pendapatan Hibah	-	-	-	-
- Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
- Dana Bagi Hasil pajak dari Prov.& Pemda lainnya	5,044.1	-	8,500.0	29.8%
- Bantuan Keuangan dari Prov. atau Pemda Lainnya	-	16,217.1	12,000.0	-
- Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>429,603.1</b>	<b>475,503.3</b>	<b>475,811.3</b>	<b>5.2%</b>
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>192,832.2</b>	<b>268,302.3</b>	<b>258,783.1</b>	<b>15.8%</b>
- Belanja Pegawai	161,794.9	208,034.6	224,327.2	17.7%
- Belanja Bunga	-	-	-	-
- Belanja Subsidi	-	-	-	-
- Belanja Hibah	-	23,938.4	2,350.0	-
- Belanja Bantuan Sosial	18,855.8	15,306.7	14,650.0	-11.9%
- Belanja Bagi Hasil kpd Prov./Kab/Kota & Pem. Desa	-	-	300.0	-
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov./Kab/Kota & Pem. Desa	10,276.1	17,583.7	15,655.8	23.4%
- Belanja Tidak Terduga	1,905.4	3,438.9	1,500.0	-11.3%
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>212,974.4</b>	<b>239,059.5</b>	<b>248,198.9</b>	<b>8.0%</b>
- Belanja Pegawai	29,864.7	30,545.2	39,916.0	15.6%
- Belanja Barang dan Jasa	62,061.4	69,929.3	71,405.7	7.3%
- Belanja Modal	121,048.4	138,585.0	136,877.2	6.3%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>405,806.6</b>	<b>507,361.8</b>	<b>506,982.0</b>	<b>11.8%</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>23,796.5</b>	<b>(31,858.5)</b>	<b>(31,170.7)</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>48,803.9</b>	<b>63,617.0</b>	<b>35,170.7</b>	<b>-15.1%</b>
- Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	46,876.3	63,413.5	33,552.7	-15.4%
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	409.0	119.2	-	-100.0%
- Penerimaan Piutang Daerah	1,518.6	84.2	1,618.0	3.2%
<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>48,803.9</b>	<b>63,617.0</b>	<b>35,170.7</b>	<b>-15.1%</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>8,982.4</b>	<b>4,691.8</b>	<b>4,000.0</b>	<b>-33.3%</b>
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,000.0	3,000.0	1,500.0	-38.8%
- Pembayaran Pokok Utang	4,472.9	1,391.8	2,500.0	-25.2%
- Pemberian Pinjaman Daerah	509.5	300.0	-	-100.0%
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>8,982.4</b>	<b>4,691.8</b>	<b>4,000.0</b>	<b>-33.3%</b>
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>39,821.4</b>	<b>58,925.2</b>	<b>31,170.7</b>	<b>-11.5%</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>63,617.94</b>	<b>27,066.73</b>	<b>-</b>	<b>-100.0%</b>

**Ringkasan Alokasi APBD (dalam %)**  
**Kabupaten Pinrang, Tahun Anggaran 2007 - 2009**

URAIAN	Realisasi 2007	Realisasi 2008	APBD 2009	Pertum- buan
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.3%</b>	<b>4.8%</b>	<b>4.8%</b>	<b>-4.66%</b>
- Hasil Pajak Daerah	0.6%	0.8%	0.7%	4.43%
- Hasil Retribusi Daerah	2.6%	2.0%	2.2%	-8.84%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.7%	1.0%	0.8%	6.61%
- Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	1.3%	1.1%	1.1%	-8.08%
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>93.5%</b>	<b>91.8%</b>	<b>90.9%</b>	<b>-1.4%</b>
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10.3%	8.7%	7.2%	-16.33%
- Dana Alokasi Umum	73.5%	72.1%	73.3%	-0.14%
- Dana Alokasi Khusus	9.7%	10.9%	10.3%	3.29%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.2%</b>	<b>3.4%</b>	<b>4.3%</b>	<b>91.56%</b>
- Pendapatan Hibah	0.0%	0.0%	0.0%	
- Pendapatan Dana Darurat	0.0%	0.0%	0.0%	
- Dana Bagi Hasil pajak dari Prov.& Pemda lainnya	1.2%	0.0%	1.8%	23.35%
- Bantuan Keuangan dari Prov. atau Pemda Lainnya	0.0%	3.4%	2.5%	
- Pendapatan Lainnya	0.0%	0.0%	0.0%	
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.00%</b>
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>47.5%</b>	<b>52.9%</b>	<b>51.0%</b>	<b>3.64%</b>
- Belanja Pegawai	39.9%	41.0%	44.2%	5.35%
- Belanja Bunga	0.0%	0.0%	0.0%	
- Belanja Subsidi	0.0%	0.0%	0.0%	
- Belanja Hibah	0.0%	4.7%	0.5%	
- Belanja Bantuan Sosial	4.6%	3.0%	2.9%	-21.14%
- Belanja Bagi Hasil kpd Prov./Kab/Kota & Pem. Desa	0.0%	0.0%	0.1%	
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov./Kab/Kota & Pem. Desa	2.5%	3.5%	3.1%	10.43%
- Belanja Tidak Terduga	0.5%	0.7%	0.3%	-20.62%
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>52.5%</b>	<b>47.1%</b>	<b>49.0%</b>	<b>-3.42%</b>
- Belanja Pegawai	7.4%	6.0%	7.9%	3.43%
- Belanja Barang dan Jasa	15.3%	13.8%	14.1%	-4.03%
- Belanja Modal	29.8%	27.3%	27.0%	-4.86%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	-	-	-	

Secara keseluruhan pendapatan meningkat sebesar 5,24% selama kurun waktu 2007-2009. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan yang sangat besar sekitar 91% dari total pendapatan sisanya adalah bersumber dari PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan proporsi 5% dan 4%.

Pertumbuhan dari 3 sumber pendapatan tersebut mengalami peningkatan yang signifikan adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu sebesar 91,56% yang disebabkan naiknya dana bagi hasil pajak dari prov dan pemda lainnya.

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Proporsi PAD terhadap keseluruhan APBD sekitar 5%, walaupun demikian perkembangan penerimaan dari PAD ini memperlihatkan bahwa kinerja penerimaan cukup menggembirakan. Dari tahun 2007 - 2009 PAD mengalami pertumbuhan sebesar 0,33%. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan dari kenaikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu sebesar 12,2%

Pertumbuhan Pajak daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu sebesar 9,91% hal ini lebih banyak disebabkan karena efektifitas pemungutan pajak semakin ditingkatkan. Dilain pihak retribusi daerah mengalami penurunan 4,6% bahkan penerimaan retribusi sangat besar

pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp.11,4 milyar atau 2,6% dari total pendapatan.

**b. Dana Perimbangan**

Rata-rata penerimaan dari dana perimbangan sebesar 91% dari total pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kewajiban pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, sangat besar ketergantungannya terhadap dana perimbangan. 73% dari total pendapatan adalah bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum). Kenaikan DAU setiap tahun rata-rata sebesar 5%. Sedangkan Dana Alokasi Khusus pertumbuhannya lebih besar dari DAU yakni sekitar 8%, proporsi DAK dari total pendapatan sekitar 10%

**c. Lain-lain pendapatan yang sah**

Bantuan keuangan dari provinsi dan daerah lainnya, memperlihatkan kenaikan yang sangat besar. Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp.12 milyar, dan diharapkan dapat terus bertumbuh pada tahun-tahun yang akan datang. Rata-rata pertumbuhan sangat besar, hampir 4 kali lipat dari tahun 2004.

Berikut gambaran penyerapan pelaksanaan APBD selama kurun waktu 2007 - 2009, sebagai berikut berdasarkan urusan

**RINGKASAN BELANJA, MENURUT URU 2007**

No.	Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Tidak Langsung (dim Rp.juta)			Belanja Langsung (dalam Rp. Juta)				TOTAL BELANJA
		Pegawai	Lainnya	TOTAL	Pegawai	Brg & jasa	Modal	TOTAL	
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>	<b>151,807.94</b>	<b>31,037.22</b>	<b>182,845.16</b>	<b>27,029.14</b>	<b>56,685.49</b>	<b>110,614.94</b>	<b>194,329.57</b>	<b>377,174.73</b>
1	<b>Pendidikan</b>	<b>94,889.20</b>	-	<b>94,889.20</b>	<b>5,253.31</b>	<b>6,151.68</b>	<b>29,203.65</b>	<b>40,608.65</b>	<b>135,497.84</b>
	1:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	94,889.20	-	94,889.20	5,253.31	6,151.68	29,203.65	40,608.65	135,497.84
2	<b>Kesehatan</b>	<b>12,556.14</b>	-	<b>12,556.14</b>	<b>6,780.35</b>	<b>10,830.35</b>	<b>10,908.06</b>	<b>28,518.76</b>	<b>41,074.90</b>
	1:Dinas Kesehatan	10,777.85	-	10,777.85	1,695.58	2,686.66	10,044.70	14,476.94	25,204.79
	2:RSU Lasinrang	1,778.29	-	1,778.29	5,084.77	8,143.69	863.36	14,091.82	15,870.11
3	<b>Pekerjaan Umum</b>	<b>5,479.77</b>	-	<b>5,479.77</b>	<b>2,082.47</b>	<b>1,541.16</b>	<b>48,545.47</b>	<b>52,169.10</b>	<b>57,648.87</b>
	1:Dinas PU	1,168.63	-	1,168.63	1,076.41	534.31	41,601.58	43,212.31	44,380.94
	3:Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	4,311.14	-	4,311.14	1,006.06	1,006.85	6,943.89	8,356.79	13,267.93
5	<b>Penataan Ruang</b>	<b>1,300.56</b>	-	<b>1,300.56</b>	<b>1,124.67</b>	<b>1,170.93</b>	<b>417.00</b>	<b>2,712.60</b>	<b>4,013.16</b>
	1:Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan	1,300.56	-	1,300.56	1,124.67	1,170.93	417.00	2,712.60	4,013.16
6	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	<b>1,076.24</b>	-	<b>1,076.24</b>	<b>567.69</b>	<b>2,430.73</b>	<b>33.25</b>	<b>3,031.67</b>	<b>4,107.91</b>
	1:Bappeda	1,076.24	-	1,076.24	567.69	2,430.73	33.25	3,031.67	4,107.91
7	<b>Perhubungan</b>	<b>1,032.59</b>	-	<b>1,032.59</b>	<b>346.99</b>	<b>988.34</b>	<b>292.47</b>	<b>1,627.80</b>	<b>2,660.39</b>
	1:Dinas Perhubungan	1,032.59	-	1,032.59	346.99	988.34	292.47	1,627.80	2,660.39
8	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>710.54</b>	-	<b>710.54</b>	<b>280.29</b>	<b>596.88</b>	<b>844.62</b>	<b>1,721.79</b>	<b>2,432.33</b>
	2:Bappedalda	710.54	-	710.54	280.29	596.88	844.62	1,721.79	2,432.33
10	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	<b>740.77</b>	-	<b>740.77</b>	<b>504.08</b>	<b>554.55</b>	<b>230.40</b>	<b>1,289.02</b>	<b>2,029.79</b>
	1:Dinas Kependudukan	740.77	-	740.77	504.08	554.55	230.40	1,289.02	2,029.79
12	<b>Keluarga berencana dan keluarga sejahtera</b>	<b>2,387.79</b>	-	<b>2,387.79</b>	<b>409.25</b>	<b>739.25</b>	<b>82.81</b>	<b>1,231.31</b>	<b>3,619.10</b>
	1:Badan keluarga berencana daerah	2,387.79	-	2,387.79	409.25	739.25	82.81	1,231.31	3,619.10
13	<b>sosial</b>	<b>908.39</b>	-	<b>908.39</b>	<b>128.18</b>	<b>447.57</b>	<b>232.16</b>	<b>807.91</b>	<b>1,716.30</b>
	1:Dinas Sosial	908.39	-	908.39	128.18	447.57	232.16	807.91	1,716.30
14	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>733.92</b>	-	<b>733.92</b>	<b>322.84</b>	<b>576.99</b>	<b>194.34</b>	<b>1,094.16</b>	<b>1,828.08</b>
	1:Dinas Tenaga Kerja	733.92	-	733.92	322.84	576.99	194.34	1,094.16	1,828.08
15	<b>Koperasi dan usaha kecil menengah</b>	<b>1,061.66</b>	-	<b>1,061.66</b>	<b>180.30</b>	<b>391.84</b>	<b>49.58</b>	<b>621.77</b>	<b>1,683.38</b>
	1:dinas koperasi dan usaha kecil	1,061.66	-	1,061.66	180.30	391.84	49.58	621.77	1,683.38
19	<b>kesbang dan politik dalam negeri</b>	<b>1,062.67</b>	-	<b>1,062.67</b>	<b>568.95</b>	<b>910.24</b>	<b>340.29</b>	<b>1,819.48</b>	<b>2,882.15</b>
	1:dinas kesbang linmas	-	-	-	-	-	-	-	-
	2:kantor ketentrangan dan ketertiban	1,062.67	-	1,062.67	568.95	910.24	340.29	1,819.48	2,882.15
20	<b>Pemerintahan umum</b>	<b>26,266.03</b>	<b>31,037.22</b>	<b>57,303.25</b>	<b>6,212.26</b>	<b>26,448.71</b>	<b>18,706.89</b>	<b>51,367.85</b>	<b>108,671.10</b>
	1: DPRD	5,085.19	-	5,085.19	-	-	-	-	5,085.19
	2: Kepala daerah dan wakil kepala daerah	415.09	-	415.09	-	-	-	-	415.09
	3: sekretariat daerah	6,159.95	31,037.22	37,197.17	3,687.61	15,409.35	16,703.54	35,800.49	71,997.67
	4: sekretariat dprd	827.11	-	827.11	1,332.33	7,215.44	706.61	9,254.38	10,081.50
	5: dinas pendapatan daerah	2,069.10	-	2,069.10	476.92	1,760.19	1,087.94	3,325.05	5,394.16
	6: badan penelitian dan pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	7: bawasda	1,166.69	-	1,166.69	291.76	872.30	54.56	1,218.61	2,385.30
	8: kantor penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-
	9: Kec. Watang sawito	2,155.33	-	2,155.33	38.46	91.21	13.82	143.50	2,298.83
	10: Kec. Paletang	1,837.74	-	1,837.74	14.58	134.31	1.05	149.93	1,987.67
	11: Kec. Tiroang	1,091.51	-	1,091.51	38.47	96.47	13.82	148.76	1,240.27
	12: Kec. Mattiro bulu	906.04	-	906.04	38.47	97.70	13.02	149.18	1,055.23
	13: Kec. Suppa	644.01	-	644.01	35.87	99.55	13.82	149.24	793.25
	14: Kec. Mattiro sompe	573.31	-	573.31	38.46	97.42	13.82	149.71	723.01
	15: Kec. Lanriang	378.60	-	378.60	38.47	96.47	13.82	148.76	527.35
	16: Kec. Patampunua	866.35	-	866.35	38.47	97.72	13.82	150.00	1,016.36
	17: Kec. Ouampunua	829.55	-	829.55	37.91	97.71	13.82	149.44	978.99
	18: Kec. Batulappa	265.21	-	265.21	38.47	95.00	15.82	149.29	414.50
	19: Kec. Cempa	414.89	-	414.89	29.47	95.69	13.80	138.95	553.84
	20: Kec. Lembang	580.34	-	580.34	36.56	92.19	13.82	142.57	722.90
21	<b>kepegawaian</b>	<b>1,111.47</b>	-	<b>1,111.47</b>	<b>1,459.54</b>	<b>2,149.81</b>	<b>239.96</b>	<b>3,849.31</b>	<b>4,960.78</b>
	2: badan kepegawaian daerah	1,111.47	-	1,111.47	1,459.54	2,149.81	239.96	3,849.31	4,960.78
22	<b>pemberdayaan masyarakat dan desa</b>	<b>490.21</b>	-	<b>490.21</b>	<b>807.99</b>	<b>756.47</b>	<b>294.00</b>	<b>1,858.46</b>	<b>2,348.67</b>
	1: kantor pemberdayaan masy desa	490.21	-	490.21	807.99	756.47	294.00	1,858.46	2,348.67
24	<b>kearsipan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	1: kantor arsip daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Urusan pilihan</b>	<b>9,987.01</b>	-	<b>9,987.01</b>	<b>2,835.56</b>	<b>5,375.87</b>	<b>10,433.45</b>	<b>18,644.87</b>	<b>28,631.89</b>
1	<b>pertanian</b>	<b>5,655.93</b>	-	<b>5,655.93</b>	<b>1,436.84</b>	<b>2,604.71</b>	<b>5,345.98</b>	<b>9,387.52</b>	<b>15,043.45</b>
	1: dinas pertanian dan peternakan	1,530.34	-	1,530.34	839.46	1,808.98	5,207.47	7,855.90	9,386.25
	2: kantor urusan ketahanan pangan	537.68	-	537.68	243.44	312.01	27.00	582.45	1,120.13
	3: balai informasi penyuluhan pertanian	3,587.90	-	3,587.90	353.95	483.72	111.51	949.17	4,537.08
2	<b>kehutanan</b>	<b>2,155.91</b>	-	<b>2,155.91</b>	<b>817.45</b>	<b>775.58</b>	<b>258.46</b>	<b>1,851.50</b>	<b>4,007.41</b>
	1: dinas kehutanan dan perkebunan	2,155.91	-	2,155.91	817.45	775.58	258.46	1,851.50	4,007.41
5	<b>kelautan dan perikanan</b>	<b>1,269.45</b>	-	<b>1,269.45</b>	<b>236.35</b>	<b>1,403.79</b>	<b>3,383.94</b>	<b>5,024.08</b>	<b>6,293.53</b>
	1: dinas perikanan dan eksplorasi laut	1,269.45	-	1,269.45	236.35	1,403.79	3,383.94	5,024.08	6,293.53
7	<b>perindustrian</b>	<b>905.73</b>	-	<b>905.73</b>	<b>344.93</b>	<b>591.78</b>	<b>1,445.07</b>	<b>2,381.78</b>	<b>3,287.50</b>
	1: dinas perindustrian perdagangan dan pariwisata	905.73	-	905.73	344.93	591.78	1,445.07	2,381.78	3,287.50
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>161,794.95</b>	<b>31,037.22</b>	<b>192,832.17</b>	<b>29,864.70</b>	<b>62,061.36</b>	<b>121,048.39</b>	<b>212,974.45</b>	<b>405,806.62</b>

## RINGKASAN BELANJA, MENURUT URUSAN

2008

No.	Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Tidak Langsung (dlm Rp.juta)			Belanja Langsung (dalam Rp. Juta)				TOTAL BELANJA
		Pegawai	lainnya	TOTAL	Pegawai	Brig & jasa	Modal	TOTAL	
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>	<b>195,369.25</b>	<b>60,267.73</b>	<b>255,636.99</b>	<b>27,130.99</b>	<b>64,706.53</b>	<b>124,457.24</b>	<b>216,294.75</b>	<b>471,931.74</b>
1	<b>Pendidikan</b>	<b>121,300.00</b>	-	<b>121,300.00</b>	<b>5,344.28</b>	<b>5,951.08</b>	<b>32,610.58</b>	<b>43,905.94</b>	<b>165,205.94</b>
	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	121,300.00	-	121,300.00	5,344.28	5,951.08	32,610.58	43,905.94	165,205.94
2	<b>Kesehatan</b>	<b>20,209.75</b>	-	<b>20,209.75</b>	<b>4,271.76</b>	<b>13,749.99</b>	<b>11,401.25</b>	<b>29,422.99</b>	<b>49,632.74</b>
	1 Dinas Kesehatan	13,636.29	-	13,636.29	2,062.22	5,435.18	9,718.07	17,215.47	30,851.76
	2 RSU Lasinrang	6,573.46	-	6,573.46	2,209.54	8,314.81	1,683.18	12,207.52	18,780.98
3	<b>Pekerjaan Umum</b>	<b>6,273.84</b>	-	<b>6,273.84</b>	<b>783.78</b>	<b>1,355.04</b>	<b>66,724.71</b>	<b>68,863.53</b>	<b>75,137.37</b>
	1 Dinas PU	1,577.74	-	1,577.74	189.89	464.63	57,946.16	58,600.68	60,178.42
	3 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	4,696.11	-	4,696.11	593.90	890.40	8,778.55	10,762.85	14,958.95
5	<b>Penataan Ruang</b>	<b>1,624.47</b>	-	<b>1,624.47</b>	<b>1,262.79</b>	<b>1,362.70</b>	<b>737.45</b>	<b>3,362.93</b>	<b>4,987.40</b>
	1 Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan	1,624.47	-	1,624.47	1,262.79	1,362.70	737.45	3,362.93	4,987.40
6	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	<b>1,313.65</b>	-	<b>1,313.65</b>	<b>1,143.96</b>	<b>2,634.42</b>	<b>56.19</b>	<b>3,834.56</b>	<b>5,148.21</b>
	1 Bappeda	1,313.65	-	1,313.65	1,143.96	2,634.42	56.19	3,834.56	5,148.21
7	<b>Perhubungan</b>	<b>1,455.68</b>	-	<b>1,455.68</b>	<b>271.57</b>	<b>1,123.67</b>	<b>275.26</b>	<b>1,670.51</b>	<b>3,126.18</b>
	1 Dinas Perhubungan	1,455.68	-	1,455.68	271.57	1,123.67	275.26	1,670.51	3,126.18
8	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>893.22</b>	-	<b>893.22</b>	<b>326.84</b>	<b>743.87</b>	<b>1,005.69</b>	<b>2,076.39</b>	<b>2,969.62</b>
	2 Bappedalda	893.22	-	893.22	326.84	743.87	1,005.69	2,076.39	2,969.62
10	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	<b>1,022.30</b>	-	<b>1,022.30</b>	<b>1,755.54</b>	<b>731.74</b>	<b>426.99</b>	<b>2,914.27</b>	<b>3,936.56</b>
	1 Dinas Kependudukan	1,022.30	-	1,022.30	1,755.54	731.74	426.99	2,914.27	3,936.56
12	<b>Keluarga berencana dan keluarga sejahtera</b>	<b>2,775.57</b>	-	<b>2,775.57</b>	<b>417.29</b>	<b>672.95</b>	<b>1,132.71</b>	<b>2,222.95</b>	<b>4,998.52</b>
	1 Badan keluarga berencana daerah	2,775.57	-	2,775.57	417.29	672.95	1,132.71	2,222.95	4,998.52
13	<b>sosial</b>	<b>1,263.91</b>	-	<b>1,263.91</b>	<b>230.23</b>	<b>592.02</b>	<b>222.54</b>	<b>1,044.79</b>	<b>2,308.69</b>
	1 Dinas Sosial	1,263.91	-	1,263.91	230.23	592.02	222.54	1,044.79	2,308.69
14	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>880.73</b>	-	<b>880.73</b>	<b>342.06</b>	<b>863.51</b>	<b>84.20</b>	<b>1,289.76</b>	<b>2,170.49</b>
	1 Dinas Tenaga Kerja	880.73	-	880.73	342.06	863.51	84.20	1,289.76	2,170.49
15	<b>Koperasi dan usaha kecil menengah</b>	<b>1,226.57</b>	-	<b>1,226.57</b>	<b>142.37</b>	<b>678.67</b>	<b>74.85</b>	<b>895.89</b>	<b>2,122.46</b>
	1 dinas koperasi dan usaha kecil	1,226.57	-	1,226.57	142.37	678.67	74.85	895.89	2,122.46
19	<b>kesbang dan politik dalam negeri</b>	<b>2,140.09</b>	-	<b>2,140.09</b>	<b>556.68</b>	<b>1,232.92</b>	<b>44.53</b>	<b>1,834.13</b>	<b>3,974.22</b>
	1 dinas kesbang linmas	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 kantor ketentraman dan ketertiban	2,140.09	-	2,140.09	556.68	1,232.92	44.53	1,834.13	3,974.22
20	<b>Pemerintahan umum</b>	<b>30,955.84</b>	<b>60,267.73</b>	<b>91,223.57</b>	<b>8,145.04</b>	<b>29,673.76</b>	<b>9,049.09</b>	<b>46,867.89</b>	<b>138,091.46</b>
	1 DPRD	5,166.48	-	5,166.48	-	-	-	-	5,166.48
	2 Kepala daerah dan wakil kepala daerah	376.59	-	376.59	0.00	-	-	0.00	376.59
	3 sekretariat daerah	7,862.40	60,267.73	68,130.13	3,059.46	17,248.45	6,879.62	27,187.52	95,317.65
	4 sekretariat DPRD	957.52	-	957.52	2,640.82	9,228.63	1,244.41	13,113.86	14,071.38
	5 dinas pendapatan daerah	2,268.64	-	2,268.64	582.27	1,329.66	605.81	2,517.75	4,786.38
	6 badan penelitian dan pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 bawasda	1,372.27	-	1,372.27	1,345.10	222.85	78.86	1,646.80	3,019.07
	8 kantor penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 Kec. Watang sawito	2,390.82	-	2,390.82	44.80	132.75	18.40	195.95	2,586.76
	10 Kec. Paletang	2,228.80	-	2,228.80	16.89	181.41	0.88	199.18	2,427.97
	11 Kec. Tiroang	1,415.86	-	1,415.86	53.51	132.61	18.62	204.75	1,620.61
	12 Kec. Mattiro bulu	1,146.14	-	1,146.14	47.83	144.79	11.45	204.08	1,350.22
	13 Kec. Suppa	773.22	-	773.22	41.63	125.86	35.10	202.58	975.80
	14 Kec. Mattiro sompe	754.07	-	754.07	41.83	133.05	23.07	197.95	952.02
	15 Kec. Lanrisang	583.44	-	583.44	53.25	126.85	24.80	204.90	788.34
	16 Kec. Patampanua	1,017.70	-	1,017.70	43.40	131.60	24.94	199.94	1,217.64
	17 Kec. Duampanua	957.83	-	957.83	50.96	135.41	17.00	203.37	1,161.20
	18 Kec. Batulappa	324.40	-	324.40	43.00	139.88	15.80	198.69	523.08
	19 Kec. Cempa	556.78	-	556.78	36.25	128.71	28.82	193.78	750.56
	20 Kec. Lembang	802.91	-	802.91	44.05	131.23	21.52	196.80	999.72
21	<b>kepegawaian</b>	<b>1,351.13</b>	-	<b>1,351.13</b>	<b>1,349.22</b>	<b>2,341.76</b>	<b>118.64</b>	<b>3,809.62</b>	<b>5,160.75</b>
	2 badan kepegawaian daerah	1,351.13	-	1,351.13	1,349.22	2,341.76	118.64	3,809.62	5,160.75
22	<b>pemberdayaan masyarakat dan desa</b>	<b>682.52</b>	-	<b>682.52</b>	<b>787.59</b>	<b>998.47</b>	<b>492.56</b>	<b>2,278.62</b>	<b>2,961.14</b>
	1 kantor pemberdayaan masy desa	682.52	-	682.52	787.59	998.47	492.56	2,278.62	2,961.14
24	<b>kearsipan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 kantor arsip daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Urusan pilihan</b>	<b>12,665.33</b>	-	<b>12,665.33</b>	<b>3,414.22</b>	<b>5,222.74</b>	<b>14,127.75</b>	<b>22,764.70</b>	<b>35,430.04</b>
1	<b>pertanian</b>	<b>7,310.71</b>	-	<b>7,310.71</b>	<b>1,226.02</b>	<b>2,850.26</b>	<b>7,984.78</b>	<b>12,061.06</b>	<b>19,371.76</b>
	1 dinas pertanian dan peternakan	2,069.36	-	2,069.36	631.24	1,994.07	7,807.40	10,432.71	12,502.07
	2 kantor urusan ketahanan pangan	680.15	-	680.15	240.34	522.94	18.00	781.28	1,461.43
	3 balai informasi penyuluhan pertanian	4,561.20	-	4,561.20	354.44	333.25	159.38	847.07	5,408.27
2	<b>kehutanan</b>	<b>2,586.96</b>	-	<b>2,586.96</b>	<b>577.24</b>	<b>1,186.25</b>	<b>1,016.29</b>	<b>2,779.77</b>	<b>5,366.73</b>
	1 dinas kehutanan dan perkebunan	2,586.96	-	2,586.96	577.24	1,186.25	1,016.29	2,779.77	5,366.73
5	<b>kelayatan dan perikanan</b>	<b>1,636.98</b>	-	<b>1,636.98</b>	<b>1,252.53</b>	<b>438.03</b>	<b>3,323.74</b>	<b>5,014.30</b>	<b>6,651.28</b>
	1 dinas perikanan dan eksplorasi laut	1,636.98	-	1,636.98	1,252.53	438.03	3,323.74	5,014.30	6,651.28
7	<b>perindustrian</b>	<b>1,130.69</b>	-	<b>1,130.69</b>	<b>358.43</b>	<b>748.21</b>	<b>1,802.94</b>	<b>2,909.58</b>	<b>4,040.27</b>
	1 dinas perindustrian perdagangan dan pariwisata	1,130.69	-	1,130.69	358.43	748.21	1,802.94	2,909.58	4,040.27
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>208,034.58</b>	<b>60,267.73</b>	<b>268,302.32</b>	<b>30,545.21</b>	<b>69,929.26</b>	<b>138,584.98</b>	<b>239,059.46</b>	<b>507,361.78</b>

No.	Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Tidak Langsung (dlm Rp. juta)			Belanja Langsung (dalam Rp. juta)				TOTAL BELANJA
		Pegawai	Lainnya	TOTAL	Pegawai	Brg & jasa	Modal	TOTAL	
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>	<b>208,313.02</b>	<b>34,455.84</b>	<b>242,768.86</b>	<b>36,338.56</b>	<b>64,537.75</b>	<b>124,620.87</b>	<b>225,497.19</b>	<b>468,266.05</b>
1	Pendidikan	127,359.45	-	127,359.45	12,836.60	4,245.64	33,333.22	50,415.46	177,774.91
	1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	127,359.45	-	127,359.45	12,836.60	4,245.64	33,333.22	50,415.46	177,774.91
2	Kesehatan	22,568.28	-	22,568.28	4,559.52	11,155.37	9,159.37	24,874.27	47,442.54
	1 Dinas Kesehatan	15,284.02	-	15,284.02	3,422.55	3,322.46	7,556.02	14,301.03	29,585.05
	2 RSU Lasinrang	7,284.25	-	7,284.25	1,136.98	7,832.91	1,603.35	10,573.24	17,857.49
3	Pekerjaan Umum	6,852.65	-	6,852.65	2,476.13	2,103.98	67,358.89	71,939.00	78,791.65
	1 Dinas PU	1,754.05	-	1,754.05	1,427.85	838.65	59,067.50	61,334.00	63,088.05
	3 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	5,098.60	-	5,098.60	1,048.28	1,265.33	8,291.39	10,605.00	15,703.60
5	Penataan Ruang	2,006.95	-	2,006.95	1,350.25	1,284.21	908.93	3,543.39	5,550.33
	1 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran	2,006.95	-	2,006.95	1,350.25	1,284.21	908.93	3,543.39	5,550.33
6	Perencanaan Pembangunan	1,480.14	-	1,480.14	654.95	4,214.97	718.49	5,588.41	7,068.56
	1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Penanaman Modal	1,480.14	-	1,480.14	654.95	4,214.97	718.49	5,588.41	7,068.56
7	Perhubungan	1,635.47	-	1,635.47	197.39	1,122.43	349.90	1,669.72	3,305.18
	1 Dinas Perhubungan Informatika & Komunikasi	1,635.47	-	1,635.47	197.39	1,122.43	349.90	1,669.72	3,305.18
8	Lingkungan Hidup	1,031.75	-	1,031.75	288.15	845.07	1,221.33	2,354.55	3,386.30
	2 Badan Lingkungan Hidup	1,031.75	-	1,031.75	288.15	845.07	1,221.33	2,354.55	3,386.30
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	1,180.89	-	1,180.89	1,210.39	883.79	154.80	2,248.98	3,429.88
	1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1,180.89	-	1,180.89	1,210.39	883.79	154.80	2,248.98	3,429.88
12	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	3,054.48	-	3,054.48	503.23	751.14	950.70	2,205.07	5,259.55
	1 Badan keluarga berencana daerah dan Pemberdayaan Perempuan	3,054.48	-	3,054.48	503.23	751.14	950.70	2,205.07	5,259.55
13	sosial	1,457.12	-	1,457.12	172.42	1,276.40	214.36	1,663.17	3,120.29
	1 Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata	1,457.12	-	1,457.12	172.42	1,276.40	214.36	1,663.17	3,120.29
14	Tenaga Kerja	957.70	-	957.70	1,095.12	1,069.69	150.50	2,315.30	3,273.00
	1 Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi	957.70	-	957.70	1,095.12	1,069.69	150.50	2,315.30	3,273.00
15	Koperasi dan usaha kecil menengah	1,371.87	-	1,371.87	279.86	542.14	178.00	1,000.00	2,371.87
	1 dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah	1,371.87	-	1,371.87	279.86	542.14	178.00	1,000.00	2,371.87
19	kesbang dan politik dalam negeri	2,333.43	-	2,333.43	554.76	1,789.68	262.93	2,607.38	4,940.81
	1 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	261.72	628.37	-	890.09	890.09
	2 Satuan Polisi Pamong Praja	2,333.43	-	2,333.43	293.04	1,161.32	262.93	1,717.29	4,050.73
20	Pemerintahan umum	32,773.85	34,455.84	67,229.68	9,029.07	29,140.26	7,650.46	45,819.79	113,049.47
	1 DPRD	5,936.04	-	5,936.04	-	-	-	-	5,936.04
	2 Kepala daerah dan wakil kepala daerah	421.00	-	421.00	-	-	-	-	421.00
	3 sekretariat daerah	3,768.55	-	3,768.55	2,369.64	14,246.46	3,993.02	20,609.12	24,377.67
	4 sekretariat DPRD	1,103.85	-	1,103.85	2,475.80	10,824.01	1,102.50	14,402.31	15,506.16
	5 dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah	5,518.33	34,455.84	39,974.17	2,375.88	2,034.24	712.00	5,122.12	45,096.29
	6 badan penelitian dan pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 inspektorat Kab Pinrang	1,556.49	-	1,556.49	1,246.90	382.53	136.58	1,766.00	3,322.49
	8 kantor penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 Kec. Watang sawito	2,746.36	-	2,746.36	43.06	138.54	18.40	200.00	2,946.36
	10 Kec. Paleteang	2,422.40	-	2,422.40	40.66	151.77	257.58	450.00	2,872.40
	11 Kec. Tiroang	1,638.29	-	1,638.29	51.08	132.95	171.18	355.20	1,993.49
	12 Kec. Mattiro bulu	1,279.17	-	1,279.17	48.03	127.97	24.00	200.00	1,479.17
	13 Kec. Suppa	811.51	-	811.51	43.05	144.05	12.90	200.00	1,011.51
	14 Kec. Mattiro sompe	874.75	-	874.75	48.07	139.58	12.35	200.00	1,074.75
	15 Kec. Lanrisang	624.07	-	624.07	52.52	135.01	154.12	341.65	965.71
	16 Kec. Patampunua	1,094.17	-	1,094.17	52.15	124.46	362.79	539.40	1,633.57
	17 Kec. Duampunua	1,045.12	-	1,045.12	49.80	131.70	109.95	291.45	1,396.57
	18 Kec. Batulappa	342.69	-	342.69	43.45	140.25	115.75	299.45	642.14
	19 Kec. Cempa	663.79	-	663.79	46.78	147.23	354.70	548.70	1,212.49
	20 Kec. Lembang	927.29	-	927.29	42.22	139.54	112.64	294.39	1,221.68
21	kepegawaian	1,506.62	-	1,506.62	617.13	3,035.33	662.75	4,315.21	5,821.83
	2 badan kepegawaian daerah	1,506.62	-	1,506.62	617.13	3,035.33	662.75	4,315.21	5,821.83
22	pemberdayaan masyarakat dan desa	742.37	-	742.37	486.71	961.05	1,301.04	2,748.80	3,491.17
	1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pmdes	742.37	-	742.37	486.71	961.05	1,301.04	2,748.80	3,491.17
24	kearsipan	-	-	-	26.90	116.61	45.20	188.71	188.71
	1 Kantor Perpustakaan dan arsip daerah	-	-	-	26.90	116.61	45.20	188.71	188.71
<b>2</b>	<b>Urusan pilihan</b>	<b>14,014.18</b>	<b>-</b>	<b>14,014.18</b>	<b>3,966.07</b>	<b>6,602.65</b>	<b>12,132.95</b>	<b>22,701.67</b>	<b>36,715.85</b>
1	pertanian	8,065.42	-	8,065.42	1,639.94	3,077.05	6,271.10	10,988.09	19,053.51
	1 dinas pertanian dan peternakan	2,366.52	-	2,366.52	1,019.78	2,193.48	6,175.20	9,388.48	11,754.97
	2 kantor ketahanan pangan	758.23	-	758.23	192.10	556.79	-	748.89	1,307.11
	3 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	4,940.67	-	4,940.67	428.07	326.78	95.90	890.73	5,791.42
2	kehutanan	2,865.50	-	2,865.50	632.33	1,446.27	902.12	2,980.72	5,846.22
	1 dinas kehutanan dan perkebunan	2,865.50	-	2,865.50	632.33	1,446.27	902.12	2,980.72	5,846.22
5	kelautan dan perikanan	1,858.17	-	1,858.17	1,252.78	1,058.47	3,463.41	5,774.66	7,632.83
	1 Dinas Kelautan dan Perikanan	1,858.17	-	1,858.17	1,252.78	1,058.47	3,463.41	5,774.66	7,632.83
7	perindustrian	1,225.10	-	1,225.10	441.01	1,020.87	1,496.32	2,958.20	4,183.30
	1 dinas perindustrian perdagangan energi dan Mineral	1,225.10	-	1,225.10	441.01	1,020.87	1,496.32	2,958.20	4,183.30
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>222,327.21</b>	<b>34,455.84</b>	<b>256,783.04</b>	<b>40,304.63</b>	<b>71,140.40</b>	<b>136,753.82</b>	<b>248,188.85</b>	<b>504,981.90</b>

Proyeksi Pendapatan

Perhitungan Proyeksi pendapatan sangat besar ditentukan oleh asumsi yang digunakan, beberapa asumsi yang mendasar dalam melakukan perhitungan tersebut adalah faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Berikut tabel asumsi yang dipergunakan untuk membuat kalkulasi :

TABEL RATES	Nilai Proyeksi					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Belanja Pegawai - Belanja tidak langsung	1.000	1.135	1.289	1.445	1.619	1.814
Belanja pegawai - Belanja langsung	1.000	1.050	1.103	1.158	1.216	1.276
Belanja barang	1.000	1.126	1.269	1.410	1.567	1.742
Belanja Modal	1.000	1.135	1.289	1.445	1.619	1.814

Dari asumsi diatas berikut hasil proyeksi Pendapatan selama periode 2009 - 2014 (dalam Rp.juta), sebagai berikut :

**PROYEKSI APBD 2010 - 2014 (Rp. Juta)**

URAIAN	PROYEKSI				Transisi 2014	Pertum- buan
	2010	2011	2012	2013		
<b>PENDAPATAN</b>						
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>26,087.6</b>	<b>29,779.2</b>	<b>33,561.6</b>	<b>37,842.4</b>	<b>42,689.8</b>	<b>13.1%</b>
- Hasil Pajak Daerah	3,740.7	4,213.5	4,682.9	5,204.5	5,784.3	11.5%
- Hasil Retribusi Daerah	11,789.6	13,279.8	14,759.2	16,403.4	18,230.7	11.5%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,588.7	5,210.2	5,837.9	6,541.1	7,329.0	12.4%
- Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	5,968.7	7,075.7	8,281.8	9,693.5	11,345.8	17.4%
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>461,837.4</b>	<b>487,156.2</b>	<b>513,490.0</b>	<b>541,576.1</b>	<b>571,555.6</b>	<b>5.5%</b>
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	45,456.0	51,613.4	57,830.6	64,796.8	72,602.1	12.4%
- Dana Alokasi Umum	366,676.3	385,340.7	404,955.2	425,568.0	447,230.2	5.1%
- Dana Alokasi Khusus	49,705.1	50,202.2	50,704.2	51,211.2	51,723.4	1.0%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>23,276.9</b>	<b>26,429.9</b>	<b>29,613.6</b>	<b>33,180.8</b>	<b>37,177.7</b>	<b>12.4%</b>
- Pendapatan Hibah						
- Pendapatan Dana Darurat						
- Dana Bagi Hasil pajak dari Prov.& Pemda lainnya	9,651.4	10,958.7	12,278.8	13,757.9	15,415.1	12.4%
- Bantuan Keuangan dari Prov. atau Pemda Lainnya	13,625.5	15,471.2	17,334.8	19,422.9	21,762.6	12.4%
- Pendapatan Lainnya						
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>511,201.9</b>	<b>543,365.4</b>	<b>576,665.3</b>	<b>612,599.3</b>	<b>651,423.0</b>	<b>6.2%</b>

## RINGKASAN ALOKASI APBD TAHUN 2009-2014 (dlm %)

URAIAN	PROYEKSI				Transisi 2014	Pertum- buan
	2010	2011	2012	2013		
<b>PENDAPATAN</b>						
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>7%</b>	<b>6.5%</b>
- Hasil Pajak Daerah	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	5,0%
- Hasil Retribusi Daerah	2,3%	2,4%	2,6%	2,7%	2,8%	5,0%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	5,8%
- Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	1,2%	1,3%	1,4%	1,6%	1,7%	10,5%
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>89%</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>	<b>-0.7%</b>
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	8,9%	9,5%	10,0%	10,6%	11,1%	5,8%
- Dana Alokasi Umum	71,7%	70,9%	70,2%	69,5%	68,7%	-1,1%
- Dana Alokasi Khusus	9,7%	9,2%	8,8%	8,4%	7,9%	-4,9%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>5.8%</b>
- Pendapatan Hibah	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
- Pendapatan Dana Darurat	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
- Dana Bagi Hasil pajak dari Prov. & Pemda lainnya	1,9%	2,0%	2,1%	2,2%	2,4%	5,8%
- Bantuan Keuangan dari Prov. atau Pemda Lainnya	2,7%	2,8%	3,0%	3,2%	3,3%	5,8%
- Pendapatan Lainnya	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0.0%</b>

Pendapatan Asli Daerah, rata-rata sekitar 6 % dari total pendapatan. Namun demikian diharapkan bahwa efisiensi dan efektifitas terhadap PAD agar lebih dioptimalkan. Diasumsikan bahwa pertumbuhan pajak maupun retribusi daerah meningkat sekitar 5%. Peningkatan ini lebih banyak disebabkan oleh intensifikasi sumber-sumber penerimaan yang ada.

Alokasi dana perimbangan hampir sekitar 90% dari pendapatan dari jumlah tersebut 70% bersumber dari dana alokasi umum. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh perubahan dana perimbangan sangat memberikan dampak terhadap penerimaan maupun pembiayaan.

Pada tahun 2009 penerimaan dari dana perimbangan khususnya yang bersumber dari dana alokasi umum sebesar Rp.348,9 milyar. Pertumbuhan penerimaan dari DAU ini rata-rata 5,1 % dari tahun 2007 - 2009.

Pada tahun proyeksi diperkirakan pertumbuhan ini, minimal masih bisa dipertahankan rata-rata sebesar 5% semenjak tahun pelaksanaan RPJM 2009 - 2014. Dari pertumbuhan ini diharapkan pada 2014 penerimaan dari Dana Alokasi Umum berisik antara Rp. 447 milyar.

Adapun Lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar 5% kontribusinya terhadap total pendapatan. Dan diperkirakan rata-rata pertumbuhannya sekitar 10%.

Pertumbuhan pendapatan selama masa proyeksi pelaksanaan RPJM 2009 - 2014, diperkirakan sebesar 6,2%.

### Perkembangan Dan Proyeksi Belanja

Belanja daerah dibagi atas 2 kategori yaitu : belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi APBD 2007, mengalami surplus sedangkan 2008 - 2009 mengalami defisit, hal ini menunjukkan bahwa jumlah belanja setiap tahun meningkat. Pertumbuhan belanja jauh lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan, sehingga defisit anggaran tidak dapat dihindarkan. Rata-rata pertumbuhan belanja sebesar 11,8 sedangkan pertumbuhan pendapatan hanya sekitar 5,3%.



Belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung. Perbandingan keduanya adalah 55% : 45%. Belanja terbesar dari belanja tidak langsung adalah belanja pegawai yaitu sebesar 47% dari total keseluruhan belanja, sedangkan belanja modal sebesar 30%

Pertumbuhan belanja pegawai dari tahun 2007 - 2009 sebesar 8,19% lebih banyak disebabkan karena kenaikan gaji dan penerimaan CPNS, sedangkan kenaikan DAU setiap tahunnya hanya berkisar 5%. Dampaknya adalah meningkatnya defisit anggaran dari tahun 2008-2009.

Dari sisi belanja, berikut informasi proyeksi belanja berdasarkan atas asumsi diatas, sebagai berikut :

### PROYEKSI APBD 2010 - 2014 (Rp. Juta)

URAIAN	PROYEKSI				Transisi 2014	Pertum- buan
	2010	2011	2012	2013		
<b>BELANJA</b>						
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>268,375.3</b>	<b>279,869.0</b>	<b>291,985.5</b>	<b>304,758.8</b>	<b>318,219.6</b>	<b>4.4%</b>
- Belanja Pegawai	235,543.6	247,320.8	259,686.8	272,671.1	286,304.7	5.0%
- Belanja Bunga						
- Belanja Subsidi						
- Belanja Hibah						
- Belanja Bantuan Sosial	14,021.5	13,419.9	12,844.2	12,293.1	11,765.7	-4.3%
- Belanja Bagi Hasil kpd Prov./Kab/Kota & Pem. Desa	340.6	386.8	433.4	485.6	544.1	12.4%
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov./Kab/Kota & Pem. Desa	15,812.4	15,970.5	16,130.2	16,291.5	16,454.4	1.0%
- Belanja Tidak Terduga	2,657.2	2,771.0	2,890.9	3,017.4	3,150.7	4.4%
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>265,668.4</b>	<b>284,532.0</b>	<b>303,600.4</b>	<b>324,058.8</b>	<b>346,014.4</b>	<b>6.8%</b>
- Belanja Pegawai	41,113.5	42,346.9	43,617.3	44,925.8	46,273.6	3.0%
- Belanja Barang dan Jasa	79,003.2	87,409.2	95,398.4	104,117.8	113,634.1	9.5%
- Belanja Modal	145,551.7	154,776.0	164,584.8	175,015.2	186,106.6	6.3%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>534,043.7</b>	<b>564,401.0</b>	<b>595,585.9</b>	<b>628,817.6</b>	<b>664,234.0</b>	<b>5.6%</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(22,841.8)</b>	<b>(21,035.6)</b>	<b>(18,920.7)</b>	<b>(16,218.3)</b>	<b>(12,810.9)</b>	<b>-13.5%</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>25,000.0</b>	<b>25,000.0</b>	<b>18,000.0</b>	<b>17,000.0</b>	<b>14,000.0</b>	<b>-13.5%</b>
- Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya						
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	25,000.0	25,000.0	18,000.0	17,000.0	14,000.0	-13.5%
- Penerimaan Piutang Daerah						
<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>25,000.0</b>	<b>25,000.0</b>	<b>20,000.0</b>	<b>17,000.0</b>	<b>14,000.0</b>	<b>-13.5%</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2,158.2</b>	<b>3,964.4</b>	<b>1,079.3</b>	<b>781.7</b>	<b>1,189.1</b>	<b>-13.8%</b>
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah						
- Pembayaran Pokok Utang	2,158.2	3,964.4	1,079.3	781.7	1,189.1	-13.8%
- Pemberian Pinjaman Daerah						
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2,158.2</b>	<b>3,964.4</b>	<b>1,079.3</b>	<b>781.7</b>	<b>1,189.1</b>	<b>-13.8%</b>
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>22,841.8</b>	<b>21,035.6</b>	<b>18,920.7</b>	<b>16,218.3</b>	<b>12,810.9</b>	<b>-13.5%</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	-	-	-	-	-	

## RINGKASAN ALOKASI APBD TAHUN 2009-2014 (dlm %)

URAIAN	PROYEKSI				Transisi 2014	Pertum- buhan
	2010	2011	2012	2013		
<b>BELANJA</b>						
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>50.3%</b>	<b>49.6%</b>	<b>49.0%</b>	<b>48.5%</b>	<b>47.9%</b>	<b>-1.2%</b>
- Belanja Pegawai	44.1%	43.8%	43.6%	43.4%	43.1%	-0.6%
- Belanja Bunga	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
- Belanja Subsidi	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
- Belanja Hibah	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
- Belanja Bantuan Sosial	2.6%	2.4%	2.2%	2.0%	1.8%	-9.4%
- Belanja Bagi Hasil kpd Prov./Kab/Kota & Pem. Desa	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	6.5%
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov./Kab/Kota & Pem. Desa	3.0%	2.8%	2.7%	2.6%	2.5%	-4.4%
- Belanja Tidak Terduga	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	-1.2%
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>51%</b>	<b>52%</b>	<b>52%</b>	<b>1.2%</b>
- Belanja Pegawai	7.7%	7.5%	7.3%	7.1%	7.0%	-2.5%
- Belanja Barang dan Jasa	14.8%	15.5%	16.0%	16.6%	17.1%	3.7%
- Belanja Modal	27.3%	27.4%	27.6%	27.8%	28.0%	0.7%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0.0%</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>						

Komposisi antara belanja langsung dan tidak langsung pada tahun proyeksi pelaksanaan RPJM 2009 - 2014, masih berkisar antara 50.3% belanja tidak langsung dan sekitar 49,7 % belanja tidak langsung. Namun demikian diharapkan bahwa kontribusi belanja langsung jauh lebih besar, agar roda pembangunan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan RPJM dapat dioptimalkan. Komposisi ini pada tahun proyeksi berkisar antara 48 % untuk belanja tidak langsung dan 52% untuk belanja langsung.

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa dana yang tersedia untuk belanja langsung pada tahun proyeksi adalah sebagai berikut

Tabel 2.44. Perkiraan dana yang tersedia untuk belanja langsung, selama periode RPJM 2009 - 2014 (Rp. Juta)

Belanja Langsung	2010	2011	2012	2013	2014	Total
1 Belanja Pegawai	41.113,5	42.346,9	43.617,3	44.925,8	46.273,6	218.277,1
2 Belanja Barang dan Jasa	79.003,2	87.409,2	95.398,4	104.117,8	113.634,1	479.562,6
3 Belanja Modal	145.551,7	154.776,0	164.584,8	175.015,2	186.106,6	826.034,3
<b>Total</b>	<b>265.668,4</b>	<b>284.532,0</b>	<b>303.600,4</b>	<b>324.058,8</b>	<b>346.014,4</b>	<b>1.523.874,0</b>

Sumber data : diolah dari apbd 2007 - 2009

Perkiraan alokasi dana untuk belanja langsung yang tersedia dalam APBD selama masa tahun proyeksi, diyakini belum bisa menjawab atas pelaksanaan program yang ada. Kebutuhan dana bila dibandingkan dengan proyeksi anggaran masih sangat kecil, oleh karenanya diharapkan sumber pendanaan dari : APBN, APBD Propinsi, Swasta, Masyarakat maupun dari pinjaman .

## 2.7. Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait

### 2.7.1 Keterkaitan Terhadap RPJM Dan RTRW Nasional

Didalam sistem perencanaan Nasional, keberadaan RPJMD Kabupaten Pinrang, secara tidak langsung disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional, dimana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Nasional merupakan agregasi dari pencapaian keberhasilan di tingkat semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian tanggungjawab bersama untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran RPJM tersebut menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Ada 3 (tiga) agenda Nasional yang tertuang dalam RPJM nasional yang perlu diperhatikan oleh daerah yaitu terkait dengan :

- Agenda Pencapaian Aman dan Damai, (diindikasikan dengan Indikator indeks kriminalitas, pecandu zat aditif, perlindungan masyarakat, konflik sosial)
- Agenda Pencapaian Adil dan Demokratis (Diindikasikan Dengan Indikator Tingkat Partisipasi Politik, Proses Penyelenggaraan Musrenbang, GDI, GEM, Indikator Terkait Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak)
- Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Diindikasikan Dengan Indikator Ekonomi Makro, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan KB, Lingkungan Hidup, Prasarana Dan Sarana)

Lebih lanjut, keterkaitan ini diukur pada tingkat pencapaian dari parameter penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai amanat UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berkaitan dengan parameter :

- Kemajuan Otonomi Daerah (Skala Kehidupan Ekonomi, Layanan Publik, Resiko-Resiko Lokal)
- Pengukuran kinerja penyelenggaraan otonomi daerah (Derajat Kesejahteraan Umum, Pelayanan Publik, Kehidupan Demokrasi Lokal)
- Indeks Pembangunan Daerah (Keberdayaan Pemerintah, Perkembangan Wilayah, Keberdayaan Masyarakat)
- Variabel Daya Saing Daerah (Perekonomian Wilayah Dan Keterbukaan)
- Daya tarik investasi berdasarkan persepsi dunia usaha (kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur)

Demikian pula halnya keterkaitan dengan rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) yang merupakan perencanaan makro strategis nasional, menggambarkan arah dan kebijakan pembangunan nasional secara ketata ruang Sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Penataan Ruang , secara langsung merupakan acuan bagi daerah untuk menyusun RTRWKabupaten (merupakan rencana tata ruang skala kabupaten/kota dengan muatan utama kelengkapan infrastruktur di tingkat lokal atau regional seperti jalan kabupaten/kota, kebutuhan jaringan air bersih, listrik, dan telekomunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik zona-zona pengembangan kawasan yang ada), dan secara tidak langsung merupakan Dokumen Tata Ruang yang perlu diperhatikan pada saat menyusun RPJMD Kabupaten.

Kabupaten Pinrang berdasarkan Undang - Undang Tata Ruang dan dipertegas dalam PP 26/2008 tentang RTRWN, ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan disektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Agroindustri.

### **2.7.1 Keterkaitan Terhadap RPJM Dan RTRW Propinsi**

Dalam konteks Provinsi, keberadaan RPJMD Kabupaten Pinrang, secara langsung disusun dengan memperhatikan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan, dimana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi merupakan tanggungjawab bersama agregasi dari pencapaian keberhasilan di tingkat kabupaten/kota yang terdapat di wilayah Provinsi.

Ada 7 (tujuh) agenda pembangunan Provinsi yang tertuang dalam RPJM Provinsi Sulawesi Selatan yang perlu diperhatikan oleh daerah, terutama oleh Kabupaten Pinrang adalah terkait dengan :

- Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat Dengan sasaran :

Usia Harapan Hidup 73,7 thn, IMR 22/1000 kelahiran, AKI 226/1000, Angka Rata-rata Lama Sekolah 8,5 thn, AMH 95 %, prevalensi gizi < 20 % pada anak balita, gizi buruk 5 %

Kebijakan Pendidikan gratis usia sekolah 6 - 15 thn, promosi pendidikan, pemberantasan buta huruf

Kebijakan kesehatan gratis, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, promosi kesehatan dengan indikator meningkatnya perilaku sehat menjadi 75 % dan sebagainya

- Peningkatan Dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Dengan sasaran :

Perkembangan Kontribusi sektor pertanian rata-rata 6 % /

thn

Daya beli masyarakat menjadi 680 - 700 Rp/thn

Penurunan penduduk miskin sebesar 20 % & Penurunan pengangguran sebesar 40 %, berkurangnya diversifikasi konsumsi pangan pokok sebesar 3,8 kg/kapita/thn, dan lain - lain.

- Perwujudan Keunggulan Lokal Untuk Memicu Laju Pertumbuhan Perekonomian

Dengan sasaran :

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi meningkat sebesar 8,2 %/thn

Memanfaatkan output sektor pertanian yang relatif besar sebagai input bagi pengembangan Agro Industri dan industri strategis

Perluasan pangsa pasar internal dan pengembangan perekonomian wilayah

Pengembangan link dan pangsa pasar hasil industri berbasis pertanian, dan lain-lain

- Mewujudkan Sulawesi Selatan Sebagai Entitas Sosial Ekonomi Yang Berkeadilan

Dengan sasaran :

Tersedianya RTRW, Kawasan Andalan dan kawasan khusus, Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) dan Kawasan Industri, serta tersedianya Utilitas perkotaan

- Penciptaan Lingkungan Kondusif Bagi Kehidupan Inovatif

Dengan sasaran :

Kondisi keamanan yang kondusif, kepatuhan terhadap hukum, penyebar luasan informasi, terkelolanya potensi konflik

- Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Dengan sasaran :

Menguatnya nilai - nilai budaya lokal, tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat, Meningkatnya kualitas teknostruktur komunitas, Mewujudnya desa sebagai komunitas yang mandiri, Meningkatnya peran serta masyarakat

- Penguatan Kelembagaan Pemerintah

Dengan sasaran :

Terbentuknya SKPD sebagai unit kerja yang mandiri dan profesional, mampu, dimana prinsi-prinsip good governance menjadi acuan bersama

Sedangkan keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan Tahun 2001, wilayah Kabupaten Pinrang ditetapkan dan diarahkan sebagai :

- Taman Wisata Alam (TWA) Lembah Tirasa dan TWA Pulau Kamarrang
- Sebagian wilayahnya masuk sebagai kawasan hutan lindung
- Masuk dalam Kawasan Rawan Bencana Alam sekitar pantai, pengaruh gempa, kawasan potensi tsunami dan longsor bongkah serta runtuh batu
- kawasan pertanian pangan lahan basah,
- Kawasan penggembalaan dan produksi ternak
- Kawasan perikanan budidaya air payau
- Kawasan pertambangan pasir kuarsa
- Masuk sebagai kawasan andalan Parepare dan sekitarnya yang menitik beratkan pada kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan agro industri
- Kawasan pengembangan irigasi sawah
- Pengembangan kawasan PLTA Bakaru

### **2.7.3 Keterkaitan Terhadap RPJP Kabupaten Pinrang**

Sebagai suatu ketentuan bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang selain mewujudkan pencapaian Visi - Misi Daerah, adalah berkorelasi dengan apa yang telah digariskan pada RPJPD sebagai suatu rujukan untuk dipedomani.

Didalam RPJPD Kabupaten Pinrang, periode pertama (2009 - 2013), perencanaan diarahkan pada :

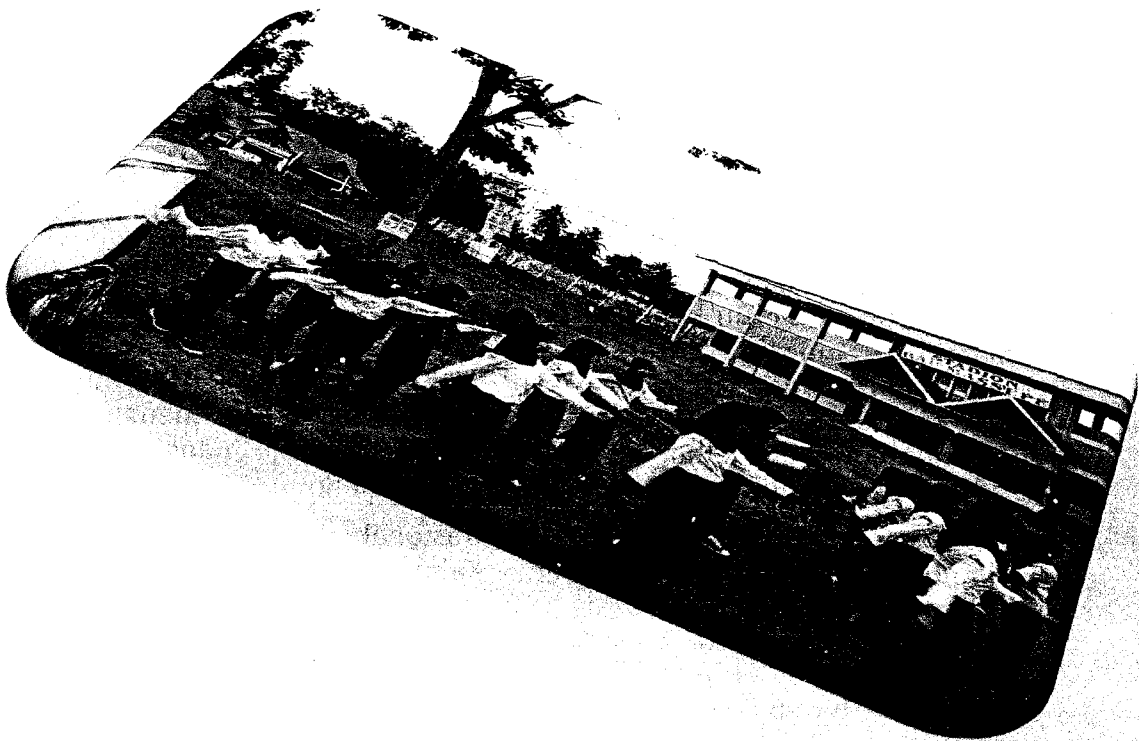
- Peletakan dasar - dasar kerangka pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis pertanian unggulan yang berorientasi pada penambahan nilai melalui mekanisme bisnis dan industri.
- Penguatan Ekonomi Lokal dalam kerangka Kemandirian Daerah
- Pengembangan Indeks Pembangunan Manusia/IPM (pengembangan Daya Beli, cerda dan sehat)
- Kerja sama dengan daerah dan pihak lain yang saling menguntungkan

Sasaran dari perencanaan tersebut dalam bentuk

- Peluncuran Cetak Biru jangka panjang maupun jangka menengah rencana tata ruang kabupaten dan rencana pengembangan Agribisnis dan Agroindustri,
- Penyiapan Perangkat Regulasi yang berkaitan pengembangan ekonomi lokal.

- Pengembangan SDM dan pemenuhan Sarana dan Prasarana dasar masyarakat bidang kesehatan, pendidikan, permukiman, dan peluang usaha.
- pengembangan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak bidang pertanian
- Penguatan Pelembagaan dan Profesionalisme aparatur pemerintah daerah
- Penguatan Pelembagaan Masyarakat
- Kemitraan antar para pelaku ekonomi dan antar daerah

Terlihat bahwa keragaman perencanaan lain dari semua tingkatan, memperkuat sinergitas dukungan dan sejalan dengan konteks RPJMD Kabupaten Pinrang yang menekankan pada perwujudan kesejateraan, pengembangan ekonomi lokal dengan pendekatan Agropolitan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).



# **BAB III**

## **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PINRANG**



### 3.1. V I S I

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pinrang ini, merupakan rencana Tahap pertama (2009 - 2014) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2009 - 2029), diindikasikan sebagai tahap peletakan dan penguatan dasar - dasar menuju kemandirian daerah yang bertumpu pada kemampuan bidang pertanian dalam arti luas. Rencana tahap pertama ini, dapat dikategorikan sebagai Tahap Konsolidasi yang menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Pada sisi lain, berbagai isu Nasional dan Daerah, yang berimplikasi pada isu daerah Kabupaten Pinrang, seperti kesejahteraan masyarakat, pemerataan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan, peluang kerja, perkembangan kawasan cepat tumbuh, pengembang kawasan pantai, lingkungan hidup, perbaikan pendidikan, kualitas kesehatan, perbaikan gizi, kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia, dll, perlu mendapat perhatian serta antisipasi bersama, yang kesemuanya perlu didukung oleh para pelaku pembangunan di kabupaten Pinrang.

Sebagaimana diketahui bahwa pernyataan Visi Jangka Panjang Kabupaten Pinrang adalah:

***"Terwujudnya Masyarakat Pinrang Yang Maju, Dinamis, dan Mandiri Dengan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Yang Berwawasan Lingkungan"***

Terkait Dengan Visi Jangka Panjang diatas serta dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, aspirasi dan cita-cita masyarakat, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Pinrang, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat, maka visi yang hendak diwujudkan melalui pencapaian target strategis dalam 5 (lima) tahun mendatang pada momentum pertama ini, dirumuskan kedalam Visi :

***"Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Penataan Program Pembangunan Pro Rakyat Menuju Terciptanya Kawasan Agropolitan Yang Didukung Oleh Penerapan Prinsip - Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"***

Visi Pembangunan Jangka Menengah tersebut, terintegrasi dengan Visi pembangunan Nasional dan bagian integral dari Visi pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan, didasarkan pada perubahan paradigma serta kondisi yang ada, memerlukan keterukuran dan komitmen berkelanjutan. Harapan tersebut, menuntut adanya Akselerasi pencapaian Visi kedepan, yang diharapkan dapat lebih berperan dalam percepatan perkembangan internal wilayah.

Oleh karena itu, pemaknaan Visi Jangka Menengah Kabupaten Pinrang dimaknai sebagai berikut :

#### Masyarakat Sejahtera :

- Diartikulasikan sebagai masyarakat yang tercukupinya kebutuhan dasar minimal di bidang penyediaan Sandang, Pangan, Papan, Kesempatan Berusaha, serta proporsi kemampuan Daya Beli masyarakat berpenghasilan rendah semakin mengecil menuju masyarakat berpenghasilan menengah ke atas
- Masyarakat yang mendapat layanan dan kualitas kesehatan yang memadai, yang al. dinyatakan dalam Indeks Harapan Hidup (IHH) tergolong membaik menuju pencapaian ideal, diatas angka 70
- Kondisi dimana masyarakatnya sejahtera terhadap layanan kualitas pendidikan yang memadai menuju Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan
- Kondisi dimana tingkat pengangguran semakin mengecil yang didukung oleh penyebaran dan pemerataan aktivitas serta pertumbuhan perekonomian yang semakin membaik

#### Pembangunan Pro Rakyat :

- Penyelenggaraan pembangunan lebih diartikulasikan pada prioritas berdasarkan aspirasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat strata menengah kebawah yang dapat memperbaiki dan meningkatkan penghasilannya
- Pembangunan diselenggarakan dengan memperhatikan pendekatan pola padat karya yang banyak melibatkan masyarakat luas

#### Terciptanya Kawasan Agropolitan :

- Terbentuk dan terbangunnya konstelasi wilayah dengan pendekatan Agropolitan yang menekankan pada pengembangan struktur pusat - pusat wilayah pertumbuhan dengan sistem kluster - kluster komoditi pertanian dalam arti luas.
- Pembangunan kewilayahan yang mengedepankan pengembangan Sumber Daya Pertanian melalui pendekatan Agrobisnis dan Agroindustri yang menggunakan teknologi tepat guna tanpa adanya eksploitasi Sumber daya alam secara berlebihan dan tak terkontrol, dan didukung oleh tingkat eksessibilitas, keberadaan sarana dan prasarana , kemudahan layanan, kemudahan memasarkan komoditi dan hasil olahan pertanian, serta diharapkan menjadi motor penggerak proses pengembangan aktivitas lainnya.
- Pendekatan pembangunan yang dipandang dalam perspektif masa depan, dalam kerangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat

#### Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik :

- Diartikulasikan bahwa keberhasilan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pinrang

berdasarkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik yang menganut prinsip - prinsip good governance : Partisipatif, Transparansi, Kesetaraan, Responsif, Akuntabilitas, Berwawasan Kedepan, Profesionalisme, Efisiensi Dan Efektif, Terkontrol, serta Penegakan Hukum

- Diselenggarakan oleh penyelenggara pemerintahan Yang Profesional, Cerdas, memiliki Kompetensi serta memiliki kearifan dalam berinteraksi dengan masyarakat.

### 3.2. M I S I

RPJMD Kabupaten Pinrang ini dirancang sebagai tahap konsolidasi peletakan dasar - dasar menuju masyarakat yang sejahtera atas kemampuan strategis Sebagaimana dinyatakan dalam Visi Daerah. Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas serta efisiensi pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki, maka dirumuskan Misi Kabupaten Pinrang beserta pencapaiannya yang diharapkan.

Hal tersebut akan dicapai dengan membangun beragam aktivitas yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan kualitas Sumber daya manusia, melanjutkan pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah, revitalisasi infrastruktur yang ada, pengembangan tata ruang wilayah dan manajemen pertanian, lingkungan hidup, pengembangan perekonomian berbasis masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, kemitraan, penyediaan lapangan kerja, dan lain - lain.

Selain itu juga perlu dipertimbangkan kemungkinan terdapat beberapa isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya serta memiliki dampak bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara, seperti penanganan kemiskinan, pengangguran, penanganan bencana, pengendalian lingkungan hidup, aksesibilitas, serta ketahanan dan kearifan budaya daerah.

Berkaitan dengan permasalahan, peluang dan kondisi obyektif perkembangan daerah kedepan, maka untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Pinrang, secara garis besar diformulasikan kedalam 3 (tiga) kluster rumusan Misi, yaitu kluster Misi Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, dan Bidang Kemasyarakatan.

Dengan demikian, rincian Formulasi - Tujuan - Sasaran pencapaian Kluster Misi untuk mewujudkan Visi Jangka Menengah ini, diuraikan sebagai berikut :

#### I. Bidang Pemerintahan

1. Mengoptimalkan Fungsi Kelembagaan Pemerintahan Dan Mendorong Terciptanya Sinergi Antar Instansi Guna Meningkatkan Efektifitas Kinerja Birokrasi Dalam

Memfasilitasi Pelaksanaan Program Pembangunan Yang Selaras Dengan Dinamika Perkembangan Masyarakat Dan Kelayakan Potensi

2. Memaksimalkan Tanggung Jawab, Membenahi Sistem Tata Kelola Jasa Pelayanan Publik Dan Distribusi Kewenangan Institusi Pemerintah Daerah Di Setiap Jenjang/Tingkatan Pemerintahan Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Program Pembangunan Secara Transparan Dan Akuntabel
3. Mengembangkan Kompetensi Dan Profesionalisme SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Kinerja Aparatur Yang Mampu Mengelola Program Pembangunan Berorientasi Pelayanan Publik
4. Menyelaraskan Program Pembangunan Daerah Dengan Program Regional Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Prinsip Koneksitas Dan Sinergi Kebijakan

Tujuan Strategik Misi Bidang Pemerintahan :

- Kelembagaan pemerintah tertata secara proporsional dan gradual
- Fungsi dan peran kelembagaan pemerintah dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan daerah serta pelayanan publik, dilakukan secara efisien dan efektif.
- Fungsi dan peran kelembagaan pemerintah dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan daerah serta pelayanan publik, dilakukan secara efisien dan efektif
- Harmonisasi dan sinkronisasi implementasi program antar kelembagaan secara vertikal maupun horizontal

Sasaran Strategik Misi Bidang Pemerintahan

- Institusi Pemerintah Daerah (Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, Sekwan, Kecamatan, Kelurahan) dan Institusi Desa, sesuai dengan kewenangan wajib dan pilihan dalam kerangka penguatan otonomi daerah, terutama institusi /Satuan Kerja yang dianggap relatif masih perlu pembenahan dan yang terkait langsung dengan pencapaian Visi - Misi Jangka menengah
- SDM Aparatur pemerintah daerah dan Satuan Kerja Daerah , terutama yang berhubungan langsung dengan Tugas dan fungsinya
- Manajemen kelembagaan daerah dan Satuan Kerja Daerah
- Program lintas wilayah propinsi dan Kabupaten

## II. Bidang Pembangunan

1. Meningkatkan Daya Jangkau Dan Mutu Infrastruktur Transportasi Untuk Membuka Isolasi Daerah, Memperlancar Arus Barang Dan Jasa, Serta Mendukung Moblitas Masyarakat Dan Kelangsungan Pembangunan Pusat - Pusat Pembangunan Sumber Daya Perekonomian Daerah Yang Berbasis Masyarakat
2. Merevitalisasi Jasa Layanan Teknis Dan Penyediaan

Prasarana Yang Memadai Untuk Mendukung Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Masyarakat

3. Meningkatkan Produktivitas Serta Nilai Tambah Produk Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Dan Perikanan/Kelautan Dengan Mengedepankan Penerapan Teknologi Dan Manajemen Yang Tepat Yang Berdampak Pada Peningkatan Pendapatan Masyarakat
4. Memantapkan Mata Rantai Dan Mekanisme Produksi Huli - Hilir Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perekonomian Masyarakat Dengan Mendorong Terciptanya Iklim Yang Mendukung Dan Memiliki Daya Tarik Bagi Tumbuhnya Investasi Dan Pengembangan Dunia Usaha
5. Menumbuh Kembangkan Usaha Kecil/Menengah Non Pertanian Melalui Pembinaan Dan Pendampingan Intensif Serta Penerapan Prinsip - Prinsip Kewirausahaan Sebagai Upaya Penyediaan Kesempatan Kerja Serta Jaminan Kepastian Usaha Bagi Masyarakat
6. Mengoptimalkan Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber - Sumber PAD Sesuai Dengan Perundang-Undagngan Yang Berlaku Untuk Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebesar Minimal 5 % Rata-Rata Pertahun
7. Meningkatkan Akses Masyarakat , Khususnya Masyarakat Yang Kurang Mampu Terhadap Layanan Pendidikan Berkualitas Dari Semua Jenjang Pendidikan SD, SLTP, Dan SLTA Seiring Dengan Peningkatan Mutu Dan Kesejahteraan Guru
8. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Kualitas Pelayanan Kesehatan, Utamanya Bagi Kelompok Masyarakat Yang Yang Kurang Mampu
9. Meningkatkan Keseimbangan Fungsi Spasial Dalam Berbagai Program Pembangunan Termasuk Didalamnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman Dan Optimalisasi Pemanfaatan Ruang, Lahan, Serta Keseimbangan Ekosistem Lingkungan Hidup

Tujuan Strategik Misi Bidang Pembangunan :

- Terbangunnya kerangka wilayah berdasarkan pendekatan Agropolitan dengan memperhatikan kualitas dan pelestarian lingkungan
- Tersedianya aksesibilitas sarana dan prasarana yang dapat menjangkau wilayah Kabupaten, terutama untuk daerah - daerah terpencil untuk mempermudah layanan terhadap masyarakat
- Memudahkan aktivitas masyarakat dalam melakukan transaksi barang dan jasa dalam kerangka pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sektor unggulan dan potensi lokal
- Penyederhanaan mata rantai pemasaran produk pertanian untuk memperbesar nilai tambah produk pertanian dan perekonomian lainnya yang diusahakan masyarakat
- Menumbuh kembangkan Usaha kecil / Menengah yang

berbasis usaha pertanian dan non pertanian yang proporsinya semakin besar dalam perekonomian daerah dan

- Optimasi layanan serta akses dibidang kesehatan dan pendidikan dalam kerangka pengembangan kualitas SDM

#### Sasaran Strategik Misi Bidang Pembangunan

- Wilayah perkotaan - pedesaan, wilayah pantai - daratan - pegunungan , kawasan strategis, kawasan cepat berkembang serta kawasan yang kurang tersentuh pembangunan namun cukup potensial serta wilayah laut yang menjadi kewenangan Kabupaten
- Manajemen tata kelola dan tata niaga hasil produk perekonomian masyarakat
- Masyarakat kabupaten, terutama penduduk berpenghasilan menengah kebawah
- Masyarakat kabupaten, terutama penduduk rentan kesehatan dan rentan pendidikan
- Sektor - sektor strategis, unggulan dan potensial yang memiliki prospek dalam meningkatkan PAD , serta berkontribusi langsung terhadap Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Daerah rata - rata diatas 5 % / Tahun
- Para pengusaha dan masyarakatnya yang bergerak dalam kegiatan perekonomian skala Kecil dan Menengah (UKM)

### III. Bidang Kemasyarakatan

1. Mengupayakan Tumbuhnya Nilai-Nilai Solidaritas Sosial Serta Menjadikan Nilai-Nilai Agama Sebagai Nilai Utama Dalam Penciptaan Moralitas Dan Akhlak Masyarakat Sehingga Tercipta Tatanan Masyarakat Pinrang Yang Rukun, Saling Menghormati, Aman Dan Damai
2. Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran Dan Ketaatan Terhadap Hukum Dan HAM Bagi Semua Lapisan Masyarakat Dan Menghormati Serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum
3. Penciptaan Alam Keterbukaan Diberbagai Bidang Pekerjaan Dan Menumbuhkan Iklim Demokrasi, Menumbuhkembangkan Gairah Partisipasi Masyarakat Dalam Setiap Tahapan Pembangunan, Serta Dalam Setiap Aktivitas Publik.
4. Mendukung Peran Lembaga-Lembaga Keagamaan, Lembaga-Lembaga Sosial (LSM/LPSM), Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Dan Organisasi Kepemudaan Dalam Kegiatan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Kemitraan Dan Partisipasi Publik

#### Tujuan Strategik Misi Bidang Kemasyarakatan :

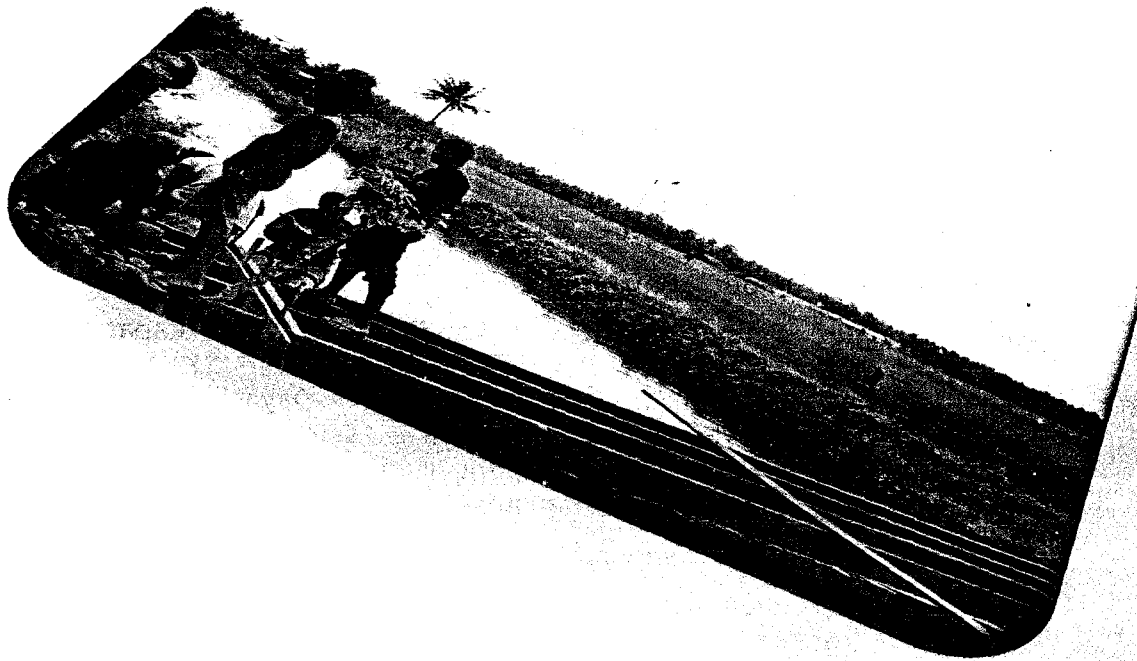
- Menumbuhkembangkan nilai - nilai agama , budaya dan kearifan lokal sebagai dasar untuk memperkuat solidaritas, kondusif serta harmoni dalam berinteraksi.

III - 7

- Menjadikan masyarakat Pinrang yang sadar serta taat hukum dan HAM , dalam alam demokrasi yang semakin kondusif
- Memberdayakan lembaga - lembaga sosial dan kemasyarakatan, turut serta dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atas dasar kemitraan dan kesetaraan gender.

**Sasaran Strategik Misi Bidang Kemasyarakatan**

- Masyarakat kabupaten Pinrang, secara bertahap, gradual, dan berdasarkan prioritas.
- Lembaga - lembaga sosial dan kemasyarakatan yang memiliki tingkat kepedulian terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas .



# **BAB IV**

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

IV - I

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Tahun 2009 - 2014  
KABUPATEN PINRANG



## 4.1. Strategi Pembangunan Daerah

Secara garis besar, ada 3 (tiga) aspek yang saling berkaitan dan menjadi dasar penentuan Strategi Arah Pembangunan Daerah dalam kerangka mewujudkan Visi - Misi Kabupaten Pinrang hingga tahun 2014. Ketiga aspek yang dimaksud adalah ;

- Kemampuan Sumber Daya Daerah

Aspek yang memperlihatkan kondisi objektif kapasitas potensi Kabupaten Pinrang (Sosial, Ekonomi Dan Keuangan, Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Kelembagaan, daya saing, kemitraan) sebagai aspek yang mempengaruhi penentuan arah strategi yang perlu dipersiapkan

- Pemerataan Dan Pertumbuhan

Aspek yang mendasari strategi yang hendak ditempuh dalam kerangka pemerataan dan perkembangan daerah kabupaten dengan pendekatan agropolitan berkaitan pengalokasian anggaran

- Penyelarasan

Aspek yang mengelaborasi keharmonisan dan keserasian berdasarkan kedua aspek diatas, yang memungkinkan pilihan - pilihan strategi akan menjadi alternatif agar terjadi harmonisasi dalam pembangunan daerah

Selain ketiga aspek tersebut, pilihan - pilihan strategi yang perlu dipersiapkan Kabupaten Pinrang, adalah bersinergi dengan strategi kerangka pengembangan pembangunan di tingkat Nasional dan provinsi Sulawesi Selatan.

Strategi pembangunan di tingkat Nasional, mengindikasikan pada keberlanjutan pembangunan pada periode sebelumnya yang mengarah pada akses Layanan Kualitas Kesehatan Dan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, Optimasi Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan.

Pada sisi lain, strategi pembangunan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 5 tahun kedepan menekankan pada 7 (Tujuh) agenda pembangunan :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat :

pendidikan gratis, Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan , promosi pendidikan, pemberantasan buta aksara, pengembangan budaya baca, kesehatan gratis, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular , Promosi kesehatan, Peningkatan dan perbaikan kampung dan permukiman

2. Peningkatan Dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat :

Peningkatan produksi pertanian & pengembangan agribisnis pedesaan, Peningkatan akses masyarakat kepada aset produktif

dan kegiatan produksi serta revitalisasi lembaga ekonomi masyarakat kecil, Peningkatan pelayanan kepada penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, Penanggulangan korban kebakaran, banjir dan bencana, Penataan Pertanahan, Penyiapan tenaga kerja, Penempatan dan perluasan kesempatan kerja, Pembinaan dan pengawasan tenaga kerja,

3. Perwujudan Keunggulan Lokal Untuk Memicu Laju Pertumbuhan Perekonomian

Pengembangan industri strategis, Pusat Pelayanan, Pengembangan kerjasama regional & promosi perdagangan, Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia,

4. Mewujudkan Sulawesi Selatan Sebagai Entitas Sosial Ekonomi Yang Berkeadilan :

Perencanaan dan pengendalian penataan ruang, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah, Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Revitalisasi Kawasan Andalan, Pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, Pembangunan Perkotaan

5. Penciptaan Lingkungan Kondusif Bagi Kehidupan Inovatif :

Pembinaan Kesatuan Bangsa, Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penataan sistem legislasi daerah, Pembinaan kehidupan sosial-politik, Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi

6. Penguatan Kelembagaan Masyarakat :

Aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya lokal, Peningkatan kualitas teknostruktur komunitas, Fasilitasi Baruga Sayang (Pemberdayaan Komunitas Desa), Pemberdayaan perempuan, Pemberdayaan organisasi pemuda dan olah raga, Pemberdayaan organisasi keagamaan, Pemberdayaan organisasi profesi

7. Penguatan kelembagaan pemerintah :

Peningkatan kinerja SKPD, Peningkatan kualitas profesionalisme aparatur pemerintah, Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan, Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah, Peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dengan demikian, Sejalan dengan Strategi Pembangunan Nasional dan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 - 2014 untuk pencapaian Visi - Misi Daerah Dengan Pendekatan Agropolitan diarahkan sebagai berikut :

I. Langkah Strategi Bidang Pemerintahan

Langkah strategi ini adalah untuk menindak lanjuti tujuan dan sasaran pencapaian Misi bidang pemerintahan, yaitu mengoptimalkan tanggung jawab fungsi kelembagaan daerah sesuai dengan manajemen tata kelola pemerintahan yang baik, efisiensi dan efektifitas dalam pembangunan,

memperkuat koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan, kompetensi dan profesionalisme SDM serta berorientasi pada pelayanan publik, diformulasikan pada arah strategi :

1. Konsolidasi dan Revitalisasi Kelembagaan Otonomi Pemerintah Daerah

Strategi ini dipersiapkan untuk pemberdayaan internal kelembagaan daerah yang sudah ada dan kelembagaan daerah yang hendak dibentuk yang esensi aktivitasnya sesuai dengan penyelenggaraan otonomi daerah, dengan penekanan pada agenda penyelenggaraan pemerintahan 5 tahun mendatang yang efisien dan efektif sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Pengembangan & Pemberdayaan SDM Aparatur Berorientasi Kinerja Kompetensi, Profesional Dan E-Procurement

Strategi ke dua ini menekankan pada reformasi birokrasi pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur daerah, yang mampu mengelola pelimpahan kewenangan pada institusinya, serta mampu merespon tuntutan terhadap pelayanan publik prima, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Memperkuat Kemitraan Internal Serta Hubungan Kerja Sama Antar Daerah

Strategi memperkuat kemitraan, dilakukan secara bertahap dan menyeluruh untuk merespon positif potensi dan peluang daerah serta merespon tantangan dan kendala perkembangan aktual yang begitu cepat terjadi, serta mampu memberikan nilai tambah bagi Daerah Kabupaten Pinrang dan hasil positif bagi institusi atau daerah lain berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan

II. Langkah Strategi Bidang Pembangunan

Esensi tujuan dan sasaran pencapaian Misi bidang Pembangunan, menekankan pada ;

- Pengentasan kemiskinan
- Mengurangi keterisolasian daerah
- Keterjangkauan dan akses terhadap pelayanan publik prima
- Pemerataan pembangunan dengan memperhatikan efisiensi pemanfaatan ruang dan kualitas lingkungan
- Memperkokoh struktur pusat - pusat wilayah pembangunan perekonomian masyarakat
- Memperkuat dan koneksitas kluster - kluster aktivitas perekonomian wilayah

- Produktivitas serta nilai tambah perekonomian daerah berbasis pertanian
- pengembangan mata rantai iklim investasi dan pengembangan dunia usaha
- Akses masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan dan pendidikan
- Memperkuat mata rantai dan mekanisme Sumber Daya Perekonomian Masyarakat

Berdasarkan format tujuan dan sasaran misi, bidang Pembangunan tersebut, diformulasikan pada langkah strategi ;

1. Cetak Biru Konsep Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Melalui Pendekatan Agropolitan

Strategi yang menetapkan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki Rencana Induk / Master Plan pembangunan daerah dengan pendekatan ruang, pendekatan Agropolitan, serta pendekatan lainnya yang saling bersinergi sebagai dasar untuk memeperkokoh arah pembangunan agar lebih efektif, tepat sasaran dan lebih terarah

2. Pengembangan Dan Revitalisasi Infrastruktur Wilayah, Terkait Dengan Pengembangan Pertanian

Strategi yang mengarahkan pada kemudahan aksesibilitas untuk mempermudah mobilitas masyarakat, barang dan jasa antar kluster pusat - pusat pertumbuhan, aksesibilitas terhadap produktivitas hulu - hilir perekonomian masyarakat, serta untuk mengentaskan disparitas antar kawasan - kawasan terpencil.

3. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat Dan Daya Saing Yang kompetitif

Strategi yang mengarahkan pada pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan pusat - pusat pertumbuhan berbasis potensi perekonomian masyarakat, serta mempersiapkan perangkat daerah yang memeperkokoh produktivitas hulu - hilir perekonomian masyarakat, serta infrastruktur kemitraan antar kelembangaan inter daerah dan dengan daerah lain yang saling menguntungkan

4. Pemberdayaan Kemudahan Pemasaran Komoditi Hasil Pertanian Paska Panen

Strategi yang mengarahkan pada kesiapan daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana kemudahan memasarkan hasil - hasil produk komoditi, setengah jadi atau hasil olahan pertanian, dengan sasaran dapat meningkatkan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat .

5. Membangun Kemitraan Koneksitas Perekonomian Internal Yang Kuat Dan Saling Menguntungkan Antar Daerah

Strategi yang mengarahkan pada kesiapan daerah memeperkokoh produktivitas hulu - hilir perekonomian masyarakat, serta infrastruktur kemitraan antar

kelembagaan dan dengan daerah lain yang saling menguntungkan .

#### 6. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Strategi yang mengarahkan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaku dan dinamisator penggerak pembangunan yang bertumpu pada kemampuan kewirausahaan; - layanan kualitas pendidikan dan kesehatan serta kemampuan kapasitas perekonomian .

### III. Langkah Strategi Bidang Kemasyarakatan

#### 1. Langkah Strategi Bidang Kemasyarakatan

Esensi tujuan dan sasaran pencapaian Misi bidang Kemasyarakatan, menekankan pada ;

- Menumbuh kembangkan interelasi sosial yang penuh kedamaian, saling menghormati, demokratis, partisipatif, kesetaraan dan keterbukaan berdasarkan ;

Nilai - Nilai Agama

Nilai - Nilai Budaya

Kearifan Lokal

Budaya positif yang tumbuh dan berkembang

- penegakan supremasi hukum
- pemberdayaan komonitas masyarakat sebagai bagian dari pelaku pembangunan

Berdasarkan format tujuan dan sasaran misi bidang Kemasyarakatan tersebut, diformulasikan pada langkah strategi ;

#### 1. Aktualisasi Keragaman Sosial Dan Kearifan Lokal Dalam Memperkokoh Ketahanan Masyarakat

Strategi ini dipersiapkan untuk memberdayakan hubungan - hubungan sosial yang menjiwai keharmonisan dalam berinteraksi sosial serta terlibat penyelenggaraan pembangunan,

#### 2. Penegakan Hukum Dalam Kerangka Aktualisasi Hak Dan Kewajiban Masyarakat

Strategi yang mengarahkan pada pemahaman, kesadaran, ketaatan, penegakan dan penjunjungan terhadap supremasi hukum dan HAM yang memungkinkan penyelenggaraan pembangunan berjalan dengan baik . Faktor ini adalah sebagai dukungan dan jaminan keamanan dan ketentraman serta ketertiban di dalam interaksi bermasyarakat

#### 3. Memperkokoh Pelembagaan Dan Peran Serta Masyarakat Sebagai ;

- Mitra Berdasarkan Kaidah - Kaidah Penyelenggaraan

## Kepemerintahan Dan Pembangunan Daerah

- Inisiasi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Publik

Strategi ini diarahkan pada kemitraan serta pemberdayaan kelembagaan dan komonitas masyarakat sebagai bagian dari pelaku, inisiator, dinamisator, operator pembangunan bersama - sama dengan pemerintah daerah

Arahan strategi pembangunan tersebut diatas, selanjutnya diformulasikan kedalam serangkaian kebijakan yang rinciannya diperlihatkan pada penjelasan berikut :

### 4.2. Kebijakan Pembangunan Daerah

Formulasi arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang untuk pencapaian kinerja Visi - Misi hingga 5 (lima) tahun mendatang, ditata berdasarkan kondisi objektif, strategi pembangunan, program prioritas serta bersinergi dengan Agenda Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan .

Oleh karena itu, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang dapat diformulasikan sebagai berikut :

Kondisi Objektif Bidang Pemerintahan :

- Tugas dan fungsi satuan kerja untuk kepentingan eksternal belum optimal, sehingga dimungkinkan untuk reposisi lingkup penugasan
- Sarana pendukung Satun - Satuan Unit Kerja Daerah, nampaknya masih terbatas
- Optimasi Pencapaian kinerja masih terkendala, diantaranya disebabkan oleh Anggaran daerah untuk pembangunan relatif masih terbatas
- Tingkat koordinasi antar institusi masih terkendala, bisa terjadi disebabkan beban kerja melebihi kapasitas yang ada atau karena bisa terjadi disebabkan lingkup penugasan belum diatur secara tegas
- Adanya beban kerja untuk mencapai keberhasilan Visi - Misi 5 (lima) tahun kedepan yang mengharuskan Satuan Unit Kerja daerah secara bersama - sama mendukung momentum tersebut
- Kapasitas kompetensi, profesional, etos kerja, resposibilitas nampaknya masih perlu pembenahan, sekalipun sumber daya yang ada disetiap satuan unit kerja berdasarkan pendidikan formal, sudah memadai
- Hubungan antar daerah yang memiliki komparasi tertentu dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan belum mendapatkan porsi yang baik, sehingga peluang ini

IV - 7

perlu ditata dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Strategi Bidang Pemerintahan :

1. Konsolidasi dan Revitalisasi Kelembagaan Otonomi Pemerintah Daerah
2. Pengembangan & Pemberdayaan SDM Aparatur Berorientasi Kinerja, Kompetensi, Profesional Dan E-Procurement
3. Memperkuat Kemitraan Internal Serta Hubungan Kerja Sama Antar Daerah

Arah Kebijakan Bidang Pemerintahan :

1. Pemberdayaan kelembagaan Daerah

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkokoh tugas dan fungsi, pembagian beban kerja dalam kerangka pencapaian Visi - Misi daerah, dilakukan secara bersamaan, gradual, dan tepat sasaran

2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Daerah

Kebijakan ini diarahkan pada Penempatan aparatur, sesuai kompetensi, profesional, dan berorientasi kerja, dilakukan secara bertahap, menyeluruh serta disesuaikan dengan beban kerja yang akan dihadapi.

Kondisi Objektif Bidang pembangunan :

- Daerah belum memiliki Master Plan berkaitan dengan pembangunan melalui pendekatan Agropolitan yang diadopsi dan ditindak lanjuti sebagaimana visi - misi yang hendak dicapai.
- Selain itu merujuk pada UU penataan ruang, wilayah kabupaten pinrang perlu redefinisi ulang pemanfaatan ruang dengan memperhatikan pelestarian dan keseimbangan ekosistem lingkungan, yang bersinergi dengan pemanfaatan ruang berdasarkan pendekatan Agropolitan
- Masih terdapat kawasan - kawasan terpencil yang belum diakses dengan baik, sehingga mobilisasi orang, barang, dan jasa belum sebagaimana yang diharapkan.
- Sarana dan prasarana yang dimiliki daerah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik
- Nilai tambah hasil produksi usaha pertanian selama ini tidak mengalami perkembangan yang mengembirakan, bahkan beberapa produksi pertanian mengalami stagnasi bahkan kemunduran bila dibandingkan dengan tingkat inflasi perkembangan ekonomi yang terjadi.
- Pelambatan nilai tambah ini juga terjadi disebabkan pula oleh tata kelola / management belum sepenuhnya merespon dengan baik
- Kontribusi sektor UMKM masih sangat kecil, bahkan UMKM non pertanian yang berfungsi sebagai salah satu bagian atau media resultan perkembangan ekonomi

masyarakat perlu dipercepat akselerasinya .

- Besarnya potensi kekayaan alam kabupaten Pinrang, belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang optimum dalam mendukung perkembangan daerah, baik terhadap peningkatan PAD maupun dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat.
- Sumber daya manusia (SDM) kabupaten Pinrang, relatif masih tergolong pada tingkat menengah bila dibandingkan dengan SDM Propinsi, baik dilihat dari sisi kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, maupun peringkat daya beli serta menurut tingkat pendapatan masyarakat. Sebagai suatu prasarat kemajuan bangsa, terutama kemajuan daerah, tentunya SDM ini harus tetap ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya.

Strategi Bidang Pemerintahan :

1. Cetak Biru Konsep Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Melalui Pendekatan Agropolitan
2. Pengembangan Dan Revitalisasi Infrastruktur Wilayah, Terkait Dengan Pengembangan Pertanian
3. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat Dan Daya Saing Yang kompetitif
4. Pemberdayaan Kemudahan Pemasaran Komoditi Hasil Pertanian Paska Panen
5. Membangun Kemitraan Koneksitas Perekonomian Internal Yang Kuat Dan Saling Menguntungkan Antar Daerah
6. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Arah Kebijakan Bidang Pembangunan :

1. Mempersiapkan Perangkat Lunak Perencanaan Daerah  
Kebijakan ini merupakan prioritas, dimana daerah pada tahap awal mempersiapkan Master Plan perencanaan - perencanaan daerah yang memperkuat konsep dan strategi pembangunan melalui pendekatan Agropolitan
2. Konsolidasi, Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Perekonomian Daerah .

Kebijakan ini ditujukan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar perekonomian masyarakat, disamping memperkuat kembali fungsi sarana dan prasarana yang telah ada berikut tata kelolanya. Sarana dan prasarana ini diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap keunggulan agregatif komparatif yang memberikan nilai tambah pada ketahanan ekonomi daerah, sehingga berbagai kapasitas potensi ekonomi dapat dikelola dengan baik. Selain arah kebijakan untuk memperkuat keunggulan komparatif tersebut adalah arah kebijakan yang mampu menangkap dan mengembangkan peluang keunggulan kompetitif yang dapat digagas dalam hal keunggulan kualitas produksi komoditi daerah yang dapat memberikan optimasi kemitraan antar daerah yang saling



menguntungkan, terbangunnya iklim usaha dan investasi yang kondusif, peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat, adanya peluang kesempatan kerja dan kesempatan usaha secara maksimal.

### 3. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebijakan ini ditujukan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan handal dalam penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi, sebagai prasarat utama dan modal dasar dalam rangka pencapaian keberhasilan Visi - Misi Daerah. Kualitas SDM ini juga penting tatkala menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi yang semakin kompetitif penuh persaingan.

Oleh karena itu pengembangan kualitas SDM yang terdidik, sehat jasmani dan rohani, berkecukupan, semangat kerja yang mumpuni, dan memiliki kepekaan sosial ini harus diasah dan ditingkatkan terus menerus tanpa mengenal waktu agar mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kabupaten Pinrang sebagai daerah Agropolitan.

#### Kondisi Objektif Bidang Kemasyarakatan :

- Dalam hubungan dan pergaulan bermasyarakat, dirasakan adanya ketimpangan dalam hal ikatan - ikatan sosial, menurunnya nilai - nilai yang terkandung yang selama ini sangat dijunjung. Kerenggangan ini tidak tertutup kemungkinan sangat besar dipengaruhi media yang mengetengahkan budaya - budaya yang tidak pas dengan kearifan lokal.
- Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dirasakan adanya inefisiensi dan etos kerja yang tidak mengalami perubahan berarti. Situasi yang demikian, bisa jadi disebabkan oleh semangat akan perlunya peraturan di tegakan mengalami degradasi. Penurunan ini tidak hanya terjadi dikalangan penyelenggara pemerintahan bahkan terjadi di tengah - tengah kalangan masyarakat.
- Ikatan - ikatan sosial yang dirasakan semakin merenggang, bisa terjadi karena konteks demokrasi, keterbukaan semangat partisipasi serta rasa tanggung jawab semakin kurang menjadi agunan bersama.
- Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga dirasakan berjalan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara utuh dan maksimal, sehingga potensi kelembagaan masyarakat yang ada lambat laun yang semula sebagai mitra dan bagian dari subjek pembangunan, menjadi objek pembangunan. Padahal diantara organisasi masyarakat yang ada terdapat individu - individu yang memiliki kapasitas yang mumpuni.

Atas dasar itu, pemerintah daerah bertekad mengembalikan posisi organisasi kemasyarakatan sebagai objek pembangunan bersama - sama menjadi mitra dan subjek yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab pembangunan

#### Strategi Bidang Kemasyarakatan :

1. Aktualisasi Keragaman Sosial Dan Kearifan Lokal Dalam Memperkokoh Ketahanan Masyarakat
2. Penegakan Hukum Dalam Kerangka Aktualisasi Hak Dan Kewajiban Masyarakat
3. Memperkokoh Pelembagaan Dan Peran Serta Masyarakat Sebagai ;
  - Mitra Berdasarkan Kaidah - Kaidah Penyelenggaraan Kepemerintahan Dan Pembangunan Daerah
  - Inisiasi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Publik

Arah Kebijakan Bidang Kemasyarakatan :

1. Memperkuat Ikatan - Ikatan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kepemerintahan Dan Pembangunan

Kebijakan ini juga merupakan bentuk keberhasilan pembangunan dengan melibatkan semua komponen masyarakat daerah atas dasar kompetensi, keterbukaan, partisipatif, rasa tanggung jawab, responsif yang kesemuanya berlandaskan pada nilai - nilai luhur budaya agraris dan kearifan lokal yang jauh belangan ini sangat menjiwai masyarakat daerah.

Kebijakan ini juga berpengharapan pada terbangunnya Ketahanan sistem nilai budaya berlandaskan pada nilai agama - solidaritas - keharmonisan - dan kearifan lokal.

2. Reformasi penegakan hukum dan HAM.

Kebijakan ini ditujukan untuk membangun kesadaran dan penegakan hukum, pada semua komponen masyarakat Pinrang, sebagai prasarat lain keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan rasa aman, tertib dan tanpa gangguan dalam kehidupan masyarakat.

3. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.

Kebijakan ini ditujukan memberdayakan kelembagaan - kelembagaan masyarakat yang ada dan berkembang di kalangan masyarakat yang selama ini perannya dirasakan belum optimal, untuk turut serta sebagai mitra dalam pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing kelembagaan masyarakat.

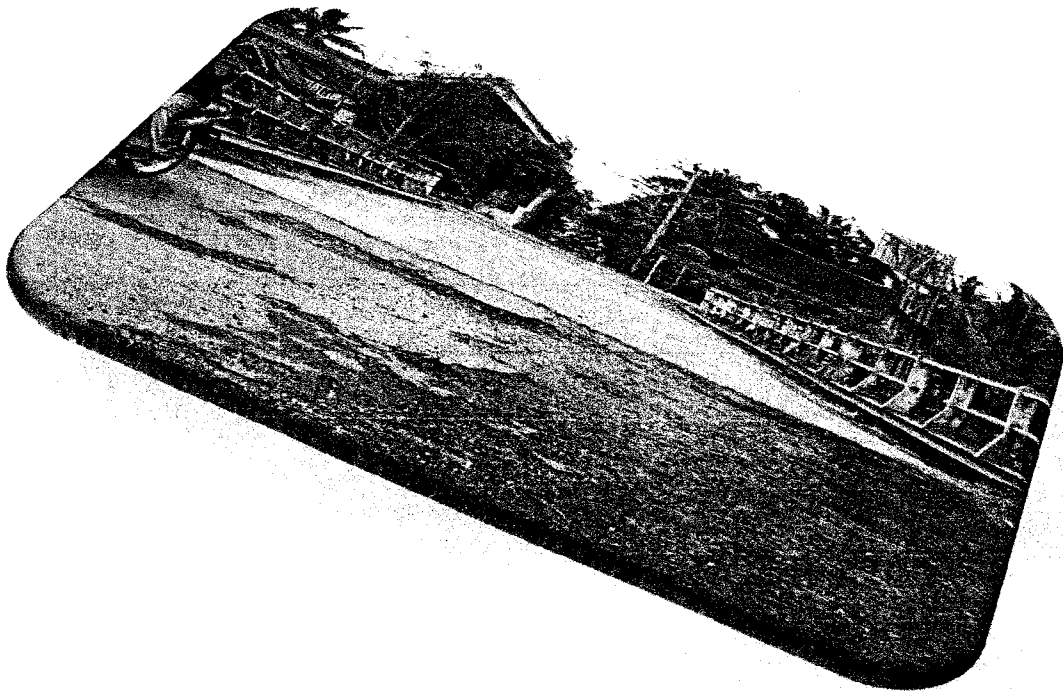
Lingkup capaian Visi - Misi - Tujuan - Sasaran - Strategi - Arah sebagaimana diuraikan pada penjelasan terdahulu, diformulasikan kedalam Indikator - Indikator Makro RPJMD Kabupaten Pinrang 2009 - 2014, yang digambarkan sebagai berikut :

Rencana Pencapaian Indikator Makro RPJMD Kabupaten Pinrang 2009 - 2014

NO	INDIKATOR MAKRO	EKSTING (07/08)	TARGET						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014 *)	
1	I P M	71.4	71.7	72.0	72.3	72.7	73.1	73.5	
	a. RLS (Thn)	7.1	7.3	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	
	b. AMH (%)	89.2	90.0	90.6	91.2	91.8	92.4	93.0	
	c. AHH (Thn)	71.0	71.3	71.6	71.9	72.2	72.6	73.0	
	d. Daya Beli (RP)	600 rb	625 rb	660 rb	700 rb	750 rb	810 rb	880 rb	
2	LPE (%)	5.01	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	
3	Pdd Miskin (%)	25.0	24.5	24.0	23.0	22.0	21.0	20.0	
4	Pencari kerja (%)	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	
5	Kontribusi sektor Pertanian (%)	55.7	56.0	56.4	56.8	57.2	57.6	58	
6	Kontribusi Sktr. Perdagangan (%)	< 20	20.4	20.8	21.2	21.6	22.0	22.5	
7	Kontribusi sektor Industri (%)	< 4.50	4.50	4.55	4.60	4.65	4.70	4.8	
9	PAD dari total APBD (%)	< 6.0	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	9.0	

Sumber : RPJP Kabupaten Pinrang 2009 - 2014

Keterangan : \*) : Termasuk Masa Transisi hingga Akhir 2014

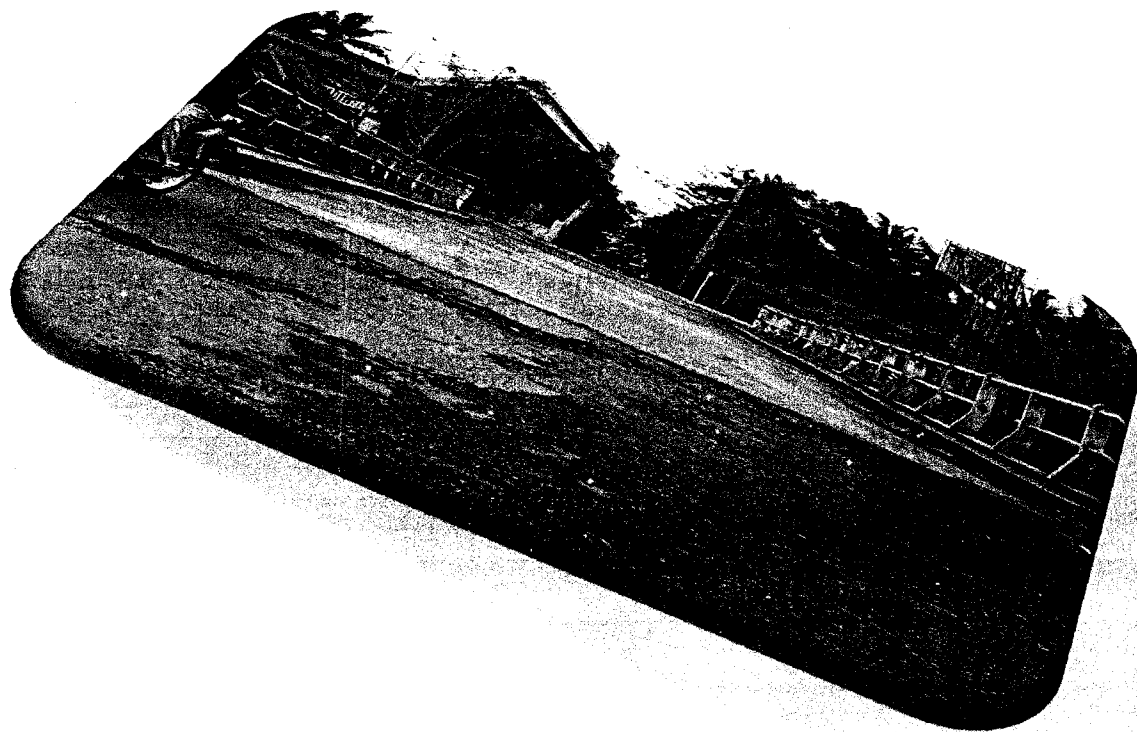


V - I

# BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN  
DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Tahun 2009 - 2014  
KABUPATEN PINRANG



# **BAB V**

## **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

V - I



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Tahun 2009 - 2014  
KABUPATEN PINRANG**

## 5.1. Proyeksi Keuangan Daerah OPTIMIS dan PESIMIS

Dalam merencanakan proyeksi APBD, sangat ditentukan dengan asumsi yang digunakan. Dengan memperhatikan kondisi krisis ekonomi saat ini yang kemungkinan masih berlangsung dalam Tahun Anggaran yang akan datang, yang akan berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat sehingga berpengaruh kepada proyeksi keuangan.

Ada dua analisis yang digunakan dalam rangka proyeksi keuangan yaitu proyeksi :

1. OPTIMIS dan
2. PESIMIS.

Perbedaan keduanya sangat ditentukan dengan asumsi yang digunakan dalam proyeksi kedepan, yakni laju inflasi berikut asumsi tersebut :

Asumsi tersebut juga telah dibahas pada bab.II

### ASUMSI OPTIMIS:

ASUMSI	Nilai Umum		Nilai Proyeksi					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Laju Inflasi	5.4%	8.0%	8.0%	7.5%	7.5%	6.0%	6.0%	6.0%
Prosentase pertumbuhan PDRB riil	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%
Prosentase pertumbuhan penduduk	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
Prosentase kenaikan gaji/pensiun	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%

### ASUMSI PESIMIS

ASUMSI PESIMIS	Nilai Umum		Nilai Proyeksi					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Laju Inflasi	5.4%	8.0%	8.0%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%
Prosentase pertumbuhan PDRB riil	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%
Prosentase pertumbuhan penduduk	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
Prosentase kenaikan gaji/pensiun	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%

### Proyeksi dan alternatif pendanaan OPTIMIS

Asumsi ini diambil berdasarkan atas, asumsi dasar tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2007 dan 2008. Dalam analisis ini, faktor yang besar sekali pengaruhnya adalah inflasi. Diharapkan pertumbuhan inflasi pada tahun proyeksi dapat menurun dari 8% tahun 2009 menjadi 6% tahun 2014. Optimisme terhadap rendahnya inflasi ini dapat dicapai, melihat pertumbuhan ekonomi yang kian membaik setiap tahunnya, termasuk inflasi tingkat nasional yang diprediksi ikut menurun, seiring situasi ekonomi nasional yang kian membaik yang menunjukkan trend yang semakin meningkat.

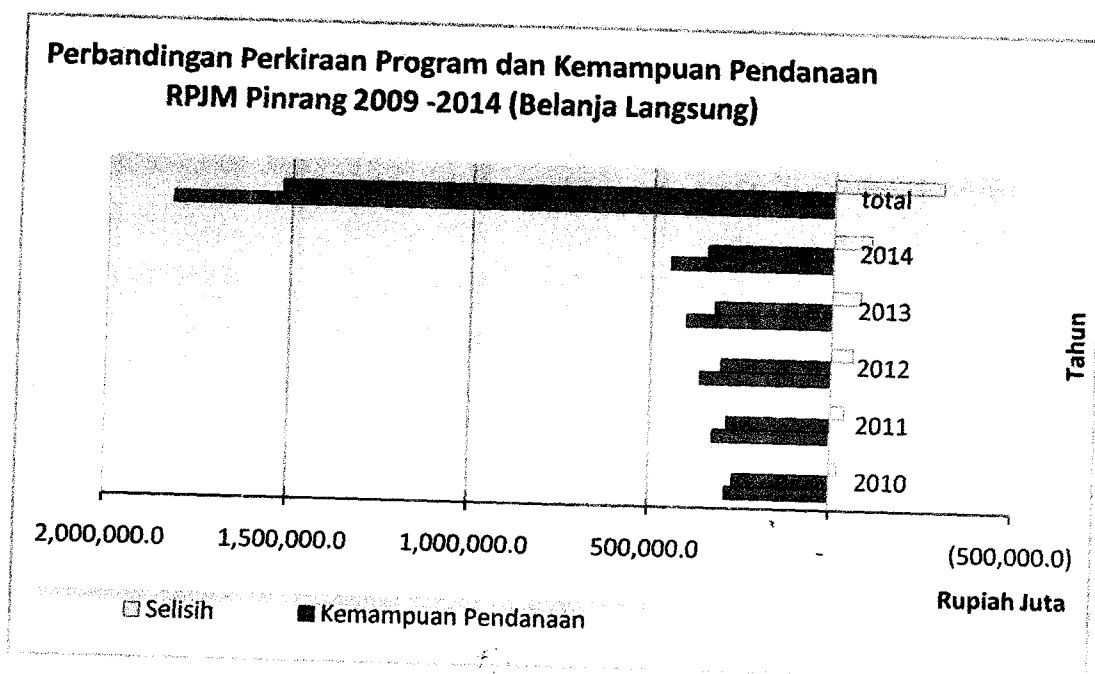
Rata-rata pertumbuhan penerimaan dari tahun 2007 sampai 2009 adalah sebesar, 5,2% sedangkan untuk tahun proyeksi dari 2010 sampai 2014 terjadi kenaikan 1% yaitu sebesar 6,2%.

Hampir sekitar 70% dari total Penerimaan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), pada tahun 2007 jumlah DAU sebesar Rp.315,9 milyar dan meningkat sebesar 5,1% tahun 2009 atau sekitar Rp.348,9 milyar.

Pada tahun proyeksi pertumbuhan DAU diasumsikan berkisar 5,1%, hal ini dilakukan mengingat bahwa dana perimbangan tersebut sangat bergantung atas kebijakan pusat dan diharapkan bahwa proyeksi ini adalah merupakan proyeksi minimal.

Besarnya program RPJM selama kurun waktu 5 (lima) tahun, belum mencukupi terhadap ketersediaan dana dalam APBD pada tahun proyeksi. Oleh karenanya dibutuhkan alternatif pendanaan lain yang bersumber dari luar APBD. Adapun sumber pendanaan lain yang dapat diupayakan dalam membiayai program RPJM, antara lain sebagai berikut :

1. APBD Propinsi
2. Dana Pusat
3. Melibatkan sector swasta
4. Partisipasi aktif masyarakat
5. Pinjaman



Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa untuk melaksanakan program jangka lima tahunan, masih dibutuhkan dana yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Berikut rincian perkiraan sumber dana yang diperlukan sebagai berikut :

TABEL PERKIRAAN KEMAMPUAN PENDANAAN DAN PERKIRAAN PROGRAM RPJM 2009 - 2014  
(dalam Rp.Juta)

TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014	total
Perkiraan Program	285,610.7	323,784.8	362,208.1	401,678.9	449,354.9	1,822,637.3
Kemampuan Pendanaan	265,668.4	284,532.0	303,600.4	324,058.8	346,014.4	1,523,874.0
Selisih	(19,942.2)	(39,252.8)	(58,607.7)	(77,620.2)	(103,340.5)	(298,763.4)

Sumber data : diolah dari APBD 2007 - 2009



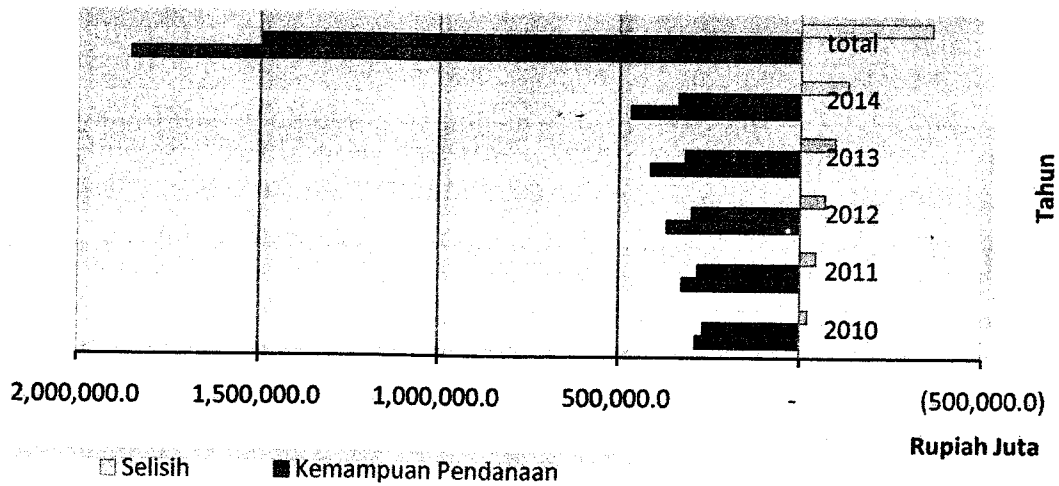
# PROYEKSI APBD 2010 - 2014 (Rp. Juta)

## Ringkasan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Pinrang, Tahun Anggaran 2007 - 2009 (Rp.Juta)

URAIAN	Realisasi		APBD 2009	Pertum- buhan	PROYEKSI			Transisi 2014	Pertum- buhan	
	2007	2008			2010	2011	2012			2013
<b>PENDAPATAN</b>										
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>										
- Hasil Pajak Daerah	22,711.6	22,980.7	22,863.7	0.3%	26,087.6	29,779.2	33,561.6	37,842.4	42,689.8	13.1%
- Hasil Retribusi Daerah	2,749.2	3,716.5	3,320.9	9.9%	3,740.7	4,213.5	4,682.9	5,204.5	5,784.3	11.5%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11,371.9	9,418.5	10,466.6	-4.1%	11,789.6	13,279.8	14,759.2	16,403.4	18,230.7	11.5%
- Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	3,210.3	4,811.1	4,041.3	12.2%	4,588.7	5,210.2	5,837.9	6,541.1	7,329.0	12.4%
	5,380.2	5,034.7	5,034.9	-3.3%	5,968.7	7,075.7	8,281.8	9,693.5	11,345.8	17.4%
<b>DANA PERIMBANGAN</b>										
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	401,847.4	436,305.4	432,447.6	3.7%	461,837.4	487,156.2	513,490.0	541,576.1	571,555.6	5.5%
- Dana Alokasi Umum	44,261.2	41,519.6	34,318.7	-11.9%	45,456.0	51,613.4	57,830.6	64,796.8	72,602.1	12.4%
- Dana Alokasi Khusus	315,934.1	343,004.8	348,915.9	5.1%	366,676.3	385,340.7	404,955.2	425,568.0	447,230.2	5.1%
	41,652.0	51,781.0	49,213.0	8.7%	49,705.1	50,202.2	50,704.2	51,211.2	51,723.4	1.0%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>										
- Pendapatan Hibah	5,044.1	16,217.1	20,500.0	101.6%	23,276.9	26,429.9	29,613.6	33,180.8	37,177.7	12.4%
- Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Bagi Hasil pajak dari Prov.& Pemda lainnya	5,044.1	-	8,500.0	29.8%	9,651.4	10,958.7	12,278.8	13,757.9	15,415.1	12.4%
- Bantuan Keuangan dari Prov. atau Pemda Lainnya	-	16,217.1	12,000.0	-	13,625.5	15,471.2	17,334.8	19,422.9	21,762.6	12.4%
- Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>429,603.1</b>	<b>475,503.3</b>	<b>475,811.3</b>	<b>5.2%</b>	<b>511,201.9</b>	<b>543,365.4</b>	<b>576,665.3</b>	<b>612,599.3</b>	<b>651,423.0</b>	<b>6.2%</b>



**Perbandingan Perkiraan Program dan Kemampuan Pendanaan  
RPJM Pinrang 2009 -2014 (Belanja Langsung) - PESIMIS**



Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa untuk melaksanakan program jangka lima tahunan, masih dibutuhkan dana yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Berikut rincian perkiraan sumber dana yang diperlukan sebagai berikut :

TABEL PERKIRAAN KEMAMPUAN PENDANAAN DAN PERKIRAAN PROGRAM RPJM 2009 - 2014 (PESIMIS)  
(dalam Rp.Juta)

TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014	total
Perkiraan Program	285,610.7	323,784.8	367,064.9	412,120.5	467,217.5	1,855,798.2
Kemampuan Pendanaan	264,548.4	280,622.9	297,794.1	316,141.7	335,751.6	1,494,858.8
Selisih	(21,062.3)	(43,161.9)	(69,270.8)	(95,978.7)	(131,465.8)	(360,939.5)

Sumber data : diolah dari apbd 2007 - 2009

## Proyeksi dan alternatif pendanaan PESIMIS

Rata-rata pertumbuhan penerimaan dari tahun 2007 sampai 2009 adalah sebesar, 5,2% sedangkan untuk tahun proyeksi dari 2010 sampai 2014 terjadi kenaikan 1% yaitu sebesar 6,2%.

Hampir sekitar 70% dari total Penerimaan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), pada tahun 2007 jumlah DAU sebesar Rp.315,9 milyar dan meningkat sebesar 5,1% tahun 2009 atau sekitar Rp.348,9 milyar.

Pada tahun proyeksi pertumbuhan DAU diasumsikan berkisar 4,6%, dengan memperhatikan kondisi perekonomian global saat ini asumsi pertumbuhan DAU kurang sebesar 0,5% dari rata-rata pertumbuhan 2007-2009.

Laju inflasi untuk tahun proyeksi terjadi perbedaan yaitu pada tahun 2012 sebesar 6% menjadi 7,5% pesimis, berikut ringkasannya

Inflasi	2012	2013	2014	Keterangan
Optimis	6%	6%	6%	Kodisi ekonomi yang membaik
Pesimis	7,5%	7,5%	7,5%	Kondisi krisis ekonomi

Dengan berubahnya asumsi laju inflasi dan pertumbuhan DAU yang menurun, berakibat langsung terhadap APBD baik dari sisi pendapatan maupun belanja, khususnya untuk belanja langsung. Berikut ringkasan perbandingan belanja langsung baik optimis maupun pesimis.

Bila dilihat perbandingan kemampuan untuk mendanai program, terjadi penurunan terhadap kualitas pendanaan dari sisi pesimis, yaitu sebesar Rp.29 milyar selama 2010 sampai 2014.

Perbandingan Belanja Langsung Optimis dan Pesimis - RPJM Pinrang Periode 2010 - 2014  
(dalam Rp.Juta)

TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014	total
Belanja Langsung Optimis	285,611	323,785	362,208	401,679	449,355	1,822,637
Belanja Langsung Pesimis	285,611	323,785	367,065	412,120	467,217	1,855,798
Selisih	-	-	(4,857)	(10,442)	(17,863)	(33,161)

Perbandingan Kemampuan Pendanaan Optimis dan Pesimis - RPJM Pinrang Periode 2010 - 2014  
(dalam Rp.Juta)

TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014	total
Optimis	265,668	284,532	303,600	324,059	346,014	1,523,874
Pesimis	264,548	280,623	297,794	316,142	335,752	1,494,859
Selisih	1,120	3,909	5,806	7,917	10,263	29,015

# PROYEKSI APBD 2010 - 2014 (Rp. Juta) - PESIMIS

Ringkasan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (ABPD)  
Kabupaten Pinrang, Tahun Anggaran 2007 - 2009 (Rp. Juta)

URAIAN	Realisasi		APBD 2009	Pertum- bahan	PROYEKSI			Transisi 2014	Pertum- bahan
	2007	2008			2010	2011	2012		
<b>PENDAPATAN</b>									
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>									
- Hasil Pajak Daerah	22,711.6	22,980.7	22,863.7	0.3%	26,087.6	29,779.2	38,855.9	44,415.4	14.2%
- Hasil Retribusi Daerah	2,749.2	3,716.5	3,320.9	9.9%	3,740.7	4,213.5	4,746.1	6,021.7	12.6%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11,371.9	9,418.5	10,466.6	-4.1%	11,789.6	13,279.8	14,958.4	18,978.8	12.6%
- Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	3,210.3	4,811.1	4,041.3	12.2%	4,588.7	5,210.2	5,916.0	7,627.3	13.5%
	5,380.2	5,034.7	5,034.9	-3.3%	5,968.7	7,075.7	8,387.9	11,787.6	18.5%
<b>DANA PERIMBANGAN</b>									
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	401,847.4	436,305.4	432,447.6	3.7%	460,061.4	483,432.4	508,408.3	563,784.0	5.2%
- Dana Alokasi Umum	44,261.2	41,519.6	34,318.7	-11.9%	45,456.0	51,613.4	58,604.8	75,557.1	13.5%
- Dana Alokasi Khusus	315,934.1	343,004.8	348,915.9	5.1%	364,900.2	381,616.8	399,099.3	436,503.5	4.6%
	41,652.0	51,781.0	49,213.0	8.7%	49,705.1	50,202.2	50,704.2	51,723.4	1.0%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>									
- Pendapatan Hibah	5,044.1	16,217.1	20,500.0	101.6%	23,276.9	26,429.9	30,010.1	38,690.9	13.5%
- Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Bagi Hasil pajak dari Prov. & Pemda lainnya	5,044.1	-	8,500.0	29.8%	9,651.4	10,958.7	12,443.2	16,042.6	13.5%
- Bantuan Keuangan dari Prov. atau Pemda Lainnya	-	16,217.1	12,000.0	-	13,625.5	15,471.2	17,566.9	22,648.3	13.5%
- Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>429,603.1</b>	<b>475,503.3</b>	<b>475,811.3</b>	<b>5.2%</b>	<b>509,425.9</b>	<b>539,641.5</b>	<b>608,068.3</b>	<b>646,890.3</b>	<b>6.2%</b>

## PROYEKSI APBD 2010 - 2014 (Rp. Juta) - PESIMIS

### Ringkasan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Pinrang, Tahun Anggaran 2007 - 2009 (Rp. Juta)

URAIAN	Realisasi		PROYEKSI					Transisi	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Pertumbuhan
<b>BELANJA</b>									
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>192,832.2</b>	<b>268,302.3</b>	<b>258,783.1</b>	<b>268,375.3</b>	<b>279,869.0</b>	<b>291,991.4</b>	<b>304,772.0</b>	<b>318,242.0</b>	<b>4.4%</b>
- Belanja Pegawai	161,794.9	208,034.6	224,327.2	235,543.6	247,320.8	259,686.8	272,671.1	286,304.7	5.0%
- Belanja Hibah	-	23,938.4	2,350.0	14,021.5	13,419.9	12,844.2	12,293.1	11,765.7	-4.3%
- Belanja Bantuan Sosial	18,855.8	15,306.7	14,650.0	14,021.5	340.6	439.2	498.7	566.2	13.5%
- Belanja Bagi Hasil kod Prov./Kab/Kota & Perm. Desa	-	-	300.0	340.6	386.8	439.2	498.7	566.2	13.5%
- Belanja Bantuan Keuangan kod Prov./Kab/Kota & Perm. Desa	10,276.1	17,583.7	15,655.8	15,812.4	15,970.5	16,130.2	16,291.5	16,454.4	1.0%
- Belanja Tidak Terduga	1,905.4	3,438.9	1,500.0	2,657.2	2,771.0	2,891.0	3,017.5	3,150.9	4.4%
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>212,974.4</b>	<b>239,059.5</b>	<b>248,198.9</b>	<b>264,548.4</b>	<b>280,622.9</b>	<b>297,794.1</b>	<b>316,141.7</b>	<b>335,751.6</b>	<b>6.1%</b>
- Belanja Pegawai	29,864.7	30,545.2	39,916.0	40,714.3	41,528.6	42,359.2	43,206.4	44,070.5	2.0%
- Belanja Barang dan Jasa	62,061.4	69,929.3	71,405.7	78,289.2	85,053.3	92,402.0	100,385.5	109,058.8	8.6%
- Belanja Modal	121,048.4	138,585.0	136,877.2	145,544.9	154,041.0	163,033.0	172,549.9	182,622.4	5.8%
	<b>405,806.6</b>	<b>507,361.8</b>	<b>506,982.0</b>	<b>532,923.7</b>	<b>560,491.9</b>	<b>589,785.5</b>	<b>620,913.8</b>	<b>653,993.6</b>	<b>5.3%</b>
	<b>23,796.5</b>	<b>(31,858.5)</b>	<b>(31,170.7)</b>	<b>(23,497.8)</b>	<b>(20,850.4)</b>	<b>(17,358.8)</b>	<b>(12,845.5)</b>	<b>(7,103.3)</b>	<b>-25.9%</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>									
<b>PEMBAYARAN</b>									
<b>PENERIMAAN PEMBAYARAN DAERAH</b>	<b>48,803.9</b>	<b>63,617.0</b>	<b>35,170.7</b>	<b>24,000.0</b>	<b>21,000.0</b>	<b>17,400.0</b>	<b>13,000.0</b>	<b>7,200.0</b>	<b>-26.0%</b>
- Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	46,876.3	63,413.5	33,552.7	-	-	-	-	-	-
- Sebelumnya	409.0	119.2	-	24,000.0	21,000.0	17,400.0	13,000.0	7,200.0	-26.0%
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1,518.6	84.2	1,618.0	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Piutang Daerah	<b>48,803.9</b>	<b>63,617.0</b>	<b>35,170.7</b>	<b>24,000.0</b>	<b>21,000.0</b>	<b>17,400.0</b>	<b>13,000.0</b>	<b>7,200.0</b>	<b>-26.0%</b>
<b>Jumlah Pembayaran</b>									
<b>PENGELUARAN PEMBAYARAN DAERAH</b>	<b>8,982.4</b>	<b>4,691.8</b>	<b>4,000.0</b>	<b>502.2</b>	<b>149.6</b>	<b>2,641.2</b>	<b>154.5</b>	<b>96.7</b>	<b>-33.8%</b>
- Penyetaraan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,000.0	3,000.0	1,500.0	502.2	149.6	2,641.2	154.5	96.7	-33.8%
- Pembayaran Pokok Utang	4,472.9	1,391.8	2,500.0	-	-	-	-	-	-
- Pemberian Pinjaman Daerah	509.5	300.0	-	502.2	149.6	2,641.2	154.5	96.7	-33.8%
	<b>8,982.4</b>	<b>4,691.8</b>	<b>4,000.0</b>	<b>502.2</b>	<b>149.6</b>	<b>2,641.2</b>	<b>154.5</b>	<b>96.7</b>	<b>-33.8%</b>
<b>Jumlah Pengeluaran Pembayaran</b>	<b>39,821.4</b>	<b>58,925.2</b>	<b>31,170.7</b>	<b>23,497.8</b>	<b>20,850.4</b>	<b>17,358.8</b>	<b>12,845.5</b>	<b>7,103.3</b>	<b>-25.9%</b>
<b>Pembayaran Neto</b>									
<b>Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>63,617.94</b>	<b>27,066.73</b>	<b>-100.0%</b>						

## **5.2. Investasi Dan Pembiayaan Pembangunan Optimis**

Untuk menghitung besarnya program dalam RPJM pada tahun proyeksi diperlukan asumsi, seperti pada tabel diatas. Hampir sekitar 91% dari total belanja merupakan belanja untuk urusan wajib. Belanja pendidikan menempati urutan pertama dari total belanja tersebut, sesuai dengan amanah undang-undang, yang mewajibkan bagi setiap pemerintah daerah mengalokasikan 20% dari total anggarannya.

Pada tahun proyeksi, belanja pendidikan turun dari 35,2% tahun 2009 menjadi 20,37% untuk keseluruhan 2009 - 2014. Hal ini disebabkan karena alokasi dana diperuntukkan lebih besar untuk sector ke PU an, yang diharapkan dengan meningkatnya anggaran untuk sector ini, kebijakan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dapat tercapai sesuai amanah dalam RPJM 2009 - 2014, ini.

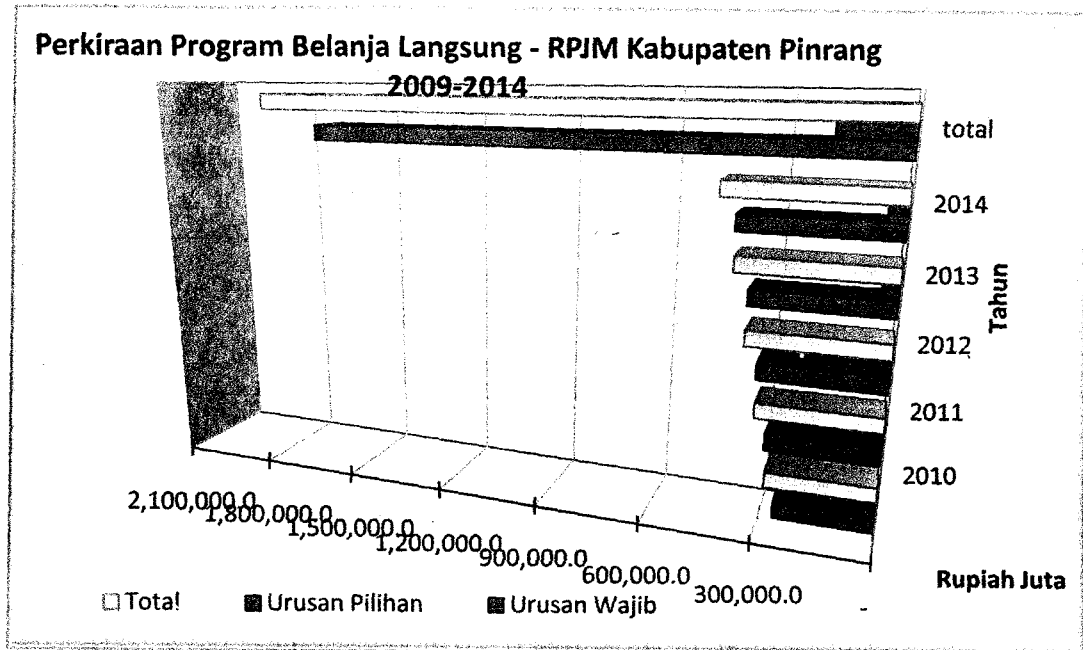
Adapun rincian program-program prioritas akan ditampilkan dalam lampiran.

Berikut ringkasan alokasi belanja untuk tahun 2009-2014, sebagai berikut :

V - II

No.	Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Langsung (dalam Rp. Juta)				
		Pegawai	Brg & jasa	Modal	TOTAL	
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>	<b>301,388.36</b>	<b>532,612.18</b>	<b>1,030,689.75</b>	<b>1,864,690.29</b>	<b>90.05%</b>
	1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	106,081.47	35,085.89	275,465.37	416,632.73	20.12%
	2 Dinas Kesehatan	28,283.87	27,456.78	62,442.89	118,183.54	5.71%
	3 RSU Lasinrang	9,395.96	64,731.08	13,250.07	87,377.11	4.22%
	4 Dinas PU	11,799.74	6,930.56	488,133.13	506,863.43	24.48%
	5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	8,662.97	10,456.67	68,519.95	87,639.59	4.23%
	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan					
	6 Kebakaran	11,158.41	10,612.66	7,511.38	29,282.44	1.41%
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
	7 & Penanaman Modal	5,412.48	34,832.48	5,937.63	46,182.59	2.23%
	Dinas Perhubungan Informatika &					
	8 Komunikasi	1,631.23	9,275.71	2,891.57	13,798.51	0.67%
	9 Badan Lingkungan Hidup	2,381.23	6,983.67	10,093.07	19,457.97	0.94%
	10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10,002.66	7,303.65	1,279.27	18,585.57	0.90%
	Badan keluarga berencana daerah dan					
	11 Pemberdayaan Perempuan	4,158.69	6,207.45	7,856.57	18,222.71	0.88%
	12 Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata	1,424.88	10,548.15	1,771.43	13,744.45	0.66%
	13 Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi	9,050.02	8,839.86	1,243.73	19,133.61	0.92%
	dinas koperasi dan usaha kecil dan					
	14 menengah	4,345.64	8,418.34	2,763.98	15,527.96	0.75%
	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan					
	15 Perlindungan Masy	1,878.11	4,830.98	646.56	7,355.64	0.36%
	16 Satuan Polisi Pamong Praja	2,421.70	9,597.13	2,172.85	14,191.67	0.69%
	17 sekretariat daerah	18,726.02	112,582.20	31,554.74	162,862.96	7.86%
	18 sekretariat DPRD	20,459.94	89,449.52	9,111.05	119,020.50	5.75%
	dinas pendapatan, pengelolaan keuangan					
	19 dan asset daerah	19,634.24	16,810.94	5,883.96	42,329.15	2.04%
	20 Inspektorat Kab Pinrang	10,304.33	3,161.18	1,128.70	14,594.20	0.70%
	21 Kec. Watang sawito	355.85	1,144.89	152.06	1,652.80	0.08%
	22 Kec. Paleteang	335.99	1,254.20	2,128.60	3,718.79	0.18%
	23 Kec. Tiroang	422.08	1,098.68	1,414.59	2,935.35	0.14%
	24 Kec. Mattiro bulu	396.94	1,057.53	198.34	1,652.80	0.08%
	25 Kec. Suppa	355.77	1,190.42	106.61	1,652.80	0.08%
	26 Kec. Mattiro sompe	397.21	1,153.49	102.09	1,652.79	0.08%
	27 Kec. Lanrisang	434.03	1,115.69	1,273.65	2,823.37	0.14%
	28 Kec. Patampanua	430.99	1,028.54	2,998.09	4,457.63	0.22%
	29 Kec. Duampanua	411.55	1,088.35	908.62	2,408.52	0.12%
	30 Kec. Batulappa	359.08	1,159.01	956.56	2,474.64	0.12%
	31 Kec. Cempa	386.55	1,216.67	2,931.24	4,534.45	0.22%
	32 Kec. Lembang	348.86	1,153.12	930.86	2,432.84	0.12%
	33 badan kepegawaian daerah	5,099.99	25,083.92	5,476.96	35,660.86	1.72%
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan					
	34 Pemdes	4,022.19	7,942.09	10,751.76	22,716.04	1.10%
	35 Kantor Perpustakaan dan arsip daerah	417.70	1,810.72	701.86	2,930.28	0.14%
	<b>2 Urusan pilihan</b>	<b>42,068.61</b>	<b>61,176.90</b>	<b>102,900.40</b>	<b>206,145.91</b>	<b>9.95%</b>
	1 dinas pertanian dan peternakan	8,427.42	18,126.85	51,031.79	77,586.06	3.75%
	2 kantor ketahanan pangan	1,552.07	4,092.71	543.99	6,188.77	0.30%
	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,					
	3 Perikanan dan Kehutanan	12,866.05	9,821.80	2,882.37	25,570.22	1.23%
	4 dinas kehutanan dan perkebunan	5,225.59	11,951.94	7,455.11	24,632.64	1.19%
	5 Dinas Kelautan dan Perikanan	10,352.97	8,747.18	28,621.58	47,721.72	2.30%
	dinas perindustrian perdagangan energi					
	6 dan Mineral	3,644.51	8,436.42	12,365.57	24,446.50	1.18%
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>343,456.97</b>	<b>593,789.09</b>	<b>1,133,590.15</b>	<b>2,070,836.20</b>	<b>100.00%</b>



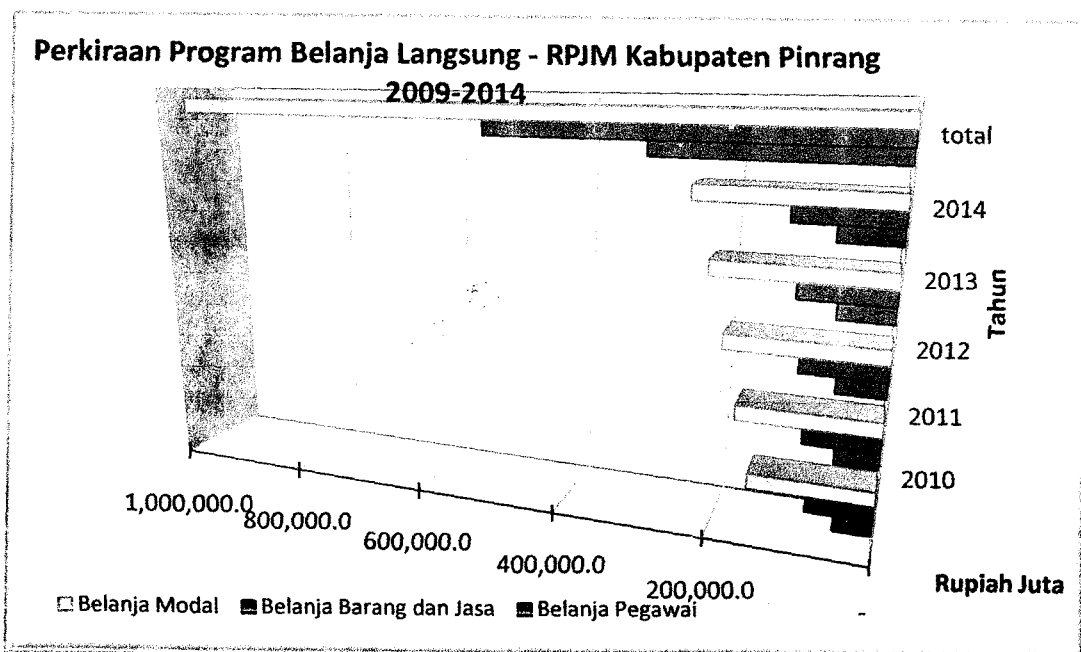


Dari hasil perhitungan program berikut dapat disimpulkan, jumlah kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan RPJM dalam kurun waktu 5 tahun (2009 - 2014)

TABEL PERKIRAAN PROGRAM RPJM 2009 - 2014  
(dalam Rp.Juta)

JENIS BELANJA	2010	2011	2012	2013	2014	total
Belanja Pegawai	47,444.8	53,786.2	60,169.0	66,905.6	74,846.7	303,152.3
Belanja Barang dan Jasa	82,370.4	93,379.8	104,461.2	114,427.9	128,009.4	522,648.7
Belanja Modal	155,795.4	176,618.7	197,578.0	220,345.4	246,498.7	996,836.3
<b>TOTAL</b>	<b>285,610.7</b>	<b>323,784.8</b>	<b>362,208.1</b>	<b>401,678.9</b>	<b>449,354.9</b>	<b>1,822,637.3</b>

Sumber data : diolah



Tabel proyeksi diatas memperlihatkan bahwa rata-rata belanja modal adalah sebesar 55,3 % atau Rp.996,8 milyar dana yang dibutuhkan untuk periode selama lima tahun. Dari total estimasi program sebesar Rp.1,8 trilyun, belanja barang dan jasa menduduki peringkat kedua dari total dana yang diperlukan, yakni sebesar 28,5%.

Hampir setiap tahun terjadi kenaikan terhadap kebutuhan pendanaan program yang ada dalam RPJM, hal ini disebabkan karena, pengaruh terhadap factor inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan kebutuhan pendanaan urusan wajib masih jauh lebih besar daripada urusan pilihan. 90,8% dari total program adalah untuk membiayai urusan wajib.

Berubahnya struktur organisasi menimbulkan konsekwensi yang berbanding lurus dengan pendanaan. Salah satu diantaranya adalah Balai informasi penyuluhan berubah menjadi BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K). Akibatnya adalah berubahnya pagu anggaran indikatif dari Rp.850,8 juta tahun 2009 menjadi Rp.3,88 milyar tahun 2010. Kenaikan pagu anggaran indikatif disebabkan oleh perubahan organisasi dari balai menjadi badan. Sebelumnya satu bidang menjadi 4 bidang : Sekertariat, Bidang Penyuluh Pertanian dan Peternakan, Bidang Penyuluh Perikanan, Kehutanan & Perkebunan dan Bidang Kelembagaan SDM

No.	Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Langsung (dalam Rp. Juta)			
		Pegawai	Brg & jasa	Modal	TOTAL
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>	<b>36,338.56</b>	<b>64,537.75</b>	<b>124,620.87</b>	<b>225,497.19</b>
	1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12,836.60	4,245.64	33,333.22	50,415.46
	2 Dinas Kesehatan	3,422.55	3,322.46	7,556.02	14,301.03
	3 RSU Lasinrang	1,136.98	7,832.91	1,603.35	10,573.24
	4 Dinas PU	1,427.85	838.65	59,067.50	61,334.00
	5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1,048.28	1,265.33	8,291.39	10,605.00
	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan				
	6 Kebakaran	1,350.25	1,284.21	908.93	3,543.38
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	7 & Penanaman Modal	654.95	4,214.97	718.49	5,588.41
	Dinas Perhubungan Informatika &				
	8 Komunikasi	197.39	1,122.43	349.90	1,669.72
	9 Badan Lingkungan Hidup	288.15	845.07	1,221.33	2,354.55
	10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1,210.39	883.79	154.80	2,248.98
	Badan keluarga berencana daerah dan				
	11 Pemberdayaan Perempuan	503.23	751.14	950.70	2,205.07
	12 Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata	172.42	1,276.40	214.36	1,663.17
	13 Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi	1,095.12	1,069.69	150.50	2,315.30
	dinas koperasi dan usaha kecil dan				
	14 menengah	279.86	542.14	178.00	1,000.00
	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan				
	15 Perlindungan Masy	261.72	628.37	-	890.08
	16 Satuan Polisi Pamong Praja	293.04	1,161.32	262.93	1,717.29
	17 sekretariat daerah	2,369.64	14,246.46	3,993.02	20,609.12
	18 sekretariat dprd	2,475.80	10,824.01	1,102.50	14,402.31
	19 dan asset daerah	2,375.88	2,034.24	712.00	5,122.12
	20 Inspektorat Kab Pinrang	1,246.90	382.53	136.58	1,766.00
	21 Kec. Watang sawito	43.06	138.54	18.40	200.00
	22 Kec. Paletang	40.66	151.77	257.58	450.00
	23 Kec. Tiroang	51.08	132.95	171.18	355.20
	24 Kec. Mattiro bulu	48.03	127.97	24.00	200.00
	25 Kec. Suppa	43.05	144.05	12.90	200.00
	26 Kec. Mattiro some	48.07	139.58	12.35	200.00
	27 Kec. Lanrisang	52.52	135.01	154.12	341.65
	28 Kec. Patampanua	52.15	124.46	362.79	539.40
	29 Kec. Duampanua	49.80	131.70	109.95	291.45
	30 Kec. Batulappa	43.45	140.25	115.75	299.45
	31 Kec. Cempa	46.78	147.23	354.70	548.70
	32 Kec. Lembang	42.22	139.54	112.64	294.39
	33 badan kepegawaian daerah	617.13	3,035.33	662.75	4,315.21
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan				
	34 Pemdes	486.71	961.05	1,301.04	2,748.80
	35 Kantor Perpustakaan dan arsip daerah	26.90	116.61	45.20	188.71
<b>2</b>	<b>Urusan pilihan</b>	<b>3,966.07</b>	<b>6,602.65</b>	<b>12,132.95</b>	<b>22,701.67</b>
	1 dinas pertanian dan peternakan	1,019.78	2,193.48	6,175.20	9,388.45
	2 kantor ketahanan pangan	192.10	556.79	-	748.88
	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,				
	3 Perikanan dan Kehutanan	428.07	326.78	95.90	850.75
	4 dinas kehutanan dan perkebunan	632.33	1,446.27	902.12	2,980.72
	5 Dinas Kelautan dan Perikanan	1,252.78	1,058.47	3,463.41	5,774.66
	dinas perindustrian perdagangan energi				
	6 dan Mineral	441.01	1,020.87	1,496.32	2,958.20
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>40,304.63</b>	<b>71,140.40</b>	<b>136,753.82</b>	<b>248,198.85</b>

No.	Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Langsung (dalam Rp. Juta)			
		Pegawai	Brg & jasa	Modal	TOTAL
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>	<b>41,498.40</b>	<b>73,853.30</b>	<b>141,629.92</b>	<b>256,981.63</b>
	1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	14,552.16	4,813.05	37,788.09	57,153.29
	2 Dinas Kesehatan	3,879.96	3,766.50	8,565.86	16,212.31
	3 RSU Lasinrang	1,288.93	8,879.75	1,817.63	11,986.31
	4 Dinas PU	1,618.68	950.73	66,961.65	69,531.06
	5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1,188.38	1,434.44	9,399.50	12,022.32
	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan				
	6 Kebakaran	1,530.70	1,455.83	1,030.40	4,016.94
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	7 & Penanaman Modal	742.48	4,778.29	814.52	6,335.28
	Dinas Perhubungan Informatika &				
	8 Komunikasi	223.77	1,272.43	396.66	1,892.87
	9 Badan Lingkungan Hidup	326.65	958.01	1,384.56	2,669.23
	10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1,372.16	1,001.91	175.49	2,549.55
	Badan keluarga berencana daerah dan				
	11 Pemberdayaan Perempuan	570.48	851.53	1,077.76	2,499.77
	12 Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata	195.46	1,446.99	243.00	1,885.45
	13 Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi	1,241.47	1,212.64	170.61	2,624.73
	dinas koperasi dan usaha kecil dan				
	14 menengah	634.52	1,229.19	403.58	2,267.29
	<b>Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan</b>				
	15 <b>Perlindungan Masy</b>	252.26	655.88	100.90	1,009.04
	16 Satuan Polisi Pamong Praja	332.21	1,316.53	298.07	1,946.80
	17 sekretariat daerah	2,686.33	16,150.44	4,526.68	23,363.45
	18 sekretariat dprd	2,806.68	12,270.60	1,249.85	16,327.12
	19 dan asset daerah	2,693.41	2,306.11	807.16	5,806.67
	20 Inspektorat Kab Pinrang	1,413.54	433.65	154.83	2,002.02
	21 Kec. Watang sawito	48.81	157.06	20.86	226.73
	22 Kec. Paletang	46.09	172.05	292.00	510.14
	23 Kec. Tiroang	57.90	150.72	194.05	402.67
	24 Kec. Mattiro bulu	54.45	145.07	27.21	226.73
	25 Kec. Suppa	48.80	163.30	14.62	226.73
	26 Kec. Mattiro sompe	54.49	158.23	14.01	226.73
	27 Kec. Lanrisang	59.54	153.05	174.72	387.31
	28 Kec. Patampunua	59.12	141.09	411.28	611.49
	29 Kec. Duampunua	56.46	149.30	124.64	330.40
	30 Kec. Batulappa	49.26	158.99	131.22	339.47
	31 Kec. Cempa	53.03	166.90	402.10	622.03
	32 Kec. Lembang	47.86	158.18	127.69	333.73
	33 badan kepegawaian daerah	699.61	3,440.99	751.32	4,891.92
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan				
	34 Pemdes	551.76	1,089.49	1,474.92	3,116.17
	35 Kantor Perpustakaan dan arsip daerah	60.99	264.39	102.48	427.86
	<b>2 Urusan pilihan</b>	<b>5,946.43</b>	<b>8,517.07</b>	<b>14,165.52</b>	<b>28,629.02</b>
	1 dinas pertanian dan peternakan	1,156.07	2,486.62	7,000.49	10,643.18
	2 kantor ketahanan pangan	212.24	551.83	84.90	848.97
	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,				
	3 Perikanan dan Kehutanan	1,941.12	1,481.83	434.87	3,857.82
	4 dinas kehutanan dan perkebunan	716.84	1,639.56	1,022.69	3,379.08
	5 Dinas Kelautan dan Perikanan	1,420.21	1,199.93	3,926.28	6,546.42
	dinas perindustrian perdagangan energi				
	6 dan Mineral	499.95	1,157.30	1,696.30	3,353.55
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>47,444.83</b>	<b>82,370.38</b>	<b>155,795.45</b>	<b>285,610.65</b>

No.	Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Langsung (dalam Rp. Juta)			
		Pegawai	Brg & jasa	Modal	TOTAL
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>	<b>47,044.99</b>	<b>83,724.38</b>	<b>160,559.88</b>	<b>291,329.25</b>
	1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	16,497.17	5,456.35	42,838.76	64,792.28
	2 Dinas Kesehatan	4,398.54	4,269.92	9,710.75	18,379.21
	3 RSUD Lasinrang	1,461.21	10,066.60	2,060.57	13,588.38
	4 Dinas PU	1,835.03	1,077.80	75,911.61	78,824.43
	5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1,347.21	1,626.16	10,655.82	13,629.20
	6 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran	1,735.29	1,650.42	1,168.13	4,553.83
	7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Penanaman Modal	841.72	5,416.94	923.38	7,182.05
	8 Dinas Perhubungan Informatika & Komunikasi	253.68	1,442.50	449.68	2,145.86
	9 Badan Lingkungan Hidup	370.31	1,086.06	1,569.62	3,025.99
	10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1,555.55	1,135.82	198.94	2,890.32
	11 Badan keluarga berencana daerah dan Pemberdayaan Perempuan	646.73	965.35	1,221.81	2,833.89
	12 Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata	221.59	1,640.39	275.48	2,137.46
	13 Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi	1,407.41	1,374.72	193.42	2,975.55
	14 dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah	719.33	1,393.48	457.52	2,570.33
	15 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	285.98	743.54	114.39	1,143.91
	16 Satuan Polisi Pamong Praja	376.61	1,492.49	337.91	2,207.01
	17 sekretariat daerah	3,045.38	18,309.08	5,131.70	26,486.16
	18 sekretariat DPRD	3,181.81	13,910.67	1,416.90	18,509.37
	19 dan aset daerah	3,053.40	2,614.34	915.04	6,582.78
	20 Inspektorat Kab Pinrang	1,602.47	491.61	175.53	2,269.61
	21 Kec. Watang sawito	55.34	178.05	23.65	257.03
	22 Kec. Paleteang	52.25	195.05	331.03	578.32
	23 Kec. Tiroang	65.64	170.86	219.99	456.49
	24 Kec. Mattiro bulu	61.73	164.46	30.84	257.03
	25 Kec. Suppa	55.33	185.13	16.58	257.03
	26 Kec. Mattiro sompe	61.77	179.38	15.88	257.03
	27 Kec. Lanrisang	67.50	173.51	198.07	439.07
	28 Kec. Patampanua	67.03	159.95	466.25	693.22
	29 Kec. Duampanua	64.00	169.25	141.30	374.56
	30 Kec. Batulappa	55.84	180.24	148.76	384.84
	31 Kec. Cempa	60.11	189.21	455.85	705.17
	32 Kec. Lembang	54.25	179.33	144.76	378.34
	33 badan kepegawaian daerah	793.12	3,900.90	851.74	5,545.77
	34 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	625.51	1,235.11	1,672.05	3,532.67
	35 Kantor Perpustakaan dan arsip daerah	69.14	299.73	116.18	485.05
<b>2</b>	<b>Urusan pilihan</b>	<b>6,741.22</b>	<b>9,655.44</b>	<b>16,058.86</b>	<b>32,455.52</b>
	1 dinas pertanian dan peternakan	1,310.58	2,818.98	7,936.17	12,065.73
	2 kantor ketahanan pangan	240.61	625.59	96.24	962.44
	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,				
	3 Perikanan dan Kehutanan	2,200.57	1,679.89	492.99	4,373.44
	4 dinas kehutanan dan perkebunan	812.65	1,858.70	1,159.37	3,830.72
	5 Dinas Kelautan dan Perikanan	1,610.03	1,360.31	4,451.06	7,421.40
	6 dinas perindustrian perdagangan energi dan Mineral	566.77	1,311.98	1,923.02	3,801.78
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>53,786.20</b>	<b>93,379.83</b>	<b>176,618.74</b>	<b>323,784.77</b>

No.	Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Langsung (dalam Rp. Juta)			
		Pegawai	Brg & jasa	Modal	TOTAL
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>	<b>52,627.79</b>	<b>93,659.90</b>	<b>179,613.43</b>	<b>325,901.12</b>
	1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	18,454.88	6,103.86	47,922.41	<b>72,481.15</b>
	2 Dinas Kesehatan	4,920.51	4,776.63	10,863.12	<b>20,560.26</b>
	3 RSUD Lasinrang	1,634.61	11,261.20	2,305.10	<b>15,200.90</b>
	4 Dinas PU	2,052.79	1,205.70	84,919.99	<b>88,178.48</b>
	5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1,507.09	1,819.14	11,920.34	<b>15,246.56</b>
	6 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran	1,941.22	1,846.27	1,306.75	<b>5,094.23</b>
	7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Penanaman Modal	941.60	6,059.77	1,032.96	<b>8,034.33</b>
	8 Dinas Perhubungan Informatika & Komunikasi	283.78	1,613.68	503.04	<b>2,400.51</b>
	9 Badan Lingkungan Hidup	414.26	1,214.94	1,755.88	<b>3,385.08</b>
	10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1,740.15	1,270.61	222.55	<b>3,233.31</b>
	11 Badan keluarga berencana daerah dan Pemberdayaan Perempuan	723.48	1,079.90	1,366.80	<b>3,170.18</b>
	12 Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata	247.88	1,835.05	308.17	<b>2,391.11</b>
	13 Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah	1,574.42	1,537.86	216.37	<b>3,328.65</b>
	14 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	319.91	831.77	127.97	<b>1,279.65</b>
	16 Satuan Polisi Pamong Praja	421.30	1,669.60	378.01	<b>2,468.91</b>
	17 sekretariat daerah	3,406.78	20,481.81	5,740.68	<b>29,629.26</b>
	18 sekretariat DPRD	3,559.39	15,561.44	1,585.04	<b>20,705.87</b>
	19 dan aset daerah	3,415.75	2,924.58	1,023.63	<b>7,363.96</b>
	20 Inspektorat Kab Pinrang	1,792.63	549.95	196.36	<b>2,538.94</b>
	21 Kec. Watang sawito	61.91	199.18	26.45	<b>287.54</b>
	22 Kec. Paleteang	58.45	218.19	370.31	<b>646.95</b>
	23 Kec. Tiroang	73.43	191.14	246.09	<b>510.66</b>
	24 Kec. Mattiro bulu	69.05	183.98	34.50	<b>287.54</b>
	25 Kec. Suppa	61.89	207.10	18.55	<b>287.54</b>
	26 Kec. Mattiro some	69.10	200.67	17.76	<b>287.53</b>
	27 Kec. Lanrisang	75.51	194.10	221.57	<b>491.18</b>
	28 Kec. Patampanua	74.98	178.93	521.57	<b>775.49</b>
	29 Kec. Duampanua	71.60	189.34	158.07	<b>419.01</b>
	30 Kec. Batulappa	62.47	201.63	166.41	<b>430.51</b>
	31 Kec. Cempa	67.25	211.66	509.94	<b>788.85</b>
	32 Kec. Lembang	60.69	200.61	161.94	<b>423.24</b>
	33 badan kepegawaian daerah	887.24	4,363.82	952.82	<b>6,203.88</b>
	34 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	699.74	1,381.68	1,870.47	<b>3,951.89</b>
	35 Kantor Perpustakaan dan arsip daerah	77.35	335.30	129.97	<b>542.61</b>
<b>2</b>	<b>Urusan pilihan</b>	<b>7,541.19</b>	<b>10,801.25</b>	<b>17,964.55</b>	<b>36,307.00</b>
	1 dinas pertanian dan peternakan	1,466.11	3,153.51	8,877.95	<b>13,497.56</b>
	2 kantor ketahanan pangan	269.16	699.82	107.67	<b>1,076.65</b>
	3 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2,461.71	1,879.24	551.49	<b>4,892.44</b>
	4 dinas kehutanan dan perkebunan	909.09	2,079.27	1,296.96	<b>4,285.31</b>
	5 Dinas Kelautan dan Perikanan	1,801.09	1,521.74	4,979.27	<b>8,302.10</b>
	6 dinas perindustrian perdagangan energi dan Mineral	634.03	1,467.67	2,151.23	<b>4,252.93</b>
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>60,168.98</b>	<b>104,461.15</b>	<b>197,577.98</b>	<b>362,208.12</b>

No.	Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Langsung (dalam Rp. Juta)			
		Pegawai	Brg & jasa	Modal	TOTAL
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>	<b>58,469.39</b>	<b>102,344.76</b>	<b>200,248.83</b>	<b>361,062.97</b>
	1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	20,645.12	6,828.27	53,609.89	81,083.28
	2 Dinas Kesehatan	5,504.49	5,343.52	12,152.37	23,000.38
	3 RSUD Lasinrang	1,828.60	12,597.69	2,578.67	17,004.96
	4 Dinas PU	2,296.41	1,348.80	94,998.39	98,643.60
	5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1,685.95	2,035.03	13,335.06	17,056.04
	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan				
	6 Kebakaran	2,171.60	2,065.39	1,461.83	5,698.82
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	7 & Penanaman Modal	1,053.35	6,778.95	1,155.56	8,987.86
	Dinas Perhubungan Informatika &				
	8 Komunikasi	317.46	1,805.20	562.74	2,685.41
	9 Badan Lingkungan Hidup	463.42	1,359.13	1,964.27	3,786.83
	10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1,946.67	1,421.40	248.97	3,617.04
	Badan keluarga berencana daerah dan				
	11 Pemberdayaan Perempuan	809.35	1,208.07	1,529.01	3,546.43
	12 Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata	277.30	2,052.84	344.75	2,674.89
	13 Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi	1,761.28	1,720.38	242.05	3,723.70
	dinas koperasi dan usaha kecil dan				
	14 menengah	900.20	1,743.85	572.56	3,216.60
	<b>Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan</b>				
	<b>15 Perlindungan Masyarakat</b>	357.88	930.49	143.15	1,431.52
	16 Satuan Polisi Pamong Praja	471.30	1,867.75	422.87	2,761.92
	17 sekretariat daerah	3,406.78	20,481.81	5,740.68	29,629.26
	18 sekretariat DPRD	3,981.83	17,408.28	1,773.15	23,163.26
	19 dan aset daerah	3,821.13	3,271.67	1,145.11	8,237.92
	20 Inspektorat Kab Pinrang	2,005.38	615.22	219.66	2,840.26
	21 Kec. Watang sawito	69.25	222.81	29.59	321.66
	22 Kec. Paletang	65.39	244.09	414.26	723.73
	23 Kec. Tiroang	82.14	213.82	275.30	571.27
	24 Kec. Mattiro bulu	77.25	205.81	38.60	321.66
	25 Kec. Suppa	69.24	231.67	20.75	321.66
	26 Kec. Mattiro sompe	77.30	224.49	19.87	321.66
	27 Kec. Lanrisang	84.47	217.13	247.87	549.47
	28 Kec. Patampunua	83.88	200.17	583.48	867.52
	29 Kec. Duampunua	80.10	211.81	176.83	468.74
	30 Kec. Batulappa	69.88	225.56	186.16	481.60
	31 Kec. Cempa	75.23	236.78	570.46	882.48
	32 Kec. Lembang	67.89	224.41	181.16	473.47
	33 badan kepegawaian daerah	992.54	4,881.72	1,065.90	6,940.16
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan				
	34 Pemdes	782.78	1,545.66	2,092.46	4,420.90
	35 <b>Kantor Perpustakaan dan arsip daerah</b>	86.53	375.09	145.39	607.01
<b>2</b>	<b>Urusan pilihan</b>	<b>8,436.19</b>	<b>12,083.15</b>	<b>20,096.60</b>	<b>40,615.95</b>
	1 dinas pertanian dan peternakan	1,640.11	3,527.77	9,931.59	15,099.47
	2 kantor ketahanan pangan	301.11	782.88	120.44	1,204.43
	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,				
	3 Perikanan dan Kehutanan	2,753.86	2,102.27	616.94	5,473.08
	4 dinas kehutanan dan perkebunan	1,016.98	2,326.04	1,450.88	4,793.90
	5 Dinas Kelautan dan Perikanan	2,014.85	1,702.34	5,570.21	9,287.40
	dinas perindustrian perdagangan energi				
	6 dan Mineral	709.28	1,641.86	2,406.53	4,757.67
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>66,905.58</b>	<b>114,427.91</b>	<b>220,345.43</b>	<b>401,678.92</b>

No.	Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Langsung (dalam Rp. Juta)			
		Pegawai	Brg & jasa	Modal	TOTAL
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>	<b>65,409.23</b>	<b>114,492.09</b>	<b>224,016.81</b>	<b>403,918.13</b>
	1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	23,095.55	7,638.73	59,972.99	90,707.27
	2 Dinas Kesehatan	6,157.83	5,977.76	13,594.77	25,730.35
	3 RSUD Lasinrang	2,045.64	14,092.94	2,884.74	19,023.32
	4 Dinas PU	2,568.98	1,508.89	106,273.99	110,351.86
	5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1,886.06	2,276.58	14,917.83	19,080.47
	6 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran	2,429.35	2,310.54	1,635.34	6,375.23
	7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Penanaman Modal	1,178.38	7,583.56	1,292.71	10,054.65
	8 Dinas Perhubungan Informatika & Komunikasi	355.14	2,019.46	629.54	3,004.14
	9 Badan Lingkungan Hidup	518.43	1,520.45	2,197.42	4,236.30
	10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2,177.73	1,590.11	278.52	4,046.36
	11 Badan keluarga berencana daerah dan Pemberdayaan Perempuan	905.41	1,351.46	1,710.50	3,967.36
	12 Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata	310.22	2,296.49	385.67	2,992.38
	13 Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi	1,970.33	1,924.57	270.78	4,165.68
	14 dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah	1,007.04	1,950.83	640.51	3,598.39
	<b>Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</b>				
	15 Satuan Polisi Pamong Praja	400.36	1,040.93	160.14	1,601.44
	16 sekretariat daerah	527.24	2,089.44	473.06	3,089.74
	17 sekretariat DPRD	3,811.10	22,912.61	6,421.99	33,145.69
	18 dan aset daerah	4,454.44	19,474.52	1,983.61	25,912.57
	19 Inspektorat Kab Pinrang	4,274.67	3,660.00	1,281.03	9,215.70
	20 Kec. Watang sawito	2,243.41	688.24	245.73	3,177.38
	21 Kec. Paletang	77.47	249.26	33.11	359.84
	22 Kec. Tiroang	73.15	273.06	463.43	809.64
	23 Kec. Mattiro bulu	91.89	239.20	307.98	639.07
	24 Kec. Suppa	86.42	230.24	43.18	359.84
	25 Kec. Mattiro some	77.46	259.17	23.21	359.84
	26 Kec. Lanrisang	86.48	251.13	22.23	359.84
	27 Kec. Patampunua	94.50	242.90	277.29	614.69
	28 Kec. Duampanua	93.83	223.93	652.73	970.49
	29 Kec. Batulappa	89.60	236.95	197.82	524.37
	30 Kec. Cempa	78.18	252.33	208.26	538.77
	31 Kec. Lembang	84.16	264.89	638.17	987.22
	32 badan kepegawaian daerah	75.95	251.05	202.66	529.67
	33 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	1,110.34	5,461.15	1,192.42	7,763.91
	34 Kantor Perpustakaan dan arsip daerah	875.69	1,729.11	2,340.82	4,945.63
	35	96.80	419.61	162.65	679.05
<b>2</b>	<b>Urusan pilihan</b>	<b>9,437.50</b>	<b>13,517.33</b>	<b>22,481.92</b>	<b>45,436.76</b>
	1 dinas pertanian dan peternakan	1,834.78	3,946.49	11,110.39	16,891.66
	2 kantor ketahanan pangan	336.85	875.80	134.74	1,347.39
	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	3,080.73	2,351.79	690.17	6,122.69
	3 dinas kehutanan dan perkebunan	1,137.69	2,602.12	1,623.09	5,362.90
	4 Dinas Kelautan dan Perikanan	2,254.00	1,904.39	6,231.35	10,389.74
	5 dinas perindustrian perdagangan energi dan Mineral	793.47	1,836.74	2,692.17	5,322.37
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>74,846.74</b>	<b>128,009.42</b>	<b>246,498.74</b>	<b>449,354.89</b>



### **5.3. Investasi Dan Pembiayaan Pembangunan Pesimis**

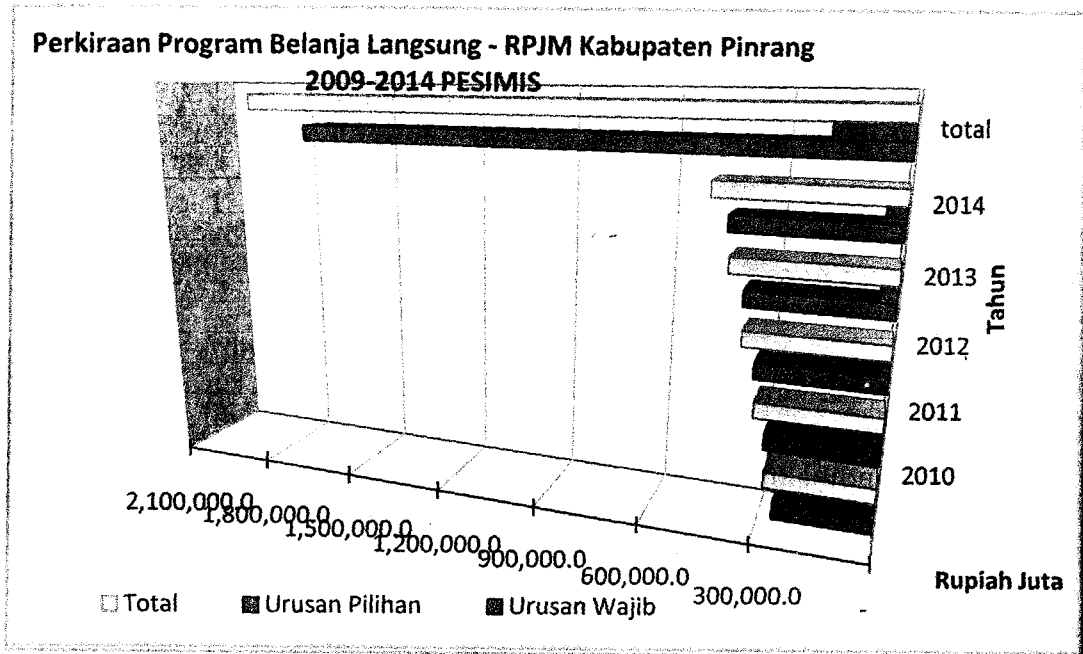
Untuk menghitung besarnya program dalam RPJM pada tahun proyeksi diperlukan asumsi, seperti pada tabel diatas. Hampir sekitar 91% dari total belanja merupakan belanja untuk urusan wajib. Belanja pendidikan menempati urutan pertama dari total belanja tersebut, sesuai dengan amanah undang-undang, yang mewajibkan bagi setiap pemerintah daerah mengalokasikan 20% dari total anggarannya.

Pada tahun proyeksi, belanja pendidikan turun dari 35,2% tahun 2009 menjadi 20,37% untuk keseluruhan 2009 - 2014. Hal ini disebabkan karena alokasi dana diperuntukkan lebih besar untuk sector ke PU an, yang diharapkan dengan meningkatnya anggaran untuk sector ini, kebijakan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dapat tercapai sesuai amanah dalam RPJM 2009 - 2014, ini.

Adapun rincian program-program prioritas akan ditampilkan dalam lampiran.

Berikut ringkasan alokasi belanja untuk tahun 2009-2014, sebagai berikut :

No.	Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Langsung (dalam Rp. Juta)				
		Pegawai	Brg & jasa	Modal	TOTAL	
1	<b>Urusan Wajib</b>	<b>306,240.32</b>	<b>540,704.77</b>	<b>1,047,470.41</b>	<b>1,894,415.50</b>	<b>90.04%</b>
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah					
1	Raga	107,827.83	35,663.49	280,000.20	423,491.52	20.13%
2	Dinas Kesehatan	28,749.49	27,908.78	63,470.86	120,129.13	5.71%
3	RSU Lasinrang	9,550.65	65,796.71	13,468.19	88,815.55	4.22%
4	Dinas PU	11,993.99	7,044.65	496,168.99	515,207.63	24.49%
5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	8,805.58	10,628.81	69,647.96	89,082.35	4.23%
6	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran	11,342.10	10,787.37	7,635.03	29,764.50	1.41%
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Penanaman Modal	5,501.59	35,405.91	6,035.37	46,942.87	2.23%
8	Dinas Perhubungan Informatika & Komunikasi	1,658.08	9,428.41	2,939.17	14,025.66	0.67%
9	Badan Lingkungan Hidup	2,420.43	7,098.64	10,259.23	19,778.30	0.94%
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10,167.33	7,423.88	1,300.33	18,891.53	0.90%
11	Badan keluarga berencana daerah dan Pemberdayaan Perempuan	4,227.15	6,309.63	7,985.91	18,522.70	0.88%
12	Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata	1,448.33	10,721.79	1,800.59	13,970.72	0.56%
13	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi	9,199.00	8,985.39	1,264.21	19,448.60	0.92%
14	dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah	4,421.79	8,565.85	2,812.41	15,800.05	0.75%
15	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masy	1,908.38	4,909.69	658.67	7,476.74	0.36%
16	Satuan Polisi Pamong Praja	2,461.56	9,755.12	2,208.62	14,425.30	0.69%
17	sekretariat daerah	18,920.27	113,750.04	31,882.07	164,552.38	7.82%
18	sekretariat dprd	20,796.76	90,922.07	9,261.04	120,979.87	5.75%
19	dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah	19,957.47	17,087.69	5,980.82	43,025.99	2.04%
20	Inspektorat Kab Pinrang	10,473.96	3,213.22	1,147.28	14,834.46	0.71%
21	Kec. Watang sawito	361.71	1,163.74	154.56	1,680.01	0.08%
22	Kec. Paleteang	341.52	1,274.85	2,163.64	3,780.01	0.18%
23	Kec. Tiroang	429.03	1,116.77	1,437.88	2,983.68	0.14%
24	Kec. Mattiro bulu	403.47	1,074.94	201.60	1,680.01	0.08%
25	Kec. Suppa	361.63	1,210.02	108.36	1,680.01	0.08%
26	Kec. Mattiro sompe	403.75	1,172.48	103.77	1,680.00	0.08%
27	Kec. Lanrisang	441.18	1,134.05	1,294.61	2,869.85	0.14%
28	Kec. Patampunua	438.09	1,045.48	3,047.45	4,531.01	0.22%
29	Kec. Duampanua	418.33	1,106.27	923.58	2,448.17	0.12%
30	Kec. Batulappa	364.99	1,178.09	972.30	2,515.38	0.12%
31	Kec. Cempa	392.91	1,236.69	2,979.49	4,609.10	0.22%
32	Kec. Lembang	354.61	1,172.10	946.18	2,472.89	0.12%
33	badan kepegawaian daerah	5,183.95	25,496.86	5,567.12	36,247.93	1.72%
34	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	4,088.41	8,072.84	10,928.76	23,090.00	1.10%
35	Kantor Perpustakaan dan arsip daerah	425.02	1,842.45	714.16	2,981.63	0.14%
2	<b>Urusan pilihan</b>	<b>42,782.22</b>	<b>62,199.01</b>	<b>104,600.36</b>	<b>209,581.59</b>	<b>9.96%</b>
1	dinas pertanian dan peternakan	8,566.15	18,425.26	51,871.90	78,863.31	3.75%
2	kantor ketahanan pangan	1,577.54	4,158.94	554.18	6,290.65	0.30%
3	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	13,099.00	9,999.63	2,934.55	26,033.19	1.24%
4	dinas kehutanan dan perkebunan	5,311.62	12,148.70	7,577.84	25,038.16	1.19%
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	10,523.40	8,891.18	29,092.76	48,507.34	2.31%
6	dinas perindustrian, perdagangan energi dan Mineral	3,704.51	8,575.30	12,569.14	24,848.95	1.18%
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>349,022.54</b>	<b>602,903.78</b>	<b>1,152,070.77</b>	<b>2,103,997.09</b>	<b>100.00%</b>

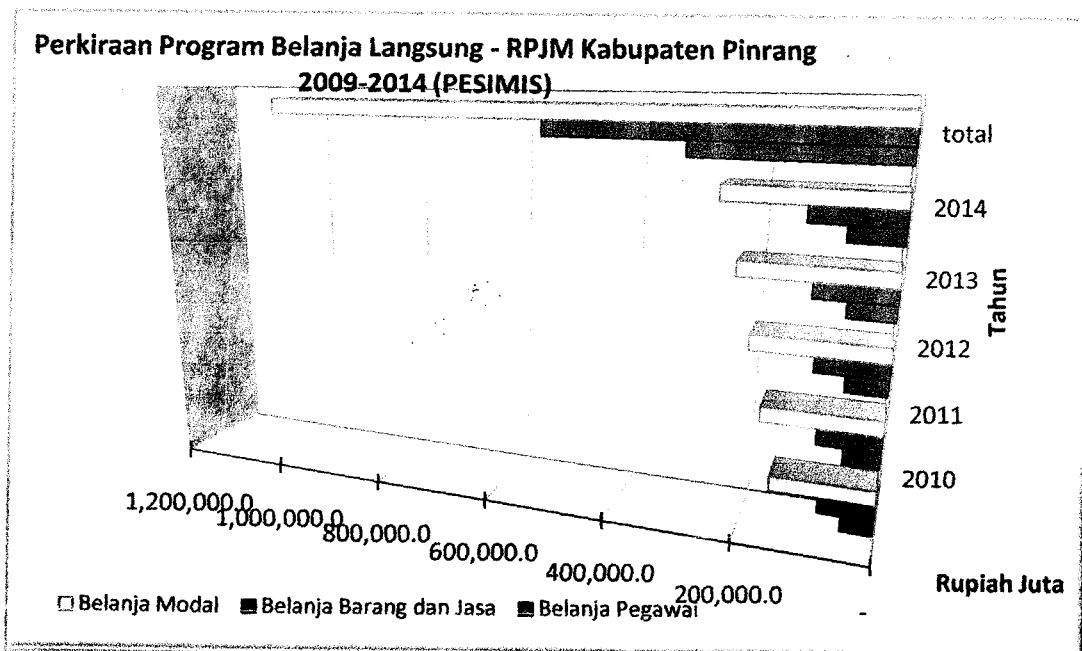


Dari hasil perhitungan program berikut dapat disimpulkan, jumlah kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan RPJM dalam kurun waktu 5 tahun (2009 - 2014)

TABEL PERKIRAAN PROGRAM RPJM 2009 - 2014 (PESIMIS)  
(dalam Rp.Juta)

JENIS BELANJA	2010	2011	2012	2013	2014	total
Belanja Pegawai	47,444.8	53,786.2	60,975.8	68,665.5	77,845.6	308,717.9
Belanja Barang dan Jasa	82,370.4	93,379.8	105,861.9	117,238.8	132,912.5	531,763.4
Belanja Modal	155,795.4	176,618.7	200,227.3	226,216.1	256,459.4	1,015,316.9
<b>TOTAL</b>	<b>285,610.7</b>	<b>323,784.8</b>	<b>367,064.9</b>	<b>412,120.5</b>	<b>467,217.5</b>	<b>1,855,798.2</b>

Sumber data : diolah



Tabel proyeksi diatas memperlihatkan bahwa rata-rata belanja modal adalah sebesar 54,7 % atau Rp.1,02 trilyun dana yang dibutuhkan untuk periode selama lima tahun. *Naiknya pendanaan belanja langsung (belanja pegawai, barang dan jasa dan modal) pada kondisi pesimis disebabkan karena naiknya nilai inflasi mulai dari tahun 2012-2014, yang berkonsekwensi terhadap naiknya harga-harga pada asumsi volume yang sama, disatu sisi terjadi penurunan pertumbuhan terhadap DAU.*

Dari total estimasi program sebesar Rp.1,86 trilyun, belanja barang dan jasa menduduki peringkat kedua dari total dana yang diperlukan, yakni sebesar 28,7% dan belanja pegawai sebesar 16,6%.

Perbandingan antara urusan wajib dan pilihan pada belanja langsung adalah 90% untuk urusan wajib dan sisanya untuk urusan pilihan.

Dari tahun 2009 sampai dengan 2011 tidak terjadi perubahan atas nilai program, hal ini disebabkan karena tingkat inflasi pada periode tersebut sama, baik untuk kondisi optimis maupun pesimis.

Urusan Pemerintah Daerah		Belanja Langsung (dalam Rp. Juta)			
		Pegawai	Brg & jasa	Modal	TOTAL
<b>1 Urusan Wajib</b>		<b>53,333.46</b>	<b>94,915.77</b>	<b>182,021.83</b>	<b>330,271.06</b>
	<i>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah</i>				
	1 Raga	18,702.34	6,185.70	48,564.99	73,453.03
	2 Dinas Kesehatan	4,986.49	4,840.67	11,008.78	20,835.95
	3 RSUD Lasinrang	1,656.52	11,412.19	2,336.01	15,404.73
	4 Dinas PU	2,080.31	1,221.87	86,058.67	89,360.85
	5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1,527.29	1,843.53	12,080.18	15,451.00
	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan				
	6 Kebakaran	1,967.25	1,871.03	1,324.27	5,162.54
	Badan Perencanaan Pembangunan				
	7 Daerah & Penanaman Modal	954.23	6,141.02	1,046.81	8,142.07
	Dinas Perhubungan Informatika &				
	8 Komunikasi	287.59	1,635.32	509.79	2,432.70
	9 Badan Lingkungan Hidup	419.81	1,231.23	1,779.43	3,430.47
	10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1,763.48	1,287.64	225.54	3,276.67
	Badan keluarga berencana daerah dan				
	11 Pemberdayaan Perempuan	733.18	1,094.38	1,385.13	3,212.69
	12 Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata	251.21	1,859.66	312.31	2,423.17
	13 Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi	1,595.53	1,558.48	219.27	3,373.29
	dinas koperasi dan usaha kecil dan				
	14 menengah	815.48	1,579.75	518.68	2,913.91
	<i>Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan</i>				
	15 <i>Perlindungan Masyarakat</i>	324.20	842.93	129.68	1,296.81
	16 Satuan Polisi Pamong Praja	426.95	1,691.99	383.08	2,502.02
	17 sekretariat daerah	3,452.46	20,756.44	5,817.65	30,026.55
	18 sekretariat DPRD	3,607.12	15,770.10	1,606.29	20,983.51
	dinas pendapatan, pengelolaan				
	19 keuangan dan asset daerah	3,461.55	2,963.80	1,037.35	7,462.70
	20 Inspektorat Kab Pinrang	1,816.67	557.32	198.99	2,572.98
	21 Kec. Watang sawito	62.74	201.85	26.81	291.39
	22 Kec. Paletang	59.24	221.12	375.28	655.63
	23 Kec. Tiroang	74.41	193.70	249.39	517.51
	24 Kec. Mattiro bulu	69.98	186.44	34.97	291.39
	25 Kec. Suppa	62.72	209.87	18.79	291.39
	26 Kec. Mattiro some	70.03	203.36	18.00	291.39
	27 Kec. Lanrisang	76.52	196.70	224.55	497.76
	28 Kec. Patampanua	75.98	181.33	528.57	785.89
	29 Kec. Duampanua	72.56	191.88	160.19	424.63
	30 Kec. Batulappa	63.31	204.33	168.64	436.28
	31 Kec. Cempa	68.15	214.50	516.78	799.43
	32 Kec. Lembang	61.51	203.30	164.11	428.91
	33 badan kepegawaian daerah	899.14	4,422.34	965.60	6,287.07
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan				
	34 Pemdes	709.12	1,400.20	1,895.55	4,004.88
	35 <i>Kantor Perpustakaan dan arsip daerah</i>	78.38	339.79	131.71	549.88
<b>2 Urusan pilihan</b>		<b>7,642.31</b>	<b>10,946.08</b>	<b>18,205.43</b>	<b>36,793.83</b>
	1 dinas pertanian dan peternakan	1,485.77	3,195.79	8,996.99	13,678.55
	2 kantor ketahanan pangan	272.77	709.21	109.11	1,091.09
	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,				
	3 Perikanan dan Kehutanan	2,494.71	1,904.44	558.89	4,958.04
	4 dinas kehutanan dan perkebunan	921.28	2,107.15	1,314.35	4,342.78
	5 Dinas Kelautan dan Perikanan	1,825.25	1,542.14	5,046.03	8,413.42
	dinas perindustrian perdagangan energi				
	6 dan Mineral	642.53	1,487.35	2,180.07	4,309.96
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>60,975.78</b>	<b>105,861.85</b>	<b>200,227.26</b>	<b>367,064.89</b>

Urusan Pemerintah Daerah		Belanja Langsung (dalam Rp. Juta)			
		Pegawai	Brg & jasa	Modal	TOTAL
No.					
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>	<b>60,001.60</b>	<b>104,829.45</b>	<b>205,576.96</b>	<b>370,408.01</b>
	<i>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah</i>				
	1 Raga	21,202.48	7,012.61	55,057.20	83,272.30
	2 Dinas Kesehatan	5,653.09	5,487.78	12,480.45	23,621.32
	3 RSUD Lasinrang	1,877.97	12,937.79	2,648.29	17,464.04
	4 Dinas PU	2,358.41	1,385.21	97,563.07	101,306.69
	5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1,731.47	2,089.97	13,695.07	17,516.51
	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan				
	6 Kebakaran	2,230.23	2,121.15	1,501.30	5,852.68
	Badan Perencanaan Pembangunan				
	7 Daerah & Penanaman Modal	1,081.79	6,961.96	1,186.75	9,230.50
	Dinas Perhubungan Informatika &				
	8 Komunikasi	326.03	1,853.93	577.94	2,757.90
	9 Badan Lingkungan Hidup	475.94	1,395.83	2,017.30	3,889.06
	10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1,999.23	1,459.78	255.69	3,714.69
	Badan keluarga berencana daerah dan				
	11 Pemberdayaan Perempuan	831.20	1,240.68	1,570.29	3,642.17
	12 Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata	284.79	2,108.26	354.05	2,747.10
	13 Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi	1,808.83	1,766.82	248.58	3,824.23
	dinas koperasi dan usaha kecil dan				
	14 menengah	924.50	1,790.93	588.01	3,303.44
	<i>Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan</i>				
	15 <i>Perlindungan Masyarakat</i>	367.54	955.61	147.02	1,470.17
	16 Satuan Polisi Pamong Praja	484.02	1,918.18	434.29	2,836.49
	17 sekretariat daerah	3,452.46	20,756.44	5,817.65	30,026.55
	18 sekretariat DPRD	4,089.32	17,878.26	1,821.02	23,788.60
	dinas pendapatan, pengelolaan				
	19 keuangan dan aset daerah	3,924.29	3,360.00	1,176.03	8,460.32
	20 Inspektorat Kab Pinrang	2,059.52	631.82	225.59	2,916.94
	21 Kec. Watang sawito	71.12	228.83	30.39	330.34
	22 Kec. Paletang	67.15	250.68	425.44	743.27
	23 Kec. Tiroang	84.36	219.59	282.73	586.69
	24 Kec. Mattiro bulu	79.34	211.37	39.64	330.34
	25 Kec. Suppa	71.11	237.93	21.31	330.34
	26 Kec. Mattiro sompe	79.39	230.55	20.41	330.34
	27 Kec. Lanrisang	86.75	222.99	254.56	564.31
	28 Kec. Patampunua	86.14	205.57	599.23	890.95
	29 Kec. Duampunua	82.26	217.53	181.61	481.39
	30 Kec. Batulappa	71.77	231.65	191.19	494.61
	31 Kec. Cempa	77.26	243.17	585.87	906.30
	32 Kec. Lembang	69.73	230.47	186.05	486.25
	33 badan kepegawaian daerah	1,019.33	5,013.52	1,094.68	7,127.53
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan				
	34 Pemdes	803.91	1,587.38	2,148.95	4,540.25
	35 <i>Kantor Perpustakaan dan arsip daerah</i>	88.86	385.21	149.32	623.39
<b>2</b>	<b>Urusan pilihan</b>	<b>8,663.94</b>	<b>12,409.36</b>	<b>20,639.15</b>	<b>41,712.46</b>
	1 dinas pertanian dan peternakan	1,684.39	3,623.01	10,199.71	15,507.11
	2 kantor ketahanan pangan	309.24	804.02	123.69	1,236.95
	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,				
	3 Perikanan dan Kehutanan	2,828.21	2,159.02	633.60	5,620.84
	4 dinas kehutanan dan perkebunan	1,044.44	2,388.83	1,490.05	4,923.32
	5 Dinas Kelautan dan Perikanan	2,069.25	1,748.30	5,720.59	9,538.13
	dinas perindustrian perdagangan energi				
	6 dan Mineral	728.43	1,686.18	2,471.50	4,886.12
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>68,665.54</b>	<b>117,238.82</b>	<b>226,216.11</b>	<b>412,120.47</b>

No.	Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Langsung (dalam Rp. Juta)			
		Pegawai	Brg & jasa	Modal	TOTAL
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>	<b>68,023.31</b>	<b>118,844.11</b>	<b>233,060.95</b>	<b>419,928.37</b>
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah				
	1 Roga	24,037.09	7,950.14	62,417.93	94,405.16
	2 Dinas Kesehatan	6,408.87	6,221.45	14,148.99	26,779.31
	3 RSUD Lasinrang	2,129.04	14,667.47	3,002.34	19,798.85
	4 Dinas PU	2,673.71	1,570.40	110,606.50	114,850.61
	5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1,962.95	2,369.39	15,525.99	19,858.33
	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan				
	6 Kebakaran	2,528.39	2,404.73	1,702.01	6,635.13
	Badan Perencanaan Pembangunan				
	7 Daerah & Penanaman Modal	1,226.42	7,892.72	1,345.41	10,464.55
	Dinas Perhubungan Informatika &				
	8 Komunikasi	369.62	2,101.79	655.20	3,126.61
	9 Badan Lingkungan Hidup	539.56	1,582.44	2,287.00	4,409.00
	10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2,266.51	1,654.94	289.87	4,211.32
	Badan keluarga berencana daerah dan				
	11 Pemberdayaan Perempuan	942.32	1,406.55	1,780.23	4,129.10
	12 Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata	322.86	2,390.11	401.39	3,114.37
	13 Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi	2,050.65	2,003.03	281.82	4,335.50
	dinas koperasi dan usaha kecil dan				
	14 menengah	1,048.10	2,030.36	666.63	3,745.08
	<i>Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan</i>				
	15 <i>Perlindungan Masy</i>	416.68	1,083.37	166.67	1,666.72
	16 Satuan Polisi Pamong Praja	548.73	2,174.62	492.35	3,215.70
	17 sekretariat daerah	3,913.99	23,531.18	6,595.36	34,040.53
	18 sekretariat dprd	4,636.04	20,268.44	2,064.48	26,968.96
	dinas pendapatan, pengelolaan				
	19 keuangan dan asset daerah	4,448.94	3,809.21	1,333.25	9,591.40
	20 Inspektorat Kab Pinrang	2,334.87	716.29	255.75	3,306.91
	21 Kec. Watang sawito	80.63	259.42	34.45	374.51
	22 Kec. Paletang	76.13	284.19	482.32	842.64
	23 Kec. Tiroang	95.64	248.95	320.53	665.12
	24 Kec. Mattiro bulu	89.94	239.63	44.94	374.51
	25 Kec. Suppa	80.61	269.74	24.16	374.51
	26 Kec. Mattiro some	90.00	261.37	23.13	374.51
	27 Kec. Lanrisang	98.35	252.80	288.60	639.75
	28 Kec. Patampanua	97.66	233.06	679.34	1,010.06
	29 Kec. Duampanua	93.25	246.61	205.88	545.75
	30 Kec. Batulappa	81.36	262.62	216.75	560.73
	31 Kec. Cempa	87.59	275.69	664.19	1,027.46
	32 Kec. Lembang	79.05	261.29	210.92	551.26
	33 badan kepegawaian daerah	1,155.61	5,683.79	1,241.03	8,080.42
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan				
	34 Pemdes	911.39	1,799.60	2,436.25	5,147.25
	35 <i>Kantor Perpustakaan dan arsip daerah</i>	100.74	436.71	169.28	706.74
<b>2</b>	<b>Urusan pilihan</b>	<b>9,822.25</b>	<b>14,068.40</b>	<b>23,398.45</b>	<b>47,289.09</b>
	1 dinas pertanian dan peternakan	1,909.58	4,107.38	11,563.34	17,580.29
	2 kantor ketahanan pangan	350.58	911.51	140.23	1,402.32
	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,				
	3 Perikanan dan Kehutanan	3,206.32	2,447.67	718.31	6,372.30
	4 dinas kehutanan dan perkebunan	1,184.07	2,708.20	1,689.26	5,581.53
	5 Dinas Kelautan dan Perikanan	2,345.89	1,982.03	6,485.39	10,813.31
	dinas perindustrian perdagangan energi				
	6 dan Mineral	825.81	1,911.61	2,801.93	5,539.35
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>77,845.56</b>	<b>132,912.51</b>	<b>256,459.39</b>	<b>467,217.46</b>

## 5.4. Arah Anggaran

## Kebijakan

## Pengelolaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan maka keterpaduan dan sinkronisasi, kebijakan program/kegiatan antara SKPD perlu lebih ditingkatkan. Keterpaduan dan sinkronisasi dilakukan melalui upaya penyamaan persepsi terhadap tantangan, prioritas dan langkah kebijakan pembangunan yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin dalam RPJP Kabupaten Pinrang. Untuk itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Anggaran antara lain :

1. Dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang dicapai dan kendala yang dihadapi pada Tahun Anggaran sebelumnya serta prakiraan dinamika kondisi tahun yang akan datang, masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun-tahun mendatang, antara lain adalah :
  - (a) Upaya lanjut untuk menanggulangi kemiskinan akibat masih rendahnya kapasitas produksi dan akses terhadap sumber daya produktif bagi masyarakat.
  - (b) Upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengingat masih terdapat anak usia 7-15 tahun yang tidak mengikuti pendidikan dasar akibat faktor sosial ekonomi, budaya dan geografi;
  - (c) Upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, adanya kendala jarak, biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang berakibat sulitnya masyarakat menggapai kualitas kesehatan yang memadai.
  - (d) Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik mengingat secara umum masih terbatasnya pemahaman aparat terhadap makna pelayanan publik, SPM masih terbatas penerapannya, masih terbatasnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan masih adanya prosedur pelayanan yang berbelit-belit;
  - (e) Upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS mengingat penerapan sistem remunerasi masih terbatas, profesionalisme birokrasi masih terbatas dan belum merata, dan system reward and punishment serta pendekatan kinerja belum dapat dilaksanakan secara optimal.
  - (f) Upaya untuk menata aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas, menguatkan kapasitas pemerintah daerah, memantapkan pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas penanganan perkara korupsi. Hal ini sejalan dengan masih rendahnya tertib administrasi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bermuara pada masih rendahnya kualitas pelayanan dan masih terjadinya berbagai macam penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
  - (g) meningkatkan daya tarik investasi, menguatkan daya saing ekonomi lokal, dan merevitalisasi industri rumah tangga;



- (h) Upaya untuk merevitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, meningkatkan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif, meningkatkan ketahanan pangan, serta meningkatkan stabilitas harga dan mengamankan pasokan bahan pokok, termasuk upaya untuk meningkatkan dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing daerah dan sektor unggulan daerah dalam *menuju pembangunan kawasan agropolitan*.
2. Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJP, maka prioritas pembangunan adalah :
- (a) Pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya tingkat kemiskinan;
- (b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran meningkatnya akses dan pemerataan pada jenjang usia dini, pendidikan dasar yang berkualitas, pendidikan menengah dan tinggi, menurunnya angka putus sekolah serta kesenjangan antara partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat;
- (c) Pemantapan reformasi birokrasi dengan sasaran meningkatnya kinerja birokrasi dalam konteks terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, menurunnya tindak pidana korupsi, efektifitas peran ormas dan partai politik, dalam mewujudkan kemandirian daerah;
- (d) Pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dengan sasaran laju pertumbuhan ekonomi minimal  $\pm 5$  persen, meningkatnya investasi, *tumbuhnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, industri pengolahan*, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan akses UKM pada sumber daya produktif; dan (e) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam.
3. Penyusunan APBD perlu disesuaikan dengan prakiraan asumsi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka pengangguran terbuka, *selain itu SKPD diminta mempertimbangkan perkiraan kondisi keuangan yang akan mengalami defisit Anggaran*.
4. Dalam penyusunan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah, *wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selanjutnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, mensyaratkan perlunya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD dan antar SKPD, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta sinkronisasi program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan*.
5. Selain itu dalam melaksanakan pembangunan perlu diperhatikan beberapa prinsip utama (pengarusutamaan) yang menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur yang mencakup perlunya mengutamakan prinsip partisipasi masyarakat, pola pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan gender, tata pengelolaan yang baik, pengurangan kesenjangan antar kecamatan, desa dan

kelurahan dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta padat karya.

## 5.5. Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan APBD

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD terkait dengan pendapatan Daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

### 1. Pendapatan Daerah

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Dalam merencanakan target PAD supaya memperhatikan kondisi krisis ekonomi saat ini yang kemungkinan masih berlangsung dalam Tahun Anggaran yang akan datang, yang akan berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat sehingga berpengaruh kepada peningkatan PAD.
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat, bahkan sebaliknya, bilamana perlu diberikan insentif untuk menarik atau memberikan rangsangan agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung stabil atau meningkat. Hal ini dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- 3) Pemerintah Daerah agar secara konsisten untuk tidak melaksanakan pemungutan terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah pusat.
- 4) Dalam menetapkan target pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hendaknya dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan hasil dari nilai kekayaan daerah yang disertakan sesuai dengan tujuan dan fungsi penyertaan modal dimaksud. Selain itu untuk meningkatkan pendapatan daerah, dapat dilakukan dengan mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang idle dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- 5) Dalam penyusunan APBD agar tidak menetapkan target pendapatan yang berasal dari setoran laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah administratif daerah Kabupaten, sebagaimana diatur dalam

surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Februari 2009 perihal Percepatan terhadap Program Penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s/d 2013. Untuk PDAM yang belum memenuhi kebutuhan diatas, agar bagian laba yang diperoleh diupayakan untuk direinvestasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan.

**b. Dana Perimbangan**

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) pencantuman alokasi dan perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran yang akan datang didasarkan pada alokasi dan perimbangan Tahun Anggaran sebelumnya dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan dua tahun terakhir;
- 2) Terhadap perencanaan alokasi dana bagi hasil, agar pemerintah daerah memperkirakan besaran alokasi dana bagi hasil lebih rendah, untuk mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga minyak dan gas atau hasil pertambangan lainnya yang cenderung menurun ditahun yang akan datang. Selanjutnya apabila alokasi dana bagi hasil tersebut tidak sesuai atau lebih tinggi dari yang diperkirakan, dapat dilakukan penyesuaian dalam perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan;
- 3) Apabila tidak menerima Alokasi DAU karena memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif sama atau lebih besar dari alokasi dasar berdasarkan penerapan formula murni DAU dari pusat, maka untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan PNSD, supaya mengalokasikan dana untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD dalam APBD Tahun Anggaran yang akan disusun, termasuk untuk kenaikan gaji pokok dan gaji bulan ke-13, yang bersumber dari pendapatan daerah antara lain PAD, DBH Pajak dan DBBH SDA dan/atau penerimaan pembiayaan dari SilPA Tahun lalu;

**c. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah**

- 1) Dalam menetapkan pendapatan bagi hasil yang diterima dari provinsi pada Tahun Anggaran yang akan datang agar menggunakan pagu Tahun Anggaran berjalan. Sedangkan bagian yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran berjalan agar ditampung dalam perubahan APBD;
- 2) Dana Darurat, Dana Bencana Alam dan Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh pemerintah daerah bilamana belum dapat diperkirakan dan dipastikan pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran yang akan datang agar penganggarnya dicantumkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran.

## 2. Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan *prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan*, oleh karena itu dalam penyusunan APBD berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya demi terwujudnya visi dan misi RPJM tahun 2009-2014. Selain itu *diupayakan agar Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa.*

### a. Belanja Tidak Langsung

Untuk mengantisipasi terjadinya defisit anggaran pada tahun yang akan datang perlu dilakukan upaya-upaya, meliputi:

#### 1) Belanja Pegawai

- a) agar memperhitungkan akses yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
- b) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan pemerintah;
- c) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai;
- d) untuk meningkatkan kinerja aparatur, dapat memberikan tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD sesuai dengan *kemampuan keuangan daerah*, yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkisambungan;
- e) Apabila SKPD telah menganggarkan tambahan penghasilan dalam bentuk uang makan, tidak diperkenankan menganggarkan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dalam bentuk kegiatan;
- f) Biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, diartikan sebagai bentuk pemberian insentif sejalan dengan kinerja organisasi dalam pencapaian target yang ditetapkan. Insentif diberikan atas dasar kebutuhan riil bagi aparat yang terkait dengan proses pemungutan pajak daerah, yang besaran insentifnya didasarkan pada pertimbangan asas kepatutan dan kewajaran yang dikaitkan dengan bobot tanggung jawab, peran, beban kerja, prestasi dan lokasi kerja serta *tidak melebihi 5 % dari target penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

#### 2) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga produksinya terjangkau oleh masyarakat

yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### 3) Belanja Hibah

- a) Pemberian Hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK), Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD;
- b) *Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;*
- c) Dalam menjalankan fungsinya di bidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. ***Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparansi dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.***
- d) *Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dibatasi dan diperjelas format pertanggung jawabannya.*

### 4) Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau pendapatan Kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan rencana pendapatan pada tahun anggaran yang akan datang, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak Kabupaten atau Pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD

### 5) Belanja Bantuan Keuangan

- a) mengalokasikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka menunjang fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa untuk percepatan/akselerasi pembangunan desa;
- b) Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

6) Belanja Tidak Terduga

- a) belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran yang akan datang
- b) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, yaitu untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

b. Belanja Langsung.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan, harus dilakukan analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk menghindari adanya pemborosan;
- 2) Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. *Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.*
- 3) Belanja Pegawai
  - a) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - b) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar Instansi Pemerintah.
- 4) Belanja Barang dan Jasa
  - a) *Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa;*
  - b) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;

- c) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
  - d) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel;
  - e) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dibatasi;
  - f) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- 5) Belanja Modal
- a) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
  - b) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

### 3. Pembiayaan Daerah

#### a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan;
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- 3) Pencantuman jumlah pinjaman dalam APBD disesuaikan dengan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal defisit APBD Tahun Anggaran

yang disusun melebihi batas maksimal dimaksud, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pemerintah Daerah agar disiplin dalam mengembalikan pokok pinjaman dan biaya lain sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
- 2) Penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBD didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah, sehingga tidak perlu setiap penganggaran dalam APBD dibuatkan Peraturan Daerah tersendiri;
- 3) Untuk menganggarkan biaya cadangan, harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan

Untuk menghindari terjadinya dana yang menganggur (Idle money), maka diupayakan untuk menghindari adanya Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan dalam APBD, dan apabila terdapat Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan supaya dalam perubahan APBD dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran berjalan.

## 5.6. Rekomendasi

Untuk mendukung pelaksanaan RPJM 2009-2014, dalam penyusunan anggaran melakukan langkah-langkah, antara lain:

- 1) Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil, dengan tetap berpatokan pada pencapaian RPJM 2009-2014;
- 2) Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah yang dipandang mampu untuk menggerakkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar;
- 3) Mengembangkan kebijakan yang inovatif yang dapat mendorong dunia usaha, mengendalikan tingkat konsumsi dan meningkatkan investasi;
- 4) Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang bersifat multiyears yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap



program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat, termasuk upaya penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;

- 5) Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SILPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian daerah.

#### Tata kelola keuangan daerah yang baik

- a. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, agar dilakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan daerah dan legislatif daerah melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan rekrutmen pegawai yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- c. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
- f. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pinjaman Daerah

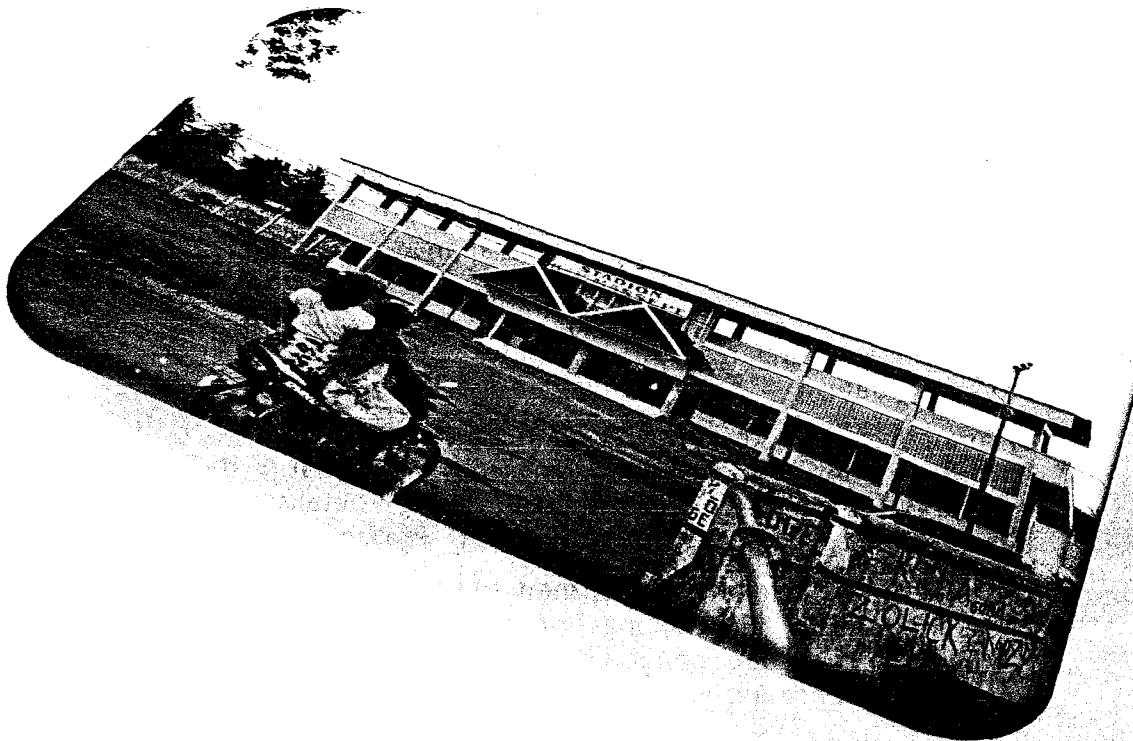
- a. Pemerintah Daerah dalam menutup kekurangan kas, dapat melakukan pinjaman melalui pinjaman jangka pendek, sedangkan untuk menutup defisit APBD dalam rangka membiayai kegiatan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik melalui pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang, dan dilakukan secara selektif.
- b. Pemerintah Daerah melakukan pinjaman jangka menengah, harus memperhitungkan waktu pengembalian pinjaman dan dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, maka penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.

Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Demikian juga standar satuan biaya

perjalanan dinas ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah. Selanjutnya dalam Keputusan Kepala Daerah tersebut juga diatur pendekatan penetapan biaya perjalanan dinas, baik lumpsum maupun at cost yang disesuaikan dengan sistem akuntabilitas/pertanggungjawaban keuangan yang dianut.

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, agar dilakukan langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pada tingkat/lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun pada tingkat lingkungan Kabupaten, dan *berupaya untuk memperbaiki opini atas Laporan Keuangan Daerah.*



# BAB VI

## PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VI - I

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Tahun 2009 - 2014  
KABUPATEN PINRANG

## PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagai realisasi dari Strategi dan Arah Kebijakan pencapaian Visi - Misi pembangunan di kabupaten Pinrang, diarahkan pada rencana penerapan program pembangunan Program Prioritas sebagai bagian dari langkah strategi Dasar daerah dan rencana Program Pembangunan Menurut Fungsi Kewenangan Wajib Dan Pilihan dalam kerangka otonomi daerah yang saling melengkapi dan terpadu.

Disamping itu, program pembangunan daerah, berintegrasi dan bersinergi dengan Program Nasional dan program daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang pelaksanaannya antara lain terdapat di wilayah Kabupaten Pinrang.

Di tingkat Nasional, komitmen kebijakan Nasional 5 tahun kedepan, untuk mendukung pembangunan daerah, diantaranya dukungan terhadap pengembangan wilayah daerah Kabupaten Pinrang, mencakup;

- Memperkuat dukungan terhadap otonomi dan demokratisasi daerah (program perlindungan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, penegakan hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik)
- Pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat ( program pengembangan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, pengembangan infrastruktur wipayah)
- Pengembangan Kawasan Andalan Parepare dan sekitarnya dengan program Nasional memperkuat pembangunan di sektor unggulan bidang pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan agro industri.

Di tingkat provinsi, komitmen kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 5 tahun kedepan, untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Selatan, diantaranya dukungan terhadap pengembangan wilayah daerah Kabupaten Pinrang, mencakup;

- Program peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat  
Program pendidikan gratis usia sekolah 6 - 15 thn, promosi pendidikan, pemberantasan buta huruf, program kesehatan gratis, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, promosi kesehatan
- Program Peningkatan Dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat  
Program peningkatan kesempatan berusaha untuk mengurangi pengangguran dan penurunan angka kemiskinan
- Program pengembangan Potensi Lokal  
Program memperkuat pengembangan Industri berbasis pertanian, perluasan pangsa pasar hasil industri
- Program Perwujudan Entitas Pemerataan/Keadilan Sosial

## Ekonomi

Program optimasi utilitas perkotaan, penataan ruang, penguatan kawasan andalan dan kawasan khusus skala propinsi di kabupaten Pinrang, al program pengembangan pertanian pangan lahan basah, perternakan, budidaya perikanan air payau, pertambangan pasir kuarsa, revitalisasi Tama Wisata Alam (TWA) Lembah Tirasa dan TWA Pulau Kamarrang, konservasi kawasan hutan lindung, serta pengembangan kawasan PLTA Bakaru

- Program Perwujudan Lingkungan Kondusif

Program perwujudan rasa aman, penegakan hukum, dan program penyebar luasan informasi

- Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Program memperkuat nilai - nilai budaya lokal, penguatan kelembagaan masyarakat, program kemandirian desa dan program partisipasi masyarakat

- Program Penguatan Kelembagaan Pemerintah

Program dukungan terhadap kemandirian dan profesionalisme unit - unit kerja daerah berdasarkan prinsip - prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

Penyelenggaraan program prioritas dan indikasi program kewenangan wajib dan pilihan berdasarkan penyelenggaraan otonomi daerah diperlihatkan sebagai berikut :

VI - 3

## 6.1. Program Prioritas 2009 - 2014

Prgram prioritas merupakan Langkah Strategis sebagai kerangka dasar yang dipersiapkan daerah untuk membangun fondasi atau pijakan bagi akselerasi pembangunan selanjutnya, dan menjadi acuan bagi SKPD untuk menindak lanjutinya.

Program prioritas sebagaimana yang dimaksud (merefere dari Visi - Misi Daerah), mencakup ;

### I. Program Bidang Pemerintahan

1. Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Melalui Pendidikan Dan Pelatihan
2. Program Perbaikan Sistem Pelayanan Di Semua Level Pemerintahan Untuk Mewujudkan Pelayanan Yang Beretika, Mudah, Murah, Transparan Dan Akuntabel Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
3. Program Revitalisasi Tata Kerja Dan Fungsi Organisasi Pemerintahan Dalam Rangka Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Aparatur Dan Keuangan

## Daerah

4. Program Perbaikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah Dan Pelayanan Publik Dengan Memanfaatkan Teknologi E-Government
5. Peningkatan Kapasitas Unit Pemerintahan Terdepan Dengan Memberikan Kewenangan Yang Lebih Jelas Serta Dukungan Sumber Daya Yang Dapat Mengoptimalkan Fungsi Pemerintahan Dan Fungsi Sebagai Pelayanan Terdepan

## II. Program Bidang Pembangunan

## A. Pembangunan Prasarana Wilayah

1. Program Pembangunan Jalan, Drainase Dan Jembatan Pada Wilayah Tertinggal Khususnya Wilayah Utara
2. Program Pembangunan Dan Perbaikan Jalan Kabupaten, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Utamanya Pada Sentra-Sentra Wilayah Pengembangan Agropolitan
3. Program Pembangunan Jalan Pertanian Dan Perikanan Serta Perintisan Jalan Perkebunan/Kehutanan Utamanya Pada Sentra-Sentra Wilayah Pengembangan Agropolitan
4. Program Pengembangan Pemanfaatan Ruang Dan Penataan Ruang Pemukiman Serta Kelestarian Lingkungan Hidup
5. Program Penanggulangan Bencana Banjir Sungai Saddang Dan Konservasi DAS
6. Program Bantuan Subsidi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa/Kelurahan
7. Program Perbaikan Jaringan Air Minum Dan Jaringan Drainase Kota Pinrang Dan Kecamatan
8. Program Revitalisasi Jaringan Irigasi Pertanian Dan Pertambakan

## B. Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan

1. Program Peningkatan Kualitas SDM Dan Perbaikan Kesejahteraan Tenaga Pendidik/Guru
2. Program Peningkatan Kualitas Dan Perbaikan Fasilitas Pendidikan Serta Kapasitas Daya Tampung Sekolah Disetiap Jenjang Dalam Rangka Peningkatan Kualitas SDM
3. Program Bantuan Subsidi Keluarga Miskin Untuk Akses Layanan Kesehatan Dan Pendidikan Yang Selaras Dengan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
4. Program Peningkatan Gizi Balita Melalui Posyandu

Dengan Pemberian Makanan Sehat Dan Bergizi, Vitamin Dan Vaksinasi Untuk Mereduksi Kasus Gizi Buruk

5. Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Bimbingan Keluarga Berencana Dan Pemberian Alat Kontrasepsi Secara Gratis

### C. Pembangunan Bidang Perekonomian

1. Program Pengembangan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan/Kelautan, Kehutanan, Dan Pertambangan Sesuai Klasterisasi Wilayah Berdasarkan Komoditas Unggulan Dan Kelayakan Dan Teknologi Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Agropolitan
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi, UKM Dan Industri Kecil Berbasis Masyarakat Serta Berwawasan Gender Sebagai Sektor Alternatif Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Penciptaan Lapangan Kerja
3. Program Penciptaan Iklim Yang Atraktif Bagi Investasi Dan Aksesibilitas Pengusaha Kecil Terhadap Lembaga-Lembaga Keuangan Formal
4. Pengembangan Potensi Dan Prasarana Di Pedesaan Untuk Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Desa/Kota
5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Dalam Rangka Penyediaan Kemudahan Dan Perluasan Akses Pasar Di Tingkat Lokal, Regional, Nasional Dan Internasional

### III. Pembangunan Bidang Kemasyarakatan (Sosial Budaya)

1. Program peningkatan kualitas kehidupan beragama
2. Program pembinaan, pengembangan dan pembangunan olah raga dan seni
3. Program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial
4. Program pengembangan dan promosi wisata alam bahari
5. Program penguatan institusi dan relasi dengan pemuka dan institusi keagamaan, organisasi LSM, organisasi profesi, orsospol, dan ormas lainnya
6. Program revitalisasi

## 6.2. Program Urusan Wajib Dan Pilihan Daerah

Program kerja urusan wajib dan Urusan pilihan daerah terkait dengan program untuk penguatan pelayanan internal pada setiap satuan kerja, serta pelayanan eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi satuan unit kerja merujuk pada pencapaian Visi - Misi Kabupaten Pinrang, namun tidak terlepas dari peraturan yang berlaku.

Program kerja internal adalah program untuk Memperkuat Kinerja pelayanan Satuan Unit Kerja, berkaitan dengan penyediaan sarana, prasarana, jasa / logistik perkantoran, penguatan SDM Aparatur, serta penyusunan sistem pelaporan yang baik, sebagai langkah awal kesiapan satuan unit kerja untuk bekerja.

Program yang dimaksud menyangkut ;

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan disiplin aparatur dengan sasaran
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan

#### **I. Program Urusan Wajib**

Program urusan wajib, merupakan bagian program kerja daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Visi - Misi pembangunan sesuai dengan kapasitas kemampuan daerah.

Program urusan wajib yang dimaksud meliputi :

##### **1. Pendidikan**

Program pendidikan, dimaksudkan untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki ketahanan intelektual (ilmu pengetahuan , teknologi dan nilai kepekaan bermasyarakat ), diprioritaskan kepada masyarakat yang kurang mampu, yaitu dengan memperkuat akses layanan pendidikan.

Indikasi Program Pendidikan yang dimaksud mencakup ;

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
- c. Program Pendidikan Menengah
- d. Program Pendidikan Non Formal
- e. Program Pendidikan Luar Biasa



- f. Program Peningkatan Mutu Kependidikan Dan Tenaga Kependidikan
- g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- h. Program Peningkatan Kualitas SDM Dan Perbaikan Kesejahteraan Tenaga Pendidik/Guru (Program Prioritas)
- i. Program Peningkatan Kualitas Dan Perbaikan Fasilitas Pendidikan Serta Kapasitas Daya Tampung Sekolah Disetiap Jenjang Dalam Rangka Peningkatan Kualitas SDM (Program Prioritas)
- j. Program Bantuan Subsidi Keluarga Miskin Untuk Akses Layanan Pendidikan Yang Selaras Dengan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Program Prioritas)

## 2. Kesehatan

Program kesehatan dimaksudkan untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki ketahanan kesehatan masyarakat (kepekaan kesehatan fisik dan mental), diprioritaskan kepada masyarakat yang kurang mampu / rentan akan kesehatan, yaitu dengan memperkuat akses layanan kualitas kesehatan.

Indikasi Program Kesehatan tersebut mencakup ;

- a. Program obat dan perbekalan kesehatan
- b. Program upaya kesehatan masyarakat
- c. Program pengawasan obat dan makanan
- d. Program pengembangan obat asli indonesia
- e. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- f. Program perbaikan gizi masyarakat
- g. Program pengembangan lingkungan sehat
- h. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- i. Program standarisasi pelayanan kesehatan
- j. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- k. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya
- l. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru paru/RS Mata
- m. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru Paru/RS Mata
- n. Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru Paru/RS Mata
- o. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- p. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- q. Program peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia
- r. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- s. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan

anak

- t. Program Bantuan Subsidi Keluarga Miskin Untuk Akses Layanan Kesehatan Yang Selaras Dengan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Program Prioritas)
- u. Program Peningkatan Gizi Balita Melalui Posyandu Dengan Pemberian Makanan Sehat Dan Bergizi, Vitamin Dan Vaksinasi Untuk Mereduksi Kasus Gizi Buruk (Program Prioritas)

### 3. Pekerjaan Umum

Program pekerjaan umum dimaksudkan untuk mewujudkan urusan dibidang pekerjaan umum daerah penyedia prasarana dan sarana untuk mendukung pengembangan wilayah serta untuk memudahkan mobilitas orang, barang, dan jasa.

Indikasi Program Pekerjaan Umum daerah mencakup ;

- a. Program pembangunan jalan dan jembatan
- b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- c. Program pembangunan turaptalud/bronjong
- d. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- e. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
- f. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
- g. Program tanggap darurat jalan dan jembatan
- h. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- i. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- j. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- k. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
- l. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- m. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- n. Program pengendalian banjir
- o. Program pengembangan wilayah cepat tumbuh
- p. Program pengembangan infrastruktur pedesaan
- q. Program Pembangunan Jalan, Drainase Dan Jembatan Pada Wilayah Tertinggal Khususnya Wilayah Utara (Program Prioritas)
- r. Program Pembangunan Dan Dan Perbaikan Jalan Kabupaten, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Utamanya Pada Sentra-Sentra Wilayah Pengembangan Agropolitan (Program Prioritas)
- s. Program Pembangunan Jalan Pertanian Dan Perikanan Serta Perintisan Jalan Perkebunan/Kehutanan Utamanya

Pada Sentra-Sentra Wilayah Pengembangan Agropolitan (Program Prioritas)

- t. Program Pengembangan Pemanfaatan Ruang Dan Penataan Ruang Pemukiman Serta Kelestarian Lingkungan Hidup (Program Prioritas)
- u. Program Penanggulangan Bencana Banjir Sungai Saddang Dan Konservasi DAS (Program Prioritas)
- v. Program Bantuan Subsidi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa/Kelurahan (Program Prioritas)
- w. Program Perbaikan Jaringan Air Minum Dan Jaringan Drainase Kota Pinrang Dan Kecamatan (Program Prioritas)
- x. Program Revitalisasi Jaringan Irigasi Pertanian Dan Pertambakan (Program Prioritas)

#### 4. Perumahan

Program perumahan dan permukiman, diselenggarakan untuk memenuhi urusan wajib sektor penyediaan perumahan yang layak huni dan diprioritaskan untuk keluarga kurang mampu, lingkungan permukiman kumuh, pelayanan pemakaman dan pencegahan bahaya kebakaran.

Indikasi Program perumahan daerah mencakup ;

- a. Program pengembangan perumahan
- b. Program lingkungan sehat perumahan
- c. Program pemberdayaan komunitas perumahan
- d. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial
- e. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

#### 5. Penataan Ruang

Program urusan penataan ruang diarahkan pada menata ruang daerah yang efisien dan tepat pemanfaatan untuk mendukung pengembangan wilayah.

Indikasi Program Penataan Ruang daerah mencakup ;

- a. Program perencanaan tata ruang
- b. Program pemanfaatan ruang
- c. Program pengendalian pemanfaatan ruang

#### 6. Perencanaan Pembangunan

Program perencanaan pembangunan diarahkan pada perwujudan kualitas perencanaan pembangunan daerah, memperkuat kerjasama pembangunan antar daerah Serta penanganan wilayah perbatasan antar daerah.

Indikasi Program Perencanaan Pembangunan daerah mencakup ;

- a. Program pengembangan data/informasi

- b. Program kerjasama pembangunan
- c. Program pengembangan wilayah perbatasan
- d. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- e. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- f. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- g. Program perencanaan pembangunan daerah
- h. Program perencanaan pembangunan ekonomi
- i. Program perencanaan sosial budaya
- j. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- k. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

#### 7. Perhubungan

Program perhubungan diarahkan pada perwujudan urusan perhubungan daerah yang efisien, efektif dalam kerangka pengelolaan berlalu lintas transportasi darat dan transportasi laut sejauh yang berada dibawah kewenangan daerah.

Indikasi Program Perhubungan daerah mencakup

- a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- b. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- c. Program peningkatan pelayanan angkutan
- d. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- e. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- f. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

#### 8. Lingkungan Hidup

Program pelestarian lingkungan hidup daerah, diarahkan pada perwujudan

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan lingkungan hidup meningkatnya kualitas pengelolaan potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Indikasi Program Lingkungan Hidup daerah mencakup ;

- a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- b. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- c. Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
- d. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
- e. Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup

- f. Program peningkatan pengendalian polusi
- g. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
- h. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
- i. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
- j. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

#### 9. Pertanahan

Program pertanahan daerah diarahkan pada tertib penyelenggaraan pemanfaatan tanah berdasarkan kewenangan daerah menurut regulasi yang ada

Indikasi Program Pertanahan daerah mencakup ;

- a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
- b. Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- c. Program penyelesaian konflik - konflik pertanahan
- d. Program pengembangan sistem informasi pertanahan

#### 10. Kependudukan Dan Catatan Sipil

Program Kependudukan Dan Catatan Sipil diarahkan pada tertib sistim administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai suatu pelayanan publik prima sebagaimana ketentuan yang ada.

Indikasi Program Kependudukan Dan Catatan Sipil daerah mencakup ;

- a. Program penataan administrasi kependudukan

#### 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk mengangkat harkat perempuan dalam hal pengarusutamaan dan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap anak, sebagai bagian integral dari supremasi hak asasi manusia .

Indikasi Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mencakup;

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- c. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- d. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
- e. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan

anak

## 12. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera mandiri dan harmonis.

Indikasi Program Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera, mencakup ;

- a. Program keluarga berencana
- b. Program kesehatan reproduksi remaja
- c. Program pelayanan kontrasepsi
- d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
- e. Program promosi kesehatan ibu, bayi & anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
- f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
- g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- h. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- i. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
- j. Program pengembangan model operasional BKB - posyandu - PADU
- k. Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Bimbingan Keluarga Berencana Dan Pemberian Alat Kontrasepsi Secara Gratis (Program Prioritas)

## 13. Sosial

Program sosial diarahkan pada pelayanan dengan pendekatan sosial untuk mengangkat harkat masyarakat yang mengalami kerawanan sosial. Program ini umumnya diprioritaskan pada masyarakat kurang mampu dan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Indikasi Program Sosial daerah mencakup ;

- a. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
- b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- c. Program pembinaan anak terlantar
- d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- e. Program pembinaan panti asuhan / panti jompo
- f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks

- narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
  - h. Program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial (Program Prioritas)

#### 14. Ketenagakerjaan

Program ketenagakerjaan diarahkan pada pembinaan tenaga kerja yang profesional, produktif dan memberikan layanan kepada para pencari kerja.

Indikasi Program Ketenagakerjaan daerah mencakup ;

- a. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- b. Program peningkatan kesempatan kerja
- c. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

#### 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program ini diarahkan pada urusan layanan pengembangan dan pembinaan terhadap jasa koperasi dan UKM yang bergerak diberbagai sektor usaha yang umumnya diusahakan para pengusaha daerah dengan skala KUKM.

Indikasi Program Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah daerah mencakup ;

- a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
- c. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah (KUKM)
- d. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- e. Program Pemberdayaan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi, UKM Dan Industri Kecil Berbasis Masyarakat Serta Berwawasan Gender Sebagai Sektor Alternatif Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Penciptaan Lapangan Kerja (Program Prioritas)

#### 16. Penanaman Modal

Program urusan Penanaman modal daerah diselenggarakan dengan maksud memberikan layanan kepada para pemilik modal untuk berinvestasi di kabupaten pinrang yang berdampak pada peningkatan mobilitas dan perkembangan perekonomian serta peluang kesempatan kerja. disamping itu perlu pembentukan Bank yang menangani UMKM sektor pertanian dan non pertanian

Indikasi program Penanaman Modal mencakup ;

- a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

- b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- c. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
- d. Program Penciptaan Iklim Yang Atraktif Bagi Investasi Dan Aksesibilitas Pengusaha Kecil Terhadap Lembaga-Lembaga Keuangan Formal (Program Prioritas)

#### 17. Kebudayaan

Program kebudayaan daerah, diarahkan pada penanganan urusan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dalam kerangka pelestarian budaya daerah yang menjiwai interaksi sosial kemasyarakatan dan pembangunan.

Indikasi program kebudayaan daerah mencakup ;

- a. Program pengembangan nilai budaya
- b. Program pengelolaan kekayaan budaya
- c. Program pengelolaan keragaman budaya
- d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
- e. Program peningkatan kualitas kehidupan beragama (Program Prioritas)
- f. Program revitalisasi budaya dan kearifan Lokal (Program Prioritas)

#### 18. Kepemudaan dan Olah Raga

Program Kepemudaan dan Olah Raga diarahkan pada pembangunan urusan kepemudaan agar berprestasi dan pencapaian olah fisik serta prestasi keolahragaan sebagian bagian dari pengembangan kualitas SDM yang sehat secara fisik dan psikis .

Indikasi program Kemudaan dan Olah Raga mencakup ;

- a. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
- b. Program peningkatan peran serta kepemudaan
- c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- d. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- e. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- f. Program Pembinaan dan Masyarakatan Olahraga
- g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- h. Program pembinaan, pengembangan dan pembangunan olah raga dan seni (Program Prioritas)

#### 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

program kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan pada



perwujudan kerukunan kebersamaan dalam interaksi sosial kemasyarakatan yang dilandasi cita - cita bersama berlandaskan nilai - nilai keberagaman sosial , kearifan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memelihara ketentraman daerah.

Indikasi program Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mencakup;

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- c. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- f. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- g. Program pendidikan politik masyarakat
- h. Program pencagahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- i. Program penguatan institusi dan relasi dengan pemuka dan institusi keagamaan, organisasi LSM, organisasi profesi, orsospol, dan ormas lainnya (Program Prioritas)

## 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Program ini dimaksudkan untum meningkatkan dan memperkokok penyelenggaraan pemerintahan umum menangani kedinasan pimpinan daerah, legislatif, penguatan regulasi daerah, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur, pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah, penanganan pengaduan masyarakat dan kerjasama antar daerah .

Indikasi program Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian daerah mencakup ;

- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
- c. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- d. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
- e. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- f. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

- g. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- h. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- i. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- j. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- k. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- l. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- m. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- n. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- o. Program penataan daerah otonomi baru
- p. Program Pendidikan Kedinasan
- q. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- r. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- s. Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Melalui Pendidikan Dan Pelatihan (Program Prioritas)
- t. Program Perbaikan Sistem Pelayanan Di Semua Level Pemerintahan Untuk Mewujudkan Pelayanan Yang Beretika, Mudah, Murah, Transparan Dan Akuntabel Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) (Program Prioritas)
- u. Program Revitalisasi Tata Kerja Dan Fungsi Organisasi Pemerintahan Dalam Rangka Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Aparatur Dan Keuangan Daerah (Program Prioritas)
- v. Program Perbaikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah Dan Pelayanan Publik Dengan Memanfaatkan Teknologi E-Government (Program Prioritas)
- w. Peningkatan Kapasitas Unit Pemerintahan Terdepan Dengan Memberikan Kewenangan Yang Lebih Jelas Serta Dukungan Sumber Daya Yang Dapat Mengoptimalkan Fungsi Pemerintahan Dan Fungsi Sebagai Pelayanan Terdepan (Program Prioritas)

#### 21. Ketahanan Pangan

Program ini diarahkan pada pembentukan kondisi daerah yang memiliki ketahanan dan kecukupan akan kesetersediaan pangan serta menjaga stabilitas pangan

Indikasi program Ketahanan Pangan mencakup ;

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
- b. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

## 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pemberdayaan masyarakat dan desa, diarahkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat pedesaan, penguatan kelembagaan desa yang berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Indikasi program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup ;

- a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
- b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- e. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan

## 23. Statistik

Program statistik diarahkan pada tersedianya data outentik daerah yang selalu diperbaharui dari waktu ke waktu untuk kepentingan semua pihak tatkala melakukan analisis, merencanakan, atau menetapkan sesuatu agar tepat sasaran

Indikasi program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup ;

- a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

## 24. Kearsipan

Program kearsipan, dipersiapkan dan diarahkan untuk menjaga terpeliharanya dokumen dan naskah penting daerah, sebagai salah satu sumber informasi pada kurun waktu yang lalu untuk dijadikan komparasi dan analisa dimasa mendatang agar lebih baik .

Indikasi program Kearsipan mencakup ;

- a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- c. Program pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana kearsipan
- d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

## 25. Komunikasi dan Informatika

Program komunikasi dan informatika, dimaksudkan untuk mempersiapkan perangkat baik kelembagaan maupun aparaturnya yang selalu memberikan kualitas informasi, baik diminta maupun tidak kepada masyarakat tentang sesuatu hal mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta melakukan pembinaan kepada media massa

Indikasi program Komunikasi dan Informatika mencakup ;

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- b. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
- c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- d. Program kerjasama informasi dan mas massa

## 26. Perpustakaan

Program perpustakaan daerah, diarahkan untuk menyediakan beragam pustaka berupa literatur - literatur baik dalam bentuk buku, dokumen, maupun pustaka elektronika yang dapat diakses oleh semua yang berkepentingan. Program ini juga merupakan bagian dari kelengkapan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Indikasi program Perpustakaan daerah mencakup ;

- a. Program pengembangan kelengkapan kepusakaan daerah
- b. Program pengadaan sarana pustaka berbasis informatika
- c. Program pemeliharaan perpustakaan

## II. Program Urusan Pilihan

### 1. Pertanian

Program pertanian masuk dalam katagori urusan pilihan, akan tetapi untuk kabupaten Pinrang merupakan program yang sangat strategis. Kontribusi Sektor ini menyumbang lebih dari 50 % pendapatan regional daerah, dan menyerap lebih dari 70 % tenaga kerja daerah, namun tingkat kejahteraan masyarakat petani relatif masih perlu, apalagi menjadi esensi pencapaian visi - misi mengangkat harkat masyarakat petani

Oleh karena itu, program strategis ini diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui penguatan kualitas produk pertanian, stabilisasi harga, penguasaan pangsa pasar, peningkatan nilai tambah produktivitas pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan melalui pendekatan Agropolitan .

Indikasi program pertanian mencakup ;

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- f. Program peningkatan produksi hasil peternakan

- g. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- h. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
- i. Program Pengembangan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan/Kelautan, Kehutanan, Dan Pertambangan Sesuai Klasterisasi Wilayah Berdasarkan Komoditas Unggulan Dan Kelayakan Dan Teknologi Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Agropolitan (Program Prioritas)
- j. Pengembangan Potensi Dan Prasarana Di Pedesaan Untuk Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Desa/Kota (Program Prioritas)
- k. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Dalam Rangka Penyediaan Kemudahan Dan Perluasan Akses Pasar Di Tingkat Lokal, Regional, Nasional Dan Internasional (Program Prioritas)

## 2. Kehutanan

Program kehutanan daerah diarahkan pada perbaikan mutu pengelolaan, konservasi, rehabilitasi dan pemanfaatan hutan, sebagai bagian dari pengembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat pengelola hutan.

Indikasi program Kehutanan mencakup ;

- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- b. Program rehabilitasi hutan dan lahan
- c. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
- d. Program pemanfaatan kawasan hutan industri
- e. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
- f. Program perencanaan dan pengembangan hutan

## 3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Program pembangunan ini, diarahkan pada pengembangan, pemanfaatan, penataan, pembinaan dan pengawasan perusahaan potensi energi dan sumber daya mineral daerah dalam kerangka pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat .

Indikasi program Energi dan Sumberdaya Mineral daerah mencakup ;

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- b. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
- c. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

## 4. Pariwisata

Program urusan pilihan pariwisata diarahkan pada pengembangan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

objek wisata serta infrastruktur pendukungnya dalam kerangka dukungan pengembangan perekonomian wilayah di sektor kepariwisataan

Indikasi program Pariwisata mencakup ;

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan
- d. Program pengembangan dan promosi wisata alam dan bahari (Program Prioritas)

#### 5. Kelautan dan Perikanan

Program urusan pilihan Kelautan dan Perikanan daerah diarahkan pada pengembangan, pembinaan dan pengelolaan produksi hasil laut dan budidaya perikanan, sebagai bagian dari pengembangan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Indikasi program Kelautan dan Perikanan mencakup ;

- a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
- c. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya alam laut
- d. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
- e. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
- f. Program pengembangan budidaya perikanan
- g. Program pengembangan perikanan tangkap
- h. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
- i. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- j. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

#### 6. Perdagangan

Program urusan pilihan daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan dibidang perdagangan dalam kerangka memperkuat ketahanan perekonomian terutama yang diusahakan masyarakat .

Indikasi program Perdagangan daerah mencakup ;

- a. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- b. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional
- c. Program peningkatan dan pengembangan ekspor

- d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- e. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

#### 7. Industri

Program industri merupakan urusan pilihan yang strategis daerah dengan maksud untuk memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan usaha perekonomian masyarakat, peningkatan pendapatan daerah, nilai tambah bagi komoditi potensial, mengurangi pengangguran serta peningkatan pendapatan masyarakat .

Indikasi program Industri daerah mencakup ;

- a. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistim produksi
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- c. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
- d. Program penataan struktur industri
- e. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

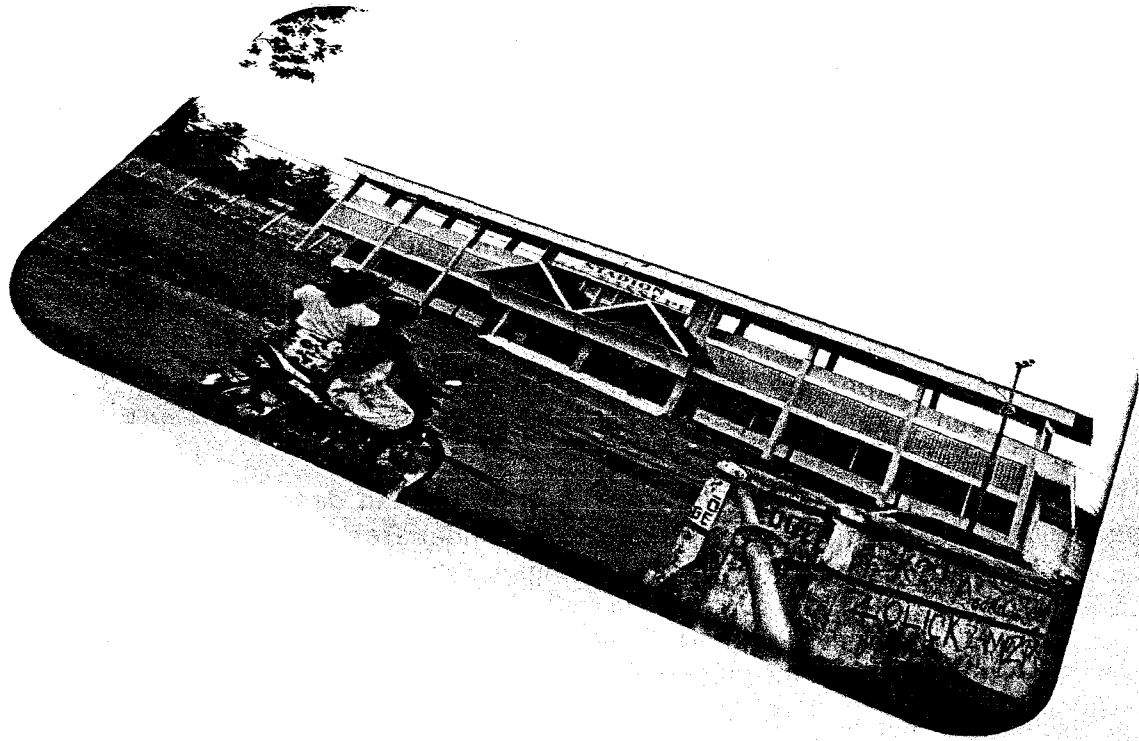
#### 8. Ketransmigrasian

Program ketransmigrasian merupakan program pilihan daerah apabila dipandang perlu. Bila dimungkinkan dan ada, maka program ini dimaksudkan untuk membina masyarakat transmigran agar lebih mandiri dan berkembangnya wilayah.

Indikasi program Ketransmigrasian mencakup ;

- a. Program pengembangan wilayah transmigrasi
- b. Program transmigrasi lokal
- c. Program transmigrasi regional

Untuk memudahkan penangan program, konfigurasi Urusan wajib dan urusan pilihan tersebut diatas , selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang "Organisasi Perangkat Daerah", yang formulasinya (dengan kelengkapan tolok ukur kinerja serta perkiraan besaran pagu indikatif), diperlihatkan pada Tabel matrik berikut :



# BAB VII

PENUTUP

VII - I

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Tahun 2009 - 2014  
KABUPATEN PINRANG



## **7.1. Pedoman Transisi**

Program Transisi dimaksudkan supaya terjadi kesinambungan pembangunan tatkala terdapat kekosongan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2015 yang belum dipersiapkan, agar Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja Satuan - Satuan Kerja Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015 dilingkungkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang harus segera dipersiapkan pada awal - awal tahun 2014 sesuai dengan kalender perencanaan daerah, memiliki preferensi atau dasar acuan.

Dokumen tersebut diatas, menjadi acuan dan pedoman untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015, serta dengan mengingat waktu yang begitu ketat bagi Pimpinan Daerah / Bupati Terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2014 nanti untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sesuai dengan jadwal dengan agenda keberlanjutan rencana pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan awal tahun 2014 dan Rencana pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2015.

Selanjutnya Bupati Terpilih hasil Pilkada Tahun 2014 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan Daerah yang lebih baik.

## **7.2. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 -2014 merupakan penjabaran Visi - Misi, dan Program Prioritas Bupati terpilih, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Pinrang, RPJM Nasional serta RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan ketentuan regulasi tentang perencanaan yang bersumber dari UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya RPJMD tersebut merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD), yang setiap tahunnya dijabarkan kedalam RKPD. Oleh karena itu agar terjadi koordinasi - harmonisasi - integrasi - sinkronisasi dalam implementasi pelaksanaan perencanaan, perlu ditetapkan norma atau kaidah - kaidah sebagai referensi yang jelas.

Kaidah - kaidah Pelaksanaan yang dimaksud ketentuannya

adalah sebagai berikut :

- a. RPJMD Kabupaten Pinrang 2009 - 2014, disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pinrang 2009 - 2029 (Perda No 1/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 - 2029),  
Pada sisi lain RPJMD ini merupakan pengejawantahan dari Visi - Misi - Program Prioritas - Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) yang direncanakan selama 5 tahun kedepan, dan selanjutnya menjadi arahan bagi para SKPD dalam rangka menyusun Rencana - Strategis
- b. RPJMD Kabupaten Pinrang 2009 - 2014, yang substansinya berisikan Visi - Misi - Program Prioritas - Arah Kebijakan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Program Kewenangan Wajib dan Pilihan Otonomi Daerah , merupakan pedoman bagi Pelaku pembangunan di daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Pinrang selama 5 tahun kedepan .
- c. Untuk memenuhi kepastian hukum, Dokumen RPJMD Kabupaten Pinrang 2009 - 2014, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang ditetapkan dengan Peraturan Daerah , menjadi dokumen resmi Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang 2009 - 2014
- d. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang, berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJMD 2009 - 2014 tersebut sesuai dengan lingkup kewenangan penyelenggaraan otonomi daerah serta sesuai dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik .
- e. Para pelaku pembangunan (stakeholders), menjadi bagian Integral pembangunan secara aktif dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab yang diembannya, dalam kerangka Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik .
- f. DPRD Kabupaten Pinrang, berkewajiban mengawasi pelaksanaan dan pencapaian target dan manfaatnya , sebagaimana yang direncanakan dalam RPJMD, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya
- g. Selain kewajiban menyusun RPJMD, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran program 5 (lima) tahunan kedalam program tahunan, dan bersama - sama dengan DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA - APBD) dan PPA(S) secara jelas.
- h. Satuan - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMDesa bagi wilayah Desa yang memuat Visi - Misi - Tujuan - Strategi - Kebijakan - Program / kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD atau tugas dan fungsi Pemerintah Desa, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2009 -2014, untuk dijadikan pedoman oleh SKPD dan Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Tahunan Desa, yang memuat ;

- Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu
  - Tujuan - Sasaran - Program Dan Kegiatan
  - Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Yang Menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD
  - Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif
  - Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program Dan Kegiatan
- i. Bappeda Kabupaten Pinrang sebagai Penanggung Jawab Perencanaan - Pengendalian - dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan, berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta RPJM Desa dan Rencana Kerja Tahunan Desa. Sebaliknya SKPD serta Pemerintahan Desa berkawajiban berkoordinasi dengan Bappeda dalam rangka penyusunan Renstra dan Renja SKPD serta RPJM Desa dan Rencana kerja tahunan desa.
- j. Pelibatan masyarakat kabupaten pinrang terhadap pelaksanaan program-program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2009 - 2014 memiliki posisi yang cukup strategis dalam mendukung konsistensi pencapaian kinerja daerah .
- k. Satuan - Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam mengimplementasikan program perlu memperhatikan bahwa :
- Program SKPD merupakan program yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan
  - Program Lintas SKPD merupakan program yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dan SKPD lain yang berkepentingan dan ada relevansinya, ditunjuk dan diatur kemudian oleh Bappeda Kabupaten Pinrang
  - Program Kewilayahan merupakan program berbasis wilayah yang dilaksanakan oleh SKPD terkait atau beberapa SKPD tertentu , yang ditunjuk dan diatur kemudian oleh Bappeda Kabupaten Pinrang

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD ini, tentunya sangat tergantung dari komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pinrang, namun pada prinsipnya tidak terlepas dari kondisi eksisting dan objektif yang terjadi ditengah masyarakat yang selalu berkembang .

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2009 - 2014 menampakan sinergitas dan harmonis dengan arah Pembangunan Nasional dan Propinsi kedepan, yang dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Pinrang

selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan

**VII - 5**

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Tahun 2009 - 2014  
KABUPATEN PINRANG**

**LAMPIRAN :**

**RENCANA PROGRAM RPJM**

**KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014**

## **URUSAN WAJIB**

- ✓ **Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga**
- ✓ **Dinas Kesehatan**
- ✓ **RSU Lasinrang**
- ✓ **Dinas PU**
- ✓ **Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air**
- ✓ **Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Kebakaran**
- ✓ **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Penanaman Modal**
- ✓ **Dinas Perhubungan Informatika & Komunikasi**
- ✓ **Badan Lingkungan Hidup**
- ✓ **Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil**
- ✓ **Badan Keluarga Berencana Daerah Dan Pemberdayaan Perempuan**
- ✓ **Dinas Sosial Kebudayaan Dan Pariwisata**
- ✓ **Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**
- ✓ **Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah**

**LAMPIRAN :**

**RENCANA PROGRAM RPJM**

**KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014**

- ✓ **Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masy**
- ✓ **Satuan Polisi Pamong Praja**
- ✓ **Sekretrariat Daerah**
- ✓ **Sekretrariat DPRD**
- ✓ **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah**
- ✓ **Inspektorat Kab Pinrang**
- ✓ **Kec. Watang Sawito**
- ✓ **Kec. Paleteang**
- ✓ **Kec. Tiroang**
- ✓ **Kec. Mattiro Bulu**
- ✓ **Kec. Suppa**
- ✓ **Kec. Mattiro Sompe**
- ✓ **Kec. Lanrisang**
- ✓ **Kec. Patampanua**
- ✓ **Kec. Duampanua**

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

- ✓ Kec. Batulappa
- ✓ Kec. Cempa
- ✓ Kec. Lembang
- ✓ Badan Kepegawaian Daerah
- ✓ Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemdes
- ✓ Kantor Perpustakaan Dan Arsip

No.	Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Langsung (dalam Rp. Juta)			
		Pegawai	Brg & jasa	Modal	TOTAL
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>	<b>301,388.36</b>	<b>532,612.18</b>	<b>1,030,689.75</b>	<b>1,864,690.29</b>
	<i>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah</i>				
	1 Raga	106,081.47	35,085.89	275,465.37	416,632.73
	2 Dinas Kesehatan	28,283.87	27,456.78	62,442.89	118,183.54
	3 RSUD Lasinrang	9,395.96	64,731.08	13,250.07	87,377.11
	4 Dinas PU	11,799.74	6,930.56	488,133.13	506,863.43
	5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	8,662.97	10,456.67	68,519.95	87,639.59
	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan				
	6 Kebakaran	11,158.41	10,612.66	7,511.38	29,282.44
	Badan Perencanaan Pembangunan				
	7 Daerah & Penanaman Modal	5,412.48	34,832.48	5,937.63	46,182.59
	Dinas Perhubungan Informatika &				
	8 Komunikasi	1,631.23	9,275.71	2,891.57	13,798.51
	9 Badan Lingkungan Hidup	2,381.23	6,983.67	10,093.07	19,457.97
	10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10,002.66	7,303.65	1,279.27	18,585.57
	Badan keluarga berencana daerah dan				
	11 Pemberdayaan Perempuan	4,158.69	6,207.45	7,856.57	18,222.71
	12 Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata	1,424.88	10,548.15	1,771.43	13,744.45
	13 Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi	9,050.02	8,839.86	1,243.73	19,133.61
	dinas koperasi dan usaha kecil dan				
	14 menengah	4,345.64	8,418.34	2,763.98	15,527.96
	<i>Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan</i>				
	15 <i>Perlindungan Masy</i>	1,878.11	4,830.98	646.56	7,355.64
	16 Satuan Polisi Pamong Praja	2,421.70	9,597.13	2,172.85	14,191.67
	17 sekretariat daerah	18,726.02	112,582.20	31,554.74	162,862.96
	18 sekretariat dprd	20,459.94	89,449.52	9,111.05	119,020.50
	dinas pendapatan, pengelolaan				
	19 keuangan dan asset daerah	19,634.24	16,810.94	5,883.96	42,329.15
	20 Inspektorat Kab Pinrang	10,304.33	3,161.18	1,128.70	14,594.20
	21 Kec. Watang sawito	355.85	1,144.89	152.06	1,652.80
	22 Kec. Paleteang	335.99	1,254.20	2,128.60	3,718.79
	23 Kec. Tiroang	422.08	1,098.68	1,414.59	2,935.35
	24 Kec. Mattiro bulu	396.94	1,057.53	198.34	1,652.80
	25 Kec. Suppa	355.77	1,190.42	106.61	1,652.80
	26 Kec. Mattiro some	397.21	1,153.49	102.09	1,652.79
	27 Kec. Lanrisang	434.03	1,115.69	1,273.65	2,823.37
	28 Kec. Patampanua	430.99	1,028.54	2,998.09	4,457.63
	29 Kec. Duampanua	411.55	1,088.35	908.62	2,408.52
	30 Kec. Batulappa	359.08	1,159.01	956.56	2,474.64
	31 Kec. Cempa	386.55	1,216.67	2,931.24	4,534.45
	32 Kec. Lembang	348.86	1,153.12	930.86	2,432.84
	33 badan kepegawaian daerah	5,099.99	25,083.92	5,476.96	35,660.86
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan				
	34 Pemdes	4,022.19	7,942.09	10,751.76	22,716.04
	35 Kantor Perpustakaan dan arsip daerah	417.70	1,810.72	701.86	2,930.28
<b>2</b>	<b>Urusan pilihan</b>	<b>42,068.61</b>	<b>61,176.90</b>	<b>102,900.40</b>	<b>206,145.91</b>
	1 dinas pertanian dan peternakan	8,427.42	18,126.85	51,031.79	77,586.06
	2 kantor ketahanan pangan	1,552.07	4,092.71	543.99	6,188.77
	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,				
	3 Perikanan dan Kehutanan	12,866.05	9,821.80	2,882.37	25,570.22
	4 dinas kehutanan dan perkebunan	5,225.59	11,951.94	7,455.11	24,632.64
	5 Dinas Kelautan dan Perikanan	10,352.97	8,747.18	28,621.58	47,721.72
	dinas perindustrian perdagangan energi				
	6 dan Mineral	3,644.51	8,436.42	12,365.57	24,446.50
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>343,456.97</b>	<b>593,789.09</b>	<b>1,133,590.15</b>	<b>2,070,836.20</b>



No.	Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Langsung (dalam Rp. Juta)				% Alokasi Anggaran Terhadap Total Belanja Langsung
		Pega-wai	Brg & jasa	Modal	TOTAL	
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>	<b>16.1%</b>	<b>28.6%</b>	<b>55.3%</b>	<b>100.0%</b>	<b>90.05%</b>
	<i>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah</i>					
	1 <i>Raga</i>	25.5%	8.4%	66.1%	100.0%	20.12%
	2 Dinas Kesehatan	23.9%	23.2%	52.8%	100.0%	5.71%
	3 RSU Lasinrang	10.8%	74.1%	15.2%	100.0%	4.22%
	4 Dinas PU	2.3%	1.4%	96.3%	100.0%	24.48%
	5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	9.9%	11.9%	78.2%	100.0%	4.23%
	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan					
	6 Kebakaran	38.1%	36.2%	25.7%	100.0%	1.41%
	Badan Perencanaan Pembangunan					
	7 Daerah & Penanaman Modal	11.7%	75.4%	12.9%	100.0%	2.23%
	Dinas Perhubungan Informatika &					
	8 Komunikasi	11.8%	67.2%	21.0%	100.0%	0.67%
	9 Badan Lingkungan Hidup	12.2%	35.9%	51.9%	100.0%	0.94%
	10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	53.8%	39.3%	6.9%	100.0%	0.90%
	Badan keluarga berencana daerah dan					
	11 Pemberdayaan Perempuan	22.8%	34.1%	43.1%	100.0%	0.88%
	12 Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata	10.4%	76.7%	12.9%	100.0%	0.66%
	13 Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi	47.3%	46.2%	6.5%	100.0%	0.92%
	dinas koperasi dan usaha kecil dan					
	14 menengah	28.0%	54.2%	17.8%	100.0%	0.75%
	<i>Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan</i>					
	15 <i>Perlindungan Masy</i>	25.0%	65.0%	10.0%	100.0%	0.36%
	16 Satuan Polisi Pamong Praja	17.1%	67.6%	15.3%	100.0%	0.69%
	17 sekretariat daerah	11.5%	69.1%	19.4%	100.0%	7.86%
	18 sekretariat dprd	17.2%	75.2%	7.7%	100.0%	5.75%
	dinas pendapatan, pengelolaan					
	19 keuangan dan asset daerah	46.4%	39.7%	13.9%	100.0%	2.04%
	20 Inspektorat Kab Pinrang	70.6%	21.7%	7.7%	100.0%	0.70%
	21 Kec. Watang sawito	21.5%	69.3%	9.2%	100.0%	0.08%
	22 Kec. Paletang	9.0%	33.7%	57.2%	100.0%	0.18%
	23 Kec. Tiroang	14.4%	37.4%	48.2%	100.0%	0.14%
	24 Kec. Mattiro bulu	24.0%	64.0%	12.0%	100.0%	0.08%
	25 Kec. Suppa	21.5%	72.0%	6.5%	100.0%	0.08%
	26 Kec. Mattiro some	24.0%	69.8%	6.2%	100.0%	0.08%
	27 Kec. Lanrisang	15.4%	39.5%	45.1%	100.0%	0.14%
	28 Kec. Patampanua	9.7%	23.1%	67.3%	100.0%	0.22%
	29 Kec. Duampanua	17.1%	45.2%	37.7%	100.0%	0.12%
	30 Kec. Batulappa	14.5%	46.8%	38.7%	100.0%	0.12%
	31 Kec. Cempa	8.5%	26.8%	64.6%	100.0%	0.22%
	32 Kec. Lembang	14.3%	47.4%	38.3%	100.0%	0.12%
	33 badan kepegawaian daerah	14.3%	70.3%	15.4%	100.0%	1.72%
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan					
	34 Pemdes	17.7%	35.0%	47.3%	100.0%	1.10%
	35 <i>Kantor Perpustakaan dan arsip daerah</i>	14.3%	61.8%	24.0%	100.0%	0.14%
<b>2</b>	<b>Urusan pilihan</b>	<b>17.5%</b>	<b>29.1%</b>	<b>53.4%</b>	<b>100.0%</b>	<b>9.95%</b>
	1 dinas pertanian dan peternakan	10.9%	23.4%	65.8%	100.0%	3.75%
	2 kantor ketahanan pangan	25.0%	65.0%	10.0%	100.0%	0.30%
	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,					
	3 Perikanan dan Kehutanan	50.3%	38.4%	11.3%	100.0%	1.23%
	4 dinas kehutanan dan perkebunan	21.2%	48.5%	30.3%	100.0%	1.19%
	5 Dinas Kelautan dan Perikanan	21.7%	18.3%	60.0%	100.0%	2.30%
	dinas perindustrian perdagangan energi					
	6 dan Mineral	14.9%	34.5%	50.6%	100.0%	1.18%
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>16.2%</b>	<b>28.7%</b>	<b>55.1%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.00%</b>

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

## **URUSAN PILIHAN**

- ✓ Dinas Pertanian Dan Peternakan
- ✓ Kantor Ketahanan Pangan
- ✓ Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
- ✓ Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
- ✓ Dinas Kelautan Dan Perikanan
- ✓ Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Mineral

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Dinas Pendidikan Pemuda  
Dan Olah Raga**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga

S K P D : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Capaian Kinerja Bd. Pendidikan Pemuda dan Olah Raga :

- Optimalisasi layanan pendidikan ; RLS 7.1 -- 73.5 ; AMH 90.0 --- 93.0 ; APS 98 -- 100 %
- Optimalisasi pendidikan usia dini ; % Wajib belajar pendidikan Dasar 9 thn, dukungan terhadap AHH
- Pembedayaan pemuda dan pengembangan prestasi Olah Raga dalam Kerangka Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	6		2009	2010	2011	2012	2013		2014**
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>													
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	± 50 - 60 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %		
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efesiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 50 - 60 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %		
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pendidikan</b>													
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	agregat jumlah anak usia dini, cakupan pengembangan sekolah,	peningkatan animo pendidikan anak usia dini, penguatan daya pikir	Anak Usia Dini, prioritas masyarakat kurang mampu, sekolah	± 20 % total pdck usia dini	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	agregat jumlah anak masuk kategori wajib belajar 9 thn, cakupan pengembangan sarana dan prasarana sekolah,	peningkatan animo pendidikan anak wajib belajar, pengembangan kemampuan berpikir (APK) 9 thn,	Anak usia katagori wajib pendidikan dasar, prioritas masyarakat rentan pendidikan, sekolah penyelenggara	± 25 % total pdck usia wajib belajar	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
3	Program Pendidikan Menengah	agregat jumlah remaja yang mengikuti pendidikan menengah , cakupan pengemb. sarana dan prasarana sekolah	peningkatan animo pendidikan remaja, kualitas pendidikan, kemampuan daya nalar	remaja usia pendidikan menengah, terutama kalangan kurang mampu, sekolah penyelenggaraan	± 20 % total pdck usia pendidikan menengah	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	APBD Kab, Prov, Pusat	

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

S K P D : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Capaian Kinerja Bd. Pendidikan Pemuda dan Olah Raga :

- Optimasi layanan pendidikan : RLS 7.1 – 73.5 ; AMH 90.0 ---- 93.0 ; APS 98 – 100 %

- Optimasi pendidikan usia dini ; % Wajib belajar pendidikan Dasar 9 thn, dukungan terhadap AHH

- Pernerdayaan pemuda dan pengembangan prestasi Olah Raga dalam Kerangka Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSTING. '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN		HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
		3	4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
4	Program Pendidikan Non Formal	agregat jumlah ptrai yang mengikuti pendidikan non formal, cakupan pengembangan sarana dan prasarana sekolah	pengembangan animo pendidikan, kualitas pendidikan, daya nalar, kemandirian	ptrai plus sekolah, kel. Kurang mampu, sekolah penyelenggara pendidikan, sekolah penyelenggaraan	± 10 % total pddk kurang bersekolah	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
5	Program Pendidikan Luar Biasa	agregat jumlah ptrai yang mengikuti pendidikan luar biasa, pengembangan sarana dan prasarana sekolah	pengurangan keterbelakangan intelektual, kemandirian	ptrai yang mengalami keterbelakangan kemampuan pendidikan, sekolah penyelenggaraan	± 2 % total usia sekolah mengalami keterbelakangan mental	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
6	Program Peningkatan Mutu Kependidikan Dan Tenaga Kependidikan	agregat jumlah pendidik & T Kependidikan Yang mengikuti penjenjangan pendidikan & sertifikasi	Tingkat efektifitas kualitas & daya saing pendidikan	pengajar dan T kependidikan yang perlu memenuhi persyaratan pendidikan dan atau yang belum bersertifikasi	± 60 % tenaga pendidik & kependidikan yang belum mengikuti penjenjangan	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
7	Program Manajemen Pelayanaan Pendidikan	agregat jumlah pendidik dan T Kependidikan dasar dan menengah pengelola sekolah	Tingkat efektifitas manajemen berbasis sekolah	sekolah <sup>2</sup> yang manajemennya masih kurang baik	± 50 % tenaga pendidik & kependidikan, perlu peningkatan manajemen	3 %	6 %	9 %	12 %	16 %	20 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
8	Program Peningkatan Kualitas SDM Dan Perbaikan Kesejahteraan Tenaga Pendidik/Guru (Program Prioritas)	agregat jumlah pendidik	kualitas pendidikan ; tingkat daya beli	prioritas pendidik daerah terpencil	± 70 % tenaga pendidik & kependidikan yang perlu perbaikan kesejahteraan	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
9	Program Peningkatan Kualitas Dan Perbaikan Fasilitas Pendidikan Serta Kapasitas Daya Tampung Sekolah Disetiap Jenjang Dalam Rangka Peningkatan Kualitas SDM (Program Prioritas)	agregat jumlah sekolah	kualitas pendidikan, kenaikan APKM	sekolah <sup>2</sup> yang fasilitasnya dan jumlah kelasnya relatif kurang	± 60 % sarana pendidikan masuk kategori kurang baik	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	APBD Kab, Prov, Pusat	

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Capaian Kinerja Bd. Pendidikan Pemuda dan Olah Raga :

- Optimalisasi layanan pendidikan ; RLS 7.1 - 73.5 ; AMH 90.0 -- 93.0 ; APS 98 - 100 %
- Optimalisasi pendidikan usia dini ; % Wajib belajar pendidikan Dasar 9 thn, dukungan terhadap AHH
- Pemberdayaan pemuda dan pengembangan prestasi Olah Raga dalam Kerangka Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
10	Program Bantuan Subsidi Keluarga Miskin Untuk Akses Layanan Pendidikan Yang Selaras Dengan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Program Prioritas)	agregat jumlah penerima bantuan yang putranya rentan putus sekolah	kuailta pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap pendidikan formal	Keluarga Miskin	± 25 % total podk kurang mampu	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	APBD Kab, Prov, Pusat
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Kepemudaan dan Olah Raga</b>												
1	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	cakupan sosialisasi peran dan pemberdayaan pemuda	pemberdayaan peran pemuda, produktivitas kerja pemuda	Pemuda2 potensial di 12 kecamatan dan kota Pinrang	± 13 fasilitas untuk memperkenalkan kebijakan kepemudaan	2	3	2	2	2	2	APBD Kab.
2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	cakupan pembinaan peran pemuda	pemberdayaan peran pemuda, produktivitas kerja pemuda	Pemuda2 potensial di 12 kecamatan dan kota Pinrang	± 13 fasilitas untuk pembinaan pemuda	3	2	2	2	2	2	APBD Kab.
3	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	cakupan pembinaan kewirausahaan	pemberdayaan peran pemuda, produktivitas kerja pemuda	Pemuda2 enterprenaur di 12 kec. Dan Kota Pinrang	± 200 pemuda enterprenaur yang perlu dikembangkan	--	--	50	50	50	50	APBD Kab.
4	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	cakupan pembinaan penyalahgunaan narkoba	pemuda sehat bebas narkoba, produktifitas. AHH	Pemuda / remaja di 12 kec. Dan Kota Pinrang (terutama dari siswa sekolah)	± 200 pemuda / remaja perlu untuk diberikan pengarahan	--	50	50	50	50	--	APBD Kab.
5	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	cakupan sosialisasi keb. & Manajemen Olahraga	Prestasi olahraga, kesehatan fisik, pemberdayaan masyarakat	Masy peduli O. Raga, keterwakilan dari cabang O. Raga	± 250 masy OR perlu diberikan pemahaman ting OR	50	50	50	50	50	--	APBD Kab.
6	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

S K P D : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Capaian Kinerja Bd. Pendidikan Pemuda dan Olah Raga :

- Optinasi layanan pendidikan ; RLS 7.1 -- 73.5 ; AMH 90.0 -- 93.0 ; APS 98 -- 100 %
- Optinasi pendidikan usia dini ; % Wajib belajar pendidikan Dasar 9 thn, dukungan terhadap AHH
- Pemberdayaan pemuda dan pengembangan prestasi Olah Raga dalam Kerangka Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR						CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	Program pembinaan, pengembangan dan pembangunan olah raga dan seni (Program Prioritas)	cakupan pembinaan Pemasarakan & pengembangan OR	Prestasi olahraga, kesehatan fisik, pemberdayaan masyarakat	Masy peduli O. Raga, kelerwakan dari cabang O. Raga	Stadion OR perlu direhabilitasi & pemb sarana OR berprestasi	± 250 partisipan OR perlu pembinaan dan apresiasi	50	50	50	50	50	50	19	APBD Kab, Prov, Pusat
		kuantiti sarana & prasarana kesenian	Prestasi Berkesenian, pemberdayaan masyarakat	Pusat kesenian Kab			25 %	50 %	100 %	--	100 %	--		APBD Kab, Prov, Pusat
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>														
							71553.3	64792.3	72481.7	91083.3	11702.3			APBD Kab.

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Dinas Kesehatan**



## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kesehatan

SKPD : Dinas Kesehatan

Capaian Kinerja Bd. Kesehatan :

- Optimalisasi derajat layanan kesehatan ; AHH : 71 - 73 ; % balita gizi buruk minimalis

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSTING, 07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009								
					2009		2010	2011	2012	2013	2014**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>													
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor.	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prasarana, akses dan mobilitas aparatur.	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	± 60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %		
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit.	Sistem pelaporan ; tata dinas	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %		
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Kesehatan</b>													
1	Program obat dan pembekalan kesehatan	Tingkat ketersediaan & pemerataan obat dan pembekalan kesehatan	kesehatan prima, produktifitas kerja	Puskesmas, pustu, polindes	± 50 % sarana kesehatan yang belum terlayani	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
2	Program upaya kesehatan masyarakat	Tingkat keterjangkauan pelayanan kesehatan, cakupan pengembangan sarana & prasarana Puskesmas	kesehatan prima, produktifitas kerja	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, Puskesmas	± 40 % masy kurang mampu belum terlayani	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab, Prov, Pusat	

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kesehatan  
 SKPD : Dinas Kesehatan  
 Capaian Kinerja Bd. Kesehatan :

- Opiniasi derajat layanan kesehatan ; AHH : 71 - 73 ; % balita gizi buruk minimalis

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
3	Program pengembangan obat dan makanan	tingkat pengembangan daerah terhadap peredaran obat & makanan	efisiensi pembelanjaan kesehatan ; taat hukum	apokik, pengusaha /pedagang obat & makanan, lab. Kes	± 60 % objek yang baru terawasi	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
4	Program pengembangan obat asli Indonesia	tingkat penggunaan obat asli daerah	efisiensi pembelanjaan kesehatan, produktifitas kerja, pengemb Daerah	pengusaha /pedagang obat asli	± 60 % objek yang belum dibina	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
5	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	cakupan desa siaga aktif, % perilaku hidup sehat, sosialisasi	efisiensi pembelanjaan kesehatan, produktifitas	desa - desa siaga, tenaga penyuluh	± 60 % desa siaga aktif kurang dalam pembinaan kesehatan	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
6	Program perbaikan gizi masyarakat	cakupan masy gizi buruk yang mendapat perbaikan gizi, penyuluhan	daya tahan tubuh, daya nalar, produktifitas	balita, remaja & Riangga yang diduga rawan gizi	± 40 % masy rawan gizi yang belum terlayani	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
7	Program pengembangan lingkungan sehat	% perilaku hidup sehat, akses penduduk terhadap sanitasi dasar	efisiensi pembelanjaan kesehatan, produktifitas	Lingkungan yang permukiman yang tidak/kurang sehat	± 40 % lingkungan permukiman tidak/kurang sehat	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
8	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	cakupan desakel, Rawan penyebaran penyakit menular	Lingkungan & masy sehat produktifitas	Lingkungan yang permukiman yang rawan peny. Menular	± 60 % lingk permukiman rawan penyakit menular	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
9	Program standarisasi pelayanan kesehatan	cakupan tenaga kesehatan yang berkompeten	penyebab liasan perilaku sehat yang baik	SKPD terkait dengan kesehatan	± 20 % T kesehatan yang perlu ditingkatkan kompetensinya	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
10	Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin	cakupan masyarakat mengalami gangguan beragam penyakit	kesehatan PIRMA produktifitas	masyarakat kurang mampu yang mengalami gangguan	± 80 % masyarakat miskin belum terlayani	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab, Prov, Pusat	



## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kesehatan

SKPD : Dinas Kesehatan

Capaian Kinerja Bd. Kesehatan :

- Optimalisasi derajat layanan kesehatan ; AHH : 71 - 73 ; % balita gizi buruk minimalis

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
18	Program Peningkatan Gizi Balita Melalui Posyandu Dengan Pemberian Makanan Sehat Dan Bergizi, Vitamin Dan Vaksinasi Untuk Mereduksi Kasus Gizi Buruk (Program Prioritas)	cakupan perawatan balita	balita sehat, kemampuan nalar, peningkatan AHH	balita rentan penyakit dan prevelensi gizi buruk	± 60 % balita yang perlu mendapat kesehatan dan asupan nutrisi	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab. Prov. Pusat	
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>													
						18.798,7	20.560,3	21.000,0					APBD Kab.

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**RSU Lasinrang**

# RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kesehatan

SKPD : RSUD Lasinrang

Capaian Kinerja Bd. Kesehatan RSUD Lasinrang

- Optimasi Pelayanan Prima pengguna RSUD ; AHH : 71 - 73

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING: 07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor indop Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuaitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur.	efektifitas pelayanan internal kantor indop Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	± 60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efesiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit.	Sistem pelaporan ; tata dinas	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Kesehatan</b>												
1	Program obat dan perbekalan kesehatan	Tingkat ketersediaan & pemerataan obat dan perbekalan kesehatan RSUD	kesehatan prima, produktifitas kerja	Stok Obat RSUD	± 100 % stok obat sarana kesehatan harus selalu sedia	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab, Prov, Pusat
8	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	cakupan penanganan langsung RSUD	Lingkungan & masy sehat produktifitas	pasien yang langsung ditangani	± 100 % pasien harus ditangani (dalam keadaan darurat), bila ada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	APBD Kab, Prov, Pusat
12	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	cakupan kelengkapan RSUD	kesehatan prima, produktifitas kerja	RSUD dan kelengkapannya	Layanan RSUD belum optimal	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab, Prov, Pusat

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kesehatan

SKPD : RSUD Lasinrang

Capaian Kinerja Bd. Kesehatan RSUD Lasinrang

- Optimalisasi Pelayanan Prima pengguna RSUD ; AHH : 71 - 73

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
13	Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	cakupan optimalisasi layanan RSUD	kesehatan prima, produktifitas kerja	kelengkapan RSUD	RSUD tetap harus optimal pelayanannya	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab. Prov. Pusat	
14	Program pembinaan peningkatan pelayanan kesehatan	cakupan objek untuk dikerjasamakan	kesehatan prima, produktifitas	Peserta layanan kesehatan RSUD	± 100 % Peserta yang berkunjung perlu ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	APBD Kab. Prov. Pusat	
15	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan imunisasi, Tingkat layanan RSUD	balita yang sehat, kemampuan nalar	balita, anak terantar yang ditangani RSUD	± 100 % Balita & anak rawan kesehatan yang berkunjung perlu ditangani segera	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	APBD Kab. Prov. Pusat	
16	Program peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia	cakupan pelayanan	peningkatan AHH, efisiensi cost untuk tetap sehat	perduuduk lanjut usia yang	± 100 % lanjut usia rawan penyakit yang berkunjung ke RSUD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	APBD Kab. Prov. Pusat	
18	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Tingkat pelayanan kesehatan ibu dan bayi	ibu, bayi yang sehat, peningkatan AHH	ibu, bayi dan anak yang ditangani RSUD	± 100 % ibu melahirkan yang perlu ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	APBD Kab. Prov. Pusat	
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>													

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



Dinas PU



## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pekerjaan Umum, dan Perumahan

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Capaian Kinerja Bd. Pekerjaan Umum dan Perumahan :

- optimasi penyediaan perumahan sederhana dan kesehatan lingkungan
- optimasi cakupan layanan infrastruktur, aksesibilitas & mobilitas barang & jasa, pertumbuhan ekonomi daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
7	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	kuantiti jalan & jembatan daerah bencana (Post Majleur)	daerah tetap berkembang, mobilitas, pemerdayaan ekonomi masy.	area kedarurata (Post majleur), tertentu	± 100 % area tanggap darurat bila ada	--	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	APBD Kab, Prov, Pusat (dicadangkan)
8	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Computerisasi data base jalan dan jembatan Kab. termasuk jln pusat & prov. Yang ada di Kab.	Dapat di akses, akurasi informasi, tindakan secepatnya	pengadaan/ penguatan perangkat, wil. Kab	100 % belum terbangun	--	--	50 %	100 %	--	--	APBD Kab.
9	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	kuantiti penunjang kebinamargaan (alat berat, Lab, gd workshop, bkl)	tindakan cepat kualitas jalan Kab, pertumbuhan daerah, mobilitas ekonomi masy.	Balai kebinamargaan Wil. Kab.	± 50 % sarana & prasarana belum lengkap	--	--	15 %	30 %	45 %	70 %	APBD Kab, Prov, Pusat
10	Program pengembangan wilayah cepat tumbuh	kuantiti wil. Cepat tumbuh (kuantiti sarana & prasarana yang ditangani)	penguatan Ekonomi Masy. Perkembangan wilayah	Kawasan2 Kab. Yang dikategorikan cepat tumbuh	± 60 % wil. Cepat tumbuh Kab. perlu penguatan	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	APBD Kab, Prov, Pusat
11	Program pengembangan infrastruktur pedesaan	kuantiti sarana & prasarana yang ditangani dalam wil. desa2	penguatan Ekonomi Masy./ desa, Perkembangan wilayah	desa2 prioritas dalam wil Kab.	± 40 % desa, masih perlu diperkuat	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	APBD Kab, Prov, Pusat
12	Program Pengaturan Jasa konstruksi	Cakupan layanan perizinan Jasa Konstruksi	Kualitas jasa konstruksi, aksesibilitas	Pengusaha jasa konstruksi	± 70 % Usaha jasa konstruksi perlu kelengkapan perizinan	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	APBD Kab.

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pekerjaan Umum, dan Perumahan

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Capaian Kinerja Bd. Pekerjaan Umum dan Perumahan :

- optimasi penyediaan perumahan sederhana dan kesehatan lingkungan
- optimasi cakupan layanan infrastruktur, aksesibilitas & mobilitas barang & jasa, pertumbuhan ekonomi daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKISTING, 07/7/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Cakupan kuantiti penguatan pengguna Jasa Konstruksi	kuailias jasa konstruksi, mutu aksesibilitas	pengguna jasa konstruksi	± 70 % pengguna Jasa Konstruksi perlu penguatan	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	APBD Kab.	
14	Program Penguasaan Jasa Konstruksi	Cakupan penguasaan tertib penyelenggaraan dan pemertaaan	tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, mutu aksesibilitas	jasa konstruksi pelaksana tugas	± 100 % Jasa Konstruksi pelaksanaan tugas perlu dikontrol	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.	
12	Program Pembangunan Jalan, Drainase Dan Jembatan Pada Wilayah Tertinggal Khususnya Wilayah Utara (Program Prioritas)	kuantiti sarana & prasarana yang dtangani pada Area yang masuk Daerah tertinggal	penguatan Ekonomi Masy./wil. Tertinggal (prioritas wilayah ultra Kab)	wil. Tertinggal (prioritas wilayah ultra Kab)	± 60 % wil. Tertinggal perlu diberdayakan	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
13	Program Pembangunan Dan Dan Perbaikan Jalan Kabupaten, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Utamanya Pada Sentra-Sentra Wilayah Pengembangan Agropolitan (Program Prioritas)	kuantiti prasarana jalan kab. kec. dan desa/kei dalam wil. Pengemb. Agropolitan	penguatan ekonomi masy. Berbasis pertanian, pengembangan wilayah	Jalan Kab - Kec - Desa/kei menuju & Skr wil Pusat - pusat pengembn Agropolitan	± 30 % jalan Kab - kec. - desa/kei menuju dan sekitar kws Agropolitan masih perlu diperkuat	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	APBD Kab, Prov, Pusat	

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pekerjaan Umum, dan Perumahan

S K P D : Dinas Pekerjaan Umum

Capaian Kinerja Bd. Pekerjaan Umum dan Perumahan :

- optimasi penyediaan perumahan sederhana dan kesehatan lingkungan
- optimasi cakupan layanan infrastruktur, aksesibilitas & mobilitas barang & jasa, pertumbuhan ekonomi daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana		
		KELUAPAN 3	HASIL 4	SASARAN 5		2009	2010	2011	2012	2013		2014**)	
14	Program Pembangunan Jalan Pertanian Dan Perikanan Serta Perintisan Jalan Perkebunan/Kehutanan Utamanya Pada Sentra-Sentra Wilayah Pengembangan Agropoltian (Program Prioritas)	kuantiti prasarana jalan pertanian (farm roads) dalam wil. Pengemb. Agropoltian	penguatan ekonomi masy. Berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan	wil. Kab. Yang dikategorikan sebagai pusat - pusat pertumbuhan Agropoltian dan wilayah pengaruhnya	± 40 % wil. Agropoltian dan pengaruhnya perlu ditangani segera	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	19	APBD Kab, Prov, Pusat
15	Program Penanggulangan Bencana Banjir Sungai Saddang Dan Konservasi DAS (Program Prioritas)	kuantiti area dan DAS Sungai Saddang yang dtangani	produktivitas ekonomi masy. , mobilitas, konservasi lahan,	DAS Sungai Saddang	± 40 % Das S Saddang berpotensi Banjir perlu segera ditangani	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %		APBD Kab, Prov, Pusat
16	Program Bantuan Subsidi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa/Kelurahan (Program Prioritas)	cakupan saraara & Prasarana desa/ke	masyarakat sehat, produktivitas kerja, peningkatan daya beli	desa/ke yang sarana & prasarannya sangat tidak baik (prioritas)	± 80 % desa/ke perlu mendapat bantuan untuk perbaikan infrastruktur	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %		APBD Kab, Prov, Pusat

**Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Perumahan**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pekerjaan Umum, dan Perumahan,

S K P D : Dinas Pekerjaan Umum

Capaian Kinerja Bd. Pekerjaan Umum dan Perumahan :

- optimasi penyediaan perumahan sederhana dan kesehatan lingkungan
- optimasi cakupan layanan infrastruktur, aksesibilitas & mobilitas barang & jasa, pertumbuhan ekonomi daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	Program pengembangan perumahan	kuantiti sarana dan prasarana kelengkapan RSS	mobilitas, efektifitas & produktifitas kerja	area lingk. Perumahan / perumahan RSS	± 40 % lingk perumahan (pra) sarana belum memadai	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
2	Program lingkungan sehat perumahan	kuantiti sarana air bersih & sanitasi kelengkapan RSS	Kesehatan lingk., efisiensi cost kesehatan	area lingk. Perumahan / perumahan RSS	± 40 % lingk perumahan sarana air bersih & sanitasi belum memadai	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
3	Program pemberdayaan komunitas perumahan	fasilitasi kuantiti peminat kredit mikro	rumah sehat, lingk asri	lingk. Perumahan kumuh,	± 50 % lingk perumahan tidak layak huni perlu dibenahi	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab, Prov, Pusat (dicadangkan)	
4	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial	kuantiti rehabilitasi rumah	rumah sehat, pemulihan beraktifitas	Kawasan bencana bila ada	± 100 % area tanggap darurat bila ada	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab, Prov, Pusat (dicadangkan)	
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>								73.824,4	88.178,5	98.600,6	110.311,1	APBD Kab.	

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Dinas Pengelolaan Sumber  
Daya Air**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pekerjaan Umum, dan Perumahan

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Capaian Kinerja Bd. Pekerjaan Umum dan Perumahan :

- optimasi penyediaan perumahan sederhana dan kesehatan lingkungan
- optimasi cakupan layanan infrastruktur, aksesibilitas & mobilitas barang & Jasa, pertumbuhan ekonomi daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur.	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	± 50 - 60 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan cara pelaporan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	laporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pekerjaan Umum</b>												
1	Program pembangunan jalan dan jembatan	kuantiti panjang jalan & jembatan	mobilitas & aksesibilitas, perkembangan area, pertumbuhan ekonomi	(prioritas) Kws. Strategis, daerah terpencil, daerah potensial	± 40 % kws strategis & terpencil belum tertangani dengan baik	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	APBD Kab, Prov, Pusat

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pekerjaan Umum, dan Perumahan

S K P D : Dinas Pekerjaan Umum

Capaian Kinerja Bd. Pekerjaan Umum dan Perumahan :

- optimasi penyediaan perumahan sederhana dan kesehatan lingkungan
- optimasi cakupan layanan infrastruktur, aksesibilitas & mobilitas barang & jasa, pertumbuhan ekonomi daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana	
		KELURAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)			
1														19
2	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	kuantiti sal. Drainase & gorong2	meniadakan resiko bencana, mobilitas & aktivitas	Kawasan Perkotaan, (prioritas) kws. Yang sering banjir	± 20 % kws perkotaan dan besiko banjir, perlu ditangani	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %		APPBD Kab.	
3	Program pembangunan juraplalud/brongjong	kuantiti area besiko	meniadakan resiko bencana, mobilitas & aktivitas	area rawan banjir, rawan longsor	± 20 % area rawan bencana belum tertangani	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %		APPBD Kab, Prov, Pusat	
4	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	kuantiti panjang jalan & jembatan yang direhabilitasi	mobilitas & aksesibilitas, perkembangan area, pertumbuhan ekonomi	jalan & jembatan kab. yang perlu direhabilitasi	± 40 % panjang jalan & jembatan Kab. perlu di rehabilitasi	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %		APPBD Kab, Prov, Pusat	
5	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/brongjong	kuantiti area yang telah diturap/brongjong	meniadakan resiko bencana, mobilitas & aktivitas	area rawan banjir, rawan longsor	± 40 % area yang diturap perlu pemeliharaan	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %			
6	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	kuantiti panjang jalan & jembatan inspeksi	mobilitas angkutan, penguatan ekonomi masy.	area sepanjang sungai berpodensi perluurban	± 40 % jalan inspeksi & jembatan perlu pemeliharaan	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %			

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pekerjaan Umum

S K P D : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Capaian Kinerja Bd. Pekerjaan Umum , Pengelolaan Sumber Daya Air :

- optimasi cakupan layanan management neraca air, pertumbuhan ekonomi daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur.	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	± 50 - 60 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pekerjaan Umum</b>												
1	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya	kuantiti sal irigasi yang dibangun , normalisasi , rehabilitasi	produktivitas tanaman pangan, pengembangan ekonomi masy.	wil. Kab berrigasi teknis & 1/2 teknis	± 50 % saluran perlu ditangani	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	APBD Kab, Prov, Pusat
2	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	kuantiti saluran & Vol air baku	produktivitas tanaman pangan, kesehatan masy , produktivitas kerja	wil. Kab berrigasi teknis & 1/2 teknis dan penyedia air baku	± 50 % saluran penyedia air baku masih perlu perbaikan	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	APBD Kab, Prov, Pusat



## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pekerjaan Umum  
 SKPD : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Capaian Kinerja Bd. Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air :

- optimalisasi cakupan layanan management neraca air, pertumbuhan ekonomi daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKISTING, '07'08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
3	Progrm pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	kuantiti objek yang ditangani	konservasi area, produktivitas tanaman pangu, produktivitas kerja, pemberdayaan masy.	Area keberadaan sungai, danau, embung	± 70 % alur sungai, danau, embung belum tertangani dengan baik	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %		APBD Kab, Prov, Pusat
4	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	kuantiti sarana & prasarana yang ditangani (air bersih, air limbah, dll)	Kesehatan lingk, efesiensi cost kesehatan, produktivitas kerja, penguatan ekonomi masy.	area lingk. Masy. Berpenghasilan rendah	± 40 % sarana & prasarana air bersih/air limbah belum ditangani	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %		APBD Kab, Prov, Pusat
5	Program pengendalian banjir	kuantiti area / penyebab resiko banjir	Kesehatan lingk, Pengembangan wil, Produktivitas tanaman pangan, penguatan ekonomi masy.	area penyebab banjir kab. Dan wilayah pesisir	± 80 % kawasan penyebab banjir perlu penanganan	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %		APBD Kab, Prov, Pusat
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>													APBD Kab.

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Dinas Kebersihan,  
Pertamanan Dan Kebakaran**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Penataan Ruang

SKPD : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran

Capaian Kinerja Bd. Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran

- keindahan kota, RTH, dan pencegahan kebakaran, dalam kerangka pembangunan daerah
- tersedianya dokumen perencanaan tata ruang lengkap

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
3	Program peningkatan kesigapan dan pencegahan bahaya kebakaran	cakupan sosialisasi tentang kesigapan dan pencegahan kebakaran	kesadaran akan pencegahan bahaya kebakaran	masyarakat, petugas kebersihan	± 200 peserta perlu penyadaran pencegahan kebakaran	--	40	40	40	40	40	APBD Kab.
		cakupan kelengkapan sarana dan prasarana Kebakaran	kenyamanan kota, pelestarian lingkungan	Insitusi yang menangani pencegahan kebakaran	± 60 % perlu kelengkapan sarana	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab.
		cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana Kebakaran	kenyamanan dan keindahan kota, Pencegahan kerugian	sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang ada	± 100 % sarana & Prasarana harus dalam kondisi prima	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab.
5	Program pengelolaan areal pemakaman	cakupan pembenahan areal pemakaman	konsolidasi lahan permukiman	lahan pemakaman yang dikelola Pemerintah Daerah	± 60 % area perkotaan rawan kebakaran <u>bila ada</u>	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	APBD Kab.
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>							1069	1555,8	509,3	509,3	509,3	APBD Kab.

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Penataan Ruang

S K P D : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran

Capaian Kinerja Bd. Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran

- keindahan kota, RTH, dan pencegahan kebakaran , dalam kerangka pembangunan daerah

- tersedianya dokumen perencanaan tata ruang lengkap

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, 07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prasarana, akses dan mobilitas aparatur.	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	± 60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit, tata dinas	Sistem pelaporan ; tata dinas	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Penataan Ruang

S K P D : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakhar

Capaian Kinerja Bd. Kebersihan, Pertamanan dan Kebakhar

- keindahan kota, RTH, dan pencegahan kebakaran, dalam kerangka pembangunan daerah

- tersedianya dokumen perencanaan tata ruang lengkap

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
<p><b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Penataan Ruang (Kebersihan, Pertamanan dan Kebakhar)</b></p>													
1	Program peningkatan Kebersihan kota	cakupan sosialisasi kebersihan kotadarah	kesadaran akan kebersihan	masyarakat, petugas kebersihan	± 240 RTangga, pengelola Pasar, petugas kebersihan perlu penguatan telang kebersihan	40	40	40	40	40	40	APBD Kab.	
		cakupan kelengkapan sarana dan prasarana kebersihan	kenyamanan kota, pelestarian lingkungan	Instusi yang menangani kebersihan	± 60 % perlu kelengkapan sarana	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab.	
		cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan	kenyamanan kota, pelestarian lingkungan	sarana dan prasarana kebersihan yang ada	± 100 % sarana & Prasarana harus dalam kondisi prima	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab.	
2	Program pengembangan Pertamanan	cakupan sosialisasi tentang keberadaan pertamanan	kesadaran akan keindahan	masyarakat, petugas pertamanan	± 200 Pemertali keindahan kota perlu denuatan	--	40	40	40	40	40	APBD Kab.	
		cakupan kelengkapan sarana dan prasarana pertamanan	kenyamanan kota, pelestarian lingkungan	Instusi yang menangani Pertamanan	± 50 % perlu kelengkapan sarana	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab.	
		cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana Pertamanan	kenyamanan dan keindahan kota, pelestarian lingkungan, Ruang Terbuka Hijau	sarana dan prasarana Pertamana yang ada	± 100 % sarana & Prasarana harus dalam kondisi prima	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab.	

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah & Penanaman  
Modal**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) d

Capaian Kinerja Bd. Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal :

• penguatan ketahanan ekonomi daerah

• Terbangunnya peluang investasi dalam kerangka pembangunan daerah

tersedianya dokumen data base perencanaan sebagai acuan pembangunan daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/'08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	± 60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) d

Capaian Kinerja Bd. Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal :

- penguatan ketahanan ekonomi daerah
- Terbangunnya peluang investasi dalam kerangka pembangunan daerah
- tersedianya dokumen data base perencanaan sebagai acuan pembangunan daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
<p><b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Perencanaan Pembangunan</b></p>													
1	Program pengembangan data/informasi	dukumen : perenc. program, informasi Perenc. Analisis karakteristik kawasan, & Kwsn. Potensial & Profil daerah	efisiensi & efektifitas pemb. Daerah, pencapaian prog, pemberdayaan ekonomi masy.	Objek yang ada di Wilayah Kabupaten	review dok prog rutin, penyajian 1 dok. Identifikasi perenc. penyajian 1 dok kws2 potensial & Profil daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	APBD Kab.	
2	Program kerjasama pembangunan	MOU dan objek kerjasama	kemitraan saling menguntungkan, pembangunan wilayah	Wil. Kab. antar daerah / organisasi yang dikerjasankan	± 100 % belum ada yang dikerjasankan <b>bila ada</b>	--	--	100 %	--	--	--	APBD Kab.	
3	Program pengembangan wilayah perbatasan	Dok. Perencanaan wilayah perbatasan	konsolidasi pengembangan wil. Perbatasan	koridor wilayah berbatasan dengan kab/kota sekitarnya	± 100 % belum dipersiapkan	--	--	--	--	100 %	--		
4	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dok. Perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh	konsolidasi pengembangan wil. Strategis	Kawasan2 yang diindikasikan sebagai kwsn strategis & Cepat tumbuh	± 100 % belum dipersiapkan	--	100 %	--	--	--	--		



## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) d

Capaian Kinerja Bd. Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal :

- penguatan ketahanan ekonomi daerah
- Terbangunnya peluang investasi dalam kerangka pembangunan daerah
- tersedianya dokumen data base perencanaan sebagai acuan pembangunan daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**		
											7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
5	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Dok. RTRW Kota Pinrang	efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan perkotaan	Kota Pinrang	± 100 % RTRW Kota belum diperbaharui dipersiapkan perencanaannya	--	--	100 %	--	--	--	--	
6	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	kuatiti kompetensi aparatur perencana daerah	penguatan kompetensi aparatur perencana, dok. Perencanaan yang berkualitas	aparatur Perencana SKPD, DPRD, Stakeholder	± 150 aparatur perencana perlu ditingkaskan komaetensinya	--	50	50	50	--	--	--	
7	Program perencanaan pembangunan daerah	Dok RKPD, Musrenbang RKPD, LKPJ, Monitoring	pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan. Pencapaian kinerja perenc. Dan penyelenggaraan pembangunan, partisipasi masyarakat	SKPD, NGOs	Penyiapan Dok & Musrenbang RKPD & penetapannya	--	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	APBD Kab.
8	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Dok, Perencanaan perekonomian daerah	akurasi perencanaan dan indikator perekonomian tepat sasaran	Wilayah Kabupaten	LPPD akhir masa jabatan	--	--	--	--	--	--	100 %	APBD Kab.
					LKPJ akhir tahun anggaran	--	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	APBD Kab.
					LKPJ akhir masa jabatan	--	--	--	--	--	100 %	100 %	100 %
					review dokumen	100 %	--	--	--	--	--	--	APBD Kab.

KPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Penanaman Modal

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal

S K P D : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) d

Capaian Kinerja Bd. Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal :

- penguatan ketahanan ekonomi daerah

- Terbangunnya peluang investasi dalam kerangka pembangunan daerah

- tersedianya dokumen data base perencanaan sebagai acuan pembangunan daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
9	Program perencanaan sosial budaya	Dok. Perencanaan sosial budaya daerah	akurasi perencanaan dan indikator sosial budaya tepat sasaran	Wilayah Kabupaten	review dokumen	--	--	--	100 %	--	--	APBD Kab.	
10	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Dok. Perencanaan prasarana & Potensi SDA	akurasi perencanaan dan indikator prasarana & Potensi SDA	wil potensi SDA Kab.	review /penyusunan dokumen	--	--	100 %	--	--	--	APBD Kab.	
11	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Dok. Perencanaan pemb. Rawan bencana	akurasi perencanaan dan indikator pengembangan Rawan bencana	wil rawan bencana Kab.	review /penyusunan dokumen	--	--	--	--	100 %	--	APBD Kab.	
12	Program Pengembangan Pemantauan Ruang Dan Penataan Ruang Pemukiman Serta Kelestarian Lingkungan Hidup (Program Prioritas)	dokumen perencanaan Tata ruang Kab	konsolidasi pemanfaatan ruang, pengembangan wilayah, kelestarian lingkungan	Wil. Kabupaten	Dok. RTRW perlu direview	--	100 %	--	--	--	--	APBD Kab.	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Penanaman Modal</b>													
1	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	cakupan kuantitatif promosi potensi daerah	penyebarnya, minat investasi, pengembangan daerah	promosi di berbagai even (Pusat - provinsi - daerah)	± 3 even promosi rutin perlu dilakukan	3	3	3	3	3	3	APBD Kab.	
2	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	dokumen profil investasi daerah	penyebarnya, potensi investasi, pengembangan daerah	akurasi peluang investasi daerah	rutin perlu diterbitkan ± 100 eks/thn	100	100	100	100	100	100	APBD Kab.	

**RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014**

Urusan : Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal  
 SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) d  
 Capaian Kinerja Bd. Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal :

- penguatan ketahanan ekonomi daerah
- Terbangunnya peluang investasi dalam kerangka pembangunan daerah
- tersedianya dokumen data base perencanaan sebagai acuan pembangunan daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
3	Program penyajian potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	kuantiti analisis potensi daerah	penyebar luasan potensi Sdaya, dan infrastruktur penunjang investasi	akurasi peluang investasi daerah	rutin perlu analisis ± 1 akt./thn	1	1	1	1	1	1	APBD Kab.
4	Program Penciptaan Iklim Yang Atraktif Bagi Investasi Dan Aksesibilitas Pengusaha Kecil Terhadap Lembaga-Lembaga Keuangan Formal (Program Prioritas)	terbentuknya lembaga BPR, kemudahan iklim investasi	pengembangan aktivitas & mobilitas perekonomian daerah	untuk mendukung aktivitas perekonomian dan peluang investasi	Perlu pembentukan 1 BPR induk ± 4 BPR cabang pembentukan pelayanan satu pintu / perizinan	50 %	100 %	--	--	--	--	APBD Kab.
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>								7.187,01	8.024	8.024	8.024	APBD Kab.

Keterangan  
 \*\*) : Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Dinas Perhubungan  
Informatika & Komunikasi**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Perhubungan serta Informatika dan Konomikasi  
 SKPD : Dinas Perhubungan, Informasi dan Konomikasi  
 Capaian Kinerja Bd. Perhubungan Informatika dan Konomikasi :

- Efisiensi dan efektifitas manajemen / pengelolaan perhubungan daerah
- Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perhubungan terhadap PDRB
- keakuratan dan kecepatan informasi yang konstruktif sampai kepada masyarakat luas dalam kerangka pembangunan daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)		
					3		4	5	7	8	9		10
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Konomikasi dan Informatika</b>													
1	Program Pengembangan Konomikasi, Informasi dan Media Massa	kuatiti penyuluhan konomikasi & informatika yang benar	masyarakat mudah mendapatkan informasi dan konomikasi yang benar	Institusi & Masy peduli Konomikasi & Informatika	40	40	40	40	40	40	40	40	APBD Kab.
2	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan konomikasi	kuantiti perangkat alat konomikasi	--	--	10 % ± 60 % institusi, perlu pembenahan	--	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	70 %	APBD Kab.
3	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang konomikasi dan informasi	kuantiti pengemebangan keabilitas SDM	layanan prima dan atraktif kebutuhan konomikasi terhadap masyarakat	Aparatur Institusi Konomikasi & Informatika	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	70 %	70 %	APBD Kab.
4	Program kerjasama informasi dan mas massa	MoU kerjasama dan aplikasi dengan operator informasi & Media massa	akurasi & cepatnya informasi yang konstruktif sampai ke masyarakat	Institusi K I & operator penyebar luasan informasi	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>													APBD Kab.

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

- Urusan : Perhubungan serta Informatika dan Kominikasi**  
**SKPD : Dinas Perhubungan, Informasi dan Kominikasi**  
**Capaian Kinerja Bd. Perhubungan Informatika dan Kominikasi :**
- Efisiensi dan efektifitas manajemen / pengelolaan perhubungan daerah
  - Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perhubungan terhadap PDRB
  - keakuratan dan kecepatan informasi yang konstruktif sampai kepada masyarakat luas dalam kerangka pembangunan daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	80 - 90 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja cara pelaporan dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit, tata dinas	Sistem pelaporan ; tata dinas	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Perhubungan</b>												
1	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan											

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Perhubungan serta Informatika dan Komunikasi

S K P D : Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi

Capaian Kinerja Bd. Perhubungan Informatika dan Komunikasi :

- Efisiensi dan efektifitas manajemen / pengelolaan perhubungan daerah
- Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perhubungan terhadap PDRB
- Keakuratan dan kecepatan informasi yang konstruktif sampai kepada masyarakat luas dalam kerangka pembangunan daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
2	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	kuantiti sarana/prasarana bidang perhub.	kenyamanan & keselamatan berlalu lintas, tingat pelayanan	sarana & prasarana perhubungan Kabupaten	± 40 % sarana & prasarana perhub. Perlu direhabilitasi	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	APBD Kab.	
3	Program peningkatan pelayanan angkutan	penyulhan & pemeliharaan konteks perhubungan	Keselamatan berlalu lintas, pelayanan prima bidang perhubungan	Stakeholders perhubungan Kabupaten,	± 200 pengguna jalan perlu penyulhan	--	50	50	50	50	--	APBD Kab.	
4	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Rehablasi terminal dan pemb. Sub terminal	pelayanan prima bidang perhubungan	sarana & prasarana perhubungan Kabupaten	1 terminal induk perlu ditata	--	--	1	--	--	--	APBD Kab, Prov, Pusat	
5	Program peningkatan dan pengananan lalu lintas	kuantiti rambu-rambu lalu lintas & marka jalan	Keselamatan berlalu lintas, pelayanan prima bidang perhubungan	Kab. Pinrang	5 sub terminal perlu ditata	--	1	1	1	1	1	APBD Kab.	
6	Program peningkatan keliatan pengoperasian kendaraan bermotor	kuantiti kelengkapan pengujian kendaraan bermotor	Keselamatan berlalu lintas, pelayanan prima bidang perhubungan	kendaraan bermotor laik uji, Kab. Pinrang	± 30 % panjang jalan perlu kelengkapan fas. perhubungan	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	APBD Kab, Prov,	
					± 100 % kendaraananuji, rutin tiap tahun harus ditera	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

LAMPIRAN :  
RENCANA PROGRAM RPJM  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Badan Lingkungan Hidup**



## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Lingkungan Hidup

S K P D : Badan Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja Bd. Lingkungan Hidup :

- Optimalisasi Kualitas Lingkungan
- Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perhubungan terhadap PDRB

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTINGSI, 07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit, tata dinas	Sistem pelaporan ;	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Lingkungan Hidup</b>												
1	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	kuantitatif O & M pengelolaan persampahan	Keindahan kota, kesehatan lingkungan	kota, pinrang, pemukiman padat penduduk, pasar kota	Aktivitas rutin	300 x	300 x	300 x	300 x	300 x	300 x	APBD Kab.

S K P D : Badan Lingkungan Hidup

**RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014**

Urusan : Lingkungan Hidup

S K P D : Badan Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja Bd. Lingkungan Hidup :

- Optimalisasi Kualitas Lingkungan

- Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perhubungan terhadap PDRB

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
2	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Kuantiti pengawasan lingkungan kawasan	lingkungan ramah lingkungan	kawasan kritis, kota Pinrang, pantai, kwsn pertambangan	± 60 % objek lingkungan perlu di cermati	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab, Prov, Pusat
3	Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	cakupan pengelola SDA & Masyarakat	efisiensi Pemantaaan SDA berwawasan lingkungan	pengelola SDA, Masyarakat konsep terhadap konservasi SDA	± 150 pengelola & Masy perlu peningkatan pemahaman	--	--	50	50	50	--	APBD Kab, Prov, Pusat
4	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Kuantiti cakupan masy. Yang memanfaatkan kwsn pesisir	efisiensi Pemantaaan hutan mangrove & kws pesisir & kwsn hutan	masy nelayan, pengelola kwsn hutan	± 200 masy pemantaaan kwsn pesisir & hutan perlu dibina	--	50	50	50	50	--	APBD Kab, Prov, Pusat
5	Program peningkatan kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	Program peningkatan pengendalian polusi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	cakupan kwsn ekowisata & Konservasi	efisiensi Pemantaaan ekowisata & kws konservasi, Pemberdayaan Masy, pengemb. Wilayah	KWS Ekowisata & kws konservasi	± 40 % objek ekowisata & Kwsn konservasi perlu dikembangkan	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	APBD Kab, Prov, Pusat

**RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014**

Urusan : Lingkungan Hidup

SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja Bd. Lingkungan Hidup :

- Optimalisasi Kualitas Lingkungan
- Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perhubungan terhadap PDRB

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSTING, '07/'08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
8	Program Pengendalian kebakaran hutan	cakupan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan	produktivitas hutan, pemberdayaan masyarakat, pengemb ekonomi berbasis hutan	masy pemanfaat kwsn hutan	± 150 RT memanfaatkan kwsn hutan	--	--	--	50	50	50	APBD Kab, Prov, Pusat	
9	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	cakupan area rehabilitasi kwsn pesisir	produktivitas kwsn pesisir dan laut, pengembangan ekonomi pesisir	Kwsn pesisir dan sekitarnya	± 25 % kwsn pesisir dannya perlu direhabilitasi	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
10	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>												APBD Kab.	

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Dinas Kependudukan Dan  
Catatan Sipil**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil

SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian Kinerja Bd. Kependudukan dan Catatan Sipil :

- Tertib Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil Dalam Kerangka mendukung Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)	
					3		4	5	6	7	8	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur, performance aparatur	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	50 - 60 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	50 - 60 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil

S K P D : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian Kinerja Bd. Kependudukan dan Catatan Sipil :

- Tertib Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil Dalam Kerangka mendukung Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/'08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014 <sup>(**)</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil</b>													
1	Program penataan administrasi kependudukan	Cakupan Sosialisasi Kependudukan(NJK)	Tertib Kependudukan, wil Kabupaten, stakeholders	wil Kabupaten	± 480 stakeholders perlu pembinaan tentang kependudukan	80	80	80	80	80	80	APBD Kab.	
		Dok. Sistem Kependudukan (NJK)	Tertib Kependudukan, wil Kabupaten	wil Kabupaten	Administrasi Kependudukan, perlu direview	--	25 %	50 %	75 %	100 %	--	APBD Kab.	
		kompetensi aparat cakupan penyuluhan	kompetensi & Profesionalisme aparat	SKPD Kependudukan, stakeholders	± 100 aparat & stakeholders masih perlu diperkuat	--	50	50	--	--	--	APBD Kab.	
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>													
						5.395	2.800,54	5.255,34	5.674	6.093	6.512	APBD Kab.	

Keterangan

(\*\*) : Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Badan Keluarga Berencana  
Daerah Dan Pemberdayaan Perempuan**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : KB dan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 SKPD : Badan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan  
 Capaian Kinerja Bd. KB & Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- Optimalisasi penyelenggaraan KB & Mpebcapaian Kel. Sejahtera dalam pembangunan daerah
- pengendalian laju penduduk, keluarga sehat dan peningkatan AHH
- Optimalisasi Peranserta perempuan dalam pembangunan daerah
- Kesetaraan Gender, perlindungan anak dari tindak kekerasan, KDRT, dan pemberdayaan Lanjut Usia

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/'08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**
						3	4	5	7	8		9
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan Internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efesiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan : tata dinas	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>												



## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : KB dan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

S K P D : Badan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan

Capaian Kinerja Bd. KB & Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- Optimalisasi penyelenggaraan KB & Mpebcapaian Kel. Sejahtera dalam pembangunan daerah
- pengendalian laju penduduk, keluarga sehat dan peningkatan AHH
- Optimalisasi Peranserta perempuan dalam pembangunan daerah
- Kesetaraan Gender, perlindungan anak dari tindak kekerasan, KDRT, dan pemberdayaan Lanjut Usia

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/108 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	Program keluarga berencana	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
1	Program keluarga berencana	cakupan pelayanan KB	Keluarga sehat, kemampuan daya beli,	masy. Miskin & produktif	± 500 Kel Miskin & produktif perlu diberi bimbingan	--	100	100	100	100	100	100	APBD Kab.
2	Program kesehatan reproduksi remaja	cakupan sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kesehatan reproduksi remaja, pengaturan perkawinan	remaja memasuki jenjang perkawinan	± 100 remaja usia perkawinan perlu pembinaan	--	50	50	--	--	--	--	APBD Kab.
3	Program pelayanan kontrasepsi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan kelompok peduli KB	Keluarga sehat, pembatasan kelahiran , pemberdayaan Masy.	Kelompok 2 peduli KB	± 25 Kelompok peduli KB perlu diberdaya gunakan	--	25	--	--	--	--	--	APBD Kab.
5	Program promosi kesehatan ibu, bayi & anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	cakupan sosialisasi /promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak	Keluarga sehat, pemberdayaan Masy. AHH	Kelompok 2 peduli kesehatan ibu, bayi & anak	± 25 Kelompok peduli kesehatan ibu, bayi dan anak yang perlu diberdayakan	--	--	25	--	--	--	--	APBD Kab.
6	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	penyebar luasan & Fasilitas tentang KRR, kesehatan remaja	stakeholders yang terlibat dalam pembentukan P/informasi	Perlu didirikannya 1 Pusat Pelayanan Informasi	--	50 %	100 %	--	--	50	--	APBD Kab.



## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : KB dan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SKPD : Badan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan

Capaian Kinerja Bd. KB & Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- Optimalisasi penyelenggaraan KB & Mpebcapaian Kel Sejahtera dalam pembangunan daerah
- pengendalian laju penduduk, keluarga sehat dan peningkatan AHH
- Optimalisasi Peranserta perempuan dalam pembangunan daerah
- Kesetaraan Gender, perlindungan anak dari tindak kekerasan, KDRT, dan pemberdayaan Lanjut Usia

NO	PROGRAM	INDIKATOR					EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	6	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19		
11	Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Birthingan Keluarga Berencana Dan Pemberian Alat Kontrasepsi Secara Gratis (Program Prioritas)	cakupan/tingkat peayanan kontrasepsi	Keluarga sehat, pembatasan kelahiran	Ibu R Tanga produktif, AHH	± 75 Ibu R Tanga produktif /kecamatan perlu KB = ± 450 KK	75	75	75	75	75	75	APBD Kab.		
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pemberdayaan dan Perlindungan Anak</b>														
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Kuantiti, sosialisasi peran perempuan dan perlindungan anak	Berperannya perempuan dalam bermasyarakat dan terlindunginya anak dari tindak kekerasan	Stakeholders konsep terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	± 250 perempuan & anak2, perlu diperkuat	--	50	50	50	50	50	APBD Kab.		
2	Program penguatan kelenbagaan pengarusutamaan gender dan anak	kualitas lembaga, terbangunnya Sistem Informasi Gender dan Anak	advokasi terhadap kesetaraan & Keadilan gender	Lembaga yang menanganari kesetaraan Gender dan Anak	lembaga yang ada perlu diperkuat	--	25 %	50 %	75 %	100 %	--	APBD Kab.		

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

**Urusan : KB dan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**SKPD : Badan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan**  
**Capaian Kinerja Bd. KB & Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :**

- Optimalisasi penyelenggaraan KB & Mpebcapaian Kel. Sejahtera dalam pembangunan daerah
- pengendalian laju penduduk, keluarga sehat dan peningkatan AHH
- Optimalisasi Peranserta perempuan dalam pembangunan daerah
- Kesetaraan Gender, perlindungan anak dari tindak kekerasan, KDRT, dan pemberdayaan Lanjut Usia

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
3	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	kuantitatif, sosialisasi tentang KDRT, Lansia & cacat	advokasi dan perlindungan terhadap KDRT, Lansia dan cacat	perempuan yang diduga/ mengalami KDRT, lansia dan cacat	± 200 partisipan diduga KDRT, Lansia, Cacat	--	50	50	50	50	--	APBD Kab.
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	kuantitatif, sosialisasi management usaha	daya beli keluarga, pengusaha perempuan tangguh	R. Tangga, pengusaha perempuan	± 200 stakeholders periode ini, perlu pencerahan	--	50	50	50	50	--	APBD Kab.
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>						3.170,7	3.170,7	3.170,7	3.170,7	3.170,7	3.170,7	APBD Kab.

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Dinas Sosial Kebudayaan  
Dan Pariwisata**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata

SKPD : Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata

Capaian Kinerja Bd. Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata :

- Penguatan penyandang masalah sosial dalam kerangka pembangunan daerah
- Pemberdayaan Kesetaraan Gender, perlindungan anak dari tindak kekerasan, KDRT, dan pemberdayaan Lanjut Usia
- kerukunan kehidupan beragama untuk mendukung pembangunan daerah
- Pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan
- Peningkatan kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PDRB Daerah
- Pengembangan kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	± 50 - 60 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja cara pelaporan dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata pelaporan dan capaian kinerja cara pelaporan	laporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : **Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata**

SKPD : **Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata**

Capaian Kinerja **Bd. Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata** :

- Pngentasan penyandang masalah sosial dalam kerangka pembangunan daerah
- Pemberdayaan Kesetaraan Gender, perlindungan anak dari tindak kekerasan, KDRT, dan pemberdayaan Lanjut Usia
- kerukunan kehidupan beragama untuk mendukung pembangunan daerah
- Pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan
- Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Daerah
- Pngembangan kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	

**Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Sosial**

1	Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	cakupan pemberdayaan PMKS, penguatan berusaha	daya beli, pngentasan kemiskinan, keluarga sejahtera	Penyandang masalah sosial (PMKS), fakir - miskin, Kabupaten	± 300 PMKS, perlu dientaskan	50	50	50	50	50	50	APBD Kab, Prov, Pusat
2	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	Program pembinaan anak terlantar	Pusat Pembinaan anak terlantar	pembudayaan anak, daya nalar, pngentasan kemiskinan	untuk memberdayakan anak2 terlantar, kab	perlu adanya pusat pembinaan anak terlantar	--	--	50 %	100 %	--	--	APBD Kab, Prov, Pusat
4	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Pusat Pembinaan penyandang cacat & trauma	pembudayaan penyandang cacat & pemulihan mental, daya kreasi	untuk memberdayakan penyandang cacat & trauma	perlu adanya pusat pembinaan penyandang cacat & Trauma	--	--	--	50 %	100 %	--	APBD Kab, Prov, Pusat
5	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo	Pusat Pembinaan / panti asuhan panti jompo	pembudayaan Lansia, produktivitas, AHH	untuk memberdayakan Lansia	perlu adanya pusat pembinaan Lansia	--	50 %	100 %	--	--	--	APBD Kab, Prov, Pusat

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata

S K P D : Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata

Capaian Kinerja Bd. Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata :

- Peningkatan penyandang masalah sosial dalam kerangka pembangunan daerah
- Pemberdayaan Kesetaraan Gender, perlindungan anak dari tindak kekerasan, KDRT, dan pemberdayaan Lanjut Usia
- kerukunan kehidupan beragama untuk mendukung pembangunan daerah
- Pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan
- Peningkatan kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PDRB Daerah
- Pengembangan kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
6	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial	cakupan, penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat	daya beli, pemberdayaan & kualitas masyarakat, kesejahteraan kel. masyarakat	Masyarakat & Pelaku usaha peduli kes. Sosial	± 100 masy dan pelaku usaha peduli sosial yang perlu pembinaan	25	75	--	--	--	--	APBD Kab, Prov, Pusat
8	Program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial (Program Prioritas)	cakupan rehabilitasi kesejahteraan sosial	daya beli, peningkatan kemiskinan, keluarga sejahtera	R Tanga yang mengalami kesulitan sosial ekonomi, kabupaten	± 400 R Tanga rentan sosial , yang perlu diantisipasi	--	80	80	80	80	80	APBD Kab, Prov, Pusat
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Kebudayaan</b>												
1	Program pengembangan nilai budaya	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	Program pengelolaan kekayaan budaya	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

K P D : Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata



## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : **Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata**

S K P D : **Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata**

Capaian Kinerja Bd. Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata :

- Peningkatan penyandang masalah sosial dalam kerangka pembangunan daerah
- Pemberdayaan Kesetaraan Gender, perlindungan anak dari tindak kekerasan, KDRT, dan pemberdayaan Lanjut Usia
- Kerukunan kehidupan beragama untuk mendukung pembangunan daerah
- Pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan
- Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Daerah
- Pengembangan kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara

NO	PROGRAM	INDIKATOR					EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	6	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19		
3	Program pengelolaan keragaman budaya	cakupan fasilitas mengikuti festival dan revitalisasi budaya	Pelestarian budaya yang konstruktif dalam pemb.	Even tkt nasional, prov dan region	proaktif perlu mengikuti $\pm 15$ even	--	3	3	3	3	3	APPBD Kab.		
4	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	cakupan fasilitas kemitraan / kerjasama	Pelestarian budaya yang konstruktif dalam pemb., pemberdayaan Masy.	kelompok2 peduli budaya lokal	$\pm 30$ kemitraan untuk mengikuti 15 even	--	6	6	6	6	6	APPBD Kab.		
5	Program peningkatan kualitas kehidupan beragama (Program Prioritas)	kuantiti fasilitas polia bermasyarakat	interaksi bermasyarakat mengandung norma2 Agama didalamnya	kelompok2 masyarakat peduli terhadap fungsi beragama	$\pm 18$ fasilitas norma2 agama terhadap kel2 masy yang perlu dikembangkan	3	3	3	3	3	3	APPBD Kab.		
6	Program revitalisasi budaya dan kearifan Lokal (Program Prioritas)	cakupan fasilitas pelestarian budaya	Pelestarian budaya yang konstruktif dalam pembangunan	objek2 budaya lokal yang bayak berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan	$\pm 15$ fasilitas untuk revitalisasi kekayaan budaya perlu dilestarikan	--	3	3	3	3	3	APPBD Kab.		

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata

SKPD : Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata

Capaian Kinerja Bd. Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata :

- Peningkatan penyandang masalah sosial dalam kerangka pembangunan daerah
- Pemberdayaan Kesetaraan Gender, perlindungan anak dari tindak kekerasan, KDRT, dan pemberdayaan Lanjut Usia
- Kerukunan kehidupan beragama untuk mendukung pembangunan daerah
- Pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan
- Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Daerah
- Pengembangan kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pariwisata</b>												
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	APBD Kab.
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	cakupan pengembangan objek wisata daerah strategis, sosialisasi, pengawasan	kunjungan wisata, pengenalan daerah kontribusi terhadap pendapatan daerah	Masyarakat wisata, objek wisata strategis	Paket pengembangan = revitalisasi objek, sosialisasi, jaringan paket wisata, dll terkait	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.
3	Program Pengembangan Kemitraan	MoU kerjasama dan aplikasi dengan operator pengelola objek wisata	akselerasi perumbuhan kunjungan wisata, pelestarian objek, perbaikan pendapatan masy. sekitar objek	Institusi kepariwisataan dan operator pengelola objek	Paket kerjasama pengelolaan objek2 wisata strategis & unggulan)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : **Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata**

S K P D : **Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata**

Capaian Kinerja Bd. Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata :

- Pngentasan penyandang masalah sosial dalam kerangka pembangunan daerah
- Pemberdayaan Kesetaraan Gender, perlindungan anak dari tindak kekerasan, KDRT, dan pemberdayaan Lanjut Usia
- kerukunan kehidupan beragama untuk mendukung pembangunan daerah
- Pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan
- Peningkatan kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PDRB Daerah
- Pengembangan kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
4	Program pengembangan dan promosi wisata alam dan bahari ( <b>Program Prioritas</b> )	cakupan promosi pemasaran, penguatan jaringan wisata, pemantauan & evaluasi.	kunjungan wisata, kontribusi terhadap pendapatan daerah	Masyarakat wisata, promosi keluar, obek wisata alam & Objek wisata bahari	Paket = promosi, pemasaran, pelatihan,	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.	
					pengembangan objek wisata alam	--	20 %	40 %	60 %	80 %	--	APBD Kab.	
					pengembangan objek wisata alam	20 %	40 %	60 %	80 %	--	--	APBD Kab.	
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>													

Keterangan

\*\* ) : Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Dinas Tenaga Kerja Dan  
Transmigrasi**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Capaian Kinerja Bd. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi :

- penguatan T Kerja siap pakai dalam kerangka pembangunan daerah
- Penguatan penganggaran dan Pemerataan Pembangunan daerah
- Pbaikkan perekonomian, pendidikan dan kesehatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana	ORGANISASI/ SKPD KAB.
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>													
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur.	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	± 50 - 60 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	laporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %		
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Ketenagakerjaan</b>													
1	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Pusat Pendidikan pengembangan kualitas & Produktivitas T Kerja	T. Kerja terdidik, Kualitas & Kompetensi T Kerja,	pengadaan Pusat Pendidikan	review/ pengadaan pusat pendidikan	--	25 %	50 %	100 %	--	--		APBD Kab, Prov, Pusat
2	Program peningkatan kesempatan kerja	cakupan pengembangan T. Kerja siap pakai	Kualitas & Kompetensi T Kerja, Pemberdayaan Masyarakat	T kerja siap pakai, Kab	± 300 T Kerja produktif perlu pembinaan menjadi siap pakai	50	50	50	50	50	50		APBD Kab.

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Capaian Kinerja Bd. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi :

- penguatan T Kerja siap pakai dalam kerangka pembangunan daerah
- Penguatan pengangguran dan Pemerataan Pembangunan daerah
- Pabakan perekonomian, pendidikan dan kesehatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR					EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana	ORGANISASI/ SKPD KAB.
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009	2010		2011	2012	2013	2014**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20		
5	Program perindugan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Penguatan kelembagaan yang mengunusi T Kerja	penyaluran T Kerja produktif, peningkatan daya beli; advokasi/ perindugan hukum	lembaga2 peduli penyaluran / pemanfaatan T Kerja	sub ordnat SKPD Ketenagakerjaan perlu diperkuat	25 %	50 %	100 %	--	--	--	APBD Kab.	Tenaga Kerja		
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Ketransmigrasian</b>															
1	Program pengembangan wilayah transmigrasi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2	Program transmigrasi lokal	Cakupan penyuluhan & bimbingan trans lok	-Perbaikan kehidupan, perbaikan pendapatan, pemerataan	trans lok (jika ada), masy peminat tranlok	Paket penyuluhan dan Bimbingan	--	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat	Ketransmigrasian		
3	Program transmigrasi regional	Cakupan penyuluhan & bimbingan trans Log	Perbaikan kehidupan, perbaikan pendapatan, pemerataan	trans lok (jika ada), masy peminat transreg	Paket penyuluhan dan Bimbingan	--	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat	Ketransmigrasian		
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>						15.332.112	20.000.000	20.000.000	33.321.112	5.723.112	4.169.000	APBD Kab.			

Keterangan

\*\*\*) : Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Dinas Koperasi Dan Usaha  
Kecil Dan Menengah**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

S K P D : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Capaian Kinerja Bd. KUKM :

- penguatan ketahanan ekonomi daerah
- Terbangunnya KUKM yang kompetitif dan laik jual

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/'08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prasarana, akses dan mobilitas aparatur.	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	± 50 - 60 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit.	Sistem pelaporan ; tata dinas	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : KUKM</b>												
1	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Cakupan sosialisasi, pembinaan	peningkatan volume usaha, peningkatan PDRB Sektor KUKM, pengembangan daerah	Kelompok masyarakat produktif	± 200 pelaku perorangan KUKM & wirausaha perlu pembinaan	--	50	50	50	50	--	APBD Kab.



## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

S K P D : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Capaian Kinerja Bd. KUKM :

- penguatan ketahanan ekonomi daerah
- Terbangunnya KUKM yang kompetitif dan laik jual

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSTING. (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELURAN	HASIL	SASARAN	6		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
2	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	kuantiti fasilitasi/ usaha KUKM yang kompetitif	peningkatan volume usaha, peningkatan PDRB Sektor KUKM, pengembangan daerah	pelaku KUKM, stakeholder berpotensi sebagai wirausaha	± 100 pelaku KUKM & wirausaha perlu pembinaan	--	--	25	25	25	25	APBD Kab.	
3	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah (KUKM)	cakupan pembentukan kluster bisnis	penguatan ekonomi daerah berbasis KUKM	Sentra - sentra KUKM wil Kabupaten	± 15 kluster bisnis perlu dibentuk dan dibina	3	3	3	3	3	--	APBD Kab.	
4	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	cakupan penguatan kelembagaan koperasi	peningkatan volume usaha, peningkatan PDRB Sektor KUKM, pengembangan daerah	lembaga peduli KUKM	± 60 lembaga yang bergerak di KUKM perlu pembinaan	10	10	10	10	10	10	APBD Kab.	
5	Program Pemberdayaan Ekonomi Dan Penguatan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi, UKM Dan Industri Kecil Berbasis Masyarakat Serta Berwawasan Gender Sebagai Sektor Alternatif Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Penciptaan Lapangan Kerja (Program Prioritas)	cakupan fasilitasi - sosialisasi penguatan KUKM	peningkatan PDRB Sektor KUKM & industri kecil, penguatan pengembangan & kemiskinan, pemberdayaan masyarakat & gender	pelaku KUKM, masy kurang mampu, pelaku industri kecil	± 300 pelaku KUKM, industri kecil & Masyarakat perlu pembinaan	50	50	50	50	50	50	APBD Kab, Prov, Pusat	
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>												APBD Kab.	

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Kantor Kesatuan Bangsa,  
Politik Dan Perlindungan Masy**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

S K P D : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat  
 Capaian Kinerja Bd. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :

- Toleransi dan harmonisasi dalam bersosialisasi kebangsaan dan kemasyarakatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur.	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	50 - 60 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efesiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	50 - 60 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit, tata dinas	Sistem pelaporan ;	50 - 60 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>												
1	Program pengembangan wawasan kebangsaan	cakupan kuantiti sosialisasi kebangsaan	kerukunan bergama, toleransi sosial dalam bingkai nilai2 luhur	± 250 stakeholders perlu pembinaan wawasan kebangsaan	--	--	50	50	50	50	50	APBD Kab.
2	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	APBD Kab.

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat  
 Capaian Kinerja Bd. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :

- Toleransi dan harmonisasi dalam bersosialisasi kebangsaan dan kemasyarakatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014 <sup>(*)</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
3	Program pendidikan politik masyarakat	cakupan diskusi/seminar pendidikan politik	demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	stakeholders peduli politik, Kab Pinrang	± 2 x diskusi/seminar / thn	2	2	2	2	2	2	APBD Kab.	
4	Program penguatan institusi dan relasi dengan pemuka dan institusi keagamaan, organisasi LSM, organisasi profesi, orsospol, dan ormas lainnya (Program Prioritas)	cakupan tatap muka / diskusi dengan pemuka dan institusi keagamaan cakupan tatap muka / diskusi dengan Organisasi LSM cakupan tatap muka / diskusi dengan Organisasi Profesi cakupan tatap muka / diskusi dengan Orsospol cakupan tatap muka / diskusi dengan kalangan Ormas	menjaga keamanan dan harmonisasi dalam penyelenggaraan pembangunan	Pemuka agama dan institusi keagamaan Organisasi LSM peduli pembangunan kalangan Organisasi Profesi Kalangan Orsospol Kalangan Ormas	± 12 x / thn ± 6 x / thn ± 6 x / thn ± 6 x / thn ± 6 x / thn	12	12	12	12	12	12	APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab.	
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>													APBD Kab.

Keterangan  
 (\*) : Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Satuan Polisi Pamong Praja**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Capaian Kinerja Bd. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :

- Terciptanya rasa aman yang kondusif untuk mendukung pembangunan daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kegiatan sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur, performance aparatur	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	50 - 60 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	50 - 60 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	50 - 60 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>												
1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	cakupan pelatihan keamanan lingkungan	keamanan lingkungan dalam pembangunan	wil. Kab. Dan Kota Pinrang (terutama)	± 300 pelugas keamanan lingkungan yang perlu pembinaan	50	50	50	50	50	50	APBD Kab.

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Capaian Kinerja Bd. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :

- Terciptanya rasa aman yang kondusif untuk mendukung pembangunan daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
2	Program pemeliharaan kantarlubmas dan pencegahan tindak kriminal	cakupan kuantiti aplikasi kerjasama keamanan bersama TNI/Polri)	keamanan Wilayah dalam pembangunan , pengentasan tindak kriminal	wil. Kab. Dan Kota Pinrang (terutama)	± 50 polisi psmongpraja perlu ditingkatkan kemampuannya	--	25	25	--	--	--	APPD Kab.	
5	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	cakupan fasilitasi pembentukan kelompok keamanan masyarakat	terciptanya rasa aman, pengentasan tindak kriminal lingkungan, pemberdayaan masyarakat	kel.2 masyarakat peduli keamanan, wil. Kab. Dan Kota Pinrang	± 30 kel. Keamanan masy perlu dibentuk	--	15	15	--	--	--	APPD Kab.	
6	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	cakupan operasi rutin tindakan pencegahan Pekat	terciptanya rasa aman, pengentasan tindak kriminal lingkungan, pemberdayaan masyarakat	wil. Kab. Dan Kota Pinrang	± 2 x op rutin/bln = 24 x op/th	24	24	24	24	24	24	APPD Kab.	
7	Program pencegahan diri dan penanggulangan korban bencana alam	posko kedaruratan (stand by)	siap bergerak / tertanggulangnya bencana (bila terjadi)	pengecahan bencana / kedaruratan	± 1 posko stand by / thn	1	1	1	1	1	1	APPD Kab.	
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>													APPD Kab.

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Sekretrariat Daerah**



## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

**SKPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang**

**Capaian Kinerja Bd. Sekretariat Daerah**

- Optimalisasi dalam pelayanan fungsi pemerintahan

- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, tertib keuangan dalam kerangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/'08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana	(SUB) ORGANISASI/ SKPD KAB.
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	5		2014**							
							2009	2010	2011	2012	2013	2014**		
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>														
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %			
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %			
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		APBD Kab.	Sekretariat Daerah
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %			
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %			
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Otonomi Daerah, Pem. Umum, Ad Keu Daerah, Prkt Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>														

**RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014**

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

S K P D : Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang

Capaian Kinerja Bd. Sekretariat Daerah

- Optimasi dalam pelayanan fungsi pemerintahan

- Terselenggaranya terbit administrasi, terbit pemerintahan, terbit hukum, terbit keuangan dalam kerangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

NO	PROGRAM	INDIKATOR				SASARAN	EKSISTING (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana	(SUB) ORGANISASI SKPD KAB.
		KELUARAN	HASIL					2009	2010	2011	2012	2013	2014**)			
1	Program peningkatan pelayanan kebidanan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Cakupan Audensi dengan tomas	penguatan aspirasi Masy.	Tomas, stakeholders	± 5 X / tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	19	20	
		kuantiti penerimaan kunker tamu(V)/VP	Nilai tambah daerah	para tamu yang berkunjung	± 50 X / tahun (esensial)	50	50	50	50	50	50	50	50			
		Kuantiti Rakor Muspida	tertib pemerintahan	unsur muspida dan staf	± 12 X / tahun	12	12	12	12	12	12	12	12			
		Kuantiti Rakor eksekutif	tertib pemerintahan	Pimpinan SKPD	± 2 X / bin = 24 x/thn	24	24	24	24	24	24	24	24	APBD Kab.	Sekretariat Daerah	
		Kuantiti Kun Ker Bupati/wakil Bpt	penguatan aspirasi Masy., elektifitas pembangunan	12 wil kecamatan, kab. Pinrang	± 2 X / keothn = 24 x / thn	24	24	24	24	24	24	24	24			
		kuantiti Koordinasi dengan Pusat, prov dan Penda lainnya	Nilai tambah daerah	pemerintah pusat, provinsi, dan penda lainnya	± 25 X / tahun	25	25	25	25	25	25	25	25			
2	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	cakupan kuantiti evaluasi regulasi tingkat desa, pendapatan desa dan pengelolaan keuangan desa	tertib administrasi keuangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa	aparatu pengelola Pemerintahan umum, aparat desa	±1 unit / paket pembinaan yang terdiri dari 5 item/desa, ada 65 desa (tuln)	65 pkt (1 pkt/ desa)	65 pkt (1 pkt/ desa)	65 pkt (1 pkt/ desa)	65 pkt (1 pkt/ desa)	65 pkt (1 pkt/ desa)	65 pkt (1 pkt/ desa)	65 pkt (1 pkt/ desa)	65 pkt (1 pkt/ desa)	APBD Kab.	Sekretariat Daerah, Bag. Umum, Bag Adm Pemerintahan Umum	
3	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	terbentuknya Sistem Informasi Layanan Publik Daerah	menjaga akurasi informasi, data dan ketepatan analisis	Infokom, humas, sandi daerah	perlu dibentuknya sistem Informasi daerah	--	--	50 %	100 %	100 %	--	--	APBD Kab.	Infokom, Humas & Protokol		
4	Program Mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	terbentuknya Sistem penanganan pengaduan	pelayanan publik prima	Infokom, bag adm kemasyarakatan, Bappeda	perlu dibentuknya sistem pengaduan	--	50 %	100 %	--	--	--	--	APBD Kab.	Infokom, Bag. Adm Kemasyarakatan		

**RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014**

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

**SKPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang**

**Capaian Kinerja Bd. Sekretariat Daerah**

- Optimalisasi dalam pelayanan fungsi pemerintahan

- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, tertib keuangan dalam kerangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	(SUB) ORGANISASI/ SKPD KAB.	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013			2014**
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20
5	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	pembentukan unit dan aplikasi kerjasama antar daerah	penguatan pemberdayaan potensi daerah	unit kerjasama, stakeholder, konsern kerjasama	perlu dibentuknya Unit kerjasama	--	--	25%	50 %	100 %	--	APBD Kab.	Sekretariat Daerah
6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pengembangan kapasitas berkaitan dengan penanganan regulasi daerah	tertib perundangan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Bag. Hukum sekretariat daerah	±1 unit / paket penguatan regulasi yang terdiri dari 8 item (rutin)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.	Sekretariat Daerah, Bag. Hukum
7	Program penataan daerah otonomi baru	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Program Perbaikan Sistem Pelayanan Di Semua Level Pemerintahan Untuk Mewujudkan Pelayanan Yang Beretika, Mudah, Murah, Transparan Dan Akuntabel Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) (Program Prioritas)	cakupan Sistem Pelayanan Publik Paripurna.	transparansi, akuntabel, efesien dan elektifitas dalam tata kelola pelayanan publik; Pemberdayaan masyarakat	Pemerintah Kab., Pecamatan, Kelurahan, pemerintah Desa, Masyarakat kota - desa Kab. Pinrang	Perlu dibentuknya ± 1 format sistem pelayanan	--	40 %	100 %	--	--	--	APBD Kab.	Sekretariat Daerah, Biro hukum, SKPD pelaksana pelayanan prima
		produk hukum penguatan sistem	kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem pelayanan	Masyarakat kota - desa Kab. Pinrang yang memerlukan pelayanan	Perlu ada Produk Hukum	--	100 %	--	--	--	--	--	--

**RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014**

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

S K P D : Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang

Capaian Kinerja Bd. Sekretariat Daerah

- Optimasi dalam pelayanan fungsi pemerintahan
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, tertib keuangan dalam kerangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana	(SUB) ORGANISASI SKPD KAB.	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	
9	Program Revitalisasi Tata Kerja Dan Fungsi Organisasi Pemerintahan Dalam Rangka Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Aparatur Dan Keuangan Daerah (Program Prioritas)	cakupan revitalisasi dan fungsionalisasi TUPOKSI Satuan2 kerja daerah	peningkatan dan penanaman peran pelaksanaan aparatur dan penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan	Dinas, Badan, Kantor dilingkungan Pemda Kab. Pinrang	Satuan2 Kerja perlu di fungsionalisasi	--	50 %	100 %	--	--	--	APBD Kab.	Sekretariat Daerah, Bag. Organisasi & Tata Laksana, Pemerintahan Umum, Penganggaran, Kepegawaian	
10	Peningkatan Kapasitas Unit Pemerintahan Terdepan Dengan Meningkatkan Kemampuan Yang Lebih Jelas Serta Dukungan Sumber Daya Yang Dapat Mengoptimalkan Fungsi Pemerintahan Dan Fungsi Sebagai Pelayanan Terdepan (Program Prioritas)	cakupan penguatan satuan kerja	Pelayanan Publik Prima	RSUD, pelayanan perizinan, Adm kependudukan, pertanahan, pendidikan, dll	Satuan kerja yang berhadapan langsung untuk pelayanan publik	--	50 %	100 %	--	--	--	APBD Kab.	Sekretariat Daerah, SKPD pelaksana pelayanan prima	
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>														

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Sekretrariat DPRD**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

**Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

**SKPD : Sekretariat DPRD**

**Capaian Kinerja Sekretariat DPRD dan DPRD**

- Optimalisasi dalam pelayanan fungsi Legislatif, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, tertib keuangan dalam kerangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/'08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur.	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Otonomi Daerah, Pem. Umum, Ad Keu Daerah, Prkt Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>												
1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Cakupan Penyiapan Cakupan Perwakilan Perda,	tertib penyelenggaraan pemerintahan tertib undang2,	kelembagaan dan Anggota Dewan,	± 50 Perda/thn yang harus disiapkan	50	50	50	50	50	50	100
		cakupan hearing dengan eksekutif dan stakeholder	kejelasan manfaat program & penyerapan aspirasi Masyarakat	kelembagaan dan Anggota Dewan, SKPD, Stakeholders	± 600 X hearing rutin / thn	100	100	100	100	100	100	

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

S K P D : Sekretariat D P R D

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD dan DPRD

- Optimasi dalam pelayanan fungsi Legislatif, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, tertib keuangan dalam kerangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

NO	PROGRAM	INDIKATOR					EKSISTING, <sup>07/08</sup> (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	6	2009		2010	2011	2012	2013	2014 <sup>**</sup> )		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19		
		cakupan rapat <sup>2</sup> kelengkapan dewan	penguatan legislasi; pengawasan & Budgeting	kelembagaan dan Anggota Dewan,	± 50 X rapat kelengkapan dewan / thn, rutin	50	50	50	50	50	50	50	APBD Kab.	
		rapat paripurna	penyajian dan pengesahan suatu hal dalam kerangka tertib kepentintahan	kelembagaan dan Anggota Dewan,	± 50 X rapat paripurna	50	50	50	50	50	50	APBD Kab.		
		Cakupan keg. Reses	penguatan aspirasi masy. / konstituen	Masy. / Konstituen	± 3 X reses/thn	3	3	3	3	3	3	APBD Kab.		
		cakupan kun kerja	memperkuat penyelenggaraan tertibkepentintahan	pimpinan dan Anggota Dewan	± 30 X kunjungan kerja / thn	30	30	30	30	30	30	APBD Kab.		
		cakupan Capacity Building (anggota) dewan	kemampuan Dewan dalam fasilitasi legislasi, monitoring & Budgeting	pimpinan dan Anggota Dewan	± 3 X sebanyak anggota dewan / thn (Paket)	3	3	3	3	3	3	APBD Kab.		
		Cakupan Sosialisasi Undang /Regulasi Daerah	tertib Kepemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Masyarakat Kabupaten	± 3 X Sosialisasi / thn	3	3	3	3	3	3	APBD Kab.		
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>														
						12.800,2	20.705,9	26.811,2	32.916,5	39.021,8	45.127,1	51.232,4	APBD Kab.	

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Dinas Pendapatan,  
Pengelolaan Keuangan Dan Asset  
Daerah**



## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- Efisiensi dan efektifitas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- pengembangan Pendapatan Daerah secara partisipatif

NO	PROGRAM	INDIKATOR					EKISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	6	7		8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>													
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan terilang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan : tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %		
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah</b>													
1	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kuantiti rancangan peraturan pengelolaan keuangan, bintek aplikasi pengelolaan keuangan, penilaian aset daerah, intensifikasi & eksistensi sumbuher <sup>2</sup> pendapatan daerah	tentu administrasi keuangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	aparatur pengelola keuangan daerah, bag keuangan SKPD	±1 paket yang terdiri dari 12 item (rutin)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.	

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

S K P D : Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Capaian Kinerja Bd. Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

- Efisiensi dan efektifitas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- pengembangan Pendapatan Daerah secara partisipatif

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
2	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kabupaten/ hasil evaluasi	cakupan kuantitas evaluasi regulasi tentang APBD/ keuangan daerah, dan aplikasi pemerintahan dan pembangunan daerah	tertib administrasi keuangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	aparatu pengelola keuangan daerah, bag keuangan SKPD	±1 unit / paket yang terdiri dari 5 item (rutin)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>												

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



Inspektorat Kab Pinrang

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : Inspektoraat Daerah

Capaian Kinerja Bd. Inspektoraat Daerah

- Efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran

- Terselenggaranya tertib administrasi dan keuangan dalam kerangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSTING. 07/108 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
1	Program Pelayaran administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayaran publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayaran publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.	
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan : tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %		
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Inspektoraat Daerah</b>													

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  
 S K P D : Inspektorat Daerah

Capaian Kinerja Bd. Inspektorat Daerah

- Efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
- Terselenggaranya tertib administrasi dan keuangan dalam kerangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	3 cakupan kuantiti pengawasan internal, pengaduan, penanganan kasus, tindak lanjut temuan, koordinasi, evaluasi	4 tertib pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	5 aparat pengawasan / inspektorat	6 ±1 unit / paket pengawasan yang terdiri dari 8 item (rutin)	7 1 pkt	8 1 pkt	9 1 pkt	10 1 pkt	11 1 pkt	12 1 pkt	19 APBD Kab.
2	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	cakupan kuantiti pelatihan kemampuan pengawasan	tertib pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	aparat pengawasan / inspektorat	± 2 X pelatihan / tahun	2	2	2	2	2	2	APBD Kab.
3	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	cakupan penyediaan sistem informasi pengawasan	prosedur pengawasan yang baik	lingkup objek yang diawasi	± 1 pkt penyusunan sistem informasi	--	1 pkt	--	--	--	--	APBD Kab.
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>												

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Kec. Watang Sawito**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  
 SKPD : Kecamatan Watang Sawito

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Opiniasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat

- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>													
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thop Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thop Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %		

**Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pemerintahan Umum Kecamatan**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

S K P D : Kecamatan Watang Sawito

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimalisasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat
- Terselenggaranya terbit administrasi, terbit pemerintahan, terbit hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Ikt KECAMATAN	cakupan koordinasi - kegiatan pemberdayaan masyarakat; - upaya penyelenggaraan kelentraman dan ketertiban umum; - penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; - pemeliharaan prasarana dan fas. pel. Umum - penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; - Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; - pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan	tertib pemerintahan kecamatan rasa aman dalam penyelenggaraan pemerintahan kec tertib pemerintahan kecamatan aksesibilitas tertib pemerintahan kecamatan tertib pemerintahan desa Optimasi pelayanan	Masy Kecamatan Watang Sawito	± 1 paket/kec /lhn/7 bidang yang dtangani (rutin)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>													

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi



LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Kec. Paleteang**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  
 S K P D : Kecamatan Paleteang

**Capaian Kinerja SKPD Kecamatan**

- Optimasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN 3	HASIL 4	SASARAN 5	2009 7		2010 8	2011 9	2012 10	2013 11	2014** 12		
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>													19
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobiltas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efesiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %		
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	korpelensi, pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan : tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %		
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pemerintahan Umum Kecamatan</b>													

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  
 SKPD : Kecamatan Paleteang  
 Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimalisasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan tkt KECAMATAN	cakupan koordinasi - kegiatan pemberdayaan masyarakat; - upaya penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban umum; - penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; - pemeliharaan prasarana dan fas. pel. Umum - penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; - Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; - pelayanan masyarakat yg belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan	tertib pemerintahan kecamatan rasa aman dalam penyelenggaraan pemerintahan kec tertib pemerintahan kecamatan aksesibilitas tertib pemerintahan kecamatan tertib pemerintahan desa Optimasi pelayanan	Masy Kecamatan Paleteang	± 1 paket/kec /thn/7 bidang yang dtangani (rutin)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>												

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :  
RENCANA PROGRAM RPJM  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Kec. Tiroang**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : Kecamatan Tiroang

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimalisasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pemerintahan Umum Kecamatan</b>												

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : Kecamatan Tiroang

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat

- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayakatan Kt KECAMATAN	<b>cakupan koordinasi</b> - kegiatan pemberdayaan masyarakat - upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertib umum; - penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; - pemeliharaan prasarana dan fas. pel. Umum - penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; - Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;	tertib pemerintahan kecamatan rasa aman dalam penyelenggaraan pemerintahan kec tertib pemerintahan kecamatan aksesibilitas	Masy Kecamatan Tiroang	± 1 paket/kec./thn/7 bidang yang dianganj (rulu)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>							54.2	402.7	456.5	510.7	573.5	639.4	

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Kec. Mattiro Bulu**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : Kecamatan Mattiro Bulu

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimalisasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pemerintahan Umum Kecamatan</b>												





LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Kec. Suppa**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : Kecamatan Suppa

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimalisasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat

- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efesiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pemerintahan Umum Kecamatan</b>												

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

S K P D : Kecamatan Suppa

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat

- Terselenggaranya terfif administrasi, terfif pemerintahan, terfif hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			SASARAN	EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	4			2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan tk1 <b>KECAMATAN</b>	<b>cakupan koordinasi</b>	kegiatan pemberdayaan masyarakat;	tertib pemerintahan kecamatan	Masy Kecamatan Suppa	± 1 paket/kec /thn/7 bidang yang diangani (ruhih)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.	
			upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum;	rasa aman dalam penyelenggaraan pemerintahan ke-										
			penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;	tertib pemerintahan kecamatan										
			pemeliharaan prasarana dan fas. pel. Umum	aksesibilitas										
			penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;	tertib pemerintahan kecamatan										
			Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;	tertib pemerintahan desa										
			pelayanan masyarakat g belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan	Optimasi pelayanan										
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>								240.0	226.7	257.0	287.5	321.7	350.8	

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Kec. Mattiro Sompe**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

S K P D : Kecamatan Mattiro Sompe

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

-Optimasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat

- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pemerintahan Umum Kecamatan</b>												

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

S K P D : Kecamatan Mattiro Sompe

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimasi dalam pelayanan masyarakat memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan tk1 <b>KECAMATAN</b>	<b>3</b> <b>cakupan koordinasi</b> - kegiatan pemberdayaan masyarakat; - upaya penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban umum; - penerapan dan pemegakan peraturan perundang-undangan; - pemeliharaan prasarana dan fas. pel. Umum - penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; - Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; - pelayanan masyarakat g belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan	<b>4</b> tertib pemerintahan kecamatan rasa aman dalam penyelenggaraan pemerintahan kec tertib pemerintahan kecamatan aksesibilitas tertib pemerintahan kecamatan tertib pemerintahan desa	<b>5</b> Masy Kecamatan Mattiro Sompe	<b>6</b> ± 1 paket/kec /hnr/7 bidang yang dangani (tulin)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>													

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Kec. Lanrisang**



## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : Kecamatan Lanrisang

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimalisasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pemerintahan Umum Kecamatan</b>												

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

S K P D : Kecamatan Lanrisang

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat

- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan tk1 <b>KECAMATAN</b>	<b>cakupan koordinasi</b>	tertib pemerintahan kecamatan	Masy Kecamatan Lanrisang	± 1 paket/kec./thn/7 bidang yang diangani (rutin)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	19	
		kegiatan pemberdayaan masyarakat;	kegiatan pemerintahan kecamatan										
		- upaya penyelenggaraan kelenstraman dan kelenstran umum;	rasa aman dalam penyelenggaraan pemerintahan ke-										
		- penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;	tertib pemerintahan kecamatan										
		- pemeliharaan prasarana dan fas. pel. Umum	aksesibilitas										
		- penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;	tertib pemerintahan kecamatan										
		- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/zatua kelurahan;	tertib pemerintahan desa										
		- pelayanan masyarakat g belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan	Optimasi pelayanan										
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>													

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Kec. Patampanua**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : Kecamatan Patampanua

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimalisasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat

- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efesiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pemerintahan Umum Kecamatan</b>												

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

S K P D : Kecamatan Patampanua

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

-Optimasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat

- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR				SASARAN	EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	3	4			2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan tkt <b>KECAMATAN</b>	<b>cakupan koordinasi</b>	kegiatan pemberdayaan masyarakat.	tertib pemerintahan kecamatan	Masy Kecamatan Patampanua	± 1 paket/kec /h/n/7 bidang yang dtangani (rutin)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	19	APBD Kab.
			- upaya penyelenggaraan ketertarikan dan keteliban umum.	rasa aman dalam penyelenggaraan pemerintahan kec										
			- penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.	tertib pemerintahan kecamatan										
			- pemeliharaan prasarana dan fas. pel. Umum	aksesibilitas										
			- penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.	tertib pemerintahan kecamatan										
			- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.	tertib pemerintahan desa										
			- pelayanan masyarakat g belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan	Optimasi pelayanan										
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>														

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Kec. Duampanua**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

**Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

**SKPD : Kecamatan Duampanua**

**Capaian Kinerja SKPD Kecamatan**

- Optimalisasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**	
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pemerintahan Umum Kecamatan</b>												

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : Kecamatan Duampanua

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR					EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009		2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kt KECAMATAN	<b>3 cakupan koordinasi</b> - kegiatan pemberdayaan masyarakat; - upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum; - penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; - pemeliharaan prasarana dan fas. pel. Umum - penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; - Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; - pelayanan masyarakat g belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan	tertib pemerintahan kecamatan rasa aman dalam penyelenggaraan pemerintahan kec tertib pemerintahan kecamatan aksesibilitas	Masy Kecamatan Duampanua	± 1 paket/kec /thn/7 bidang yang ditangani (rutin)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt		APBD Kab.	
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>								330,4	374,6	418,0	468,7	524,4		

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi



LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Kec. Batulappa**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : Kecamatan Batulappa

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimalisasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efesiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	laporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pemerintahan Umum Kecamatan</b>												

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

S K P D : Kecamatan Batulappa

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optinasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR				SASARAN	EKSISTING, '07/'08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana	
		KELURAN	3	HASIL	4			2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan tk <b>KECAMATAN</b>	<b>cakupan koordinasi</b>				Masy Kecamatan Batulappa	± 1 paket/kec./thn/7 bidang yang dangani (mln)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.
		- kegiatan pemberdayaan masyarakat.		tertib pemerintahan kecamatan											
		- upaya penyelenggaraan kelentaman dan ketertiban umum.		rasa aman dalam penyelenggaraan pemerintahan kec.											
		- penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.		tertib pemerintahan kecamatan											
		- pemeliharaan prasarana dan fas. pel. Umum		aksesibilitas											
		- penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.		tertib pemerintahan kecamatan											
		- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.		tertib pemerintahan desa											
		- pelayanan masyarakat g belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan		Optimasi pelayanan											
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>															

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Kec. Cempa**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

S K P D : Kecamatan Cempa

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimalisasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pemerintahan Umum Kecamatan</b>												

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : Kecamatan Cempa

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimasi dalam pelayanan masyarakat; memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat

- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014 <sup>4)</sup>		
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Klt <b>KECAMATAN</b>	<b>cakupan koordinasi</b>	tertib pemerintahan kecamatan	Masy Kecamatan Cempa	± 1 paket/kec./thn/7 bidang yang dtangani (ruin)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.
		kegiatan pemberdayaan masyarakat;	rasa aman dalam penyelenggaraan pemerintahan kec										
		upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum;	tertib pemerintahan kecamatan										
		penetapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;	aksesibilitas										
		pemeliharaan prasarana dan fas. pel. Umum	tertib pemerintahan kecamatan										
		penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;	tertib pemerintahan desa										
		Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/lalu kelurahan;	Optimasi pelayanan										
		pelayanan masyarakat belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan											
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>							549,7	622,0	705,2	788,9	892,5	997,2	

Keterangan

<sup>4)</sup> : Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Kec. Lembang**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : Kecamatan Lembang

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimalisasi dalam pelayanan masyarakat, memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat

- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR		EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL		SASARAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuaitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pemerintahan Umum Kecamatan</b>												



## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : Kecamatan Lembang

Capaian Kinerja SKPD Kecamatan

- Optimalisasi dalam pelayanan masyarakat memperkuat pemerintahan dan aspirasi Masyarakat
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib hukum, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Ikt <b>KECAMATAN</b>	<b>cakupan koordinasi</b> - kegiatan pemberdayaan masyarakat. - upaya penyelenggaraan kелentraman dan ketertiban umum. - penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. - pemeliharaan prasarana dan fas. pel. Umum - penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. - Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. - pelayanan masyarakat g belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan	tertib pemerintahan kecamatan rasa aman dalam penyelenggaraan pemerintahan kec tertib pemerintahan kecamatan aksesibilitas tertib pemerintahan kecamatan tertib pemerintahan desa dan/atau kelurahan Optimasi pelayanan	Masy Kecamatan Lembang	± 1 paket/kec /thn/7 bidang yang diangani (rutin)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.	
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>													

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Badan Kepegawaian Daerah**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  
 SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Capaian Kinerja Bd. Badan Kepegawaian Daerah

- Efektifitas dan capabilitas pendaya gunaan aparatur untuk penyelenggaraan pemerintahan
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib aparatur

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
						7	8	9	10	11	12	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Kepegawaian Daerah</b>												

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Capaian Kinerja Bd. Badan Kepegawaian Daerah

- Efektifitas dan capabilitas pendaya gunakan aparatur untuk penyelenggaraan pemerintahan
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib aparatur

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/'08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
1. Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Melalui Pendidikan Dan Pelatihan (Program Prioritas)													
1.16	Program Pendidikan Kedinasan	Cakupan pengembangan kedinasan	aparatur handal, efesiensi dan efektifitas pembangunan	aparatur daerah	penjenjangan struktural, ± 1 paket tdr dari 3 jenis diklat penjenjangan /40 pesertat/hn (rutin)	3 pkt	3 pkt	3 pkt	3 pkt	3 pkt	3 pkt	3 pkt	APBD Kab.
				aparatur diklat, Institusi kepegawaian daerah	diklat teknis; ± 1 paket tdr dari 6 jenis diklat rata2 60 pesertat/hn (rutin)	6 pkt	3 pkt	3 pkt	3 pkt	3 pkt	3 pkt	3 pkt	
				aparatur daerah	pengembangan kurikulum, dll	--	25 %	50 %	75 %	100 %	--	--	
1.17	Program peningkatan kapasitas sumber Daya aparatur	Cakupan pengembangan kapasitas & kapabilitas pegawai daerah	aparatur handal, efesiensi dan efektifitas pembangunan	aparatur daerah	± 1 unit/ paket terdiri dari 4 item diklat (rutin)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Capaian Kinerja Bd. Badan Kepegawaian Daerah

- Efektifitas dan capabilitas pendaya gunaan aparatur untuk penyelenggaraan pemerintahan
- Terselenggaranya tertib administrasi, tertib pemerintahan, tertib aparatur

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
1.18	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan rekrutmen PNS, reposisi PNS, kenaikan pangkat, analisis jabatan, tugas belajar, sistem penghargaan, diklat, dll terkait dengan pengembangan aparatur.	4 aparatur handal, tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas pembangunan	5 aparatur daerah	± 1 unit / paket terdiri dari ± 15 item (rutin)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>												

Keterangan

\*\*) : Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Badan Pemberdayaan  
Masyarakat Dan Pemdes**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

**Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa**

- terfif administrasi, keuangan, pembangunan desa
- Optimasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa
- Optimasi Pemberdayaan Perempuan desa

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur, performance aparatur	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efesiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>												
1	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	cakupan penguatan kelembagaan masyarakat desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa, perbaikan pendapatan	Organisasi Masy yang ada di daerah pedesaan. , kab. Pinrang	± 100 % kelembagaan masy desa perlu diberdayakan	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	APBD Kab, Prov, Pusat
2	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	cakupan penguatan dan fasilitas perekonomian desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa, perbaikan perekonomian desa, ketahanan desa	masyarakat yang berpotensi dan bergerak memajukan ekonomi desa, kab. Pinrang	± 70 % usaha desa masy perlu mendapat pembinaan dan diberdayakan	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab, Prov, Pusat

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**S K P D : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa**

-tertib administrasi, keuangan, pembangunan desa

-Optimasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa

-Optimasi Pemberdayaan Perempuan desa

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/'08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	cakupan penguatan partisipasi kelompok masyarakat desa	Pemberdayaan partisipasi Masyarakat Desa dalam pembangunan	kel. masyarakat potensial desa peduli pembangunan	± 70 % kel. Masy desa potensial perlu diberdayakan	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
4	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	cakupan penguatan kapasitas aparatur desa	tertib administrasi pemerintahan & pelayanan masy. Desa	aparatur desa (profitas), aparat keurahan	± 60 % aparat desa/kel perlu mendapat pembekalan	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
5	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Cakupan kewirausahaan perempuan desa	Pemberdayaan perempuan Desa, perbaikan pendapatan dan ekonomi keluarga	perempuan potensial pelaku ekonomi	± 60 % perempuan potensial usaha perlu dikembangkan kemampuannya	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>													APBD Kab.

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi



LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Kantor Perpustakaan Dan**

**Arsip**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

- Menjadi Sumber akurasi data aktual sebagai bagian dari pembangunan daerah bidang Perpustakaan
- Menjadi sumber kekayaan intelektual daerah
- Menjadi Sumber akurasi data aktual sebagai bagian dari pembangunan daerah bidang kearsipan
- menjadi sumber komparasi kekayaan intelektual daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**	
						3	4	5	6	7	8	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur.	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Perpustakaan</b>												
1	Program pengembangan kelengkapan kepustakaan daerah	Kuantiti kelengkapan pustaka daerah	kekayaan intelektual daerah, sumber akurasi analisis . animo minat baca	Institusi kepustakaan,	± 60 % institusi , perlu dilengkapi bahan pustaka	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab.
2	Program pengadaan sarana pustaka berbasis informatika	cakupan kelengkapan pustaka berbasis informatika	minat penggunaan informatika sebagai sumber pengayaan intelektual masyarakat	Institusi kepustakaan,	1 paket perangkat lengkap informatika perlu dipersiapkan	20 %	50 %	100 %	--	--	--	APBD Kab.
3	Program pemeliharaan kepustakaan	Kuantiti pemeliharaan rutin dan berkala	pelestarian Pustaka daerah	Institusi kepustakaan,	Paket pemeliharaan rutin / berkala (8 x rutin & 4 x berkala/thn)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

**SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah**

- Merjadi Sumber akurasi data aktual sebagai bagian dari pembangunan daerah bidang Perpustakaan
- Merjadi sumber kekayaan intelektual daerah
- Merjadi Sumber akurasi data aktual sebagai bagian dari pembangunan daerah bidang kearsipan
- Merjadi sumber komparasi kekayaan intelektual daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
4	Program Pengem budaya baca dan pembinaan perpustakaan	kuantiti sosialisasi, koordinasi, perencanaan, kelengkapan perpustakaan, monitoring, dll berkaitan dengan minat baca	peningkatan animo minat baca, intelektual daya nalar	Institusi perpustakaan, pengunjing perpustakaan	Paket sosialisasi, koordinasi, pengadaaan, monitoring, dll rutin	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.	
<b>PeLAYANAN Penyelenggaraan Urusan : Kearsipan</b>													
1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	cakupan pembenahan dan penguatan administrasi kearsipan	tertib kearsipan, sumber pengetahuan pembangunan	Institusi Kearsipan	± 60 % kelengkapan data kearsipan perlu dilengkapi	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab.	
2	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	cakupan pembenahan dan pelestarian dokumen	tertib kearsipan, sumber pengetahuan pembangunan	Institusi Kearsipan	± 60 % sarana dan prasarana kearsipan perlu dibenahi	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.	
3	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	kuantiti pemeliharaan rutin	pelestarian arsip	Institusi Kearsipan	Paket pemeliharaan rutin /berkala (8 x rutin & 4 x berkala/thn)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.	
4	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	cakupan penyuluhan & layanan informasi	kemudahan informasi, ketepatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Institusi Kearsipan	paket penyuluhan (4 x sosialisasi terhadap 50 peduli kearsipan/ sosialisasi/ thn	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.	
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>													
APBD Kab.													

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

- Menjadi Sumber akurasi data aktual sebagai bagian dari pembangunan daerah bidang Perpustakaan
- Menjadi sumber kekayaan intelektual daerah
- Menjadi Sumber akurasi data aktual sebagai bagian dari pembangunan daerah bidang kearsipan
- menjadi sumber komparasi kekayaan intelektual daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR		EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	19

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



Dinas Pertanian Dan  
Peternakan

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pertanian

**SKPD : Dinas Pertanian dan Peternakan**  
**Capaian Kinerja Bd. Pertanian dan Peternakan:**

- Stabilitas produksi dan perbaikan mutu serta nilai tambah hasil produksi pertanian dan Peternakan  
 - mempertahankan swa semesta pangan dan gizi hewani, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat petani dalam kerangka pengembangan Agropolititan

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)	
9	Program Pengembangan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan/Kelautan, Kehutanan, Dan Pertambangan Sesuai Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Komoditas Unggulan Dan Kelayakan Dan Teknologi Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Agropolititan (Program Prioritas)	3 dok, cetak biru agropolititan, kuantiti penyuluhan, klusterisasi potensi kawasan, sistem pemasaran, pemantauan teknologi tepat guna	4 peningkatan kontribusi sektor terhadap PDRB, perbaikan pendapatan pelaku usaha sektor strategis, pemberdayaan masyarakat	5 Institusi terkait pada format agropolititan, pelaku usaha sektor strategis	6 Paket = penyuluhan ± 100 kel petani t. Pangan, perkebunan, dll, pengadaan sarana & prasarana bibit unggul, rutin	7 1 pkt	8 1 pkt	9 1 pkt	10 1 pkt	11 1 pkt	12 1 pkt	19 APBD Kab, Prov, Pusat
10	Pengembangan Potensi Dan Prasarana Di Pedesaan Untuk Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Desa/Kota (Program Prioritas)	cakupan kuantiti sarana dan prasarana pedesaan	penguatan perekonomian desa, pemerataan pembangunan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	wilayah desa terpencil (terutama),	Paket = pembangunan / revitalisasi / refungsionalisasi sarana dan prasarana pedesaan yang dibutuhkan dan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat
11	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Dalam Rangka Penyediaan Kemandirian Dan Perluasan Akses Pasar Di Tingkat Lokal, Regional, Nasional Dan Internasional (Program Prioritas)	pemb. Sarana/ prasarana & Pusat informasi dan promosi bisnis	stabilitas harga, akurasi informasi, pemberdayaan petani	Pusat informasi dan promosi pasar	perlu dibangun Pusat Pelayanan Informasi dan Promosi Pasar Komoditas	--	50 %	100 %	--	--	--	APBD Kab, Prov, Pusat
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>							9.633,2	17.065,7	25.497,6	35.099,5	46.699,5	APBD Kab.

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pertanian

SKPD : Dinas Pertanian dan Peternakan

Capaian Kinerja Bd. Pertanian dan Peternakan:

- Stabilitas produksi dan perbaikan mutu serta nilai tambah hasil produksi pertanian dan Peternakan
- mempertahankan swa sambada pangan dan gizi hewani, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat petani dalam kerangka pengembangan Agropolitan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur, performance aparatur	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efesiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	laporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pertanian dan Peternakan</b>												
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan pemberdayaan kelembagaan petani, pemb. Sistem kelompok tani	Kesejahteraan petani, produktifitas hasil, perbaikan pendapatan daerah	Kelompok tani tanaman pangan, pelaku agribisnis	± 25 kelembagaan tani perlu diperkuat	--	5	5	5	5	5	APBD Kab, Prov, Pusat
2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/	cakupan penanganan kersama, pemeliharaan rutin/berkala, penguasaan pasar pemb. Sarana/prasarana , dll	pengembangan produksi pemasaran, penyebar luasan produk pertanian	Institusi & pelaku bisnis berbasis pertanian	Paket berisikan ± kerjasama, pemeliharaan rutin, penguasaan pasar, dll	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pertanian

S K P D : Dinas Pertanian dan Peternakan

Capaian Kinerja Bd. Pertanian dan Peternakan:

- Stabilitas produksi dan perbaikan mutu serta nilai tambah hasil produksi pertanian dan Peternakan
- mempertahankan swa sambada pangan dan gizi hewani, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat petani dalam kerangka pengembangan Agropoltikan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/	Kuantiti pengadaan sarana & prasarana teknologi lepat guna	pengembangan produktivitas hasil pertanian & perkebunan	Kelompok tani tanaman pangan, pelaku agribisnis	± 60 % institusi fungsi pertanian/ perkebunan perlu pembenahan	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab, Prov, Pusat	
4	Program peningkatan produksi pertanian/	kuantiti penyediaan sarana produksi, pengadaan bibit,	produktivitas hasil, perbaikan pendapatan, kontribusi Pendapatan daerah	petani potensial t. Pangan/perkebunan pada sentra2 produksi	Paket pengadaan sarana produksi, dll kepada kel. Tani	--	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat	
5	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	cakupan kuantiti pencegahan & penanggulangan penyakit ternak	ternak sehat, konsumsi nutrisi daging ternak, perbaikan pendapatan	petani peternak	Paket = pendataan, pemeliharaan kesehatan, pemusnahan ternak berpenyakit, danawasan, rutin	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat	
6	Program peningkatan produksi hasil peternakan	cakupan pemb. sarana, pembelian, kualitas gizi, pengembangan agribisnis	ternak sehat, konsumsi nutrisi daging ternak, perbaikan pendapatan	Institusi pengelola peternakan, petani peternak	Paket pengadaan sarana produksi, dll kepada kel. Peternak	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat	
7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	cakupan penanganan bersama, pemeliharaan rutin/ berkala, penguasaan pasar penyuluhan, dll	pengembangan produksi pemasaran	Institusi & pelaku bisnis berbasis pertanian	(± 240 kel. Petani ternak, pelaku bisnis) perlu dibekali	40	40	40	40	40	40	APBD Kab, Prov, Pusat	
8	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	cakupan pengadaan sarana & prasarana peternakan	Perbaikan pendapatan petani/perkebunan, produktivitas produksi daging	petani ternak cakupan potensial, Kab. Pinrang	Paket pengadaan sarana & prasarana item peternakan dll kepada kel. Peternak	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat	



LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Kantor Ketahanan Pangan**

# RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pertanian

SKPD : Kantor Ketahanan Pangan

- Stabilitas produk dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan dalam kerangka stabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efisiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pertanian

S K P D : Kantor Ketahanan Pangan

- Stabilitas produk dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan dalam kerangka stabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR					EKSISTING, '07/'08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN				2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Ketahanan Pangan</b>													
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	cakupan penagapan manajemen, data base, tingkat kebutuhan, intensivikasi, diversivikasi, pola distribusi, pemilihan, pemantauan, dll.	stabilitas kebutuhan pangan daerah	Wil. Kab. Pinrang, sentra2 produk pangan	Stabilitas pertanian pangan ± 15 - 30 item aktivitas perlu dipersiapkan (tulin)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat	
		stabilitas hasil perkebunan daerah,	Wil. Kab. Pinrang, sentra2 produk perkebunan	Stabilitas produk/ produktivitas hasil perkebunan ± 10 - 20 item aktivitas perlu dipersiapkan (tulin)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat	
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>													

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Badan Pelaksana**

**Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan  
Kehutanan**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pertanian

**SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**

- Stabilisasi produk dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan dalam kerangka stabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/'08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efesiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sisim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pertanian, Penyuluhan Pertanian</b>												
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan pelatihan peningkatan kesejahteraan petani, pemberdayaan kelembagaan	Kesejahteraan petani, produktifitas hasil, perbaikan pendapatan daerah	Kelompok tani tanaman pangan, pelaku agribisnis	± 240 kelompok tani perlu diberi bimbingan	40	40	40	40	40	40	APBD Kab, Prov, Pusat

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pertanian

**SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**

- Stabilisasi produk dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan dalam kerangka stabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR					EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	6	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19		
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>														
1	Program Pelayanan administratif perkembangan	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.		
2	Program Peningkatan sarana dan prasara aparatur	kualitas sarana & Prasara, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %			
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efesiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %			
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %			
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengeluaran lentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layk, audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %			
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pertanian, Penyuluhan Pertanian</b>														
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan pelatihan peningkatan kesejahteraan petani, pemberdayaan kelembagaan	Kesejahteraan petani, produktifitas hasil, perbaikan pendapatan daerah	Kelompok tani tanaman pangan, pelaku agribisnis	± 240 kelompok tani perlu diberi bimbingan	40	40	40	40	40	40	APBD Kab, Prov, Pusat		

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Dinas Kehutanan Dan  
Perkebunan**

# RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pertanian

## SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

- Stabilisasi produk dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan dalam kerangka stabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
7	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	cakupan penyuluhan penyakit hewan ternak	ternak sehat, konsumsi nutrisi daging ternak, perbaikan pendapatan	petani peternak dan hewan ternak	penyuluhan ± 200 peternak tentang pencegahan penyakit ternak	--	40	40	40	40	40	APBD Kab, Prov, Pusat
6	Program peningkatan produksi hasil peternakan	cakupan penyuluhan tentang produksi daging ternak yang baik	konsumsi nutrisi daging ternak, perbaikan pendapatan	Institusi pengelola peternakan, petani peternak dan hewan ternak	Paket = penyuluhan ± 40 kel petani ternak, perlu bimbingan, rutin	--	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat
7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	cakupan penanganan bersama, pemeliharaan rutin/ berkala, penguasaan pasar penyuluhan, dll	pengembangan produksi pemasaran	Institusi & pelaku bisnis berbasis pertanian	(± 240 kel. Petani ternak, pelaku bisnis) perlu dibekali	40	40	40	40	40	40	APBD Kab, Prov, Pusat
8	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	cakupan penyuluhan penggunaan teknologi pertanian/perkebunan	Perbaikan pendapatan petani/perkebunan, produktivitas produksi daging	petani ternak potensial, Kab. Pinrang	Paket = penyuluhan ± 40 kel petani ternak, rutin	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pertanian, Penyuluhan Perikanan</b>												
1	Program rehabilitasi hutan dan lahan	cakupan penyuluhan peran serta masyarakat dalam menjaga area hutan	efisiensi pemanfaatan hutan, pelestarian hutan, partisipasi masyarakat	Kawasan hutan tanaman, Kab. Pinrang	Paket = penyuluhan ± 40 kel petani pemanfaatan hutan perlu bimbingan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat





## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Pertanian

**SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**

- Stabilisasi produk dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan dalam kerangka stabilitas penyelenggaraan pembangunan daeran

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
5	Program pemberdayaan penyuluh Perikanan	cakupan, pengembangan kapasitas penyuluh, peningkatan kesejahteraan aktivitas kegiatan	produksi /produktivitas perikanan	Wil. Kab. Pinrang, sentra2 produk perikanan	Paket bersisian ± 1 - 3 item penyuluh perikanan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat
7	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	cakupan kuantiti pengkajian budidaya perikanan	perbaikan pendapatan petani perikanan	Masy. Pesisir potensial, pengelola budidaya perikanan	± 10 sosialisasi	--	2	2	2	2	2	APBD Kab.
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>												
												APBD Kab.

kenaikan pagu anggaran indikator disebabkan oleh perubahan organisasi dari balai menjadi badan. Sebelumnya satu bidang menjadi 4 bidang : Sekretariat, Bidang Penyuluh Pertanian dan Perikanan, Bidang Penyuluh Perikanan, Kehutanan & Perkebunan dan Bidang Kelembagaan SDM

**Keterangan**

**\*\*): Termasuk Periode Transisi**

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Dinas Kelautan Dan  
Perikanan**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kehutanan , Pertanian Perkebunan

SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

- Efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan tanaman
- pelestarian dan konservasi kws hutan dan memberikan nilai tambah bagi petani pengelola kwsn. Hutan
- Stabilitas produksi dan perbaikan mutu serta nilai tambah hasil produksi Perkebunan
- mempertahankan produksi perkebunan, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat petani perkebunan dalam kerangka pengembangan Agropolitan

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	AGREGAT CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)	
					3		4	5	6	7	8	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efesiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Kehutanan</b>												
1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	cakupan pengembangan hutan tanaman, pemanfaatan hutan industri hasil hutan, dll	efesiensi pemanfaatan hutan, pelestarian hutan	Kawasan hutan tanaman, Kab.	Paket = pengembangan, pemanfaatan hasil hutan, dll terkait), rutin	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kehutanan , Pertanian Perkebunan

**SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

- Efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan tanaman
- pelestarian dan konservasi kws hutan dan memberikan nilai tambah bagi petani pengelola kwsn. Hutan
- Stabilitas produksi dan perbaikan mutu serta nilai tambah hasil produksi Perkebunan
- mempertahankan produksi perkebunan, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat petani perkebunan dalam kerangka pengembangan Agropoltian

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	AGREGAT CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana					
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	cakupan pembinaan, rehabilitasi hutan dan lahan	efisiensi pemanfaatan hutan, pelestarian hutan , partisipasi masyarakat	Kawasan hutan tanaman , Kab.	Paket = pembibitan, pemeliharaan, pengendalian hutan dan lahan, dll	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APPBD Kab, Prov, Pusat
3	Perilindungan dan konservasi sumber daya hutan	cakupan ssosialisasi, pencegahan, bintek, penyadaran akan kerusakan hutan	efisiensi pemanfaatan hutan, pelestarian hutan , partisipasi masyarakat	Kawasan hutan tanaman , Kab. , pemanfaat hutan	Paket = penanggulangan kebakaran hutan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APPBD Kab,
4	Program pemanfaatan bakan industri	cakupan pemanfaatan area kosong yang dimanfaatkan tanaman lain	perbaikan pendapatan dan konsumsi gizi petani	Area kosong Kawasan hutan tanaman , yang dimanfaatkan tanaman lain	± 60 % alih fungsi lahan sementara yang dimanfaatkan, perlu direhabilitasi	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %								APPBD Kab,
5	Program pembinaan dan pemberian industri hasil hutan	Produk hukum tentang pengelolaan Industri hasil hutan	kepastian hukum dalam mengelola industri hasil hutan	Pengesahan produk hukum	perlu payung hukum daerah dalam memanfaatkan industri hasil hutan (Perda & Perbup	50 %	100 %	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	APPBD Kab,
6	Program perencanaan dan pengembangan bakan	cakupan pendampingan penguatan masyarakat pengguna hutan adat	pelestarian pemanfaatan hutan adat	masyarakat pengguna hutan adat	± 40 % hutan yang dikelola masy adat perlu pembinaan	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %								APPBD Kab,

Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pertanian, Perkebunan

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Kehutanan , Pertanian Perkebunan

SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

- Efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan tanaman
- pelastarian dan konservasi kws hutan dan memberikan nilai tambah bagi petani pengelola kwsn. Hutan
- Stabilitas produksi dan perbaikan mutu serta nilai tambah hasil produksi Perkebunan
- mempertahankan produksi perkebunan, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat petani perkebunan dalam kerangka pengembangan Agropolitan

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, 07/08 (Unit, Satuan, %)	AGREGAT CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana	
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013		2014**)
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkebunan	3 Cakupan pemberdayaan kelembagaan petani, pemb. Sistem kelompok tani	4 Kesejahteraan petani, produktifitas hasil, perbaikan pendapatan daerah	5 Kelompok tani tanaman pangan, pelaku agribisnis	6 ± 25 kelembagaan tani perlu diperkuat	7	8	9	10	11	12	19
2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi Perkebunan	cakupan penanganan kersama, pemeliharaan rutin/berkala, penguasaan pasar pemb. Sarana/prasarana , dll	pengembangan produksi pemasaran, penyebar luasan produk pertanian	Institusi & pelaku bisnis berbasis pertanian	Paket berisikan ± kerjasama, pemeliharaan rutin, penguasaan pasar, dll	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat
3	Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan	Kuantiti pengadaan sarana & prasarana teknologi tepat guna	pengembangan produktivitas hasil perkebunan	Kelompok tani tanaman pangan, pelaku agribisnis	± 60 % institusi fungsi perkebunan perlu pembenahan	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	APBD Kab, Prov, Pusat
4	Program peningkatan produksi perkebunan	kuantiti penyediaan sarana produksi, pengadaan bibit,	produktivitas hasil, perbaikan pendapatan, kontribusi Pendapatan daerah	petani potensial t. Pangan/perkebunan pada sentra2 produksi	Paket pengadaan sarana produksi, dll kepada kel. Tani tanaman keras	--	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab, Prov, Pusat
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>												APBD Kab.

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM RPJM

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014



**Dinas Perindustrian  
Perdagangan Energi Dan Mineral**

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Industri, Perdagangan Energi dan Mineral

**SKPD : Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Mineral**

- Pemberdayaan Industri Daerah dalam mendukung pembangunan daerah
- Pengembangan perekonomian dan kontribusi sektor Industri terhadap perekonomian daerah
- Stabilitas (transaksi) perdagangan daerah
- Pengembangan perekonomian dan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah
- Efisiensi dan efektifitas pengelolaan kawasan Penambangan Galian C, dalam kerangka pembangunan Daerah
- pelestarian dan konservasi kws penambangan Galian C dan penambangan rakyat lainnya

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**	
						3	4	5	6	7	8	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efesiensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Industri</b>												



## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : **Industri, Perdagangan Energi dan Mineral**

### S K P D : Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Mineral

- Pembedayaan Industri Daerah dalam mendukung pembangunan daerah
- Pengembangan perekonomian dan kontribusi sektor Industri terhadap perekonomian daerah
- Stabilitas (transaksi) perdagangan daerah
- Pengembangan perekonomian dan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah
- Efisiensi dan efektifitas pengelolaan kawasan Penambangan Galian C, dalam kerangka pembangunan Daerah
- pelestarian dan konservasi kws penambangan Galian C dan penambangan rakyat lainnya

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan fasilitas, Pembinaan, perizinan, akses perbankan	pemberdayaan hasil industri, pengurangan pengangguran, perbaikan pendapatan	masyarakat dan pelaku industri kab. Pinrang	Paket fasilitas, Pembinaan, perizinan, akses perbankan, dll terkait	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APPD Kab.	
3	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Cakupan bimbingan pengenalan teknologi industri	pemberdayaan hasil industri, pengurangan pengangguran, perbaikan pendapatan	pelaku industri kab. Pinrang	Paket fasilitas, Pembinaan, penyuluhan, rutin	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APPD Kab.	
4	Program penataan struktur industri	Cakupan bimbingan keterkaitan industri hulu - hilir	pemberdayaan industri hulu - hilir, Kontribusi terhadap PDRB	pelaku industri hulu - hilir, masyarakat industri kab. Pinrang	± 80 % pelaku industri hulu - hilir perlu pembinaan	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	APPD Kab.	
		terbentuknya kluster industri yang handal	pemberdayaan kluster industri, pemberdayaan ekonomi masy.	kelompok kluster industri	Kluster industri perlu dipersiapkan lebih matang	--	50 %	100 %	--	--	--	APPD Kab.	

**RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014**

Urusan : Kelautan dan Perikanan

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

- pengembangan produksi hasil perikanan tangkap dan budidaya perikanan
- pengembangan kawasan pesisir serta perbaikan perekonomian masyarakat pesisir

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
8	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Cakupan optimalisasi produk perikanan	Pemberdayaan Kwsn pesisir, perbaikan pendapatan nelayan, pengembangan Industri pengolahan perikanan	pengelola Industri pengolahan perikanan, kab Pinrang	Industri2 pengolahan perikanan perlu pembinaan	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
10	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	cakupan kuantiti penyuluhan penyadaran hukum tentang pendencygunaan Sumberdaya Laut	Pemberdayaan Kwsn budidaya air payau/tawar	Masy. Pesisir potensial	± 10 sosialisasi	--	2	2	2	2	2	APBD Kab.
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. juta)</b>												APBD Kab.

Keterangan

\*\*): Termasuk Periode Transisi

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

**Urusan : Kelautan dan Perikanan**

**SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan**

- pengembangan produksi hasil perikanan tangkap dan budidaya perikanan
- pengembangan kawasan pesisir serta perbaikan perekonomian masyarakat pesisir

NO	PROGRAM	INDIKATOR			EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)						Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN		2009	2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Kelembagaan</b>												
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat kelengkapan Administrasi kantor	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapannya	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	APBD Kab.
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	kuualitas sarana & Prasarana, akses dan mobilitas aparatur,	efektifitas pelayanan internal kantor thdp Pelayanan publik	Perkantoran dan kelengkapan aparatur	60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	performance aparatur	efestensi dan efektifitas layanan	aparatur terkait dan tertentu	± 60 - 70 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas aparatur	Kompetensi & Profesionalisme aparatur	aparatur terkait dan tertentu	± 70 - 80 % Capaian Kinerja	10 %	20 %	30 %	40 %	55 %	70 %	
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	kompetensi pengetahuan tentang tata cara pelaporan	pelaporan tepat waktu, konsistensi, layak audit,	Sistem pelaporan ; tata dinas	± 60 - 70 % Capaian Kinerja	20 %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Kelautan dan Perikanan</b>												
1	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	cakupan pembinaan kel. Ekonomi masy pesisir	Pemberdayaan Kwsn pesisir, perbaikan pendapatan nelayan,	Kelompok2 ekonomi kwsn pesisir	± 80 % kel.2 masy. Eknomi kwsn pesisir perlu pembinaan	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	APBD Kab, Prov, Pusat

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Industri, Perdagangan Energi dan Mineral

**SKPD : Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Mineral**

- Pemberdayaan Industri Daerah dalam mendukung pembangunan daerah
- Pengembangan perekonomian dan kontribusi sektor Industri terhadap perekonomian daerah
- Stabilitas (transaksi) perdagangan daerah
- Pengembangan perekonomian dan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah
- Efisiensi dan efektivitas pengelolaan kawasan Penambangan Galian C, dalam kerangka pembangunan Daerah
- pelestarian dan konservasi kws penambangan Galian C dan penambangan rakyat lainnya

NO	PROGRAM	INDIKATOR					EKSTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)							Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN				2009	2010	2011	2012	2013	2014**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19			
3	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Cakupan peninjauan peluang pasar, MoU dengan daerah/ pemerintah lai, Promosi	komoditas ekspor dipasarkan luas / pemberdayaan perekonomian masy	daerah / pemerintahan luar yang potensial	Paket peninjauan, aplikasi, kerjasama	--	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.			
4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	cakupan kemitraan, penguatan sistem jalinan, penguasaan pasar, perizinan	komoditas dipasarkan luas / pemberdayaan perekonomian masy	Daerah & mitra kerja perdagangan	Pkt kemitraan, penguatan sistem pemasaran, perlu dibudayakan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.			
5	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan pembinaan, penyuluhan, fasilitas permodalan	tertib perdagangan, keindahan kota, pemberdayaan pedagang kaki lima	pedagang kaki lima	± 80 % pedagang kaki perlu pembinaan dan bimbingan	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	APBD Kab.			
<b>Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Energi dan Sumber Daya Mineral</b>															
1	Program pembinaan dan pengembangan bidang perimbangan	Produk hukum tentang keg. Pertambangan	kepastian hukum dalam mengelola pertambangan gal. C	Pengesahan produk hukum	perlu payung hukum daerah dalam memanfaatkan penambangan Gal C (Perda & Perbup)	50 %	100 %	--	--	--	--	APBD Kab.			

## RENCANA PROGRAM RPJMD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 - 2014

Urusan : Industri, Perdagangan Energi dan Mineral

**S K P D : Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Mineral**

- Pembedayaan Industri Daerah dalam mendukung pembangunan daerah
- Pengembangan perekonomian dan kontribusi sektor Industri terhadap perekonomian daerah
- Stabilitas (transaksi) perdagangan daerah
- Pengembangan perekonomian dan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah
- Efisiensi dan efektifitas pengelolaan kawasan Penambangan Galian C, dalam kerangka pembangunan Daerah
- pelestarian dan konservasi kws penambangan Galian C dan penambangan rakyat lainnya

NO	PROGRAM	INDIKATOR				EKSISTING, '07/08 (Unit, Satuan, %)	CAPAIAN KINERJA INDIKATIF (Unit, Satuan, %)					Sumber Dana
		KELUARAN	HASIL	SASARAN	2009		2010	2011	2012	2013	2014**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
		cakupan sosialisasi dan pengawasan	efisiensi dan efektifitas pemanfaatan penambangan Gal. C, kontribusi terhadap perekonomian daerah	pelaku pengusahaan penambangan	Paket sosialisasi pengawasan, evaluasi (rutin) dalam kerangka penegakan hukum	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.
2	Program pengawasan dan penerbitan kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	cakupan pengawasan pertambangan rakyat pemetaan kwsn Rawan Bencans	pelestarian penambangan rakyat, perbaikan pendapatan penambang	pelaku pengusahaan penambangan kws, penambangan	Paket sosialisasi pengawasan, evaluasi revitalisasi kwsn penambangan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	APBD Kab.
3	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	cakupan koordinasi dengan PLTA Bakaru	pelestarian area penambangkit, perbaikan pendapatan	Kws PLTA Bakaru, Masy. Pemanfaat kws Bakaru	Paket koordinasi (± 12 x koordinasi/thn)	1 Krdnsi	1 Krdnsi	1 Krdnsi	1 Krdnsi	1 Krdnsi	1 Krdnsi	APBD Kab.
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF (Rp. Juta)</b>												APBD Kab.

**Keterangan**

\*\*): Termasuk Periode Transisi